



LAPORAN

ANALISIS DATA DAN

INFORMASI

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2026

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjar



ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Banjar

Tahun 2026

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Banjar

Juni 2026

ANALISIS DATA DAN INFORMASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Banjar

Tahun 2026

TIM PENYUSUN

Pembina	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banjar
Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bapperida Kabupaten Banjar
Sekretaris	Perencana Ahli Muda Diah Ayu Yulianawati, S.Sn
Anggota	Kepala Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Banjar
Anggota	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Banjar
Anggota	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Kabupaten Banjar
Anggota	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Banjar
Anggota	Perencana Ahli Muda Maulidyanti Eka Sari, S.P., M.P.
Anggota	Perencana Ahli Muda Fariha Riska Yumita, S.Si., M.Sc.
Anggota	Perencana Ahli Muda Nuriyami, S.E., M.M.
Anggota	Perencana Ahli Muda Dewi Sari, SP.
Anggota	Perencana Ahli Muda Irma Vidya, M.S.
Anggota	Perencana Ahli Muda Gusti Rizki Azhari, S.E.
Anggota	Perencana Ahli Muda M. Haris, S.T., M.M.
Anggota	Perencana Ahli Muda Norsyahnita, S.Pd.
Anggota	Perencana Ahli Muda Sihabuddin, S.E.
Anggota	Peneliti Ahli Pertama Juhairiyah, M.Kes., SKM.
Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan Ikhwan Wahyudi Rahman, S.T.
Anggota	Penelaah Teknis Kebijakan Muhammad Rizky Rifani, S.E.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan **Laporan Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan refleksi atas berbagai capaian program pembangunan di daerah. Keberhasilan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Oleh karena itu, analisis data ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, sumbangsih pemikiran, serta kerja sama yang baik dalam proses pengumpulan data hingga penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan menjadi acuan yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan daerah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Martapura, Juni 2026

Kepala BAPPERIDA Kab. Banjar

Ir. Hj. Anna Rosida Santi, ST.,MT
NIP. 19741024 199803 2 006

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Dasar Hukum	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	6
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	6
2.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	6
2.1.1 Administrasi dan Geografi	6
2.1.2 Kondisi Topografi	10
2.1.3 Kondisi Klimatologi.....	18
2.1.4 Kondisi Geografi	21
2.1.5 Penggunaan Lahan.....	25
2.1.6 Risiko dan Kerawanan Bencana	27
2.2 Potensi Sumber Daya Alam	31
2.2.1 Potensi Pengembangan Wilayah	31
2.2.2 Potensi Sumber Daya Alam	42
2.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	43
2.3.1 Rasio Elektrifikasi.....	44
2.3.2 Jumlah Pelanggan PT. PLN (Persero) di Kabupaten Banjar	44
2.3.3 Cakupan Pelayanan PT. Air Minum Intan Banjar	46
2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Teraliri/Belum Teraliri Oleh PT Air Minum Intan Banjar	47
2.3.5 Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Banjar.....	49
2.3.6 Ketahanan Pangan	50
2.3.7 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjar	53
2.4 Lingkungan Hidup Berkualitas	56
2.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar	56

2.4.2 Akses Sanitasi Masyarakat Kabupaten Banjar.....	58
2.4.3 Capaian Penanganan Persampahan Kabupaten Banjar	60
2.5 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	61
2.5.1 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Banjar.....	61
2.5.2 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banjar.....	63
2.5.3 Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjar	65
2.6 Demografi	66
2.6.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	67
2.6.2 Piramida Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	70
2.6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	73
2.6.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	74
2.6.5 Keberadaan Masyarakat Adat dan Kondisi Sosiologis Masyarakat	76
BAB III	80
ASPEK KESEJAHTERAAN	80
3.1 Kesejahteraan untuk Semua.....	80
3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	80
3.1.2 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2025 (Persen)	81
3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2025	83
3.1.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2025.....	88
3.1.5 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025.....	92
3.1.6 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 (Nilai).....	98
3.1.7 Grafik PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025.....	108
3.1.8 Grafik PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2021–2025....	110
3.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka	111
3.1.10 Indeks Gini	115
3.1.11 Indeks Pembangunan Manusia	117
3.2 Kesehatan untuk Semua.....	123
3.2.1 Usian Harapan Hidup (UHH).....	123
3.2.2 Prevalensi Stunting	125
3.2.3 Cakupan UHC atau Universal Health Coverage	127

3.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata.....	130
3.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025	131
3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	132
3.3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025	133
3.3.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	135
3.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	137
3.3.6 Unsur IPLM	138
3.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	140
3.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	140
3.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	141
3.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	142
3.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	145
3.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	149
3.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	149
3.6.2 Indeks Ketimpangan Gender	151
BAB IV	153
ASPEK DAYA SAING DAERAH	153
4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	153
4.1.1 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banjar	153
4.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	155
4.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan	156
4.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	157
4.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	160
4.2.4 Indeks Inovasi Daerah	162
4.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	178
4.3.1 Distribusi Persentase PDRB Non Tambang Lapangan Usaha (Persen) .	179
4.4 Transformasi Digital	181
4.4.1 Pembangunan TIK	181
4.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	182
4.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto	182
4.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	186

4.6.1 Panjang Jalan Berdasarkan Wewenang Pengelolaan Kabupaten Banjar	186
4.6.2 Kondisi Jalan Kabupaten Banjar	188
4.6.3 Persentase Konektivitas, Persentase Kondisi Jalan mantap, dan Indeks Konektivitas di Kabupaten Banjar	189
4.6.4 Indeks Konektivitas	190
4.6.5 Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan di Kabupaten Banjar	191
4.6.6 Indeks Konektivitas Prasarana di Kabupaten Banjar	194
4.7 Stabilitas Ekonomi Makro	194
4.7.1 Grafik Laju Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin tahun 2021-2025	195
BAB V	198
ASPEK PELAYANAN UMUM	198
5.1 Regulasi dan tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	198
5.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banjar	198
5.1.2 Capaian Kinerja SAKIP, Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabuptaen Banjar Tahun 2025	201
5.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	203
5.2.1 Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjar	203
5.3 Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	203
5.3.1 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023-2025 ...	203
5.3.2 Indeks Kesalehan Sosial	206
5.3.3 Indeks Harmoni Indonesia	210
5.3.4 Indeks Demokrasi Indonesia	211
5.3.5 Indeks Pelayanan Publik	215
5.3.6 Indeks Integritas	216
BAB VI	221
PENUTUP	221

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Banjar	7
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Banjar	11
Gambar 2.3	Peta Ketinggian Kabupaten Banjar	12
Gambar 2.4	Peta Geomorfologi Kabupaten Banjar	14
Gambar 2.5	Peta Geomorfologi Kabupaten Banjar	16
Gambar 2.6	Peta Klimatologi Kabupaten Banjar	19
Gambar 2.7	Peta Curah Hujan Kabupaten Banjar	21
Gambar 2.8	Peta Geologi Kabupaten Banjar.....	22
Gambar 2.9	Peta Jenis Tanah Kabupaten Banjar	24
Gambar 2.10	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Banjar	25
Gambar 2.11	Peta Tingkat Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Banjar	28
Gambar 2.12	Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Banjar	29
Gambar 2.13	Peta Kerawanan Bencana Puting BeliungKabupaten Banjar.....	30
Gambar 2.14	Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Banjar.....	31
Gambar 2.15	Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Selatan..	35
Gambar 2.16	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Banjar.....	37
Gambar 2.17	Daerah Rawa di Kabupaten Banjar.....	39
Gambar 2.18	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Banjar	40
Gambar 2.19	Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Banjar	41
Gambar 2.20	Peta Ketersediaan Air Kabupaten Banjar.....	42
Gambar 2.21	Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) di Kab. Banjar tahun 2021-2025	45
Gambar 2.22	Cakupan Layanan PT. AM Tahun 2021-2025.....	46
Gambar 2.23	Peta Pelayanan Air Minum PAMSIMAS Kabupaten Banjar.....	48
Gambar 2.24	Indeks Infrastruktur Kabupaten Banjar, 2022-2025.....	49
Gambar 2.25	Grafik IKP Kab/Kota Prov Kalsel tahun 2025	51
Gambar 2.26	Grafik Aspek IKP Prov. Kalsel	53
Gambar 2.27	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar 2022-2025	58
Gambar 2.28	Akses Sanitasi Layak vs Aman	59
Gambar 2.29	Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Banjar.....	60
Gambar 2.30	Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	61
Gambar 2.31	Indeks Kerentanan.....	62
Gambar 2.32	Indeks Potensi Dampak	63
Gambar 2.33	Indeks Risiko Bencana Kab. Banjar Tahun 2021-2025	64
Gambar 2.34	Grafik Indeks Ketahanan Daerah.....	66
Gambar 2.35	Peta Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025	69
Gambar 2.36	Piramida Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Tahun 2025	72

Gambar 3.1	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	80
Gambar 3.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	84
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2020- 2025 ..	88
Gambar 3.4	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020- 2025.....	90
Gambar 3.5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2025.....	91
Gambar 3.6	Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	93
Gambar 3.7	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025	94
Gambar 3.8	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	96
Gambar 3.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	98
Gambar 3.10	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025.....	100
Gambar 3.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	102
Gambar 3.12	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025 .	104
Gambar 3.13	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025.....	106
Gambar 3.14	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	107
Gambar 3.15	Grafik PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	109
Gambar 3.16	Grafik PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025	110
Gambar 3.17	Grafik TPT Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025.....	113
Gambar 3.18	Perbandingan Indeks Gini Ratio Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025 (Maret).....	116
Gambar 3.19	Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	118
Gambar 3.20	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020 -2025.....	120
Gambar 3.21	Perbandingan IPM Kab / Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2025	122

Gambar 3.22	Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	124
Gambar 3.23	Prevalensi Stunting di Kabupaten Banjar Tahun 2021-2024	126
Gambar 3.24	Capaian Universal Health Coverage (UHC) dan Distribusi Peserta JKN Berdasarkan Segmen Kepesertaan Kabupaten Banjar Tahun 2025	128
Gambar 3.25	Profil Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta JKN Kabupaten Banjar Tahun 2025	129
Gambar 3.26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025	131
Gambar 3.27	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025	132
Gambar 3.28	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025	134
Gambar 3.29	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025	136
Gambar 3.30	Grafik Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan...	140
Gambar 3.31	Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banjar Tahun 2021-2024	143
Gambar 3.32	Grafik Analisis Klaster Performa Dimensi Kebudayaan	146
Gambar 3.33	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) Kabupaten Banjar	149
Gambar 3.34	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	151
Gambar 4.1	Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	156
Gambar 4.2	Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	158
Gambar 4.3	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	160
Gambar 4.4	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025	161
Gambar 4.5	Rekapitulasi Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	164
Gambar 4.6	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2025	165
Gambar 4.7	Grafik Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah Kab.Banjar Tahun 2021 - 2025	166
Gambar 4.8	Grafik Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap	189
Gambar 4.9	Grafik Indeks Konektivitas	190
Gambar 4.10	Trayek Angkutan Pengumpan (Feeder)	192

Gambar 4.11	Grafik Indeks Konektivitas Prasarana Di Kab. Banjar Tahun 2020-2024	194
Gambar 4.12	Grafik Laju Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin 2020-2025	195
Gambar 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banjar	199
Gambar 5.2	Capaian Kinerja SAKIP dan SPBE Kab. Banjar	201
Gambar 5.3	Skor Indeks Daya Saing Daerah	204
Gambar 5.4	Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023-2025	205
Gambar 5.5	Perbandingan IKS Kabupaten Banjar 2024, 2025 dan IKS Nasional	207
Gambar 5.6	Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Banjar Tahun 2025	212
Gambar 5.7	Grafik Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	216
Gambar 5.8	Grafik Indeks Integritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan ...	218

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Banjar	7
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar dan Topografi Wilayah Tahun 2021 - 2025	10
Tabel 2.3	Tabel Ketinggian Wilayah Di Kabupaten Banjar	13
Tabel 2.4	Geomorfologi di Kabupaten Banjar	15
Tabel 2.5	Kelerengan Wilayah Di Kabupaten Banjar	17
Tabel 2.6	Keadaan Iklim Menurut Bulan Tahun 2025.....	19
Tabel 2.7	Jenis Tanah Di Kabupaten Banjar	23
Tabel 2.8	Jenis Penggunaan Lahan Di Kabupaten Banjar.....	25
Tabel 2.9	Rasio Elektrifikasi di Kab. Banjar	44
Tabel 2.10	Cakupan Non PT AM	48
Tabel 2.11	Capaian Komponen Indeks Ketahanan Pangan di Kab. Banjar	52
Tabel 2.12	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjar	54
Tabel 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar	57
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	67
Tabel 2.15	Keterangan Gambar.....	69
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2025.....	70
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2024	73
Tabel 2.18	Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2021–2025	74
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Banjar Tahun 2025.....	77
Tabel 3.1	Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025 (%).....	82
Tabel 3.2	PDRB Pengeluaran ADHB Kab. Banjar Tahun 2021 – 2025 PDRB Pengeluaran Berdasarkan Adhb Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah).....	85
Tabel 3.3	Tabel 3.5 PDRB Pengeluaran Berdasarkan Adhk Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah).....	87
Tabel 3.4	TPT Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025	112
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Banjar	138
Tabel 4.1	Angka Ketergantungan di Kabupaten Banjar Tahun 2020	154
Tabel 4.2	Inovasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025.....	169

Tabel 4.3	Distribusi Persentase PDRB Non Tambang Menurut Lapangan Usaha (Persen)	179
Tabel 4.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025.....	184
Tabel 4.5	Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Banjar (km), 2022-2025	187
Tabel 4.6	Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Banjar (km), 2022-2025.....	187
Tabel 4.7	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Banjar (km), 2022-2025	188
Tabel 4.8	Jumlah Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Menurut Trayek di Kabupaten Banjar Tahun 2025.....	192
Tabel 5. 1	Capaian Kinerja SAKIP Daerah, Indeks SPBEKabupaten Banjar Tahun 2021-2025	201
Tabel 5. 2	Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjar	203
Tabel 5. 3	Perbandingan IKS Kabupaten Banjar 2024-2025	208
Tabel 5. 4	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan ..	215
Tabel 5. 5	Indeks Integritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan	217

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam era tata kelola pemerintahan yang semakin mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan evidence-based policy, ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Data dan informasi yang komprehensif diperlukan untuk memberikan gambaran kondisi eksisting daerah, mengidentifikasi permasalahan dan potensi pembangunan, serta merumuskan strategi pembangunan yang tepat sasaran.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus disusun berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan daerah yang didukung oleh data dan informasi yang valid. Selain itu, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola data guna menghasilkan informasi statistik sektoral yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pembangunan daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum. Keempat aspek tersebut menjadi komponen utama dalam menggambarkan kinerja pembangunan daerah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RKPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, maupun dokumen evaluasi pembangunan lainnya.

Aspek geografi dan demografi memberikan informasi mengenai karakteristik wilayah, kondisi fisik daerah, distribusi penduduk, struktur penduduk, serta dinamika kependudukan yang mempengaruhi arah pembangunan daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan tingkat kualitas hidup masyarakat melalui indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Aspek daya saing daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi, investasi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, aspek pelayanan umum menggambarkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi penting sebagai dasar penyediaan informasi pembangunan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyediakan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

1. Menyajikan gambaran kondisi umum pembangunan daerah berdasarkan data dan informasi yang valid dan terukur.
2. Menganalisis kondisi pembangunan daerah dari aspek geografi dan demografi.
3. Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Menganalisis tingkat daya saing daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
5. Menganalisis capaian pelayanan umum yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
6. Mengidentifikasi potensi, permasalahan, tantangan, dan peluang pembangunan daerah.
7. Menyediakan bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perumusan kebijakan pembangunan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

A. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis aspek geografi dan demografi mencakup:

- Posisi dan Peran Strategis Daerah
- Potensi Sumber Daya Alam
- Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- Lingkungan Hidup Berkualitas
- Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
- Demografi

B. Aspek Kesejahteraan

Analisis aspek kesejahteraan mencakup:

- Kesejahteraan untuk semua
- Kesehatan untuk Semua
- Pendidikan Berkualitas yang Merata
- Perlindungan Sosial yang Adaptif
- Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
- Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

C. Aspek Daya Saing Daerah

Analisis aspek daya saing daerah mencakup:

- Daya Saing Sumber Daya Manusia
- IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
- Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
- Transformasi Digital
- Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
- Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
- Stabilitas Ekonomi Makro

D. Aspek Pelayanan Umum

Analisis aspek pelayanan umum mencakup:

- Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
- Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.
7. Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur perencanaan pembangunan, statistik sektoral, dan Satu Data Indonesia di daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II Analisis Aspek Geografi dan Demografi

Memuat kondisi umum daerah, karakteristik wilayah, analisis kondisi wilayah dan kependudukan daerah

BAB III Analisis Aspek Kesejahteraan

Memuat analisis indikator kesejahteraan.

BAB IV Analisis Aspek Daya Saing Daerah

Memuat analisis potensi dan kinerja daya saing daerah.

BAB V

Analisis Aspek Daya Saing Daerah

Memuat analisis potensi dan kinerja daya saing daerah

BAB VI Penutup

BAB II

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi dan demografi merupakan dua faktor penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sebelum suatu perencanaan pembangunan dilakukan, perlu dilakukan identifikasi terhadap kondisi geografis dan demografis wilayah agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara tepat dan efektif.

Di Kabupaten Banjar, aspek geografi mencakup karakteristik, administrasi wilayah, potensi pengembangan wilayah, serta tingkat kerentanan terhadap bencana. Sementara itu, aspek demografi menggambarkan kondisi kependudukan, termasuk jumlah persebaran, serta keterkaitannya dengan rencana tata ruang wilayah. Kedua aspek ini menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Pemahaman terhadap kedua aspek ini mendukung penguatan sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi yang tangguh terhadap bencana. Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan secara lebih terarah, adaptif, dan berkelanjutan.

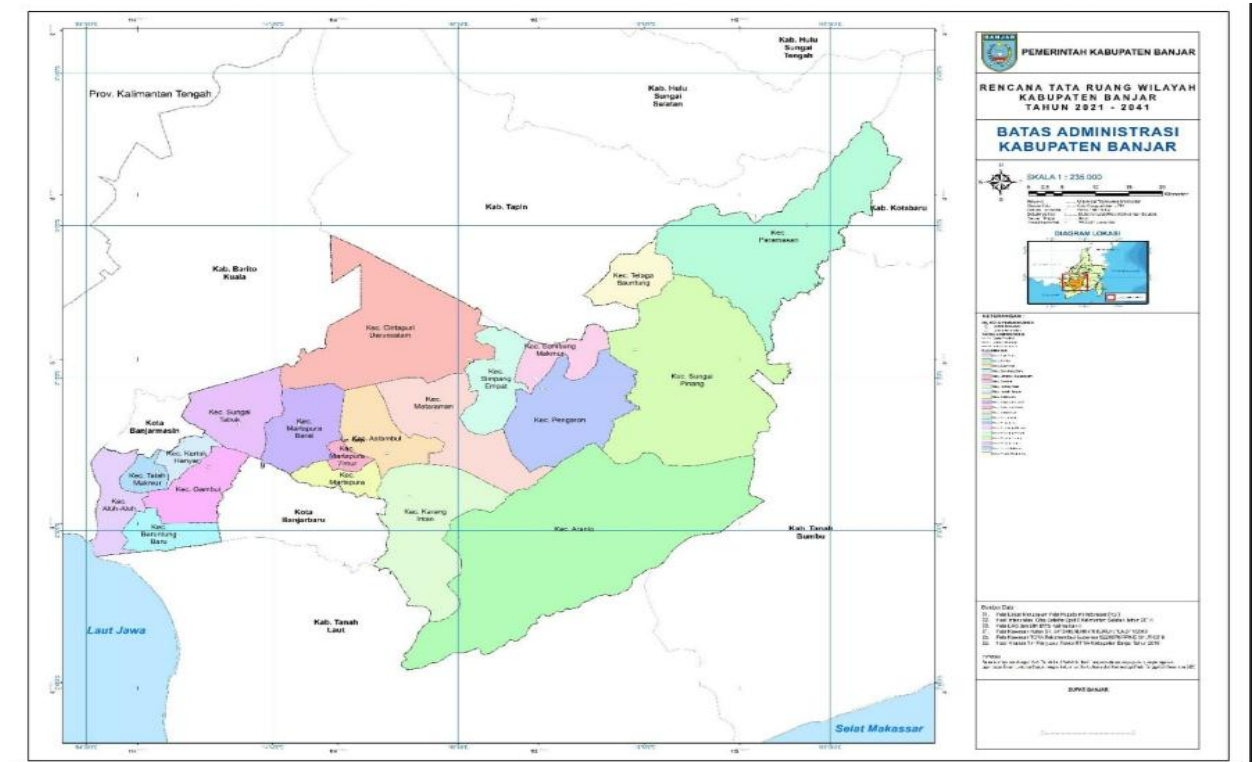
2.1.1 Administrasi dan Geografi

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini adalah Martapura yang dikenal dengan sebutan Kota Serambi Mekkah. Secara keseluruhan, Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah 4.668,50 km² atau sekitar 12,20% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Banjar terletak pada koordinat di antara 114°30'20" sampai dengan 115°35'37" Bujur Timur dan pada 2°49'55" sampai dengan 3°43'38" Lintang Selatan dengan batas wilayah:

- 1) Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara;
- 2) Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur;
- 3) Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan; serta
- 4) Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

Kabupaten Banjar terbagi menjadi 20 kecamatan, dengan total 277 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Aranio dengan luas 1.166,35 km² (24,98%), sedangkan yang terkecil adalah Martapura Timur dengan luas 29,99 km² (0,64%).. Secara lebih rinci terkait luas wilayah di Kabupaten Banjar akan disajikan dalam gambar dan tabel berikut:



Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 – 2041

Tabel 2. 1 Tabel Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Banjar

No	Kecamatan di Kabupaten Banjar	Luas Wilayah		Jumlah	
		Luas Km2	Persentase	Kelurahan	Desa
1	Aluh-Aluh	82,48	1,77	-	19
2	Beruntung Baru	61,42	1,32	-	12
3	Gambut	129,3	2,77	2	12

No	Kecamatan di Kabupaten Banjar	Luas Wilayah		Jumlah	
		Luas Km2	Persentase	Kelurahan	Desa
4	Kertak Hanyar	45,83	0,98	3	10
5	Tatah Makmur	35,47	0,76	-	13
6	Sungai Tabuk	147,3	3,16	1	20
7	Martapura	42,03	0,90	7	19
8	Martapura Timur	29,99	0,64	-	20
9	Martapura Barat	149,38	3,20	-	13
10	Astambul	216,5	4,64	-	22
11	Karang Intan	215,35	4,61	-	26
12	Aranio	1166,35	24,98	-	12
13	Sungai Pinang	458,65	9,82	-	11
14	Paramasan	560,85	12,01	-	4
15	Pengaron	433,25	9,28	-	12
16	Sambung Makmur	134,65	2,88	-	7
17	Mataraman	148,4	3,18	-	15
18	Simpang Empat	141,1	3,02	-	15
19	Telaga Bauntung	158	3,38	-	4
20	Cintapuri Darussalam	312,2	6,69	-	11
	Jumlah	4668,5	100	13	277

Sumber: BPS Kab. Banjar, 2026

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat diketahui gambaran wilayah administratif di Kabupaten Banjar. Secara keseluruhan, Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah 4.668,5 km² dengan total 13 kelurahan dan 277 desa yang tersebar di 20 kecamatan.

Dari sisi luas wilayah, terdapat perbedaan yang cukup mencolok antar kecamatan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Aranio dengan luas 1.166,35 km² atau sekitar 24,98% dari total wilayah Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seperempat wilayah kabupaten berada di kecamatan tersebut. Sebaliknya, kecamatan dengan luas terkecil adalah Martapura Timur dengan luas 29,99 km² atau hanya 0,64%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi luas wilayah antar kecamatan

Beberapa kecamatan lain yang memiliki wilayah cukup luas antara lain Paramasan (12,01%), Sungai Pinang (9,82%), dan Pengaron (9,28%). Sementara itu, kecamatan dengan persentase wilayah kecil di bawah 2% antara lain Aluh-Aluh, Beruntung Baru, Kertak Hanyar, dan Tatah Makmur.

Dilihat dari jumlah desa dan kelurahan, sebagian besar kecamatan di kabupaten banjar didominasi oleh desa. Hanya beberapa kecamatan yang memiliki kelurahan, yaitu:

- a. Gambut (2 kelurahan)
- b. Kertak Hanyar (3 kelurahan)
- c. Sungai Tabuk (1 kelurahan)
- d. Martapura (7 kelurahan)

Kecamatan Martapura yang menjadi wilayah pusat administrasi memiliki perpaduan desa dan kelurahan memiliki jumlah kelurahan terbanyak, yang menunjukkan karakteristik wilayah yang lebih perkotaan dibanding kecamatan lainnya. Sementara itu, kecamatan lain cenderung bersifat pedesaan dengan jumlah desa yang lebih dominan.

Dari jumlah desa, kecamatan dengan desa terbanyak adalah Karang Intan (26 desa), disusul Astambul (22 desa) dan Sungai Tabuk (20 desa). Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Paramasan dan Telaga Bauntung yang masing-masing memiliki 4 desa.

Dilihat dari struktur wilayah, Kabupaten Banjar memperlihatkan kombinasi antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan distribusi luas wilayah dan jumlah pemerintahan desa/kelurahan yang bervariasi di setiap kecamatan.

Kecamatan dengan wilayah luas cenderung memiliki jumlah desa yang relatif lebih sedikit seperti kecamatan Aranio dan Paramasan. Kecamatan dengan karakter perkotaan memiliki kelurahan, sedangkan wilayah pedesaan didominasi desa.

2.1.2 Kondisi Topografi

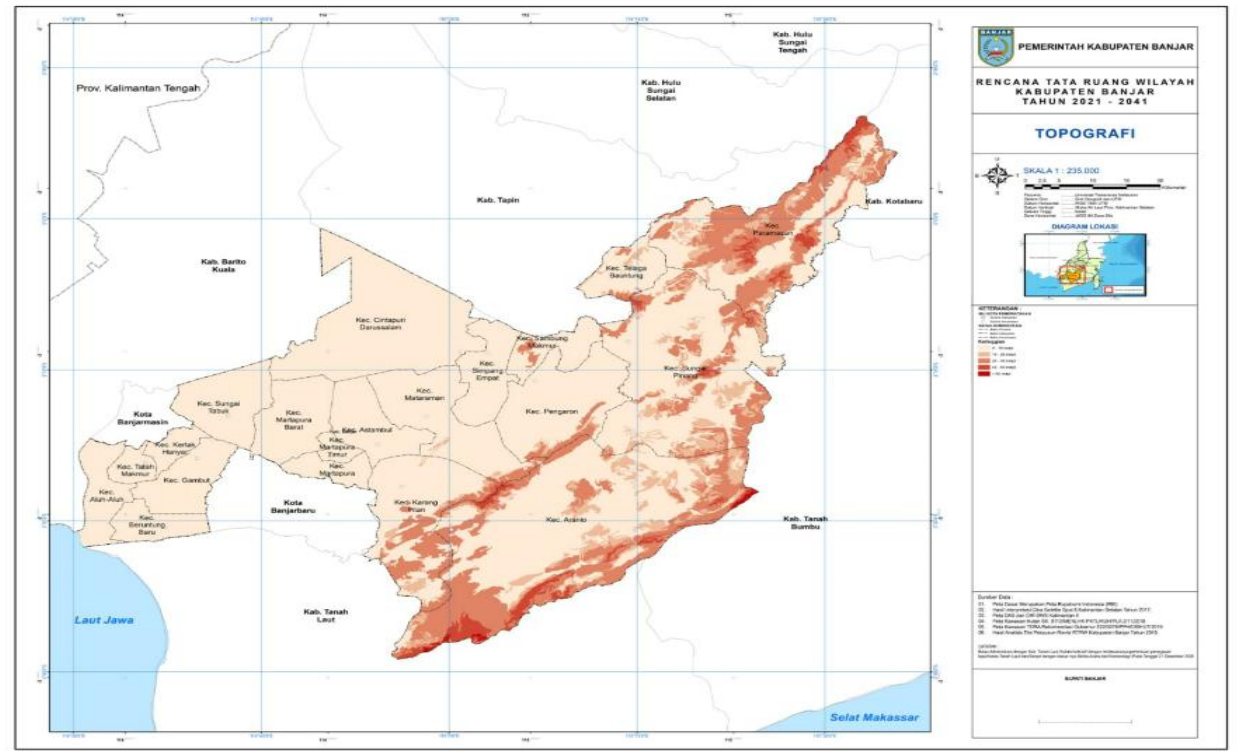
Kondisi topografi wilayah seperti keadaan morfologi dan kemiringan lereng sangat penting untuk diketahui karena penataan ruang banyak didasarkan pada kondisi topografi suatu wilayah. Demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya kemiringan lereng.

Tabel 2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar dan Topografi Wilayah Tahun 2021 - 2025

No	Kecamatan	Lembah/Valley			Lereng/Slope			Dataran/Flat		
		2021	2024	2025	2021	2024	2025	2021	2024	2025
1	Aluh-Aluh	—	—	—	—	—	—	19	19	19
2	Beruntung Baru	—	—	—	—	—	—	12	12	12
3	Gambut	—	—	—	—	—	—	14	14	14
4	Kertak Hanyar	—	—	—	—	—	—	13	13	13
5	Tatah Makmur	—	—	—	—	—	—	13	13	13
6	Sungai Tabuk	—	—	—	—	—	—	21	21	21
7	Martapura	—	—	—	—	—	—	26	26	26
8	Martapura Timur	—	—	—	—	—	—	20	20	20
9	Martapura Barat	—	—	—	—	—	—	13	13	13
10	Astambul	—	—	—	—	—	—	22	22	22
11	Karang Intan	—	—	—	1	1	1	25	25	25
12	Aranio	—	—	—	—	—	—	12	12	12
13	Sungai Pinang	—	—	—	11	11	11	—	—	—
14	Paramasan	—	—	—	4	4	4	—	—	—
15	Pengaron	—	—	—	—	—	—	12	12	12
16	Sambung Makmur	—	—	—	7	7	7	—	—	—
17	Mataraman	—	—	—	—	—	—	15	15	15
18	Simpang Empat	—	—	—	1	1	1	14	14	14
19	Telaga Bauntung	—	—	—	4	4	4	—	—	—
20	Cintapuri Darussalam	—	—	—	—	—	—	11	11	11
Kabupaten Banjar		—	—	—	28	28	28	262	262	262

Sumber: BPS Kab. Banjar, 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah desa/kelurahan di kabupaten banjar terbagi dalam tiga kategori topografi yaitu Lembah, Lereng/Puncak dan Dataran sehingga dapat terlihat bahwa bagaimana persebaran desa/kelurahan dan aktivitas penduduk berkaitan erat dengan faktor topografi wilayah. Jumlah ini konsisten dari tahun 2021 hingga 2025, yang berarti tidak ada perubahan signifikan dalam distribusi topografi permukiman selama periode tersebut.



Gambar 2. 2 Peta Topografi Kabupaten Banjar

Sumber Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021-2041

Kabupaten Banjar terletak di dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian topografi mulai -74 mdpl sampai 1400 mdpl. Ketinggian dibawah 0 mdpl disebabkan karena terdapat wilayah perairan yang luas. Sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar berada di dataran dengan ketinggian 0 – 400 mdpl dengan total luas wilayah sebesar 419.193,33 ha dan paling banyak ditemukan di Kecamatan Aranio. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah. Namun terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Banjar yang masuk ke dalam klasifikasi topografi sedang (400 – 700 mdpl) dan topografi tinggi (> 700 mdpl). Variasi ketinggian ini menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pola

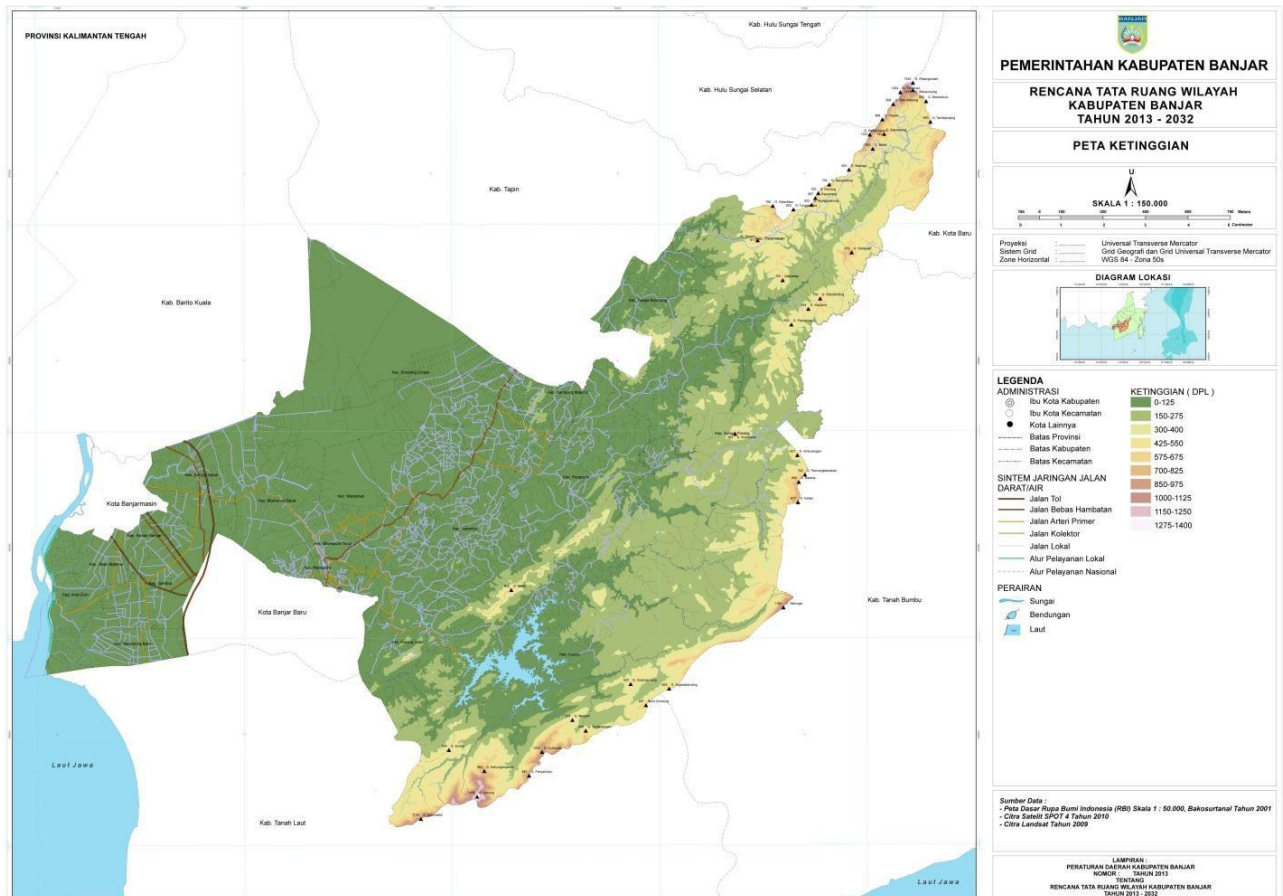
aktivitas dan persebaran penduduk. Selain itu, ketinggian wilayah juga digunakan sebagai dasar dalam penentuan pemanfaatan lahan atau wilayah usaha.

Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian rendah hingga sedang, yang mempengaruhi pola aktivitas masyarakat, terutama dalam pertanian, permukiman, dan penggunaan lahan. Selain itu, kondisi topografi yang relatif rendah menyebabkan sistem drainase alami kurang optimal. Akibatnya:

- Sekitar 29,93% wilayah sering tergenang air
- Sekitar 0,58% wilayah tergenang secara periodik

Kondisi ini umumnya terjadi pada daerah dataran rendah, terutama di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan aliran sungai dan rawa, seperti wilayah Aluh-Aluh, Sungai Tabuk, dan sekitarnya.

Kecamatan dengan wilayah luas seperti Aranio, Paramasan, dan Sungai Pinang cenderung memiliki topografi berbukit hingga pegunungan dengan jumlah desa relatif lebih sedikit. Sebaliknya, kecamatan yang lebih kecil seperti Martapura, Kertak Hanyar, dan Gambut memiliki karakteristik wilayah dataran rendah yang lebih padat penduduk serta memiliki kelurahan sebagai ciri wilayah perkotaan.



Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2013-2032

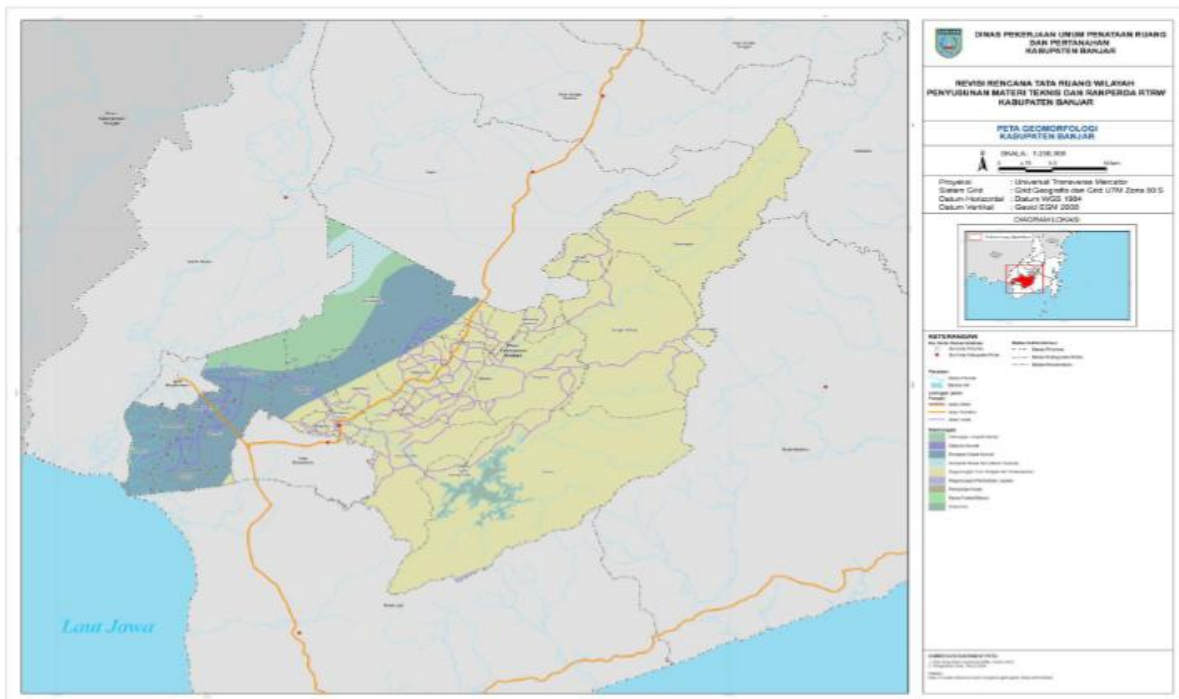
Tabel 2. 3 Tabel Ketinggian Wilayah Di Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha) Berdasarkan Ketinggian			
		< 0 mdpl	0 - 400 mdpl	400 - 700 mdpl	> 700 mfdpl
1	Aluh Aluh	1.046,94	9.182,89	-	-
2	Aranio	-	83.646,40	13.911,05	3.660,56
3	Astambul	-	12.942,90	-	-
4	Beruntung Baru	16,79	7.107,59	-	-
5	Cintapuri Darussalam	1,13	46.695,97	-	-
6	Gambut	6,88	12.134,11	-	-
7	Karang Intan	-	32.082,80	318,89	-
8	Kertak Hanyar	2,55	4.095,03	-	-
9	Martapura	0,06	5.532,26	-	-
10	Martapura Barat	0,95	11.088,59	-	-
11	Martapura Timur	-	2.013,23	-	-
12	Mataraman	-	20.011,96	-	-
13	Paramasan	-	36.237,81	16.648,42	1.498,52
14	Pengaron	-	28.063,26	85,12	-

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021-2041

Berdasarkan uraian tabel di atas, diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar berada di dataran dengan ketinggian 0 – 400 mdpl dengan total luas wilayah sebesar 419.193,33 ha dan paling banyak ditemukan di Kecamatan Aranio. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah. Namun terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Banjar yang masuk ke dalam klasifikasi topografi sedang (400 – 700 mdpl) dan topografi tinggi (> 700 mdpl). Wilayah

dengan ketinggian lebih tinggi, yaitu >700 mdpl, memiliki proporsi yang relatif kecil dan umumnya berada pada kawasan perbukitan hingga pegunungan dengan pemanfaatan lahan yang lebih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Banjar memiliki karakter topografi yang didominasi dataran rendah hingga bergelombang, namun tetap memiliki variasi ketinggian yang berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan, persebaran penduduk, serta potensi kerawanan bencana seperti banjir di dataran rendah dan longsor di wilayah yang lebih tinggi.



Gambar 2. 4 Peta Geomorfologi Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 – 2041

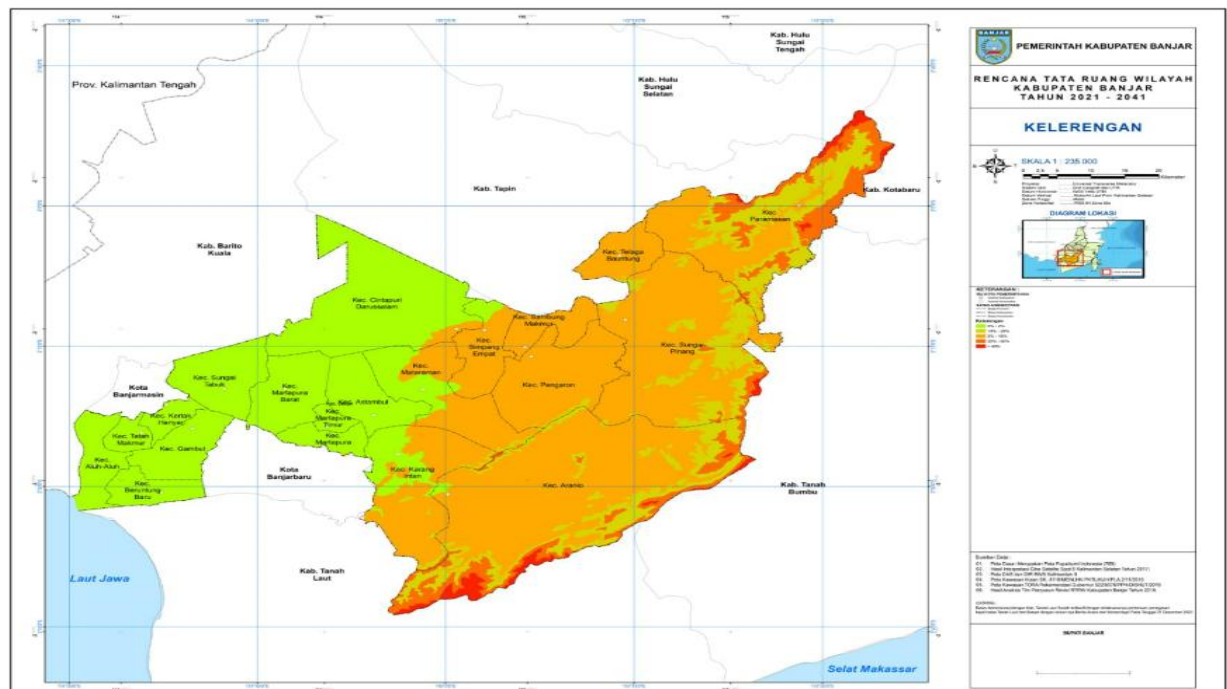
Geomorfologi atau bentuk dataran bumi di Kabupaten Banjar meliputi cekungan limpas banjir, endapan kipas aluvial, kompleks rawa buri (Back Swamp), pegunungan tua, perbukitan dan badan air. Terbentuknya geomorfologi ini didorong oleh letak geografis Kabupaten Banjar yang berada di sekitar kawasan perairan, yaitu laut dan sungai. Secara lebih terperinci, berikut luas wilayah kecamatan berdasarkan jenis morfologi wilayah.

Tabel 2. 4 Geomorfologi di Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Geomorfologi Wilayah (ha)					
		Cekungan Limpah Banjir	Endapan Kipas Aluvial	Komplek Rawa Buri (Back Swamp)	Pegunungan Tua Terlipat dan Tersesarkan	Peguungan / Perbukitan Lipatan	Tubuh Air
1	Aluh Aluh	223,60	10.006,23	-	-	-	-
2	Aranio	-	-	-	93.674,68	381,86	7.161,47
3	Astambul	322,06	4.088,60	-	8.532,23	-	-
4	Beruntung Baru	-	6.812,00	-	312,38	-	-
5	Cintapuri Darussalam	19.127,70	19.514,27	6.732,41	1.322,71	-	-
6	Gambut	-	12.141,00	-	-	-	-
7	Karang Intan	-	-	-	32.401,69	-	-
8	Kertak Hanyar	-	4.097,58	-	-	-	-
9	Martapura	-	-	-	5.532,31	-	-
10	MartapuraBarat	548,67	8.475,57	-	2.065,30	-	-
11	Martapura Timur	-	-	-	2.013,23	-	-
12	Mataraman	-	2.696,97	-	17.314,99	-	-
13	Paramasan	-	-	-	54.384,75	-	-
14	Pengaron	-	-	-	28.148,38	-	-
15	Sambung Makmur	-	-	-	8.520,30	-	-
16	Simpang Empat	-	2.973,95	-	10.646,16	-	-
17	Sungai Pinang	-	-	-	61.960,51	-	-
18	Sungai Tabuk	7.593,09	7.753,87	-	-	-	-
19	Tatah Makmur	-	3.316,81	-	-	-	-
20	Telaga Bauntung	-	-	-	8.046,43	-	-
Kabupaten Banjar		27.815,13	81.876,85	6.732,41	334.876,04	381,86	7.161,47

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 – 2041

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa morfologi di Kabupaten Banjar yang cukup bervariasi karena terdapat 6 bentuk morfologi. Bentuk morfologi yang paling mendominasi di Kabupaten Banjar adalah pegunungan tua terlipat dan tersesarkan. Hal tersebut dikarenakan setelah pegunungan terbentuk, proses erosi dan pelapukan selama jutaan tahun dapat mengikis puncak-puncak tajam, meninggalkan morfologi yang lebih halus namun masih menunjukkan ciri-ciri terlipat dan tersesarkan. Bentuk morfologi badan air di Kabupaten Banjar hanya ditemukan di Kecamatan Aranio hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya merupakan perairan karena terdapat waduk riam kanan yang menjadi sumber PLTA.



Gambar 2. 5 Peta Geomorfologi Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 – 2041

Tabel 2. 5 Kelerengan Wilayah di Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha) Berdasarkan Kelerengan				
		Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%
1	Aluh Aluh	10.101,70	119,06	8,94	0,13	-
2	Aranio	24.767,68	22.091,78	21.651,53	23.260,21	9.446,80
3	Astambul	12.286,25	577,20	77,93	1,51	-
4	Beruntung Baru	7.081,18	41,34	1,76	0,09	-
5	Cintapuri Darussalam	45.666,46	882,71	143,88	4,05	-
6	Gambut	12.041,20	97,45	2,35	-	-
7	Karang Intan	13.831,81	6.883,03	5.202,48	5.143,65	1.340,72
8	Kertak Hanyar	4.069,57	27,48	0,53	-	-
9	Martapura	5.402,87	126,13	3,31	-	-
10	Martapura Barat	11.055,69	33,80	0,05	-	-
11	Martapura Timur	1.965,70	46,18	1,34	-	-
12	Mataraman	14.532,52	3.791,16	1.279,37	398,80	10,12
13	Paramasan	6.401,54	9.650,41	13.880,73	18.555,01	5.897,06
14	Pengaron	12.790,18	8.556,86	4.215,00	2.308,25	278,08
15	Sambung Makmur	2.792,65	2.801,23	2.035,51	857,50	33,40
16	Simpang Empat	9.911,39	2.173,30	1.166,06	367,13	2,21
17	Sungai Pinang	15.270,48	16.682,20	15.061,11	12.162,64	2.784,08
18	Sungai Tabuk	15.301,82	44,63	0,52	-	-
19	Tatah Makmur	3.294,03	22,59	0,19	-	-
20	Telaga Bauntung	2.241,82	2.389,10	1.994,46	1.220,00	201,05
Kabupaten Banjar		230.806,55	77.037,63	66.727,07	64.278,99	19.993,53

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021-2041

Berdasarkan tabel diatas, kabupaten banjar didominasi oleh kelas lereng datar (0–8%) dengan luas sekitar 230.806,55 ha, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kondisi topografi yang relatif landai dan sangat potensial untuk

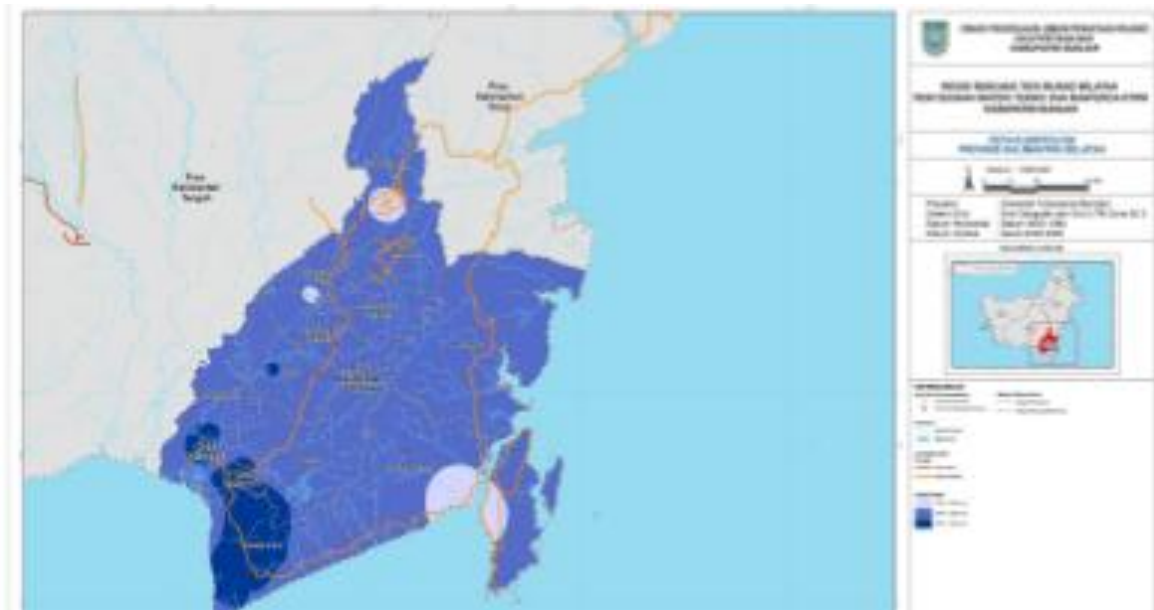
pengembangan permukiman, pertanian, serta infrastruktur. Selanjutnya, kelas landai (8–15%) dan agak curam (15–25%) juga memiliki luas yang cukup signifikan, masing-masing 77.037,63 ha dan 66.727,07 ha, yang masih memungkinkan untuk kegiatan budidaya dengan pengelolaan konservasi yang baik.

Di sisi lain, wilayah dengan kelerengan curam (25–45%) dan sangat curam (>45%) masing-masing seluas 64.278,99 ha dan 19.993,53 ha, yang umumnya tersebar di kecamatan seperti Aranio, Paramasan, dan Sungai Pinang. Wilayah ini memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan lahan dan lebih rentan terhadap erosi serta longsor, sehingga lebih sesuai sebagai kawasan lindung atau kehutanan. Oleh karena itu, kawasan ini lebih tepat diarahkan sebagai kawasan lindung, hutan, atau pemanfaatan terbatas seperti agroforestry dan wisata alam. Dengan pengelolaan yang tepat, variasi kelerengan ini justru dapat menjadi potensi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kondisi alam.

Secara keseluruhan, distribusi kelerengan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki kombinasi wilayah dataran luas dan perbukitan yang cukup signifikan, sehingga perencanaan tata ruang perlu mempertimbangkan kesesuaian lahan agar pembangunan tetap optimal dan berkelanjutan.

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Keadaan iklim di Kabupaten Banjar secara umum sama dengan daerah lain di tanah air, yaitu termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei sampai dengan Oktober) dan musim hujan (November sampai dengan sekitar bulan April). Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.



Gambar 2. 6 Peta Klimatologi Kabupaten Banjarnegara

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara 2021-2041

Secara spesifik, sesuai dengan hasil pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Banjarnegara, kondisi klimatologi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Keadaan Iklim Menurut Bulan Tahun 2025

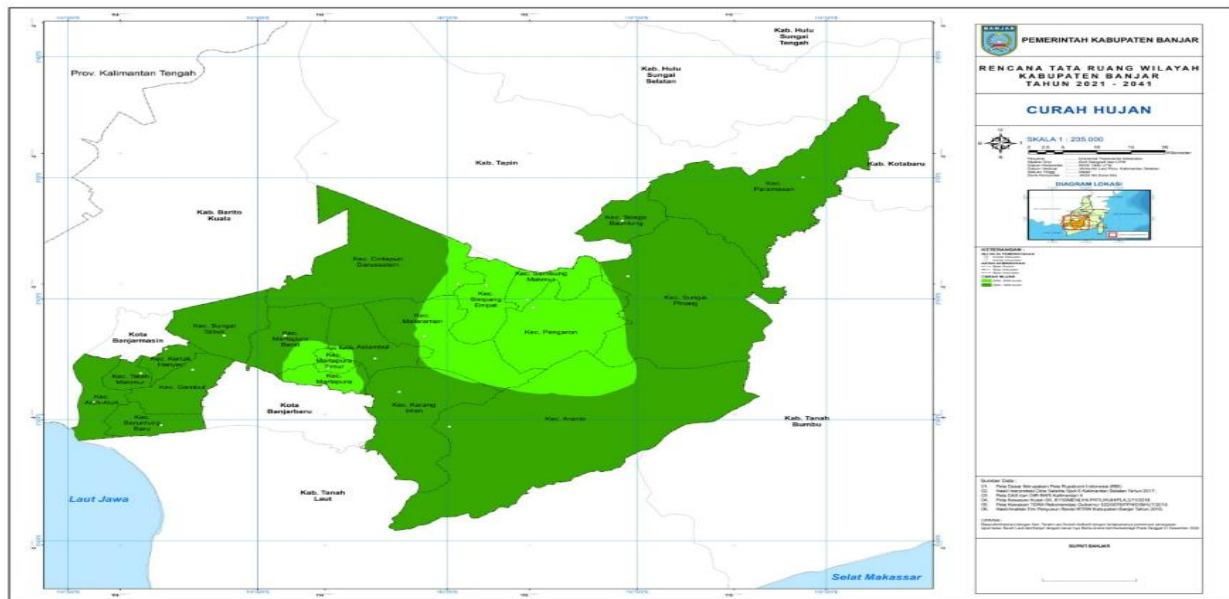
Bulan	Rata-rata suhu Udara (°C)		Kelembaban Udara (%)		Kecepatan Angin (knot)		Tekanan Udara (Mb)		Hari Hujan (Day)	Sinar Matahari (%)
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks		
Januari	22,4	32,9	60	100	0	10	999,6	1008,0	26	3,2
Februari	22	33	55	100	0	11	999,1	1010,5	19	3,1
Maret	21,8	34,4	52	100	0	10	997,5	1008,5	22	3,5
April	22,8	33,8	55	100	0	9	999,8	1008,3	20	4,7
Mei	23,4	34,8	54	100	0	10	999	1008,4	10	5,9
Juni	22,6	34,4	55	100	0	9	999,7	1008,9	17	4,6
Juli	20,5	34,4	49	98	0	8	999,7	1008,0	7	5,7
Agustus	21,7	34,4	51	99	0	9	1001	1008,6	17	4,2
September	21,3	34,7	45	99	0	10	1001,1	1008,5	15	5,4

Bulan	Rata-rata suhu Udara (°C)		Kelembaban Udara (%)		Kecepatan Angin (knot)		Tekanan Udara (Mb)		Hari Hujan (Day)	Sinar Matahari (%)
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks		
Oktober	21,8	35,1	50	99	0	12	997,5	1009,8	16	5,3
November	22,1	33,8	53	99	0	14	1000	1007,9	21	4,4
Desember	22,2	33,3	63	100	0	8	999,8	1008,5	27	3,1

Sumber: BPS Kab. Banjar, 2026

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Banjar memiliki iklim tropis lembab dengan suhu udara yang relatif stabil sepanjang tahun, berkisar antara 20,5°C hingga 35,1°C, serta kelembaban tinggi mencapai 45–100%. Pola curah hujan terlihat jelas, dimana jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada akhir hingga awal tahun (Desember–Maret), sedangkan periode pertengahan tahun (Juni–September) cenderung lebih kering dengan jumlah hari hujan yang lebih sedikit. Kondisi ini juga berbanding terbalik dengan penyinaran matahari, yang lebih rendah saat musim hujan dan meningkat saat musim kemarau.

Secara klimatologis, kondisi ini menunjukkan pengaruh kuat iklim *monsun tropis*, di mana pergerakan angin musim menyebabkan perbedaan periode basah dan kering. Dampaknya, wilayah dataran rendah di Kabupaten Banjar berpotensi mengalami genangan atau banjir saat musim hujan, sementara pada musim kemarau relatif terjadi kondisi lebih kering yang mendukung aktivitas pertanian dan kegiatan luar ruang. Dengan demikian, pola iklim ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pertanian, serta mitigasi bencana di daerah tersebut



Gambar 2. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Banjar

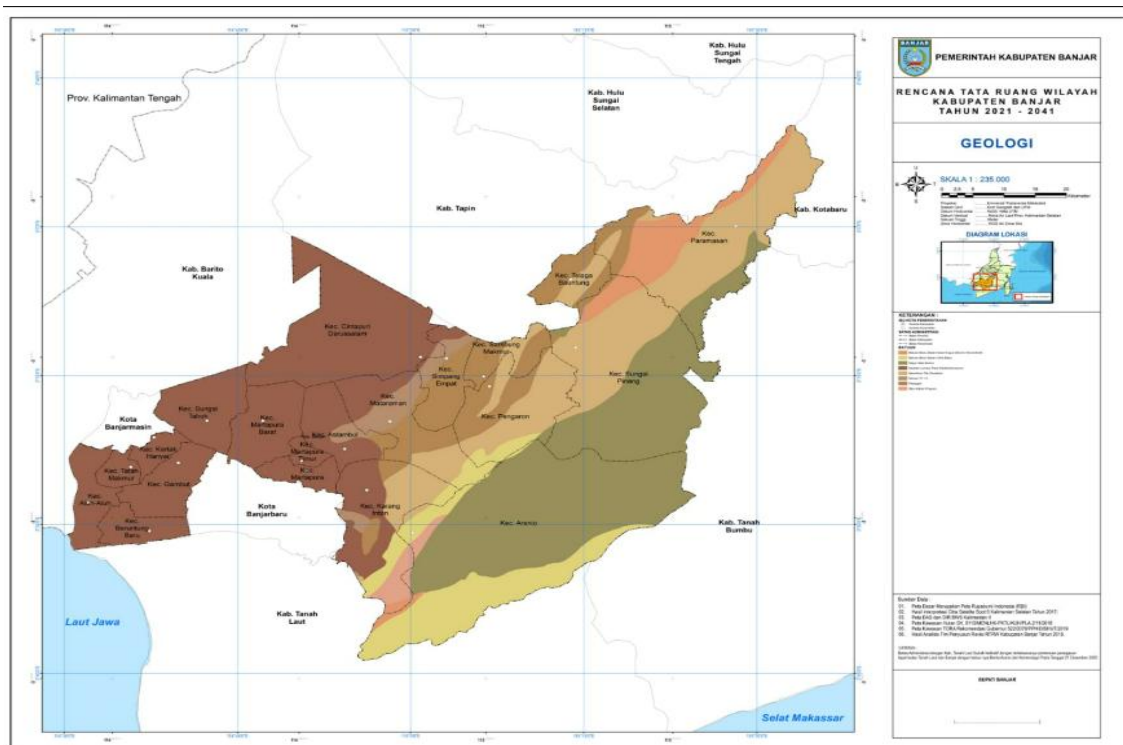
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021–2041

2.1.4 Kondisi Geografi

Kabupaten Banjar memiliki keragaman formasi geologi yang terbagi secara zonasi dari barat ke timur. Bagian barat didominasi oleh endapan aluvial muda dengan topografi datar yang cocok untuk permukiman dan pertanian, namun memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir. Wilayah tengah merupakan zona peralihan dengan batuan sedimen yang membentuk topografi bergelombang hingga berbukit, sehingga masih dapat dimanfaatkan untuk perkebunan dengan pengelolaan yang baik. Sementara itu, bagian timur hingga tenggara didominasi oleh batuan lebih tua seperti batuan beku dan metamorf dengan kondisi topografi curam hingga pegunungan, yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan daerah resapan air, namun memiliki potensi longsor yang tinggi. Secara keseluruhan, kondisi geologi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Banjar perlu disesuaikan dengan karakteristik fisik wilayah agar mendukung pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan tangguh terhadap bencana.

Pada umumnya tanah di wilayah Kabupaten Banjar bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, ber-pasir dan berdebu Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di

wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 %, dan 30-60 cm hanya 14,83%.



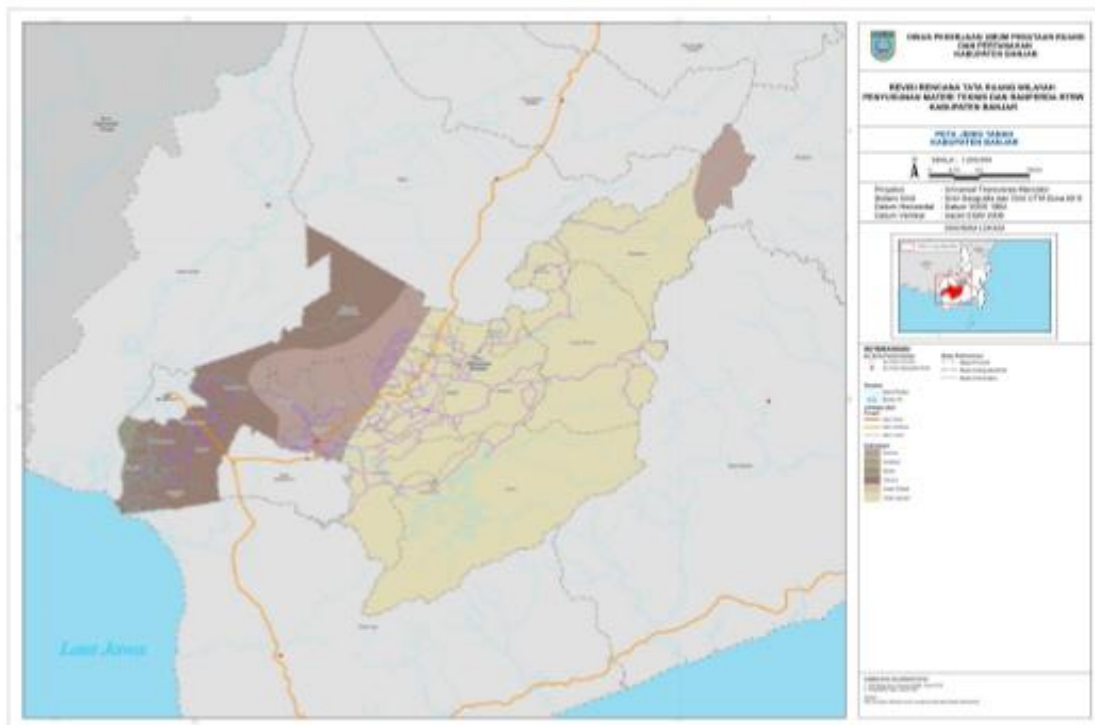
Gambar 2. 8 Peta Geologi Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021-2041

Tabel 2. 7 Jenis Tanah Di Kabupaten Banjar

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha) Berdasarkan Jenis Tanah			
		Acrisols	Fluvial	Histosol	Humik Latosol
1	Aluh Aluh	-	2.474,03	7.755,81	-
2	Aranio	-	-	-	101.218,01
3	Astambul	10.706,07	-	-	2.236,83
4	Beruntung Baru	-	-	7.124,38	-
5	Cintapuri Darussalam	16.337,51	-	28.470,57	1.889,02
6	Gambut	-	-	12.141,00	-
7	Karang Intan	105,46	-	-	32.296,23
8	Kertak Hanyar	-	-	4.097,58	-
9	Martapura	5.458,85	-	36,98	36,48
10	Martapura Barat	8.588,48	-	2.501,06	-
11	Martapura Timur	2.013,23	-	-	-
12	Mataraman	6.857,28	-	-	13.154,68
13	Paramasan	12.320,01	-	-	42.064,74
14	Pengaron	-	-	-	28.148,38
15	Sambung Makmur	-	-	-	8.520,30
16	Simpang Empat	1.904,93	-	36,51	11.678,66
17	Sungai Pinang	-	-	-	61.960,51
18	Sungai Tabuk	2.076,63	-	13.270,33	-
19	Tatah Makmur	-	-	3.316,81	-
20	Telaga Bauntung	-	-	-	8.046,43
Kabupaten Banjar		66.368,44	2.474,03	78.751,04	311.250,26

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 – 2041



Gambar 2. 9 Peta Jenis Tanah Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 - 2041

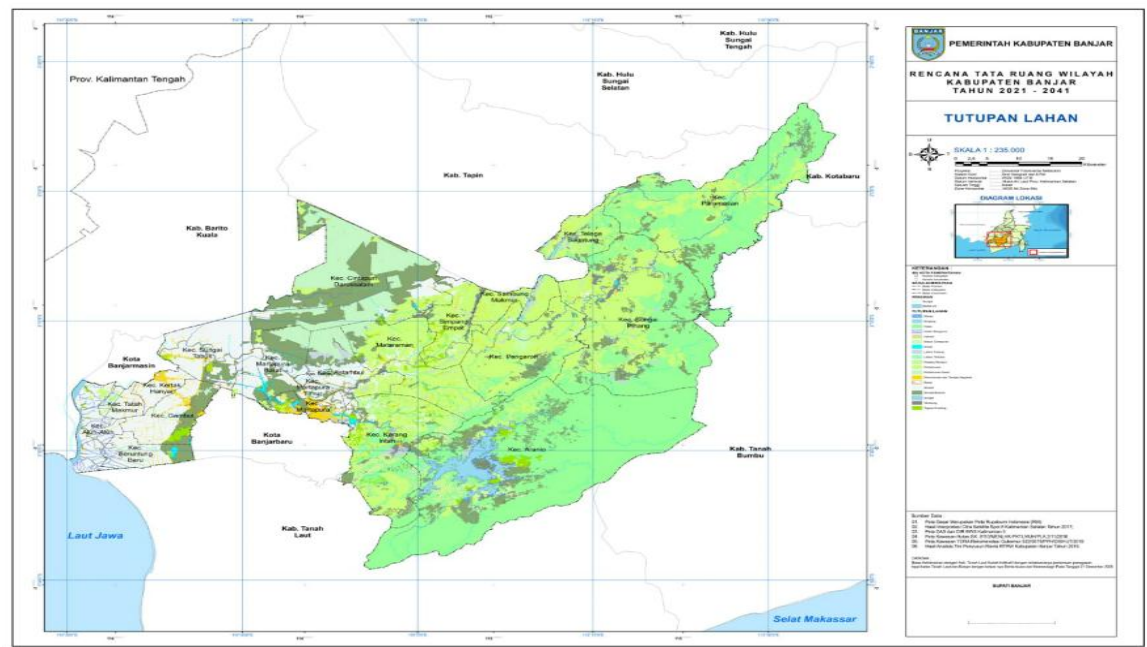
Berdasarkan tabel jenis tanah di Kabupaten Banjar, terlihat bahwa wilayah ini didominasi oleh tanah humik latosol (311.250,26 ha), diikuti oleh tanah histosol (78.751,04 ha), acrisols (66.368,44 ha), dan fluvial (2.474,03 ha). Dominasi humik latosol menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada kawasan perbukitan hingga pegunungan dengan bahan induk batuan yang relatif tua, seperti di kecamatan Aranio, Sungai Pinang, Paramasan, dan Pengaron. Tanah ini umumnya memiliki kesuburan sedang, namun memerlukan pengelolaan yang baik karena rentan terhadap erosi pada lereng curam.

Sementara itu, tanah histosol yang cukup luas menunjukkan keberadaan lahan rawa atau gambut, terutama di wilayah dataran rendah seperti Aluh-Aluh, Gambut, dan Kertak Hanyar, yang memiliki kandungan bahan organik tinggi tetapi rentan terhadap genangan dan kebakaran saat musim kemarau. Tanah acrisols tersebar di beberapa kecamatan seperti Astambul, Martapura, dan Mataraman, yang umumnya memiliki tingkat kesuburan rendah hingga sedang dan membutuhkan pemupukan untuk budidaya optimal. Adapun tanah fluvial yang luasnya relatif kecil berada di daerah aliran sungai dan memiliki kesuburan tinggi sehingga potensial untuk pertanian intensif. Secara keseluruhan, variasi jenis tanah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki karakter wilayah yang beragam, sehingga

pemanfaatan lahan perlu disesuaikan dengan kondisi tanah agar mendukung pembangunan yang produktif dan berkelanjutan.

2.1.5 Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Banjar masih didominasi oleh sektor agraris dan kehutanan, dengan potensi pengembangan yang cukup besar di berbagai bidang. Penggunaan lahan di Kabupaten Banjar didominasi oleh guna lahan berupa Hutan Negara dengan luas 86.510 Ha. Berikut merupakan tabel penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banjar:



Gambar 2. 10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 – 2041

Tabel 2. 8 Jenis Penggunaan Lahan Di Kabupaten Banjar

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS
1.	Tegalan	36.378
2.	Ladang	19.465
3.	Perkebunan	53.446
4.	Hutan rakyat	16.709
5.	Tambak	44
6.	Kolam	1.802

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS
7.	Padang Rumput	48.079
8.	Lahan yang tidak diusahakan	35.235
9.	Pekarangan	20.143
10.	Rumah dan Bangunan	15.200
11.	Hutan Negara	86.510
12.	Rawa	12.314
13.	Sawah Irigasi	6.952
14.	Sawah tadah hujan	16.551
15.	Pasang Surut	35.626
16.	Lahan sawah lebak	11.888
17.	Lainnya	50.173

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 – 2041

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Banjar didominasi oleh kawasan hutan negara (86.510 ha), diikuti oleh perkebunan (53.446 ha), padang rumput (48.079 ha), serta kategori lainnya (50.173 ha). Hal ini menandakan bahwa wilayah Kabupaten Banjar masih memiliki tutupan lahan alami dan semi-alami yang cukup luas, serta potensi besar pada sektor kehutanan dan perkebunan. Di sisi lain, sektor pertanian juga berperan penting, terlihat dari luas tegalan, ladang, dan berbagai jenis sawah (irigasi, tadah hujan, lebak, dan pasang surut) yang menunjukkan keberagaman sistem pertanian sesuai kondisi lahan.

Struktur penggunaan lahan ini mencerminkan karakter wilayah yang masih agraris dan berbasis sumber daya alam. Besarnya luas hutan negara menunjukkan pentingnya fungsi ekologis seperti penyangga lingkungan, pengatur tata air, dan konservasi. Sementara itu, luasnya lahan perkebunan dan pertanian mengindikasikan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Adanya lahan yang belum diusahakan (35.235 ha) menunjukkan peluang pengembangan ke depan, baik untuk pertanian, permukiman, maupun investasi. Namun, kondisi ini juga perlu dikelola secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan alih fungsi lahan yang berlebihan, kerusakan lingkungan, atau konflik pemanfaatan ruang. Dengan demikian, data ini penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan wilayah yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.1.6 Risiko dan Kerawanan Bencana

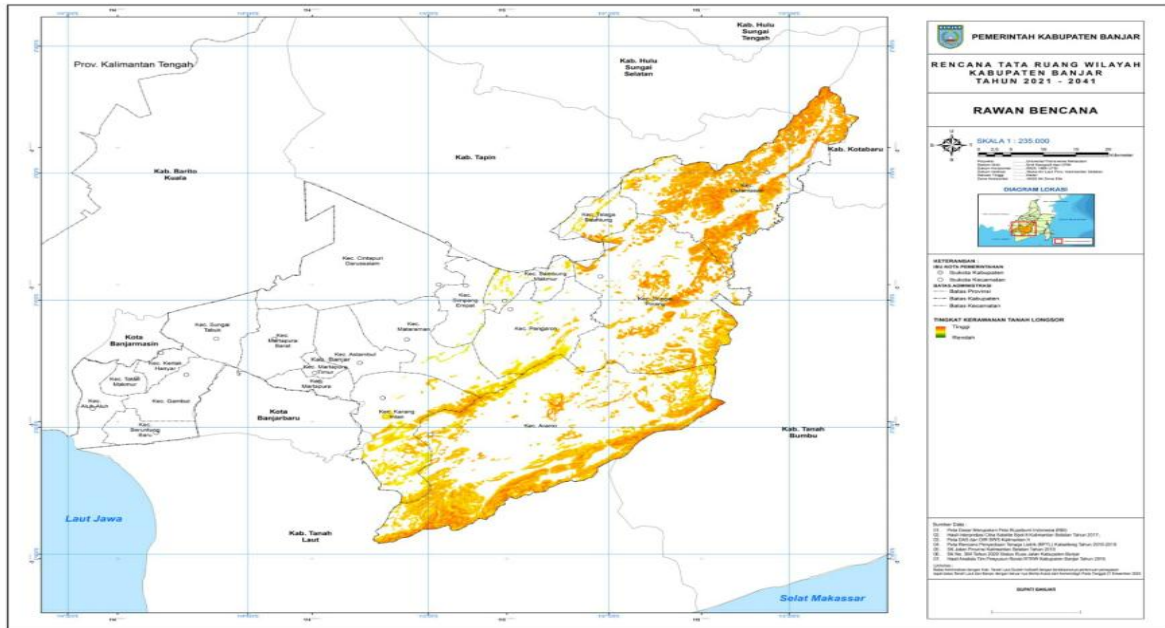
Bencana alam merupakan peristiwa yang terjadi akibat proses alam dalam upaya mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu, baik karena faktor alami maupun akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Potensi bencana di suatu wilayah dapat dikenali melalui kondisi geologi seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan amblesan, serta dari jenis aktivitas manusia seperti pembukaan lahan yang dapat memicu kebakaran hutan. Selain itu, riwayat kejadian bencana di masa lalu juga menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi tingkat kerawanan suatu daerah.

Di Kabupaten Banjar, potensi bencana alam yang umum terjadi meliputi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan, dan angin puting beliung, sedangkan kejadian gempa bumi belum tercatat sebagai ancaman utama. Potensi bencana tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan penggunaan lahan. Banjir umumnya terjadi di wilayah dataran rendah dan daerah aliran sungai, longsor berpotensi di kawasan perbukitan dengan lereng curam, sedangkan kebakaran lahan sering terjadi pada area lahan kering atau gambut saat musim kemarau. Adapun angin puting beliung biasanya muncul pada masa peralihan musim akibat kondisi atmosfer yang tidak stabil. Oleh karena itu, identifikasi wilayah rawan bencana perlu dilakukan secara dini dan berkelanjutan agar upaya mitigasi, pencegahan, serta evakuasi dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, dan tepat sasaran.

1. Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor umumnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit hingga pegunungan. Di Kabupaten Banjar, daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap tanah longsor meliputi Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Sungai Pinang.

Wilayah-wilayah tersebut memiliki kemiringan lereng yang cukup tinggi serta kondisi tanah yang rentan terhadap pergerakan, terutama saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan lahan yang baik dan peningkatan kewaspadaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana longsor.



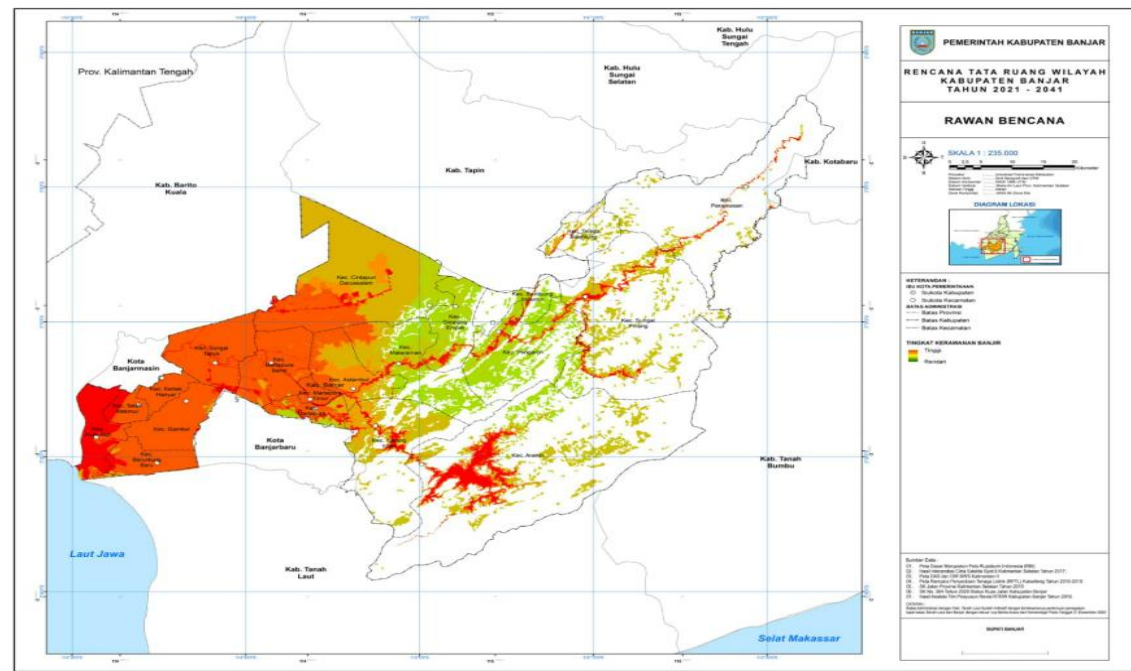
Gambar 2. 11 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021-2041

2. Banjir

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat kerawanan banjir relatif tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti meluapnya Sungai Martapura dan Sungai Riam Kanan, tingginya curah hujan, serta faktor non-alam seperti perubahan tata guna lahan yang mengurangi daya resap air.

Kabupaten Banjar didominasi oleh wilayah dengan risiko bencana banjir, di mana terdapat kelas risiko rendah, sedang dan tinggi di seluruh Kecamatan. Total luas wilayah dengan risiko bencana banjir di Kabupaten Banjar adalah hanya seluas 164.567,60 ha. Wilayah risiko bencana banjir di Kabupaten Banjar paling luas adalah wilayah dengan tingkat risiko tinggi dengan luas 108.442,97 hektar. Hal ini sekitar kurang lebih $\frac{1}{4}$ dari luas keseluruhan Kabupaten Banjar. Kecamatan yang paling luas wilayah dengan risiko banjir adalah Kecamatan Cintapuri Darussalam dengan luas 43.156,14 hektar. Sedangkan kecamatan yang paling kecil wilayah risiko banjir adalah Kecamatan Sambung Makmur dengan luas 654,44 hektar.



Gambar 2. 12 Peta Tingkat Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 - 2041

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar pada tahun 2025 terjadi banjir di 13 kecamatan dengan total 13 kejadian yang berdampak pada 147 desa/kelurahan, 33.768 bangunan, 39.581 kepala keluarga, dan 116.984 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi kejadian relatif rendah, dampak yang ditimbulkan sangat luas. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan wilayah cukup tinggi, terutama pada kawasan dataran rendah dan padat penduduk, sehingga diperlukan upaya mitigasi yang lebih terarah seperti pengendalian tata ruang, peningkatan sistem drainase, dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk mengurangi dampak bencana banjir.

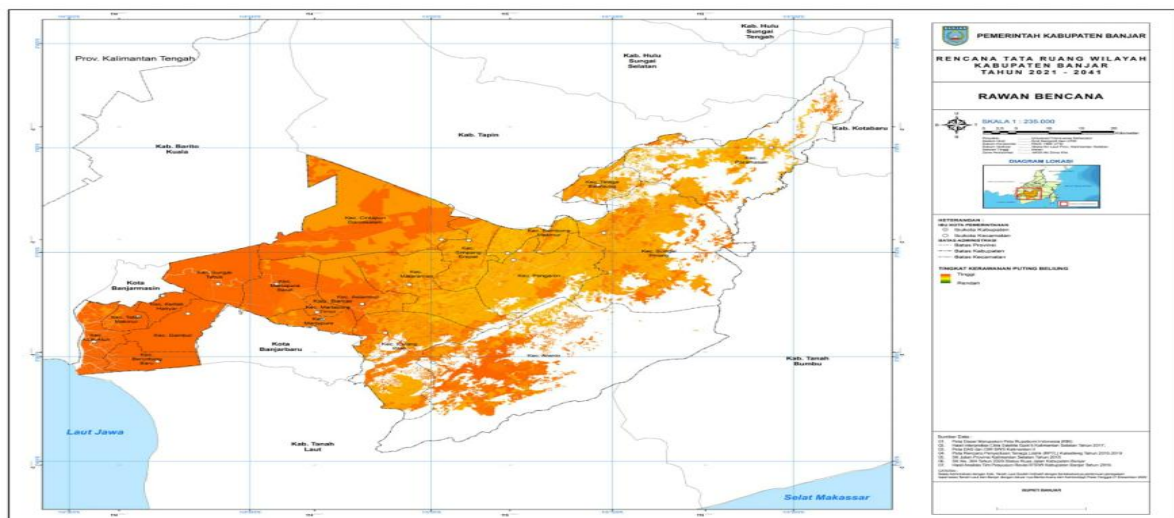
3. Angin Puting Beliung

Kawasan rawan angin puting beliung di Kabupaten Banjar umumnya terjadi pada wilayah dataran terbuka dengan kondisi atmosfer yang labil, terutama saat peralihan musim.

Berdasarkan data kejadian bencana dari BPBD Kabupaten Banjar tahun 2024–2025, angin puting beliung merupakan bencana yang cukup dominan, dengan jumlah

kejadian meningkat dari 39 kejadian pada tahun 2024 dan bertambah menjadi 49 kejadian pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya gangguan cuaca ekstrem di wilayah tersebut. Kecamatan dengan kejadian tertinggi pada tahun 2025 adalah Sungai Tabuk (13 kejadian), diikuti Gambut (9 kejadian) dan Aluh-Aluh (5 kejadian). Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi geografis terbuka, dataran rendah, serta faktor cuaca lokal.

Kerawanan bencana ini dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem seperti perbedaan suhu yang tinggi, kelembaban udara, serta pembentukan awan cumulonimbus. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan rumah, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi seperti peningkatan kewaspadaan saat cuaca ekstrem, penguatan struktur bangunan, serta penyebaran informasi peringatan dini kepada masyarakat.



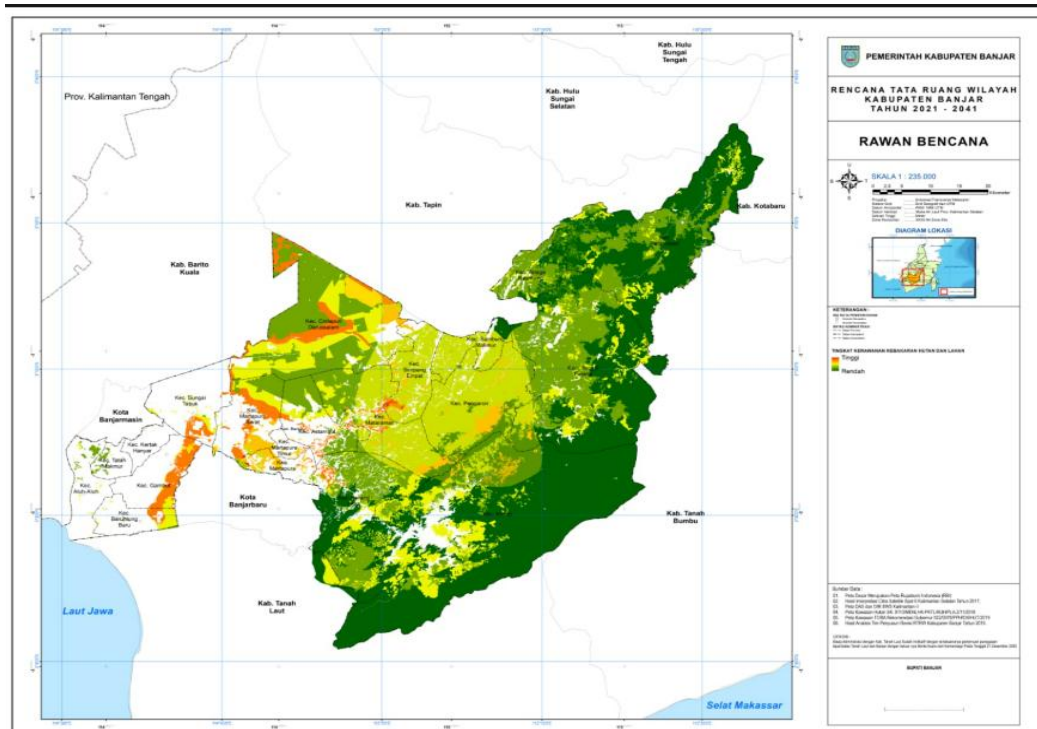
Gambar 2. 13 Peta Kerawanan Bencana Puting Beliung Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021-2041

4. Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Banjar umumnya berada pada wilayah dengan lahan kering, gambut, atau area yang rentan terhadap aktivitas pembukaan lahan. Kawasan rawan kebakaran terdapat di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan gambut, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Aluh-Aluh.

Kerawanan kebakaran di wilayah tersebut dipengaruhi oleh kondisi lahan, terutama pada musim kemarau ketika vegetasi menjadi kering dan mudah terbakar. Selain itu, aktivitas manusia seperti pembakaran lahan untuk pertanian juga menjadi faktor utama penyebab kebakaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan seperti pengawasan pembukaan lahan, penyediaan sarana pemadaman, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar risiko kebakaran dapat diminimalkan.



Gambar 2. 14 Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Banjar

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2021 - 2041

2.2 Potensi Sumber Daya Alam

2.2.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032, disebutkan bahwa potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Banjar berdasarkan Rencana Kawasan Strategis Wilayah Penataan Ruang yang diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan ini perlu diprioritaskan pengembangan dan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera terutama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama. Penentuan kawasan strategis kabupaten

lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

Kawasan Strategis Kabupaten berfungsi :

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Untuk mewadahi penataan ruang Kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten ditetapkan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
4. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan kriteria :

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;

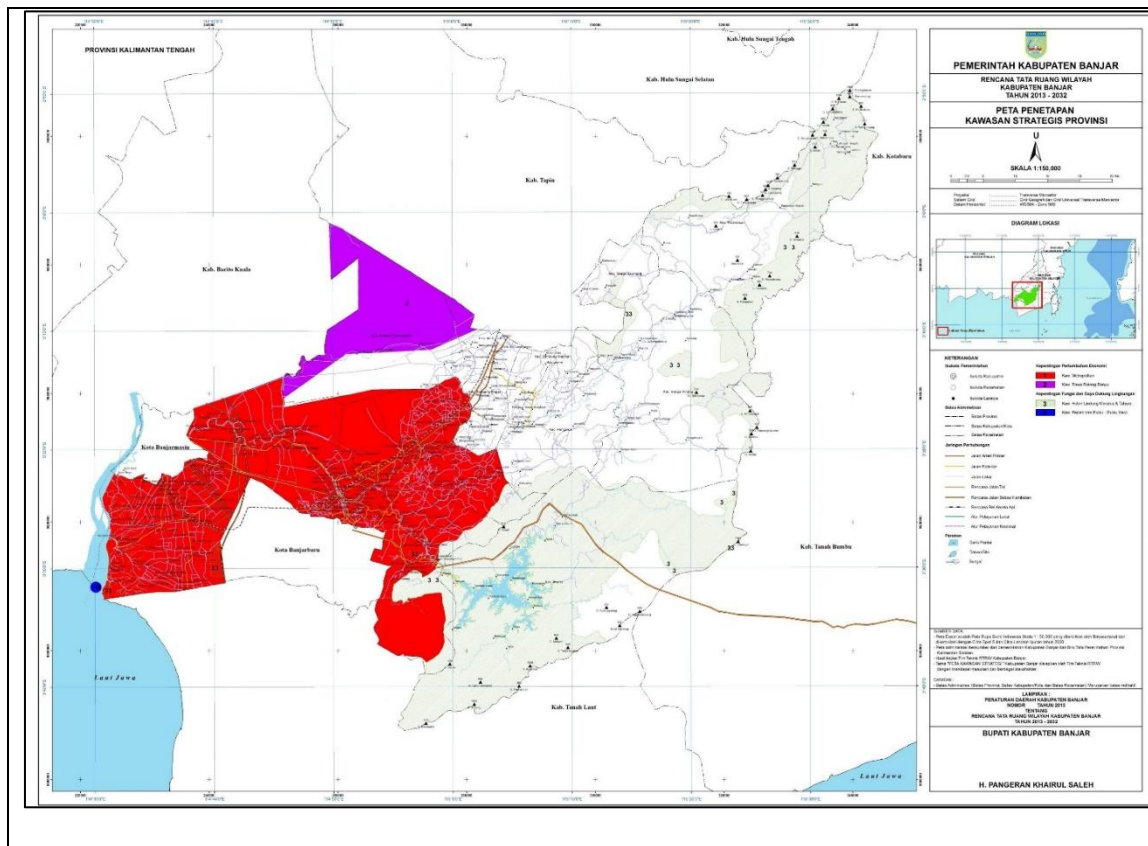
4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Potensi ekspor;
 - d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
5. Merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan:
 - a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki :
 - a. peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b. sumber daya alam strategis;
 - c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;

- d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan :
- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. kawasan rawan bencana alam; atau
 - g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; dan
9. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan. Kawasan strategis merupakan bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Banjar terdiri dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.



Gambar 2. 15 Peta Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Selatan

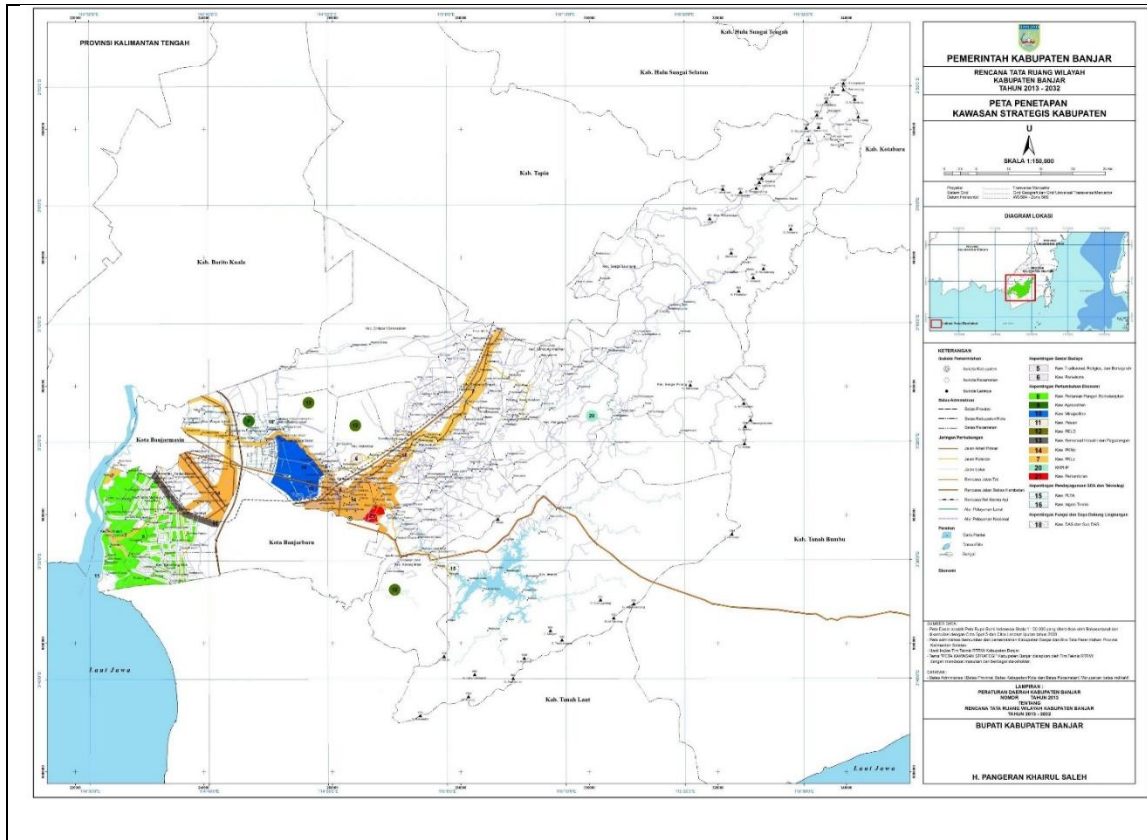
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2013-2032

- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - a. Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi sebagian Kabupaten Banjar di Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan; dan
 - b. Kawasan Rawa Batang Banyu, sebagian Kabupaten Banjar di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Cintapuri Darussalam.
- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Lingkungan
 - a. Kawasan Pegunungan Meratus yaitu kawasan hutan lindung yang memanjang dari Kabupaten Kota Baru sampai dengan Kabupaten Banjar termasuk Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sultan Adam di Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan; dan

- b. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan terbuka sepanjang pantai timur - tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya di Kabupaten Banjar.
- Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara
Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara terdiri atas :
 - a. Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan pulau-pulau kecil sebagai daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan dan daerah industri pertahanan;
 - b. Kawasan tertentu di pegunungan meratus sebagai daerah pertahanan darat dan pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba persenjataan.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten yang ada di Kabupaten Banjar terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.



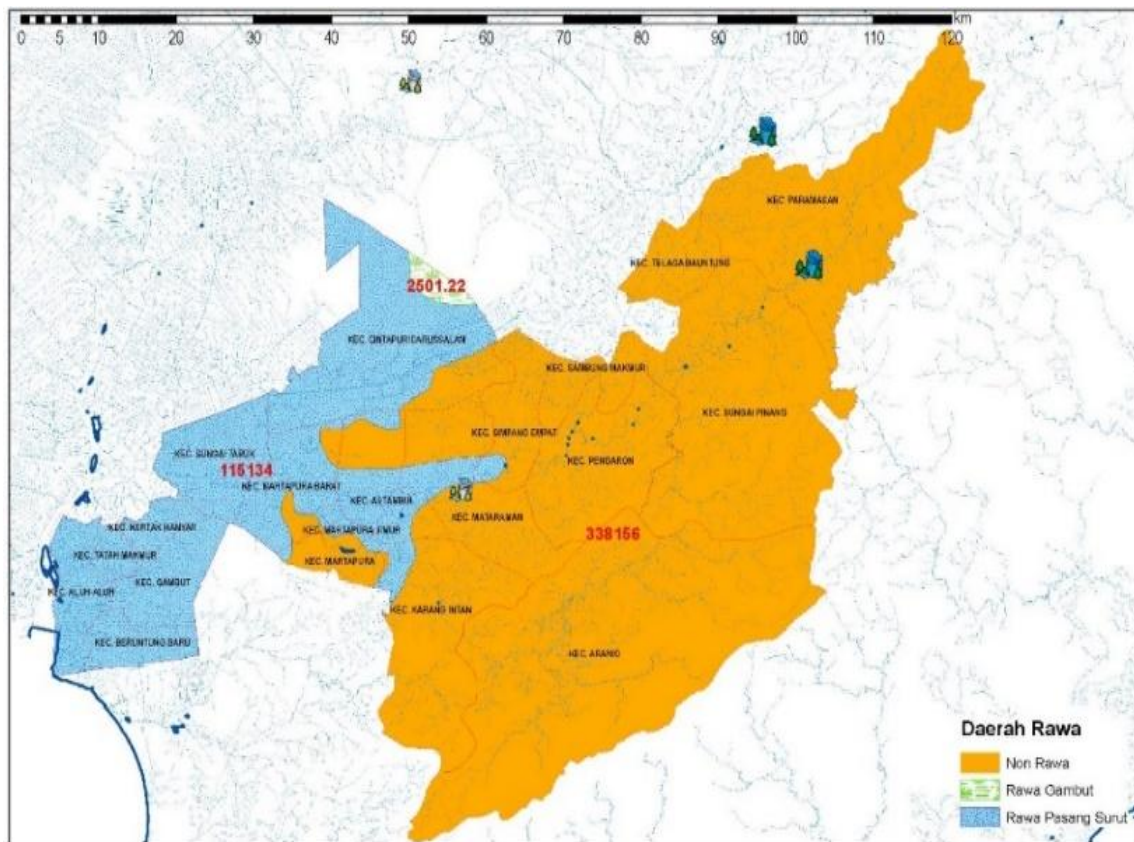
Gambar 2. 16 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Banjar
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 2013-2032

- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
- a. Kawasan Perkotaan PKNp Martapura;
 - b. Kawasan Perkotaan PKLp Kertak Hanyar-Gambut, Simpang Empat, Sungai Tabuk dan Aluh-Aluh;
 - c. Kawasan Perkantoran di Kecamatan Martapura, dan sebagian Kecamatan Karang Intan;
 - d. Kawasan Komersial dan Pergudangan Jalan A. Yani dan Jalan Lingkar Selatan;
 - e. Kawasan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (pengembangan Padi) di Kecamatan Gambut dan Sekitarnya;
 - f. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sungai Tabuk;
 - g. Kawasan Perikanan Budidaya Minapolitan di Cindai Alus Kecamatan Martapura dan Martapura Barat;

- h. Kawasan Pengembangan Ekonomi Lokal Perkebunan Karet Rakyat di Kecamatan Karang Intan, Mataraman, Astambul, Martapura Barat;
- i. Kawasan Pesisir di Kecamatan Aluh-Aluh; dan
- j. Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KKPHP).
- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
 - c. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala kabupaten.
 - e. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya berupa Kawasan tradisional, religius dan bersejarah Martapura, Teluk Selong, Kalampaian dan kawasan pariwisata Lok Baintan.
- Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
 - a. Kawasan PLTA Ir. P.M. Noor;
 - b. Kawasan Irigasi Teknis.
- Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan
Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung Lingkungan berupa Kawasan Sub DAS Martapura, Sub DAS Riam Kanan, Sub DAS Riam Kiwa, dan Sub DAS Barito Hilir.

Berdasarkan kondisi hidrologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati oleh beberapa sungai besar dan juga sungai kecil. Beberapa sungai besar tersebut meliputi sungai Martapura, sungai Riam Kanan dan sungai Riam Kiwa. Kondisi hidrologi Kabupaten Banjar

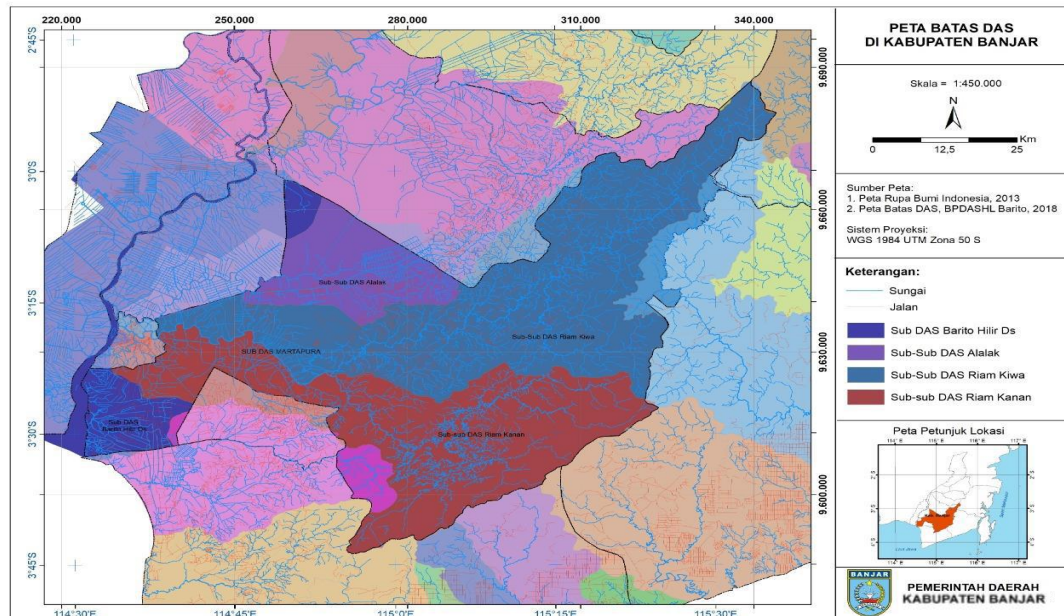
dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya oleh curah hujan, dan terdapat daerah rawa yang terdiri dari 3 bagian kedalaman, yaitu kedalaman air tanah 90cm (66,45%), kedalaman 60-90 (18,72%), dan kedalaman 30-60 (14,38%).



Gambar 2. 17 Daerah Rawa di Kabupaten Banjar

Sumber : PUPR dan Pertanahan Kabupaten Banjar, 2022

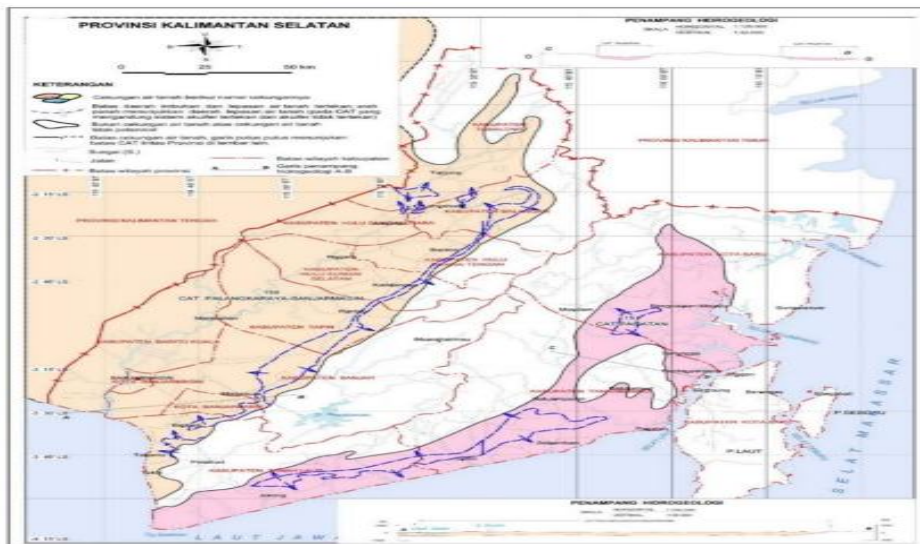
Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura Kabupaten Banjar mempunyai luas sekitar 453,88 km² atau 45.388 hektar, dengan sungai utamanya yang keluar dari sungai Riam Kanan melewati kota Martapura sepanjang 36.566 m, serta jika dihitung termasuk anak anak sungainya mempunyai jumlah panjang 375,91 Km, sehingga tingkat kerapatan sungainya 0.828 km/km². Beda tinggi dari Hulu ke Hilir adalah 8,00 m, sehingga diperoleh gradien sungai sebesar 0.022%. DAS Martapura adalah jenis DAS yang berbentuk paralel yang tersusun dari percabangan dua sub-DAS maupun sungai yang cukup besar di bagian hulu, tetapi menyatu di bagian hilirnya. DAS Martapura adalah sub-DAS dari DAS Barito yang merupakan bagian dari WS (Wilayah Sungai) Barito.



Gambar 2. 18 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Banjar

Sumber : PUPR dan Pertanahan Kabupaten Banjar, 2022

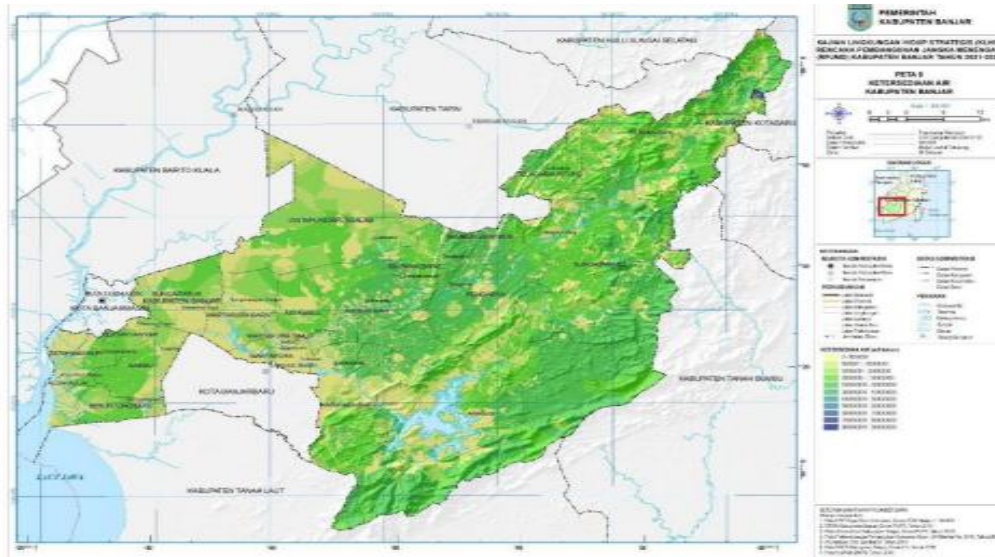
Pada Tahun 2022 di Kabupaten Banjar curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret sebanyak 25 hari hujan dengan jumlah curah hujan sebanyak 407,3 mm. Sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada Bulan Agustus dan Juli dengan curah hujan masing masing sebanyak 11 dan 17 hari. Selama periode 2018-2022 curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember – Desember dan Januari hingga bulan April, rata-rata selama curah hujan diatas 200 mm per bulan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019 curah hujan rendah yaitu sebesar 147 mm, dari dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Banjar, dapat dilihat bahwa wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Banjar memiliki sumber daya air tanah yang relatif cukup baik dengan cakupan area kategori sedang sebesar 79,41% atau sekitar 366.297,12 ha yang merupakan bagian dari wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Palangkaraya-Banjarmasin. Daerah bawahan (low land) Kabupaten Banjar sebagian bagian paling bawah dari morfologi gunung secara hidrogeomorfologi berfungsi sebagai daerah pencadangan air tanah (storage ground water) dan daerah penurapan air tanah (discharge area) yang berperan sebagai cekungan hidrogeologi dengan akuifer yang potensial dan penyebaran luas. Lebih rinci sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 2. 19 Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Banjar

Sumber: BPS Kab. Banjar, 2017 – 2022, data diolah

Wilayah dengan penyedia air paling baik di Kabupaten Banjar didominasi kelas jasa lingkungan tinggi adalah Kecamatan Martapura Timur 71,65% atau seluas 1.607,3 ha. Sedangkan wilayah dengan pemurnian air yang buruk didominasi kelas jasa lingkungan rendah adalah Kecamatan Beruntung Baru yang didominasi kelas jasa lingkungan rendah 54,74% atau seluas 3.047,27 ha. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan – kebutuhan (*supply – demand*) diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki ketersediaan air terbesar di Kabupaten Banjar adalah Kecamatan Aranio ketersediaan sebesar 1.345.567.741 m³/tahun dengan jumlah rasio ketersediaan dan kebutuhan kecamatan ini mencapai 39,67. Artinya semakin besar rasio ketersediaan, maka potensi terjadinya kekurangan air tidak terjadi. Lebih rinci sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 2. 20 Peta Ketersediaan Air Kabupaten Banjar
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, 2023

2.2.2 Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil analisa kondisi keruangan fisik dan sosial wilayah dapat dirumuskan beberapa potensi sumber daya alam Kabupaten Banjar, yakni:

1. Kabupaten Banjar memiliki sumber daya air yang melimpah selain sungai, yaitu Bendungan Riam Kanan seluas 161.993 Ha. Beberapa sungai besar yang mengalir sepanjang tahun antara lain Sungai Alalak, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa. Sungai yang membentuk daerah/wilayah Aliran sungai adalah Riam Kanan, Riam Kiwa dan Alalak. Potensi sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata, pendukung kegiatan budidaya pertanian dan mendukung kawasan minapolitan serta sebagai pendukung transportasi di wilayah Kabupaten Banjar;
2. Sebagian besar wilayah berupa hutan dengan luas 86.510 Ha yang memiliki keanekaragaman hayati merupakan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Banjar;
3. Adanya potensi sumber daya alam berupa bahan galian dan mineral berupa batu bara, emas, dan batu mulia;
4. Potensi industri kecil yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Banjar yaitu industri kecil penggosokan batu mulia, penggosokan batu permata, serta industri kecil kerajinan emas dan perak; II-21 | Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029

5. Potensi pertanian yang besar khususnya komoditi padi mendukung pengembangan kawasan agropolitan;
6. Kabupaten Banjar merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan Banjar Bakula;
7. Terdapat beberapa kawasan yang memiliki pertumbuhan cepat, Kawasan tersebut berbatasan dengan Kota Banjarmasin. Kawasan tersebut antara lain Gambut, Kertak Hanyar, dan Sungai Tabuk;
8. Posisi Kabupaten Banjar sebagai penghubung utama antarwilayah di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Banjar merupakan salah satu simpul kegiatan perekonomian wilayah di Kalimantan Selatan.
9. Potensi industri kecil yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Banjar yaitu industri kecil penggosokan batu mulia, penggosokan batu permata, serta industri kecil kerajinan emas dan perak di Martapura di Kabupaten Banjar, selain itu terdapat beberapa potensi industri di Kabupaten Banjar, diantaranya:
 - a. Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan
 - b. Industri Rubber Sheet Smoked (RSS) di Kecamatan Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai PinangIndustri Perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh

2.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kondisi ketenagalistrikan di Kabupaten Banjar merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan layanan listrik berperan dalam menunjang berbagai kebutuhan dasar, seperti penerangan, komunikasi, serta operasional kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.■

Secara umum, kondisi ketenagalistrikan di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang positif, yang ditandai dengan meningkatnya cakupan layanan listrik dan jumlah pelanggan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap energi listrik sebagai kebutuhan dasar.■

2.3.1 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi di Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Pada tahun 2021, rasio elektrifikasi tercatat sebesar 99,41 persen, kemudian mencapai 100 persen pada tahun 2022, dan bertahan hingga sekarang.

Tabel 2. 9 Rasio Elektrifikasi di Kab. Banjar

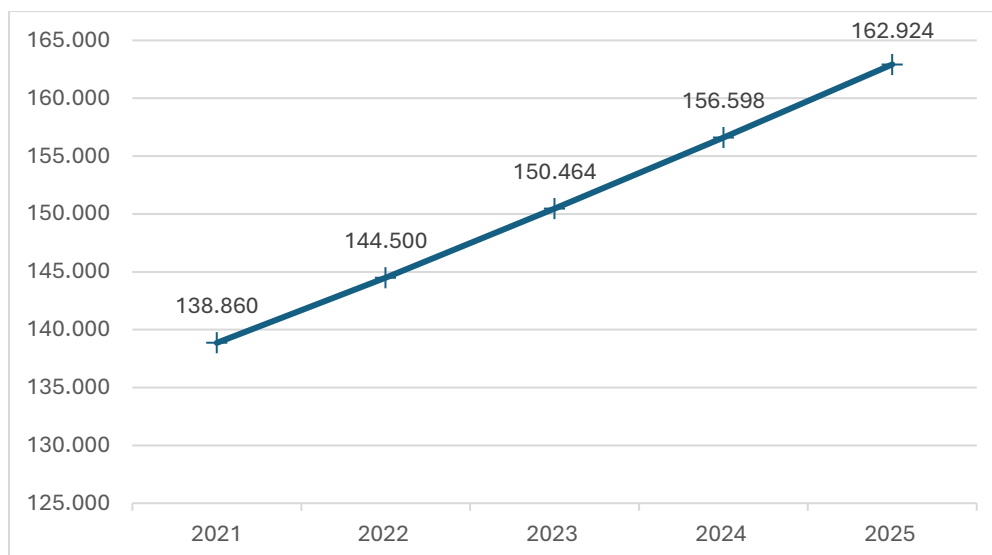
Rasio Elektrifikasi	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Banjar	99,41%	100,85%	100%	100%	100%

Sumber Data PT PLN Tahun 2026

Capaian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 100 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kabupaten Banjar telah terlayani listrik. Meskipun demikian, capaian rasio elektrifikasi yang tinggi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan listrik yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, selain mempertahankan capaian akses, aspek keandalan dan kualitas layanan tetap menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat.

2.3.2 Jumlah Pelanggan PT. PLN (Persero) di Kabupaten Banjar

Jumlah pelanggan listrik PT PLN (Persero) di Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2021–2025. Pada tahun 2021 jumlah pelanggan tercatat sebanyak 138.860 pelanggan, meningkat menjadi 144.500 pelanggan pada tahun 2022, 150.464 pelanggan pada tahun 2023, 156.598 pelanggan pada tahun 2024, dan mencapai 162.924 pelanggan pada tahun 2025.



Gambar 2. 21 Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) di Kab. Banjar tahun 2021-2025

Sumber : PT PLN, 2026

Peningkatan jumlah pelanggan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan kebutuhan listrik yang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, pembangunan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain pelanggan rumah tangga, peningkatan juga terjadi pada pelanggan dari sektor usaha, perdagangan, dan jasa.

Secara umum, tren peningkatan jumlah pelanggan listrik mencerminkan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap energi listrik sebagai kebutuhan dasar, sekaligus sebagai penunjang utama dalam mendorong aktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Banjar.

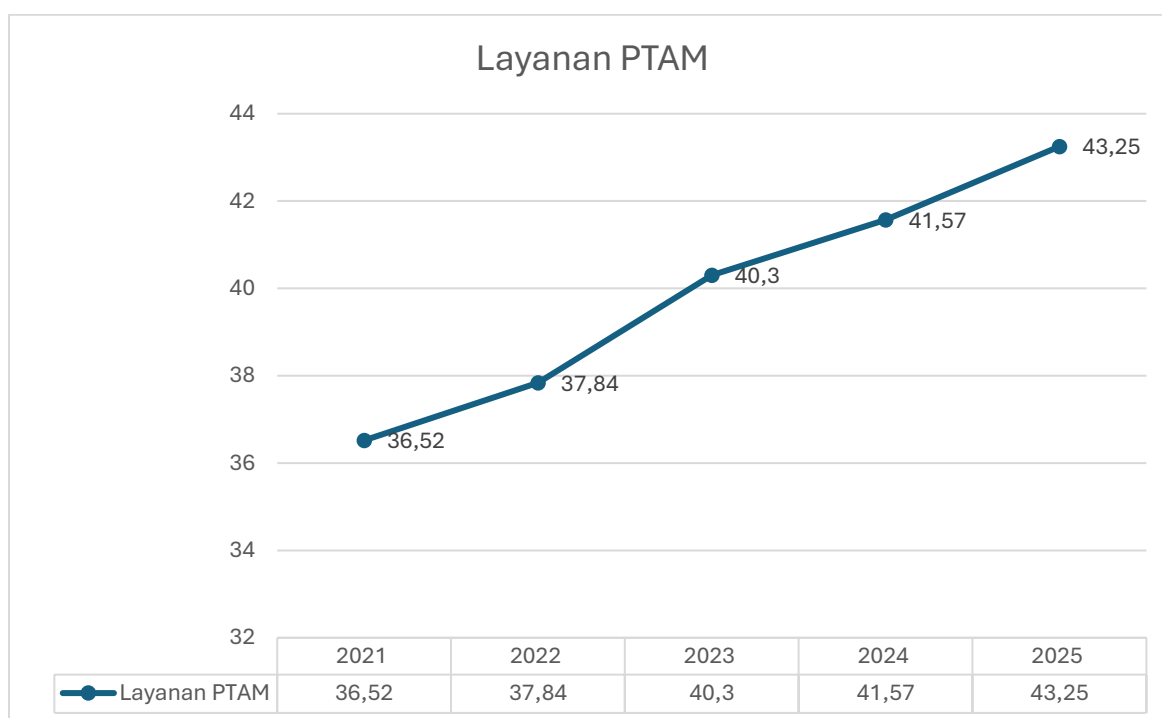
Air Bersih

Penyediaan layanan air bersih dan air minum di Kabupaten Banjar terus menjadi prioritas pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung permukiman yang sehat serta layak huni. Pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan melalui pengembangan jaringan perpipaan PTAM, optimalisasi sumber air baku, serta penyediaan layanan air bersih non-perpipaan di wilayah yang belum terjangkau layanan. Kondisi geografis wilayah yang didominasi lahan basah dan sebaran permukiman yang cukup luas menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan akses layanan air minum. Namun demikian, melalui pembangunan infrastruktur air bersih, peningkatan kapasitas pelayanan, dan dukungan program

sanitasi lingkungan, akses masyarakat terhadap air minum layak secara bertahap terus mengalami peningkatan sehingga turut berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat dan ketahanan lingkungan daerah.

2.3.3 Cakupan Pelayanan PT. Air Minum Intan Banjar

Cakupan layanan PTAM di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan penyediaan akses air minum perpipaan sebagai bagian dari pemenuhan layanan dasar masyarakat. Peningkatan layanan PTAM menjadi indikator penting dalam mendukung kualitas permukiman layak huni, kesehatan masyarakat, serta pemerataan akses infrastruktur dasar di wilayah perkotaan maupun perdesaan.



Gambar 2. 22 Cakupan Layanan PT. AM Tahun 2021-2025

Sumber Data PT. AM Intan Banjar Tahun 2026

Data cakupan layanan PTAM tahun 2021–2025, terlihat tren peningkatan yang konsisten dari 36,52% pada tahun 2021 menjadi 43,25% pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya perluasan akses layanan air bersih kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan terhadap air bersih yang layak dan terjangkau.

Pertumbuhan cakupan layanan sebesar hampir 7% dalam lima tahun mengindikasikan bahwa permintaan air bersih terus bertambah, seiring dengan

pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta peningkatan aktivitas ekonomi. Kondisi ini juga menegaskan bahwa air bersih bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi telah menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat dan produktivitas wilayah.

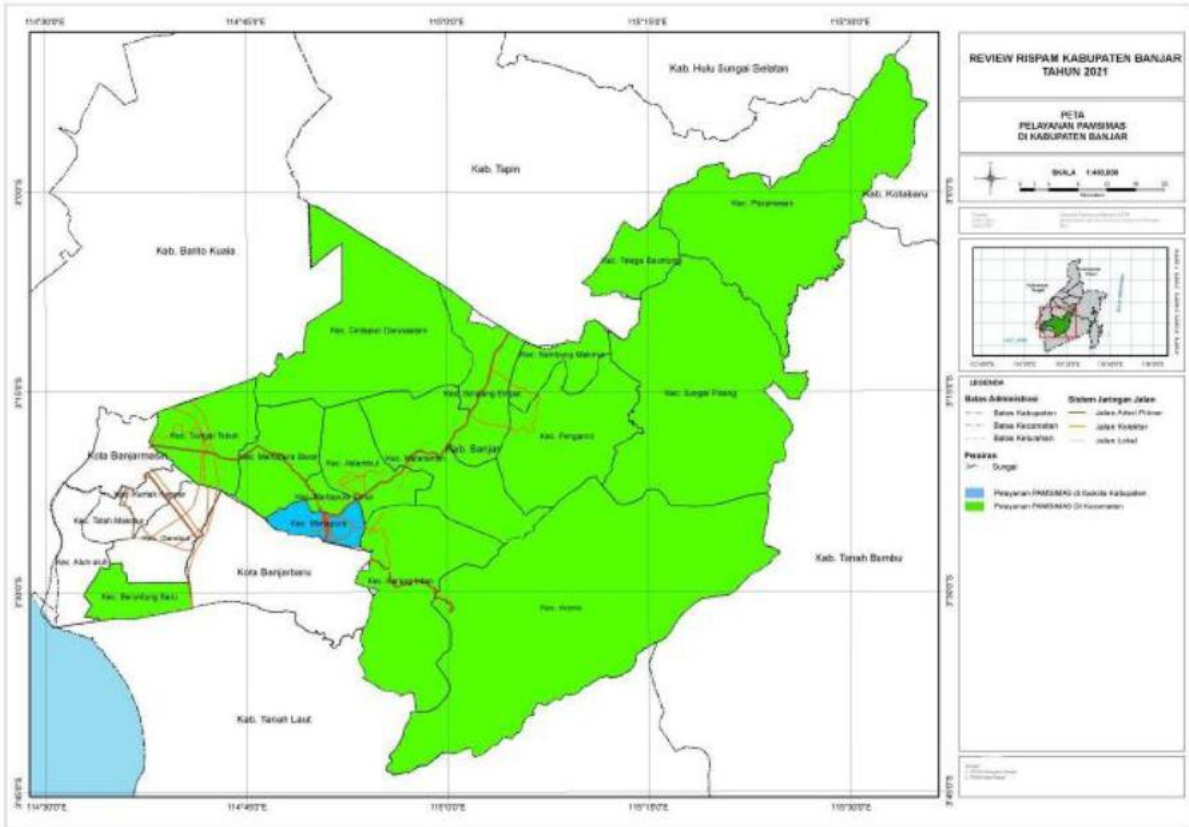
Di sisi lain, capaian yang masih berada pada kisaran 43,25% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari separuh masyarakat masih belum terlayani secara optimal oleh jaringan PTAM. Hal ini menandakan adanya gap pelayanan yang perlu segera direspons melalui percepatan pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur air minum.

Pelayanan PTAM mencakup 16 Kecamatan di Kabupaten Banjar, adapun kecamatan yang belum mendapat layanan PTAM adalah Kecamatan Paramasan, Kecamatan Telaga Bauntung, Kecamatan Aranio, dan Kecamatan Cintapuri Darusalam.

Tren peningkatan cakupan layanan PTAM tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan, tetapi juga mempertegas urgensi untuk terus meningkatkan investasi dan pengelolaan sektor air bersih. Upaya ini menjadi krusial guna memastikan terpenuhinya kebutuhan air bersih secara merata, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif.

2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan Yang Teraliri/Belum Teraliri Oleh PT Air Minum Intan Banjar

Layanan air minum di Kabupaten Banjar sebagian besar masih ditopang oleh sistem air minum berbasis masyarakat, yang saat ini menjangkau 161 desa dari total 277 desa yang ada. Kondisi ini menunjukkan peran penting partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan dasar, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan perpipaan skala besar. Sistem berbasis masyarakat tersebut umumnya dikelola secara swadaya dengan memanfaatkan sumber air lokal, sehingga mampu menjawab kebutuhan dasar air minum secara fleksibel dan kontekstual. Namun demikian, masih terdapat desa yang belum terlayani secara optimal, sehingga diperlukan penguatan dukungan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas sarana prasarana, pembinaan kelembagaan pengelola, serta integrasi dengan sistem penyediaan air minum yang lebih berkelanjutan dan aman.



Gambar 2. 23 Peta Pelayanan Air Minum PAMSIMAS Kabupaten Banjar
Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Banjar

Tabel 2. 10 Cakupan Non PT AM

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan NON PTAM (%)	49,68	49,56	48,53	34,68	33,66

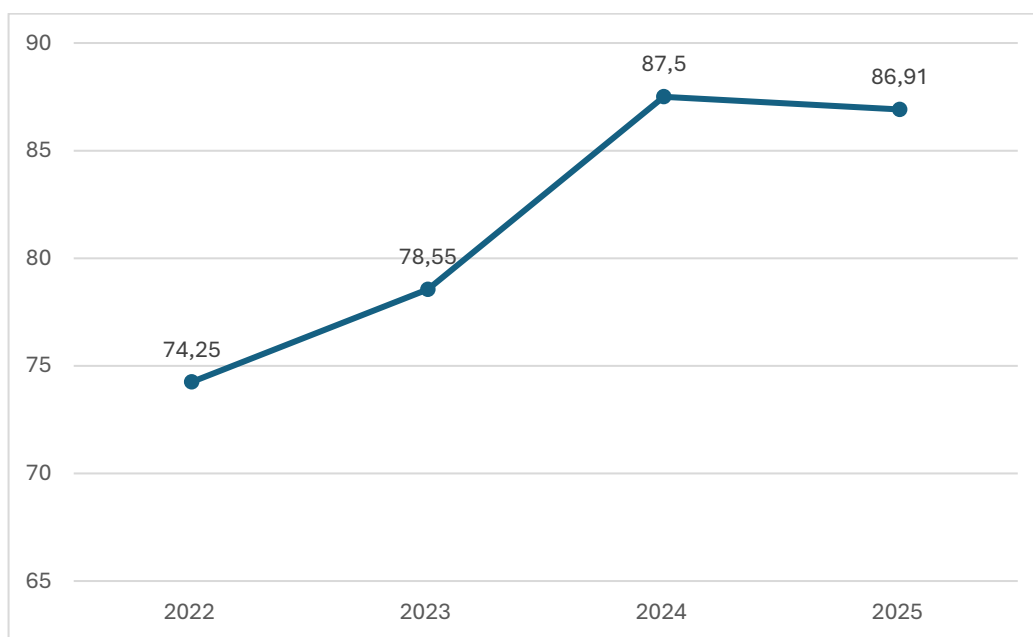
Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Banjar

Cakupan layanan air minum non perpipaan (non-PTAM) di Kabupaten Banjar menunjukkan tren relatif stabil pada periode 2021–2023, masing-masing sebesar 49,68%, 49,56%, dan 48,53%. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 34,68% dan 33,66%. Penurunan ini tidak semata-mata mencerminkan berkurangnya akses layanan, melainkan dipengaruhi oleh adanya koreksi dalam metode perhitungan jumlah penerima manfaat yang lebih akurat, serta ditemukannya sejumlah sarana air minum berbasis masyarakat yang tidak berfungsi

secara optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan keberlanjutan layanan melalui pemeliharaan infrastruktur, penguatan kelembagaan pengelola, serta validasi data yang berkelanjutan agar cakupan layanan dapat terukur secara lebih tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.3.5 Capaian Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Banjar

Layanan infrastruktur dasar di Kabupaten Banjar secara umum tercermin melalui capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas dan ketersediaan layanan dasar daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat pelayanan pada berbagai sektor infrastruktur, seperti jalan, air minum, sanitasi, permukiman, drainase, dan layanan dasar lainnya yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Peningkatan nilai indeks menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan, aksesibilitas infrastruktur, serta meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik. Meski demikian, tantangan pemerataan layanan antarwilayah, kondisi geografis lahan basah, dan kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan perdesaan masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur dasar secara berkelanjutan.



Gambar 2. 24 Indeks Infrastruktur Kabupaten Banjar, 2022-2025

Sumber: Analisis Data, 2026

Capaian pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Banjar menunjukkan kinerja yang cukup positif, tercermin dari Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang mencapai angka 71,05. Nilai ini mengindikasikan bahwa secara umum masyarakat telah merasakan manfaat dari penyediaan layanan infrastruktur, baik dalam aspek aksesibilitas, kualitas, maupun keberlanjutan layanan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan irigasi, air bersih, dan sanitasi dinilai telah mampu mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara memadai.

Meskipun demikian, capaian ini juga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan agar lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah. Perbedaan kondisi geografis dan tingkat perkembangan antar kawasan menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan pelayanan infrastruktur yang inklusif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas perencanaan, pemeliharaan, serta integrasi program lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong peningkatan indeks kepuasan di masa mendatang.

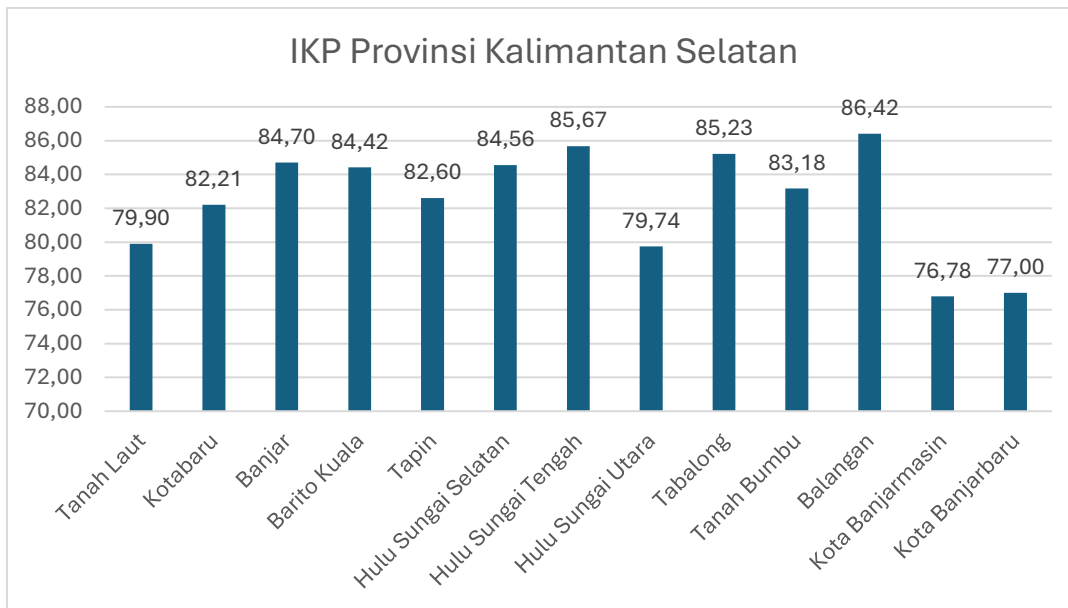
Secara keseluruhan, nilai indeks sebesar 71,05 menempatkan kinerja layanan infrastruktur Kabupaten Banjar pada kategori baik, sekaligus menjadi landasan yang kuat untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

2.3.6 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tergambar dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah, dilakukan pengukuran terhadap aspek-aspek pembentuk ketahanan pangan.

Badan Pangan Nasional (BAPANAS) telah menetapkan 3 (tiga) aspek dari ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan. Dimana nilai ketiga aspek tersebut merupakan angka komposit yang menjadi nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Dari tabel terlihat posisi Kabupaten Banjar tahun 2025 berada di angka 84,70. Angka ini mendudukkan Kabupaten Banjar di posisi ke 4 dengan IKP tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan

setelah Balangan, Hulu Sungai Tengah dan Tabalong. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan IKP sebesar 3,16 poin, dimana tahun 2024 IKP Kabupaten Banjar adalah 81,54. Kriteria IKP Kabupaten Banjar berada di kategori Sangat Tahan. Kriteria daerah dengan kategori Sangat Tahan menunjukkan bahwa kabupaten Banjar memiliki pemenuhan nilai yang tinggi dalam pencapaian 3 (tiga) aspek Ketahanan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan.



Gambar 2. 25 Grafik IKP Kab/Kota Prov Kalsel tahun 2025

Sumber BAPANAS tahun 2026 data diolah

Dari tabel terlihat posisi Kabupaten Banjar tahun 2025 berada di angka 84,70. Angka ini mendudukkan Kabupaten Banjar di posisi ke 4 dengan IKP tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Balangan, Hulu Sungai Tengah dan Tabalong. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan IKP sebesar 3,16 poin, dimana tahun 2024 IKP Kabupaten Banjar adalah 81,54. Kriteria IKP Kabupaten Banjar berada di kategori Sangat Tahan. Kriteria daerah dengan kategori Sangat Tahan menunjukkan bahwa kabupaten Banjar memiliki pemenuhan nilai yang tinggi dalam pencapaian 3 (tiga) aspek Ketahanan Pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan dan aspek pemanfaatan pangan.

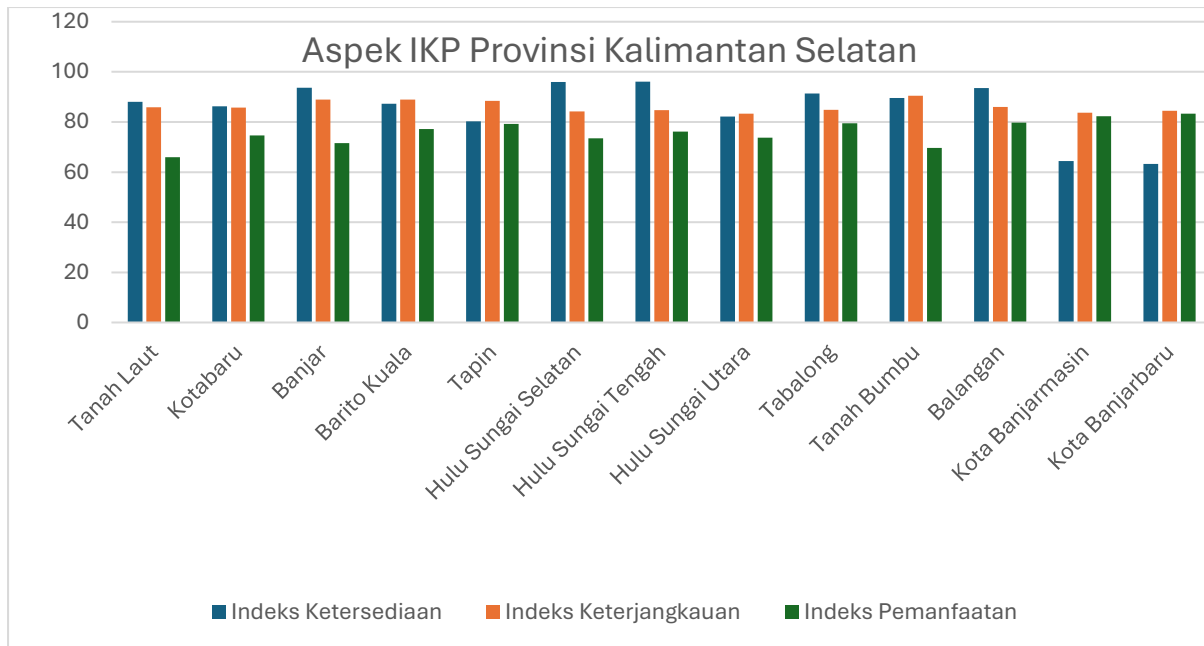
Tabel 2. 11 Capaian Komponen Indeks Ketahanan Pangan di Kab. Banjar

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Indeks Ketersediaan	Indeks Keterjangkauan	Indeks Pemanfaatan	Indeks Komposit	Peringkat
14	Tanah Laut	2025	88,07	85,81	65,9	79,9	52
15	Kotabaru	2025	86,3	85,75	74,64	82,21	31
16	Banjar	2025	93,65	88,91	71,61	84,7	9
17	Barito Kuala	2025	87,21	88,95	77,18	84,42	11
18	Tapin	2025	80,3	88,39	79,19	82,6	25
19	Hulu Sungai Selatan	2025	95,97	84,17	73,52	84,56	10
20	Hulu Sungai Tengah	2025	96,08	84,74	76,17	85,67	6
21	Hulu Sungai Utara	2025	82,13	83,35	73,79	79,74	54
22	Tabalong	2025	91,33	84,83	79,51	85,23	8
23	Tanah Bumbu	2025	89,59	90,41	69,65	83,18	23
24	Balangan	2025	93,48	86,02	79,76	86,42	4
25	Kota Banjarmasin	2025	64,44	83,74	82,28	76,78	124
26	Kota Banjarbaru	2025	63,26	84,47	83,37	77	115

Sumber BAPANAS tahun 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian akses tertinggi dari komponen IKP di Kabupaten Banjar adalah pada aspek ketersediaan,yaitu 93,65. Hal ini relevan dengan proporsi jumlah penduduk yang lebih kecil dibanding luas wilayah serta potensi pertanian yang sangat besar. Diposisi kedua ada pada aspek keterjangkauan di angka 88,91. Aspek keterjangkauan meliputi layanan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pusat kesehatan masyarakat, pusat perdagangan dan akses distribusi. Posisi terakhir ditempati oleh aspek pemanfaatan pada angka 71,61.

Aspek pemanfaatan yang masih rendah ini mencerminkan bahwa konsumsi pangan di Kabupaten Banjar masih belum beragam, hanya terfokus pada hasil panen langsung tanpa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menghasilkan produk yang lebih beragam.



Gambar 2. 26 Grafik Aspek IKP Prov. Kalsel

Sumber BAPANAS tahun 2026 data diolah

2.3.7 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjar

Tanaman pangan kaya akan karbohidrat dan protein. dibudidayakan oleh manusia dengan tujuan utama sebagai sumber makanan utama (makanan pokok). Berdasarkan jenisnya, tanaman pangan dikelompokkan menjadi Sereal/Biji-bijian (Padi, Jagung, Gandum, dan Sorghum), Polong-polongan/Kacang-kacangan (Kedelai, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau) dan Umbi-umbian (Singkong/Ubi Kayu), Ubi Jalar, Kentang, dan Talas)

Jumlah produksi tanaman pangan adalah total hasil panen dari suatu komoditas tanaman pangan yang dihasilkan dalam suatu wilayah (bisa berupa desa, kabupaten, provinsi, atau negara) dalam jangka waktu tertentu (biasanya dihitung per satu tahun).

Berikut data jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Banjar selama periode 2021 hingga 2025:

Tabel 2. 12 Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjar

Jenis	2021	2022	2023	2024	2025
Padi (Ton)	133.271	127.136	92.021	147.593	166.001
Jagung (Ton)	N/A	5.386	N/A	309,04	467

Sumber: BPS Kab. Banjar Kabupaten Banjar dalam Angka, 2021-2025 data diolah

Produksi padi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, namun menunjukkan lonjakan yang sangat positif di dua tahun terakhir. Tahun 2021, produksi padi berada di angka 133.271 ton, menurun tipis pada 2022 menjadi 127.136 ton. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2023, di mana produksi sebesar 92.021 ton (turun sekitar 27,6% dari tahun sebelumnya). Penurunan tajam di tahun 2023 ini secara umum biasanya berkaitan erat dengan faktor alam (fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang atau serangan hama). Produksi padi berhasil bangkit di 2024, melonjak ke 147.593 ton. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan produksi sebesar 166.001 ton. Ini menandakan adanya pemulihan cuaca yang mendukung, peningkatan produktivitas lahan, atau keberhasilan program bantuan pertanian seperti pupuk dan irigasi

Untuk komoditas jagung terdapat data kosong (N/A) pada tahun 2021 dan 2023, namun menunjukkan pola pertumbuhan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 produksi berada di kisaran 309,04 ton, dan meningkat menjadi 467 ton pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai ribuan, angka di tahun 2024-2025 mengalami penurunan skala volume, namun secara performa *year-on-year* (2024 ke 2025) produksi jagung mengalami kenaikan sebesar 51%.

Secara keseluruhan, tahun 2025 menjadi tahun keemasan (puncak produksi) bagi kedua komoditas tersebut dalam periode 5 tahun terakhir. Sektor pertanian memperlihatkan ketahanan yang baik karena mampu bangkit dari keterpurukan tahun 2023 (untuk padi) dan mencetak pertumbuhan yang konsisten menuju tahun 2025.

Upaya meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya padi dan jagung, di Kabupaten Banjar terus digalakkan secara intensif oleh pemerintah daerah, Dinas Pertanian, serta instansi terkait. Ini mengingat Kabupaten Banjar menempati posisi sebagai salah satu lumbung pangan terbesar kedua di Kalimantan Selatan setelah Barito Kuala.

Berikut adalah beberapa upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kedua komoditas tersebut:

Produksi padi di Kabupaten Banjar menunjukkan tren positif (meningkat dari 147.593 ton pada 2024 menjadi 166.001 ton pada 2025). Strategi yang diterapkan meliputi:

- Perluasan Areal Tanam melalui Cetak Sawah: Pemerintah daerah gencar melakukan program cetak sawah baru dengan target potensi areal mencapai ribuan hektare guna menambah luas lahan produktif.
- Optimalisasi Lahan Rawa dan Lahan Pasang Surut: optimalisasi lahan rawa menjadi lahan pertanian produktif terus dipacu agar petani bisa menanam padi secara berkelanjutan (tidak hanya setahun sekali).
- Budidaya Padi Gogo di Lahan Kering: Di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau irigasi basah (seperti kawasan perbukitan/lahan kering di beberapa kecamatan), pemerintah mendorong penanaman Padi Gogo untuk memanfaatkan potensi lahan kering secara maksimal.
- Penerapan Mekanisasi dan Teknologi Modern: Melalui pendampingan program pertanian modern, petani didorong menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) mulai dari traktor pengolah tanah, mesin pompa air untuk mitigasi kekeringan/iklim, hingga mesin pemanen (*combine harvester*) guna menekan angka kehilangan hasil (*losses*) saat panen.

Komoditas jagung difokuskan baik untuk ketahanan pangan maupun untuk pemenuhan kebutuhan industri pakan ternak. Upayanya meliputi:

- Pemanfaatan Lahan HGU Perkebunan (Intercropping/Tumpang Sari): Salah satu terobosan strategis di Kabupaten Banjar adalah memanfaatkan lahan Hak Guna Usim (HGU) milik perusahaan swasta (seperti perkebunan kelapa sawit) untuk ditanami jagung.
- Optimasi Lahan Masyarakat melalui Program TNI AD: Melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) atau Kerja Sama Ketahanan Pangan, TNI turut membantu masyarakat membersihkan dan mengoptimalkan lahan tidur di beberapa kecamatan untuk ditanami jagung.
- Penggunaan Benih Unggul Varietas Hibrida: Petani disokong dengan bantuan sarana produksi (saprodi) berupa benih jagung hibrida yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap hama, dan adaptif terhadap cekaman iklim.

Meski produksi menunjukkan grafik meningkat, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar tetap fokus mengatasi beberapa hambatan di lapangan:

- Perubahan Iklim: Ancaman kemarau panjang (*El Nino*) atau banjir yang dapat mengganggu kalender tanam.
- Regenerasi Petani dan SDM: Berkurangnya minat generasi muda untuk bertani, sehingga diperlukan modernisasi alat agar bertani terlihat lebih efisien dan menguntungkan.
- Kelembagaan Penyuluh: Penguatan kapasitas kelompok tani secara mandiri agar tetap produktif di tengah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan.

2.4 Lingkungan Hidup Berkualitas

2.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar

Menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banjar menjadi isu krusial yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya tekanan jumlah penduduk. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan yang berfungsi memberikan gambaran ringkas mengenai kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini disajikan dalam bentuk angka yang menunjukkan apakah kualitas lingkungan berada dalam kondisi baik atau sebaliknya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi sumber permasalahan pengelolaan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya meningkatkan nilai indeks tersebut melalui pelaksanaan berbagai proyek strategis guna mengoptimalkan perbaikan kualitas lingkungan, termasuk pada seluruh parameter penyusunnya. Hal ini sejalan dengan tema RKPD Kabupaten Banjar tahun 2027 yaitu Penguatan Sumber Daya Manusia dan ekonomi Berbasis Resiliensi Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan untuk menjawab isu strategis Penguatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Adaptasi Perubahan Iklim. Selain itu juga menunjang prioritas daerah yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan ketangguhan Daerah terhadap Bencana Hidrometeorologi.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan tren perbaikan. Pada tahun 2025, IKLH Kabupaten Banjar mencapai 78,20 dan masuk kategori baik, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 74,59. Kondisi kualitas lingkungan di Kabupaten Banjar sangat dipengaruhi oleh kualitas udara dan air. Kualitas udara kerap terganggu akibat kebakaran hutan dan lahan gambut, yang menyebabkan berkurangnya tutupan lahan sehingga

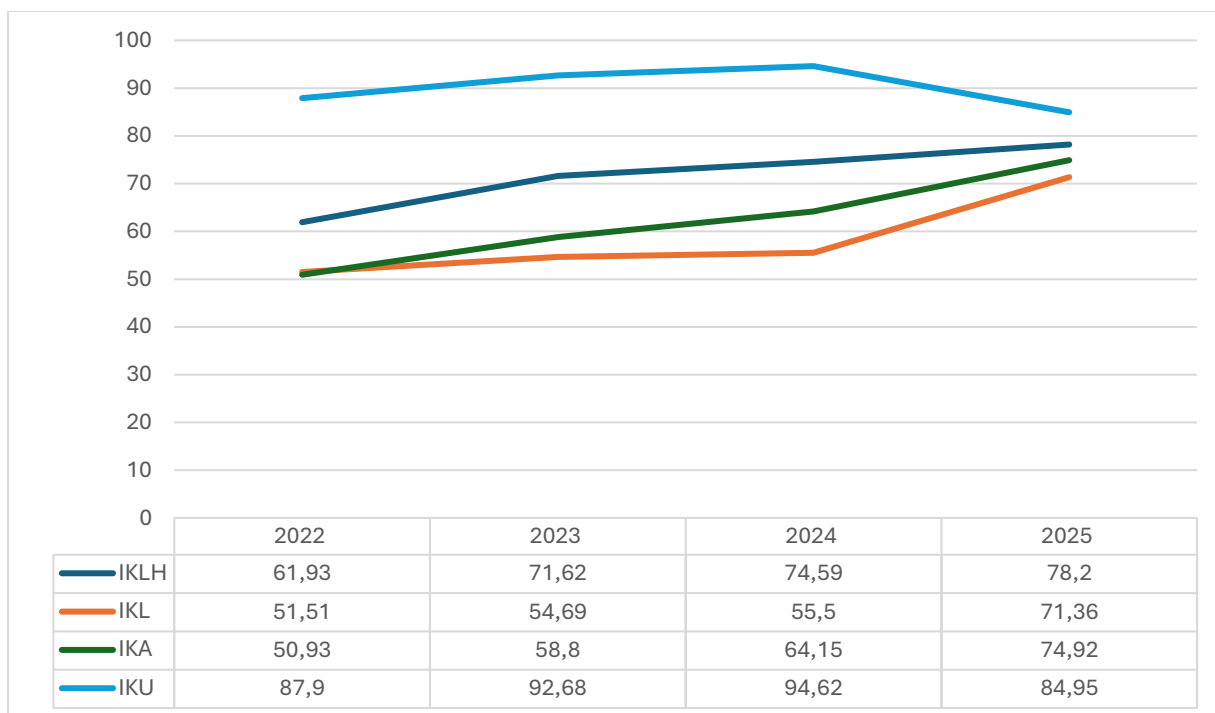
diperlukan intervensi berupa reboisasi di area terdampak, termasuk kawasan bekas tambang. Sementara itu, kualitas air dipengaruhi oleh perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai serta praktik buang air besar sembarangan di sungai. Selain itu, pencemaran dari aktivitas industri, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan, serta perubahan tata guna lahan di wilayah sekitar Kabupaten Banjar turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas air. Peningkatan kualitas lingkungan hidup juga berkaitan erat dengan kondisi kualitas lahan. Alih fungsi lahan yang semakin meningkat, khususnya dari lahan pertanian (sawah) menjadi non-pertanian, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya kualitas lahan di Kabupaten Banjar.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar selama ini telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan lingkungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banjar. Predikat IKLH Kabupaten Banjar sejak Tahun 2023 berada pada predikat Baik dan terus mengalami peningkatan nilai indeksnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 13 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar

Jenis	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Kategori IKLH	Sedang	Baik	Baik	Baik
Indeks Kualitas LH	61,93	71,62	74,59	78,20
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,51	54,69	55,5	71,36
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,93	58,80	64,15	74,92
Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,9	92,68	94,62	84,95

Sumber Data Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Banjar



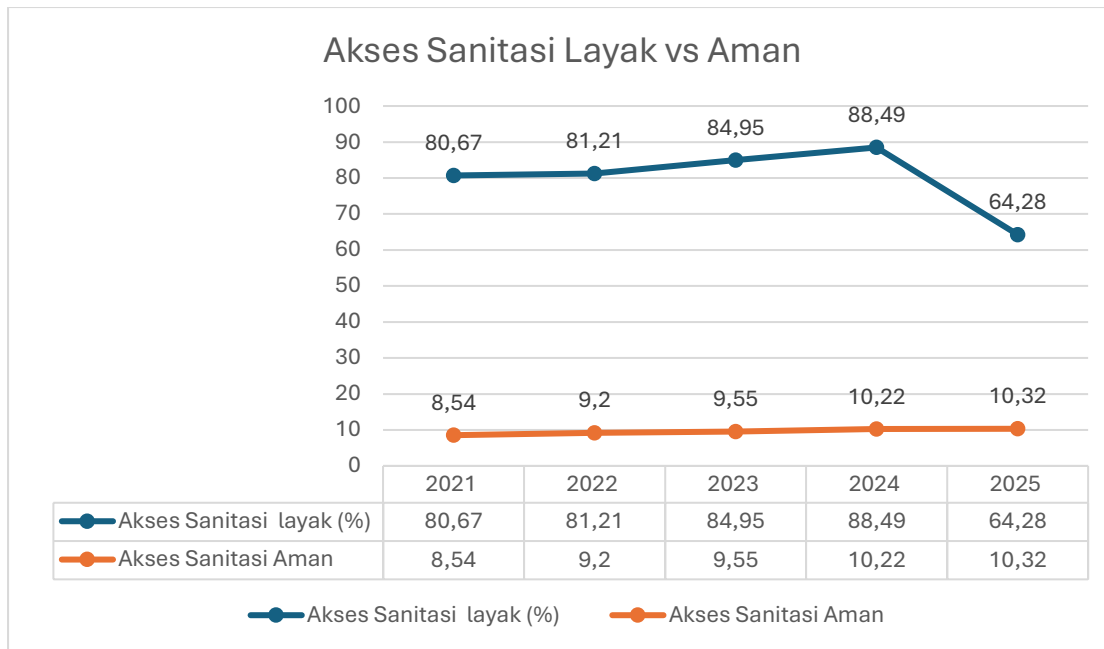
Gambar 2. 27 Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar 2022-2025

Sumber: DPRKPLH, 2026

Berdasarkan tabel tersebut maka capaian IKLH Kabupaten Banjar tahun 2025 telah melampaui target nasional tahun 2026 (77) yakni sebesar 78,20.

2.4.2 Akses Sanitasi Masyarakat Kabupaten Banjar

Sanitasi di Kabupaten Banjar menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan kualitas permukiman dan kesehatan masyarakat, terutama dalam mendukung terwujudnya lingkungan yang layak huni, bersih, dan berkelanjutan. Peningkatan layanan sanitasi dilakukan melalui pengembangan akses sanitasi layak, pengurangan kawasan dengan perilaku buang air besar sembarangan, serta peningkatan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan. Upaya tersebut turut didukung melalui pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, serta sinergi lintas sektor dalam penanganan kawasan permukiman. Meskipun masih terdapat tantangan berupa sebaran permukiman yang luas, karakteristik wilayah lahan basah, dan keterbatasan layanan di beberapa desa, secara umum kondisi sanitasi di Kabupaten Banjar menunjukkan tren perbaikan yang berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan daerah.



Gambar 2. 28 Akses Sanitasi Layak vs Aman

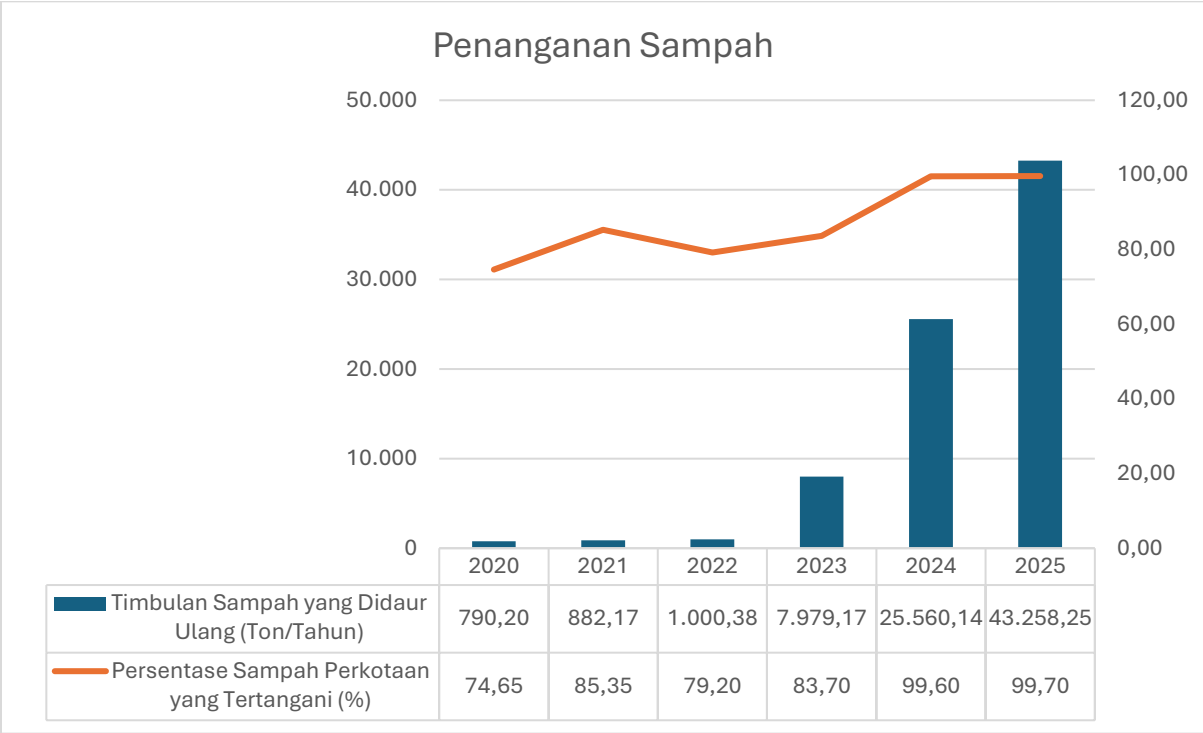
Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Capaian akses sanitasi di Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akses sanitasi layak mengalami kenaikan konsisten dari 80,67% pada tahun 2021 menjadi 88,49% pada tahun 2024, dan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2025, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Sementara itu, akses sanitasi aman juga menunjukkan peningkatan bertahap dari 8,54% pada tahun 2021 menjadi 10,32% pada tahun 2025, meskipun pertumbuhannya relatif lebih lambat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah mengakses sanitasi layak, tantangan masih terdapat pada peningkatan kualitas layanan menuju standar sanitasi aman.

Peningkatan capaian tersebut juga tidak terlepas dari semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak dan aman bagi kesehatan serta kualitas lingkungan. Kesadaran ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga fasilitas sanitasi, mengubah perilaku hidup bersih dan sehat, serta mendukung program-program pemerintah daerah. Kondisi ini pada akhirnya membentuk kemitraan yang semakin kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan sanitasi menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran

2.4.3 Capaian Penanganan Persampahan Kabupaten Banjar

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase sampah perkotaan yang tertangani, dari 74,65 persen pada tahun 2020 menjadi 99,60 persen pada tahun 2024 dan mencapai 99,7 persen pada tahun 2025.



Gambar 2. 29 Capaian Penanganan Sampah di Kabupaten Banjar

Sumber: DPRKPLH, 2026

Peningkatan capaian penanganan sampah tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang atau terolah. Pada tahun 2020 jumlah sampah yang didaur ulang tercatat sebesar 790,20 ton per tahun dan terus meningkat hingga mencapai 43.258,25 ton per tahun pada tahun 2025. Kenaikan yang cukup signifikan terutama terjadi sejak tahun 2023, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penanganan dan pengolahan sampah di Kabupaten Banjar.

Capaian tersebut mencerminkan semakin meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, baik melalui pengumpulan, pengangkutan, maupun pengolahan sampah. Selain itu, peningkatan pengelolaan sampah juga menunjukkan tumbuhnya perhatian terhadap aspek kebersihan lingkungan dan pengurangan dampak pencemaran akibat timbulan sampah.

Meskipun demikian, peningkatan volume timbulan sampah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat tetap menjadi tantangan dalam pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan sampah memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

2.5 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.5.1 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Banjar

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah atau sistem rentan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus kemampuan yang dimiliki untuk mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak tersebut. Kerentanan dipengaruhi oleh tingkat paparan terhadap risiko (seperti banjir atau kekeringan), sensitivitas lingkungan dan sosial ekonomi, sedangkan kapasitas adaptasi mencerminkan kesiapan kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, sumber daya, serta kemampuan masyarakat dalam melakukan penyesuaian. Kombinasi keduanya menjadi indikator penting dalam menilai tingkat ketahanan suatu daerah terhadap perubahan iklim

Sebaran Indeks Kerentanan Kabupaten Banjar:



Gambar 2. 30 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Sumber Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

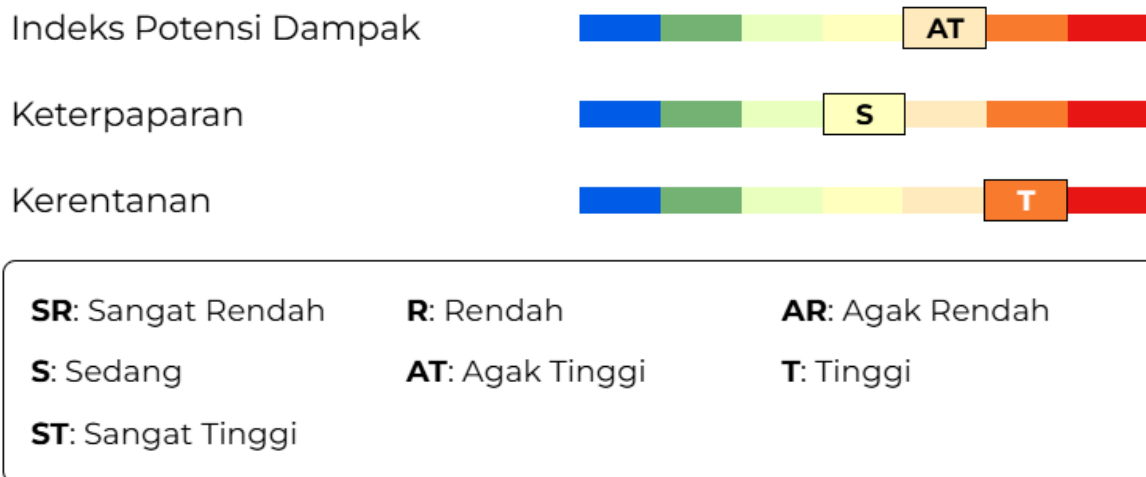
Indeks Kerentanan adalah suatu **ukuran atau nilai yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu wilayah, kelompok masyarakat, atau sistem terhadap ancaman tertentu**, baik ancaman bencana, perubahan iklim, sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Secara umum, indeks kerentanan digunakan untuk mengetahui **seberapa besar potensi dampak yang akan diterima apabila terjadi suatu gangguan atau bahaya**. Semakin tinggi nilai indeks kerentanan, semakin rentan suatu wilayah atau masyarakat terhadap dampak tersebut.



Gambar 2. 31 Indeks Kerentanan

Sumber Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

Berdasarkan bagan sebaran indeks kerentanan, Kabupaten Banjar berada pada kelas indeks “Tinggi”. Hal ini terlihat dari diagram yang seluruh bagiannya didominasi warna oranye sebagai representasi kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai tekanan dan dampak perubahan iklim, sehingga memerlukan penguatan kapasitas adaptasi, peningkatan ketahanan wilayah, serta dukungan pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan guna mengurangi potensi risiko di masa mendatang



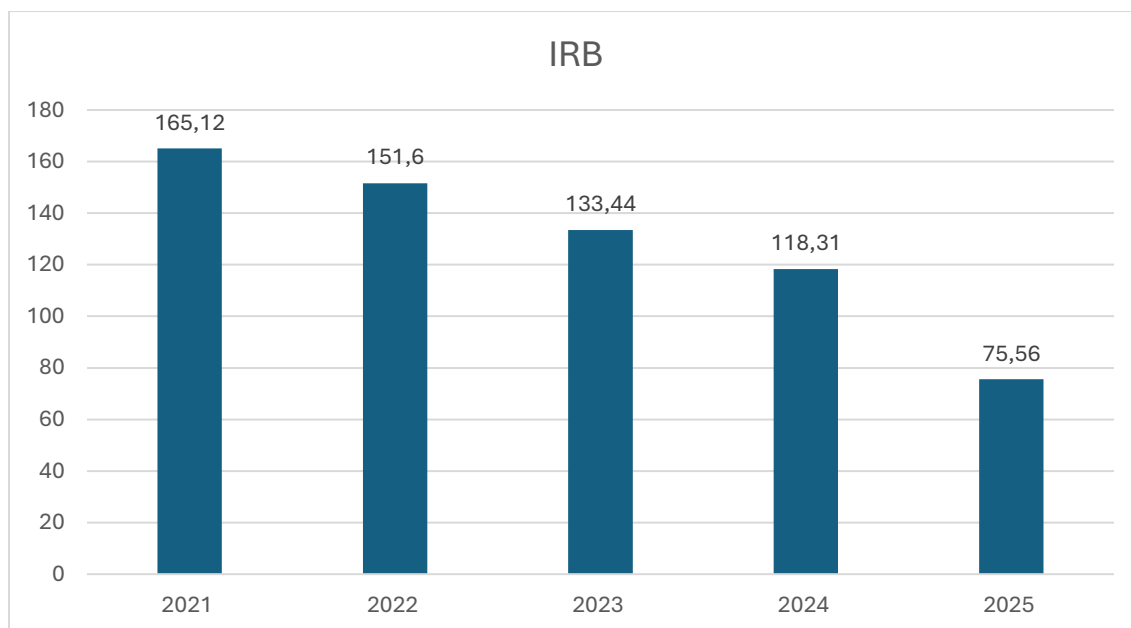
Gambar 2. 32 Indeks Potensi Dampak

Sumber Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

Dari aspek potensi dampak, Kabupaten Banjar berada pada kategori **agak tinggi**, yang berarti perubahan iklim berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Faktor penentu utama kerentanan dipengaruhi oleh kondisi sensitivitas wilayah dan kapasitas adaptasi yang masih perlu diperkuat, terutama dalam peningkatan layanan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, kualitas lingkungan, ketahanan ekonomi masyarakat, serta kelembagaan adaptasi perubahan iklim.

2.5.2 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banjar

Indeks Risiko Bencana merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap potensi bencana berdasarkan kombinasi ancaman bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat risiko suatu daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan wilayah terhadap berbagai potensi bencana.



Gambar 2. 33 Indeks Risiko Bencana Kab. Banjar Tahun 2021-2025

Sumber data BPBD Kab Banjar Tahun 2026

Secara umum, penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan mulai menunjukkan hasil yang positif. Penurunan paling signifikan terjadi pada periode **2024 ke 2025**, yang mengisyaratkan adanya akselerasi dalam penguatan kapasitas daerah, baik melalui peningkatan infrastruktur pengendalian bencana, sistem peringatan dini, maupun kesiapsiagaan masyarakat.

Jika dianalisis lebih dalam, tren penurunan IRB ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya **pengurangan tingkat kerentanan**, baik dari sisi sosial maupun ekonomi, misalnya melalui peningkatan kualitas permukiman, akses layanan dasar, dan edukasi kebencanaan. Kedua, **peningkatan kapasitas daerah**, seperti penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan dalam respon darurat. Ketiga, kemungkinan adanya **pengelolaan risiko berbasis tata ruang** yang lebih baik, sehingga eksposur terhadap potensi bahaya dapat diminimalkan. Meski demikian, nilai IRB pada tahun 2025 yang berada di angka **75,66** menunjukkan penurunan signifikan disebabkan salah satunya adalah karena adanya pembaharuan cara penilaian terhadap Indeks Risiko Bencana

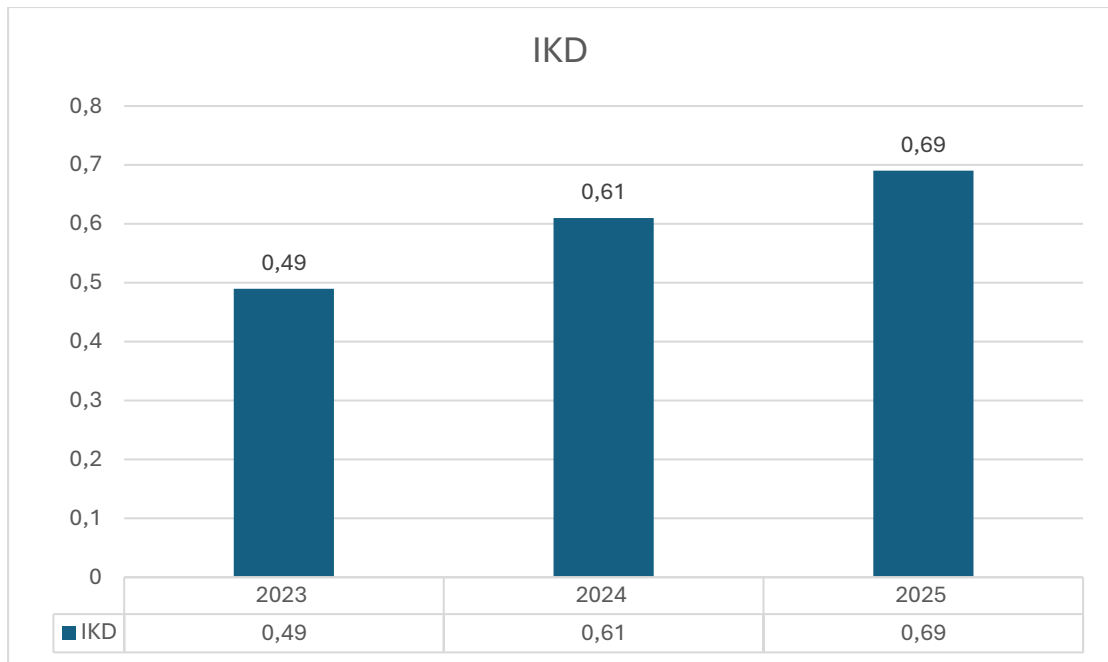
Dengan demikian, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada **pemeliharaan capaian yang sudah baik** sekaligus memperkuat intervensi pada aspek yang masih lemah, seperti peningkatan kapasitas masyarakat berbasis

komunitas, integrasi data risiko dalam perencanaan pembangunan, serta penguatan ketahanan infrastruktur terhadap bencana. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa tren penurunan risiko dapat berlanjut secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah yang tangguh bencana.

Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Banjar dari tahun 2021 hingga 2025 yang cukup signifikan sejalan dengan tren peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada periode 2023–2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat risiko, tetapi juga diiringi dengan meningkatnya kapasitas ketahanan daerah dalam menghadapi dan merespons bencana. Dengan kata lain, **penurunan IRB didukung oleh kenaikan IKD**, yang mencerminkan semakin kuatnya sistem, infrastruktur, serta kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh bencana.

2.5.3 Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Banjar

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kapasitas suatu wilayah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam menghadapi, mengelola, dan mengurangi risiko bencana. Indeks ini berfokus pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memitigasi risiko, beradaptasi, meminimalkan dampak kerusakan, serta pulih pascabencana.



Gambar 2. 34 Grafik Indeks Ketahanan Daerah

Sumber BPBD Kab. Banjar

Kenaikan nilai IKD tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar semakin mampu dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari berbagai tekanan, termasuk bencana, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peningkatan dari 0,49 ke 0,69 mencerminkan adanya penguatan kapasitas daerah yang relatif cepat, yang dapat dikaitkan dengan berbagai intervensi pembangunan yang lebih terarah dan berbasis risiko.

2.6 Demografi

Demografi adalah istilah dalam Ilmu Kependudukan yang merujuk pada data atau gambaran tentang penduduk suatu wilayah.

Secara sederhana, demografi membahas hal-hal seperti:

- Jumlah penduduk
- Persebaran penduduk
- Usia (anak-anak, dewasa, lansia)
- Jenis kelamin
- Kelahiran (natalitas)
- Kematian (mortalitas)
- Perpindahan penduduk (migrasi)

2.6.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Jumlah penduduk Kabupaten Banjar selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat secara umum, dari 572.109 jiwa pada tahun 2021 menjadi 595.717 jiwa pada tahun 2025, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,45 persen per tahun. Untuk melihat perkembangan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan secara lebih rinci, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

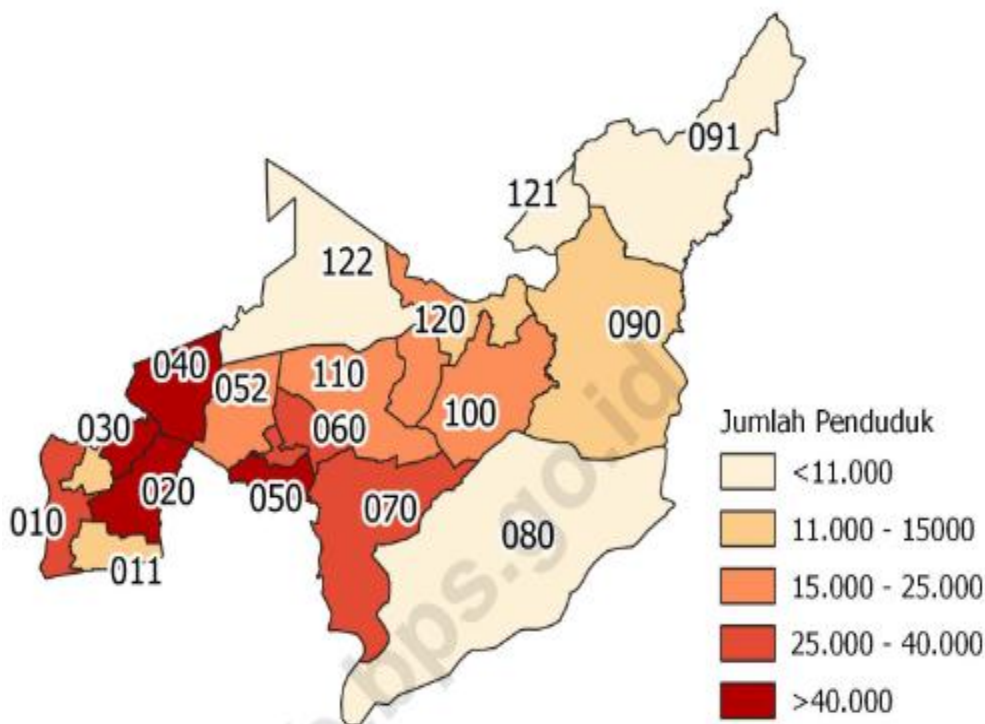
Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2024 (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Aluh-Aluh	28.478	28.655	24.493	30.107	30.571	1,46
Beruntung Baru	14.367	14.511	14.801	14.828	14.907	0,22
Gambut	45.723	46.815	44.933	46.159	47.578	2,40
Kertak Hanyar	46.196	47.014	41.571	42.325	43.352	1,82
Tatah Makmur	12.712	12.909	13.184	13.364	13.633	1,64
Sungai Tabuk	65.744	66.751	62.190	62.868	64.036	1,33
Martapura	123.287	125.722	125.164	127.355	130.177	1,72
Martapura Timur	29.395	29.483	30.459	30.831	31.113	0,78
Martapura Barat	19.029	19.269	19.364	19.552	19.774	0,81
Astambul	34.693	34.929	36.223	36.589	36.996	1,09
Karang Intan	35.362	35.894	36.581	37.155	37.696	1,37
Aranio	9.059	9.157	9.377	9.522	9.808	1,13

Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020-2024 (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Sungai Pinang	13.942	13.976	14.521	15.152	15.513	1,91
Paramasan	3.756	3.765	3.715	3.826	3.936	0,75
Pengaron	16.641	16.761	17.392	17.837	18.313	2,14
Sambung Makmur	11.976	12.139	12.486	13.143	13.540	2,91
Mataraman	24.685	24.837	25.225	25.207	25.346	0,10
Simpang Empat	23.081	23.285	23.957	24.236	24.671	1,54
Telaga Bauntung	3.344	3.373	3.349	3.385	3.497	1,38
Cintapuri Darussalam	10.639	10.665	11.130	11.243	11.260	0,05
JUMLAH	572.109	579.910	579.910	584.684	595.717	1,45

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

Berdasarkan tabel, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penduduk menjadi 577.115 jiwa dibandingkan tahun 2022 sebesar 579.910 jiwa, sehingga pola pertumbuhan tidak sepenuhnya linier. Penurunan pada tahun 2023 mengindikasikan adanya dinamika demografi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penurunan angka kelahiran, peningkatan angka kematian, serta perpindahan penduduk keluar wilayah, khususnya pada kelompok usia produktif. Kondisi ini umumnya terjadi pada wilayah yang memiliki keterkaitan dengan mobilitas tenaga kerja dan perubahan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 2024 dan 2025 kembali terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dinamika demografi yang didorong oleh peningkatan angka kelahiran serta masuknya penduduk ke wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas yang lebih baik.

Perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan menunjukkan variasi laju pertumbuhan yang berbeda. Kecamatan Sambung Makmur, Gambut, dan Pengaron mencatat pertumbuhan relatif tinggi yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pembangunan, akses transportasi yang lebih baik, serta kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi. Sebaliknya, Kecamatan Mataraman dan Cintapuri Darussalam menunjukkan pertumbuhan yang rendah cenderung stagnan, yang berkaitan dengan keterbatasan aksesibilitas dan peluang ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan, dinamika jumlah penduduk Kabupaten Banjar tidak hanya menunjukkan kecenderungan meningkat, tetapi juga mencerminkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor demografi, mobilitas penduduk, dan perkembangan wilayah. Berdasarkan geografis, jumlah penduduk menurut kecamatan dapat terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 35 Peta Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2025

Sumber Data BPS Kab. Banjar 2026

Tabel 2. 15 Keterangan Gambar

Kode	Kecamatan	Kode	Kecamatan
010	Aluh-Aluh	070	Karang Intan
011	Beruntung Baru	080	Aranio
020	Gambut	090	Sungai Pinang
030	Kertak Hanyar	091	Paramasan

031	Tatah Makmur	100	Pengaron
040	Sungai Tabuk	101	Sambung Makmur
050	Martapura	110	Mataraman
051	Martapura Timur	120	Simpang Empat
052	Martapura Barat	121	Telaga Bauntung
060	Astambul	122	Cintapuri Darussalam

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

2.6.2 Piramida Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Struktur penduduk Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–59 tahun) merupakan kelompok dengan jumlah penduduk terbesar. Dominasi kelompok usia produktif ini mencerminkan perubahan struktur demografi yang mengarah pada peningkatan potensi tenaga kerja. Komposisi penduduk secara lebih mendalam berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin struktur penduduk Kabupaten Banjar tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2025

<i>Kelompok Umur</i>	<i>Laki-Laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>
0-4	17,117	16,120	33.237
5-9	25,649	24,086	49.735
10-14	26,927	25,303	52.230
15-19	23,792	22,616	46.408
20-24	24,945	24,050	48.995
25-29	23,582	22,131	45.713
30-34	23,416	22,621	46.037
35-39	23,474	23,095	46.569
40-44	23,381	23,560	46.941
45-49	22,667	22,798	45.465
50-54	19,906	19,628	39.534
55-59	15,999	16,351	32.350
60-64	11,666	12,007	23.673

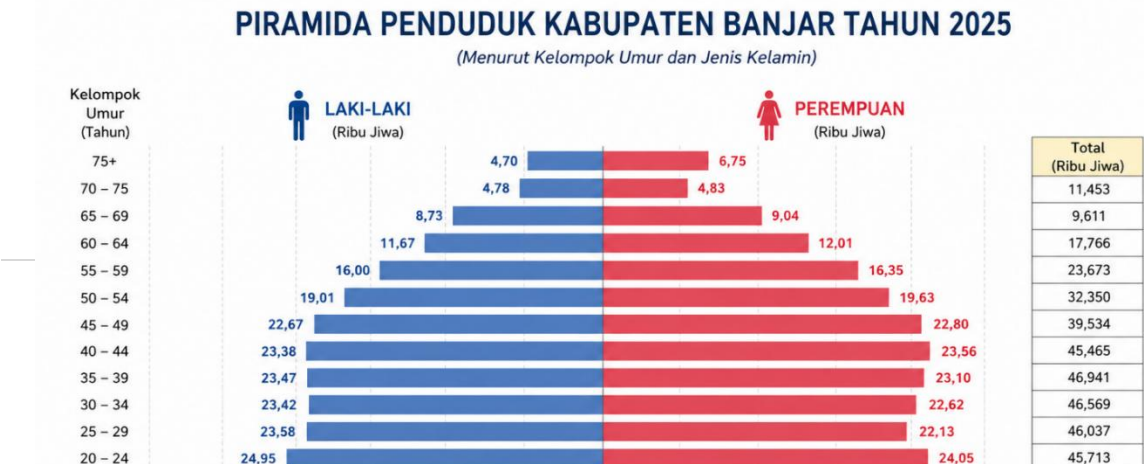
Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
65-69	8,728	9,038	17.766
70-75	4,782	4,829	9.611
75+	4,704	6,749	11.453
JUMLAH	303,735	294,982	595.717

Satuan: Ribu Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

Berdasarkan tabel, perubahan komposisi penduduk pada kelompok umur menunjukkan dinamika struktur demografi Kabupaten Banjar yang semakin berkembang. Pada kelompok usia muda (0–14 tahun), proporsi penduduk masih relatif besar, namun tidak lagi menjadi kelompok dominan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan tingkat kelahiran dalam beberapa tahun terakhir. Sejalan dengan kondisi tersebut, pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), jumlah penduduk relatif lebih kecil namun menunjukkan tren peningkatan, terutama pada penduduk perempuan. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat serta meningkatnya angka harapan hidup.

Perubahan pada kedua kelompok umur tersebut menunjukkan adanya pergeseran struktur demografi yang ditandai dengan menurunnya proporsi usia muda dan meningkatnya proporsi usia lanjut. Pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh penurunan tingkat fertilitas, tetapi juga oleh perubahan perilaku keluarga dalam perencanaan jumlah anak serta meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dinamika struktur umur penduduk Kabupaten Banjar mengarah pada fase transisi demografi, yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyesuaian kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi kelompok usia lanjut. Untuk memperjelas struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin, data tersebut disajikan dalam bentuk piramida penduduk sebagai berikut:



Gambar 2. 36 Piramida Penduduk Kabupaten Banjar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Tahun 2025

Sumber Data BPS Kab. Banjar 2026

Piramida penduduk Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan struktur yang cenderung mengarah pada bentuk stasioner. Proporsi penduduk usia produktif (15–59 tahun) lebih dominan dibandingkan kelompok usia muda dan usia lanjut, kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Banjar sedang berada dalam fase transisi demografi menuju bonus demografi.

Dominasi penduduk usia produktif memberikan peluang dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi tenaga kerja. Namun demikian, kondisi ini juga menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor ekonomi produktif. Pada kelompok usia muda, proporsi penduduk yang tidak lagi dominan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat kelahiran. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk, terutama pada perempuan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya angka harapan hidup dan perbaikan kualitas kesehatan.

Perbedaan komposisi antara laki-laki dan perempuan pada usia lanjut menunjukkan adanya kesenjangan harapan hidup, dimana perempuan cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan laki-laki. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam penyediaan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia. Struktur piramida penduduk Kabupaten Banjar tidak hanya menggambarkan komposisi demografi, tetapi juga menunjukkan arah perubahan struktur penduduk yang memiliki implikasi strategis terhadap perencanaan

pembangunan daerah, khususnya dalam pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Jumlah penduduk Kabupaten Banjar menurut jenis kelamin selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan pola yang relatif sejalan dengan perkembangan total penduduk. Pada tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebesar 595.717 jiwa yang terdiri dari 300.735 jiwa laki-laki dan 294.982 jiwa perempuan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, komposisi penduduk menurut jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2024

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
2021	289.057	283.052	572.109
2022	292.892	287.018	579.910
2023	290.271	284.844	577.115
2024	303.100	297.540	600.640
2025	303.735	294.982	595.717

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel, Perkembangan data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah penduduk baik laki-laki maupun perempuan, sejalan dengan penurunan total penduduk. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan, terutama pada penduduk laki-laki, sebelum kembali mengalami penyesuaian pada tahun 2025.

Perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan kecenderungan selisih yang relatif kecil dan semakin seimbang. Namun demikian, selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cenderung menurun, yang ditunjukkan oleh penurunan rasio jenis kelamin dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk perempuan relatif lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.

Perubahan rasio jenis kelamin tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan tingkat mortalitas dimana penduduk laki-laki memiliki risiko kematian yang relatif lebih tinggi, serta perbedaan tingkat harapan hidup dimana perempuan cenderung memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang.. Selain itu, mobilitas penduduk usia produktif juga mempengaruhi komposisi jenis kelamin, terutama pada wilayah yang menjadi tujuan atau sumber migrasi tenaga kerja.

2.6.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banjar selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat, dari 122,55 jiwa per km² pada tahun 2021 menjadi 127,60 jiwa per km² pada tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan kepadatan menjadi 123,19 jiwa per km² dibandingkan tahun 2022 sebesar 124,22 jiwa per km², seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18 Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2021–2025

Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Aluh-Aluh	82,48	345,27	347,42	357,58	365,02	370,65
Beruntung Baru	61,42	233,91	236,26	240,98	241,42	242,71
Gambut	129,30	353,62	362,06	347,51	356,99	367,97
Kertak Hanyar	45,83	1007,99	1025,83	907,07	923,52	945,93
Tatah Makmur	35,47	358,39	363,94	371,69	376,77	384,35
Sungai Tabuk	147,30	446,33	453,16	422,20	426,80	434,73
Martapura	42,03	2933,31	2991,24	2.977,97	3030,10	3097,24
Martapura Timur	29,99	980,16	983,09	1.015,64	1028,04	1037,45
Martapura Barat	149,38	127,39	128,99	129,63	130,89	132,37

Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2021	2022	2023	2024	2025
Astambul	216,50	160,24	161,33	167,31	169,00	170,88
Karang Intan	215,35	164,21	166,68	169,87	172,53	175,05
Aranio	1.166,35	7,77	7,85	8,04	8,16	8,41
Sungai Pinang	458,65	30,40	30,47	31,66	33,04	33,82
Paramasan	560,85	6,70	6,71	6,62	6,82	7,02
Pengaron	433,25	38,41	38,69	40,14	41,17	42,27
Sambung Makmur	134,65	88,94	90,15	92,73	97,61	100,56
Mataraman	148,40	166,34	167,37	169,98	169,86	170,80
Simpang Empat	141,10	163,58	165,02	169,79	171,76	174,85
Telaga Bauntung	158,00	21,16	21,35	21,20	21,42	22,13
Cintapuri Darussalam	312,20	34,08	34,16	35,65	36,01	36,07
JUMLAH	4.668,50	122,55	124,22	123,19	125,24	127,60

Satuan: Jiwa/km²

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel, penurunan kepadatan penduduk pada tahun 2023 sejalan dengan terjadinya penurunan jumlah penduduk pada periode yang sama. Kondisi ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor demografi seperti penurunan angka kelahiran, peningkatan angka kematian, serta kemungkinan terjadinya migrasi keluar wilayah, terutama pada kelompok usia produktif.

Selanjutnya, peningkatan kembali kepadatan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya pemulihan pertumbuhan penduduk yang didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya aktivitas ekonomi dan permukiman di wilayah tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dinamika kependudukan di Kabupaten Banjar bersifat fluktuatif namun tetap menunjukkan tren meningkat dalam jangka menengah.

Secara spasial, tingkat kepadatan penduduk menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Martapura, Martapura Timur, dan Kertak Hanyar memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, yang dipengaruhi oleh perannya sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan kawasan permukiman yang berkembang pesat. Sebaliknya, kecamatan seperti Paramasan, Aranio, dan Telaga Bauntung memiliki tingkat kepadatan yang sangat rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh luas wilayah yang besar, karakteristik geografis yang relatif sulit dijangkau, serta keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur.

Perbedaan tingkat kepadatan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah. Kepadatan yang tinggi pada wilayah tertentu berpotensi menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur dan pelayanan publik, sedangkan wilayah dengan kepadatan rendah menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan layanan dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banjar tidak hanya mencerminkan distribusi penduduk, tetapi juga menunjukkan keterkaitan erat antara perkembangan wilayah, aksesibilitas, serta aktivitas ekonomi, yang perlu menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

2.6.5 Keberadaan Masyarakat Adat dan Kondisi Sosiologis Masyarakat

Kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten Banjar ditandai dengan dominasi masyarakat Banjar sebagai kelompok etnis utama yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan berakar pada adat istiadat serta ajaran agama Islam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat, antara lain dalam sistem kekerabatan, adat perkawinan, tradisi keagamaan, serta budaya gotong royong yang masih terpelihara. Selain itu, keberagaman etnis yang terdiri dari suku Banjar, Jawa, Madura, Bugis, dan Dayak menunjukkan dinamika sosial yang terbuka, dimana interaksi antar kelompok berlangsung secara harmonis dan membentuk struktur sosial yang inklusif. Keberadaan masyarakat adat juga tercermin dalam praktik kehidupan berbasis kearifan lokal, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan hubungan sosial berbasis komunitas, yang menjadi modal sosial dalam mendukung pembangunan daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, komposisi penduduk menurut agama di Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan dominasi pemeluk agama Islam, sementara agama lainnya memiliki proporsi yang relatif kecil. Komposisi tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 19 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Banjar Tahun 2025

Kecamatan	Islam	Protestan Christian	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Khonghucu Khonghucu	Kepercayaan Others
Aluh-Aluh	30.567	4	-	-	-	-	-
Beruntung Baru	14.906	1	-	-	-	-	-
Gambut	47.339	138	56	9	31	5	-
Kertak Hanyar	42.098	594	429	13	212	6	-
Tatah Makmur	13.624	1	-	6	-	-	-
Sungai Tabuk	63.836	145	27	19	9	-	-
Martapura	129.604	290	142	13	126	1	1
Martapura Timur	31.109	3	1	-	-	-	-
Martapura Barat	19.763	5	6	-	-	-	-
Astambul	36.985	2	9	-	-	-	-
Karang Intan	37.663	24	4	1	4	-	-
Aranio	9.808	-	-	-	-	-	-
Sungai Pinang	15.335	98	2	74	-	2	2
Paramasan	2.168	96	54	1571	-	3	44
Pengaron	18.310	-	-	3	-	-	-
Sambung Makmur	13.539	1	-	-	-	-	-

Kecamatan	Islam	Protestan Christian	Katolik Catholic	Hindu	Budha Buddha	Khonghucu Khonghucu	Kepercayaan Others
Mataraman	25.265	50	30	7	1	-	-
Simpang Empat	24.633	30	7	1	-	-	-
Telaga Bauntung	3.497	-	1	-	-	-	-
Cintapuri Darussalam	11.245	8	7	-	-	-	-
JUMLAH	591.294	1.490	775	1.711	382	17	47

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Banjar sangat didominasi oleh pemeluk agama Islam, yang mencapai lebih dari 99 persen dari total penduduk. Sementara itu, pemeluk agama lain seperti Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta aliran kepercayaan memiliki jumlah yang relatif kecil dan tersebar di beberapa kecamatan tertentu.

Dominasi agama Islam tersebut berpengaruh terhadap karakter sosial masyarakat yang religius, dimana nilai-nilai keagamaan menjadi landasan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam norma sosial, interaksi masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Kondisi ini juga memperkuat budaya gotong royong, kebersamaan, serta kohesi sosial di masyarakat. Namun demikian, keberagaman agama yang ada tetap menunjukkan adanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Banjar. Hal ini tercermin dari tidak adanya konsentrasi konflik sosial berbasis agama serta adanya interaksi sosial yang harmonis antar kelompok masyarakat.

Secara spasial, pemeluk agama non-Islam cenderung lebih banyak ditemukan pada kecamatan dengan tingkat urbanisasi dan mobilitas penduduk yang lebih tinggi, seperti Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, dan Martapura. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara keberagaman agama dengan dinamika sosial ekonomi dan arus migrasi penduduk. Di sisi lain, perkembangan pembangunan dan meningkatnya mobilitas penduduk turut membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Wilayah dengan aksesibilitas tinggi mengalami perubahan sosial yang

lebih cepat, sedangkan wilayah dengan akses terbatas masih mempertahankan pola kehidupan yang lebih tradisional dan berbasis kearifan lokal.

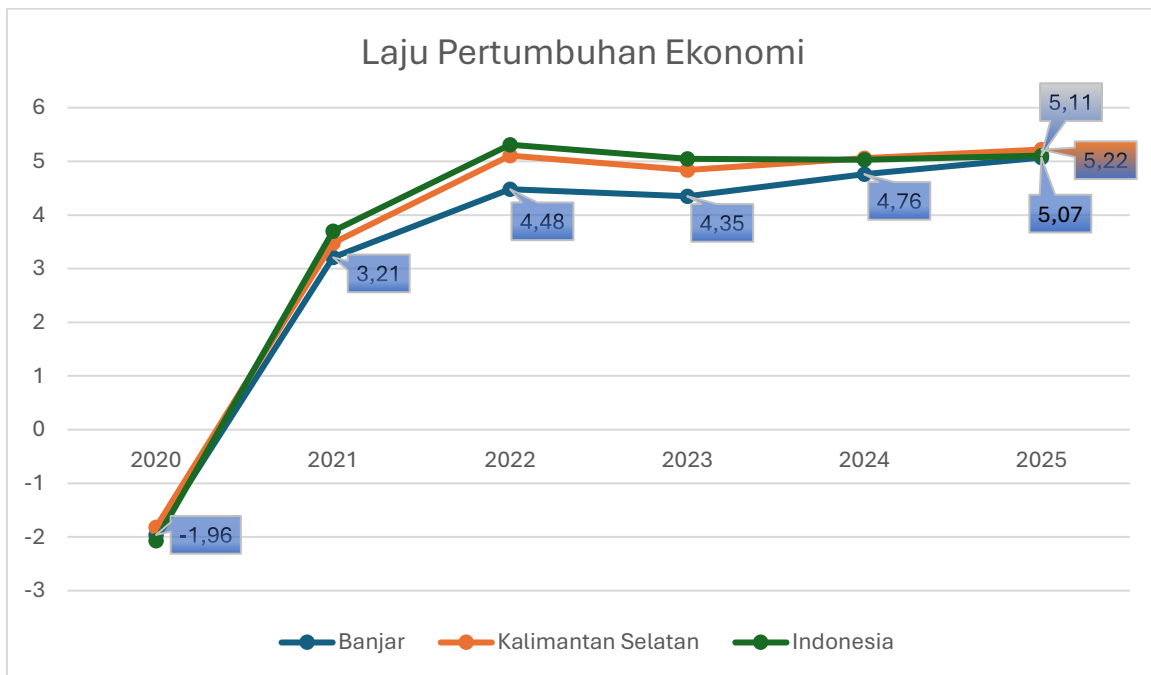
BAB III

ASPEK KESEJAHTERAAN

3.1 Kesejahteraan untuk Semua

3.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan persentase perubahan kinerja perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dihitung berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil karena telah menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan aktivitas ekonomi yang sebenarnya dari tahun ke tahun. Berikut adalah gambaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar selama periode Tahun 2020-2025:



Gambar 3. 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2026; BPS RI, 2026

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dalam kurun waktu 2020–2025 menunjukkan tren pemulihan yang cukup baik pasca pandemi, meskipun masih berada sedikit di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Secara rata-rata, pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Banjar tercatat sebesar 3,32 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan Kalimantan Selatan sebesar 3,65 persen dan nasional sebesar 3,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi daerah telah tumbuh positif, namun masih memerlukan penguatan untuk dapat sejajar dengan tingkat yang lebih luas.

Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Banjar mengalami kontraksi sebesar -1,96 persen akibat tekanan pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi secara signifikan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi pemulihan yang cukup konsisten, dengan pertumbuhan mencapai di atas 3 persen sejak 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 5,07 persen pada tahun 2025. Tren ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi daerah telah kembali berjalan dan semakin menguat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi secara umum.

Meskipun menunjukkan perbaikan yang signifikan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar secara konsisten masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan ekonomi daerah berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan momentum pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dalam mendorong sektor-sektor unggulan dan meningkatkan produktivitas ekonomi agar pertumbuhan yang dicapai tidak hanya meningkat, tetapi juga mampu bersaing dan berkelanjutan.

3.1.2 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2025 (Persen)

Selain melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat, analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan melalui penyajian data perekonomian daerah menurut lapangan usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi dan dinamika masing-masing sektor dalam membentuk struktur ekonomi Kabupaten Banjar, sehingga dapat diketahui sektor-sektor yang menjadi penggerak utama maupun yang masih perlu didorong pengembangannya. Berikut disajikan data distribusi ekonomi Kabupaten Banjar dalam kurun waktu enam tahun terakhir:

Tabel 3. 1 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025 (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,65	16,77	15,07	14,85	15,02	15,43
B. Pertambangan dan Penggalian	13,50	16,08	23,07	22,05	20,82	18,81
C. Industri Pengolahan	6,84	6,82	6,27	5,95	6,09	6,45
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
F. Konstruksi	10,48	10,34	9,59	9,74	9,89	9,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,64	14,32	13,68	14,60	14,78	15,55
H. Transportasi dan Pergudangan	4,79	4,57	4,29	4,63	4,72	4,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,32	3,21	3,00	3,10	3,24	3,47
J. Informasi dan Komunikasi	4,09	4,13	3,80	3,84	3,96	4,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,25	1,97	1,96	1,98	2,02
L. Real Estate	3,61	3,59	3,24	3,24	3,28	3,33
M,N. Jasa Perusahaan	0,38	0,36	0,34	0,36	0,38	0,39
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	7,04	6,12	6,07	6,13	5,95
P. Jasa Pendidikan	5,98	5,79	5,16	5,14	5,16	5,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,58	2,65	2,46	2,51	2,52	2,55
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,77	1,68	1,57	1,59	1,66	1,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

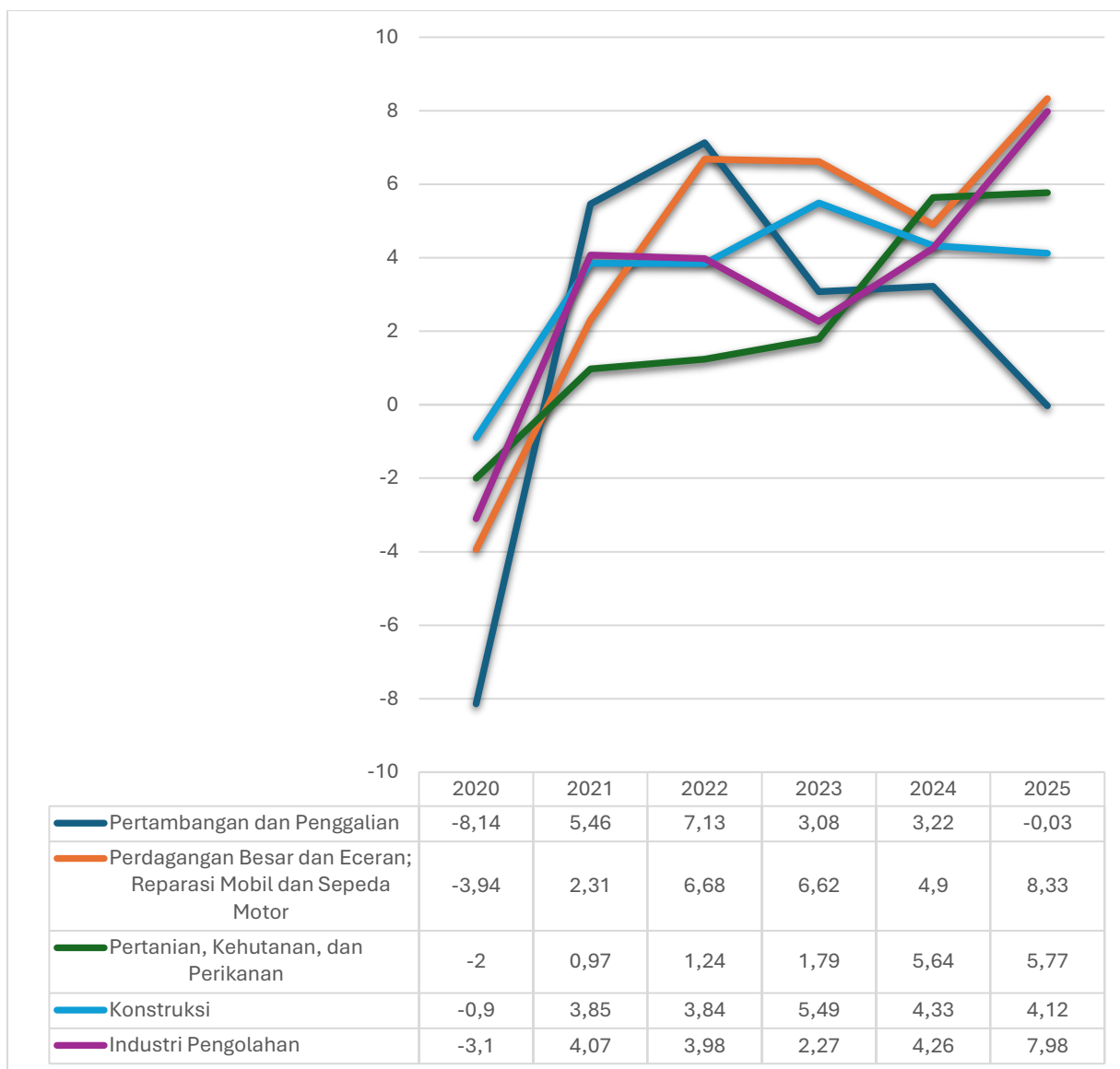
Berdasarkan data distribusi PDRB menurut lapangan usaha, struktur perekonomian Kabupaten Banjar selama periode 2020–2025 sektor pertambangan dan penggalan menjadi kontributor terbesar dengan rata-rata distribusi sebesar 19,06 persen dalam periode 2020–2025. Dominasi ini mencerminkan masih kuatnya peran sektor berbasis sumber daya alam dalam menopang perekonomian daerah, meskipun sektor ini memiliki karakteristik yang fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti harga komoditas.

Sektor berikutnya yang memiliki kontribusi signifikan adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata sebesar 15,80 persen, yang menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi basis ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan dasar. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga memiliki peran penting dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,60 persen, yang mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas distribusi dan konsumsi sebagai penggerak ekonomi domestik. Diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 9,98 persen dan industri pengolahan sebesar 6,40 persen yang menunjukkan adanya aktivitas pembangunan dan potensi peningkatan nilai tambah, meskipun kontribusinya masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Banjar menunjukkan ketergantungan yang masih cukup tinggi pada sektor primer dan ekstraktif, khususnya pertambangan dan pertanian. Meskipun demikian, mulai terlihat peran sektor perdagangan dan jasa yang semakin menguat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya proses transformasi ekonomi yang berjalan secara bertahap, namun masih memerlukan penguatan pada sektor-sektor bernilai tambah seperti industri pengolahan dan jasa modern agar struktur ekonomi menjadi lebih seimbang, tangguh, dan berkelanjutan.

3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Selain itu, untuk melengkapi gambaran struktur ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, berikut disajikan data laju pertumbuhan pada beberapa sektor unggulan di Kabupaten Banjar yang mencerminkan dinamika kinerja sektor-sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah:



Gambar 3. 2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, BPS Kabupaten Banjar 2026

Dalam analisis ini, sektor unggulan ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor dengan kontribusi terbesar dianggap sebagai sektor unggulan karena memiliki peran dominan dalam membentuk struktur ekonomi daerah serta memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar.

Berdasarkan data laju pertumbuhan sektor unggulan, Secara umum, sektor-sektor unggulan mampu tumbuh dengan rata-rata yang bervariasi, mencerminkan tingkat ketahanan dan potensi pengembangan masing-masing sektor dalam mendorong perekonomian daerah. Dari lima sektor unggulan yang dianalisis,

pertumbuhan rata-rata berada pada kisaran moderat, dengan kecenderungan meningkat pada periode pasca pandemi.

Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,15 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki peran yang semakin strategis sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi daerah, seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu, sektor konstruksi 3,46 persen dan industri pengolahan 3,24 persen juga menunjukkan kinerja yang cukup stabil.

Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 1,79 persen dengan pola yang fluktuatif, bahkan mengalami kontraksi kembali pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap faktor eksternal seperti harga komoditas. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2,24 persen, yang meskipun relatif lebih rendah dibanding sektor lainnya, namun menunjukkan tren peningkatan pada akhir periode. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan dan modernisasi sektor pertanian agar mampu meningkatkan produktivitas dan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara lebih optimal.

Tabel 3. 2 PDRB Pengeluaran ADHB Kab. Banjar Tahun 2021 – 2025 PDRB PENGELUARAN BERDASARKAN ADHB KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2025 (Milyar Rupiah)

JENIS PENGELUARAN	PDRB SERI 2010 ADHB (Milyar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	11.857,46	13.214,50	14.468,14	15.628,51	16.569,50
<i>Kontribusi</i>	66,11%	62,71%	63,92%	65,01%	64,72%
<i>Pertumbuhan</i>		11,44%	9,49%	8,02%	6,02%
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT	175,77	191,68	219,77	259,68	275,4
<i>Kontribusi</i>	0,980%	0,910%	0,971%	1,080%	1,076%
<i>Pertumbuhan</i>		9,05%	14,65%	18,16%	6,05%

JENIS PENGELUARAN	PDRB SERI 2010 ADHB (Milyar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	2.316,77	2.375,67	2.557,21	2.836,19	2.919,22
<i>Kontribusi</i>	12,92%	11,27%	11,30%	11,80%	11,40%
<i>Pertumbuhan</i>		2,54%	7,64%	10,91%	2,93%
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	5.576,96	6.031,45	6.615,76	7.162,57	7.699,01
<i>Kontribusi</i>	31,10%	28,62%	29,23%	29,79%	30,07%
<i>Pertumbuhan</i>		8,15%	9,69%	8,27%	7,49%
PERUBAHAN INVENTORI	1,33	-12,51	-5,94	-19,00	3,55
<i>Kontribusi</i>	0,007%	-0,059%	-0,026%	-0,079%	0,014%
<i>Pertumbuhan</i>		-1040,60%	-52,52%	219,87%	-118,68%
NET EKSPOR BARANG DAN JASA	-1.993,22	-729,08	-1.220,53	-1.825,94	-1.866,46
<i>Kontribusi</i>	-11,11%	-3,46%	-5,39%	-7,59%	-7,29%
<i>Pertumbuhan</i>		-63,42%	67,41%	49,60%	2,22%
PDRB	17.934,87	21.071,26	22.634,41	24.042,01	25.600,21

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

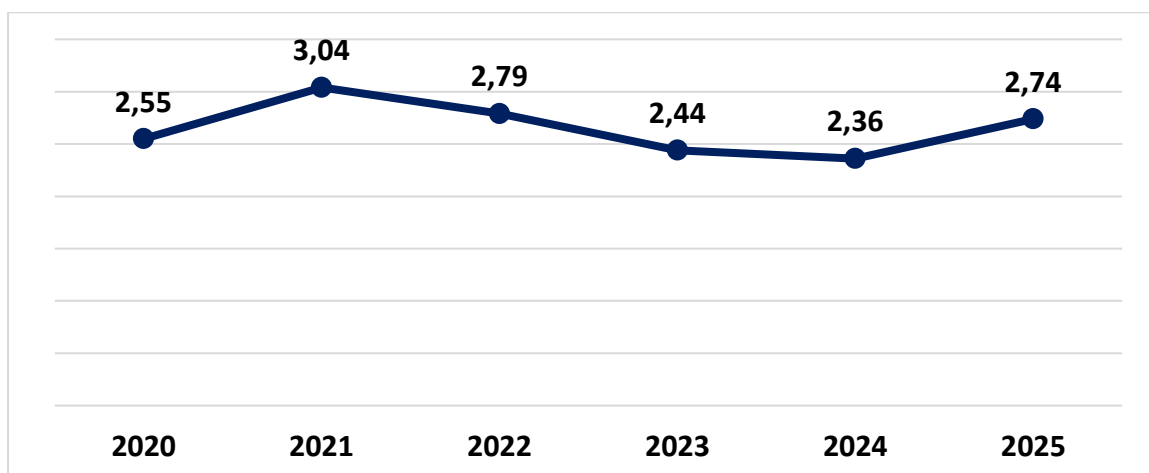
**Tabel 3. 3 Tabel 3.5 PDRB PENGELUARAN BERDASARKAN ADHK
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2025 (Milyar Rupiah)**

JENIS PENGELUARAN	PDRB SERI 2010 ADHK (Milyar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	8.108,88	8.430,03	8.833,25	9.307,80	9.770,84
<i>Kontribusi</i>	66,96%	66,63%	66,91%	67,31%	67,25%
<i>Pertumbuhan</i>		3,96%	4,78%	5,37%	4,97%
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT	109,58	115,19	124,52	143,57	150,16
<i>Kontribusi</i>	0,905%	0,910%	0,943%	1,038%	1,033%
<i>Pertumbuhan</i>		5,12%	8,10%	15,30%	4,59%
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH	1.357,99	1.332,39	1.383,74	1.430,92	1.452,41
<i>Kontribusi</i>	11,21%	10,53%	10,48%	10,35%	10,00%
<i>Pertumbuhan</i>		-1,89%	3,85%	3,41%	1,50%
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO	3.602,38	3.719,61	3.884,77	4.058,11	4.253,22
<i>Kontribusi</i>	29,75%	29,40%	29,43%	29,35%	29,27%
<i>Pertumbuhan</i>		3,25%	4,44%	4,46%	4,81%
PERUBAHAN INVENTORI	0,85	-7,28	-3,23	-10,33	1,76
<i>Kontribusi</i>	0,007%	-0,058%	-0,024%	-0,075%	0,012%
<i>Pertumbuhan</i>		-956,47%	-55,63%	219,81%	-117,04%
NET EKSPOR BARANG DAN JASA	-1.070,46	-938,46	-1.021,65	-1.101,74	-1.099,06
<i>Kontribusi</i>	-8,84%	-7,42%	-7,74%	-7,97%	-7,56%
<i>Pertumbuhan</i>		-12,33%	8,86%	7,84%	-0,24%
PDRB	12.109,22	12.651,49	13.201,40	13.828,33	14.529,34

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

3.1.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2025

Persentase penduduk miskin menggambarkan proporsi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan (GK) dibandingkan dengan total jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Indikator ini berfungsi untuk menilai sejauh mana tingkat kemiskinan terjadi dalam suatu populasi dan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan kesejahteraan.



Gambar 3. 3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2020- 2025

Sumber: BPS Kabupaten Banjar , 2025

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar selama periode 2020–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun secara umum memperlihatkan kecenderungan menurun dalam jangka panjang.

Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan cukup tajam menjadi 3,04 persen. Tahun ini menjadi salah satu periode yang cukup berat dalam upaya pengendalian tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022 terlihat adanya perbaikan kondisi, yang tercermin dari turunnya persentase penduduk miskin menjadi 2,79 persen.

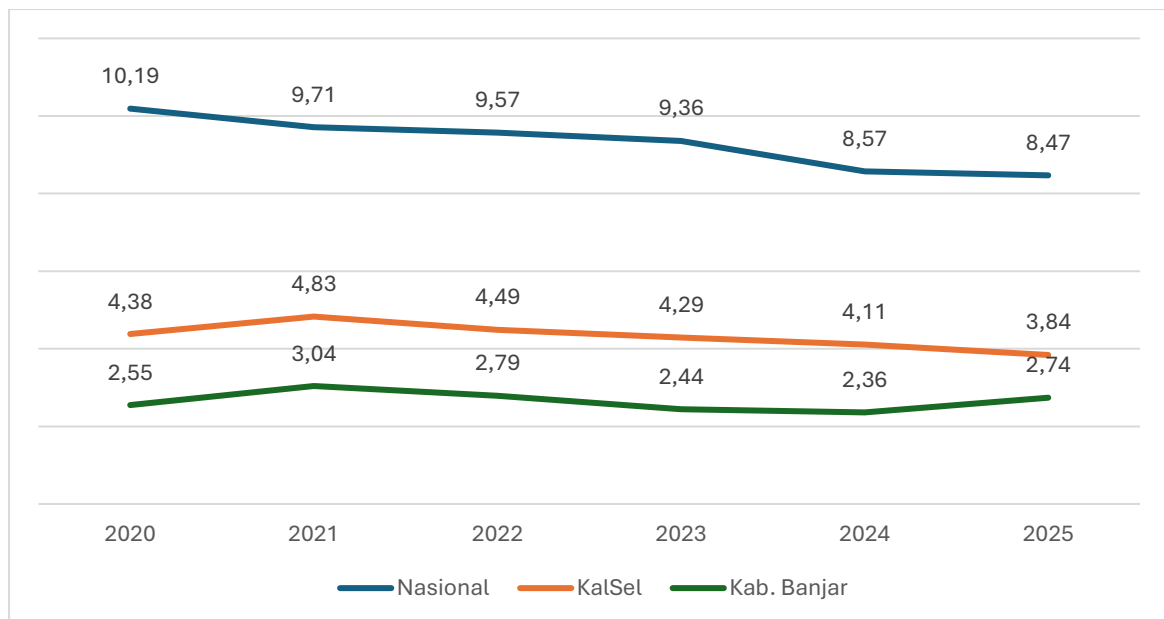
Pada tahun 2023 menjadi 2,44 persen dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 2,36 persen. Capaian pada tahun 2024 ini merupakan yang terendah selama periode pengamatan, menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan, tetapi pada tahun 2025, persentase penduduk miskin tercatat

mengalami kenaikan menjadi 2,74 persen atau terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,38 persen dari 2,36 persen. Hal ini disebabkan antara lain sebagai penyebab utama adalah

- Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar naik paling tinggi dibanding kabupaten lain, yaitu dari Rp.589.000 menjadi Rp.634.000 (naik hampir 8%). Sementara kabupaten lain hanya naik 2–4%.
- Inflasi/Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Banjar tercatat 2,32% (data DKUMPP). Pada Maret 2025 terjadi puncak inflasi, terutama kenaikan harga beras, daging, dan bawang merah.
- Karena angka kemiskinan Kabupaten Banjar sudah sangat rendah ($<5\%$), maka yang tersisa adalah kelompok miskin ekstrem. Kelompok ini sangat sensitif terhadap inflasi, gejolak ekonomi, atau bencana. Jika angka kemiskinan masih tinggi (6–7%), gejolak harga tidak terlalu terlihat dampaknya.

Faktor penyebab lainnya adalah :

- Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, dan pada 2025 banyak yang gagal tanam (contoh: Aluh-aluh, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar). Kondisi ini memperparah kerentanan.
- Bantuan sosial terlambat turun karena efisiensi anggaran. Padahal biasanya bantuan bisa menahan lonjakan angka kemiskinan.
- Tahun 2024 ada fenomena Pemilu (Pilpres & Pileg) yang membuat banyak bantuan tersalurkan. Namun di awal 2025, bantuan pusat tertunda, APBD belum turun, serta terjadi pemblokiran APBN untuk DAK & DAU infrastruktur.

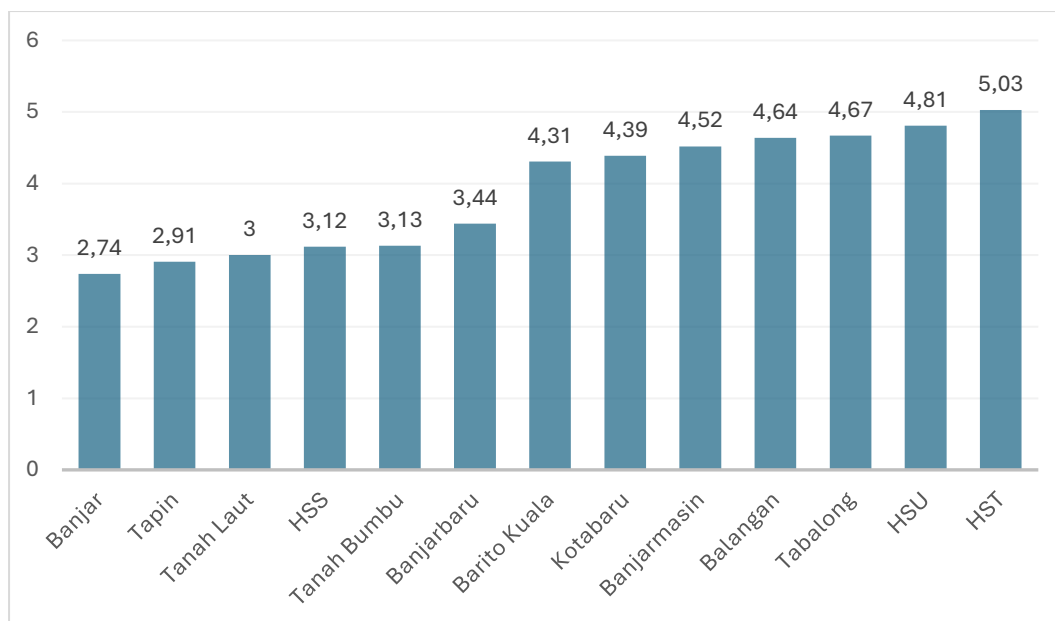


Gambar 3. 4 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020- 2025

Sumber: BPS Kab.Banjar, BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, 2025

Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tingkat provinsi maupun nasional. Angka kemiskinan yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar telah berhasil melaksanakan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar selama beberapa tahun terakhir merupakan indikasi bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah telah berhasil memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.



Gambar 3. 5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Berdasarkan data persentase penduduk miskin kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tahun 2025, Kabupaten Banjar mencatat angka kemiskinan sebesar 2,74 persen, atau menjadi daerah dengan persentase kemiskinan terendah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Capaian ini berada jauh di bawah rata-rata kemiskinan provinsi yang pada tahun 2025 masih berada di kisaran 3,84 persen, sehingga menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar wilayah lain di Kalimantan Selatan.

Jika dibandingkan dengan daerah terdekat, persentase kemiskinan Kabupaten Banjar lebih rendah daripada Tapin (2,91%), Tanah Laut (3,00%), dan Banjarbaru (3,44%). Selisih ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki performa pengendalian kemiskinan yang lebih baik meskipun masih menghadapi tantangan jumlah penduduk miskin secara absolut yang cukup besar. Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Banjarmasin (4,52%), Tabalong (4,67%), Hulu Sungai Utara (4,81%), hingga Hulu Sungai Tengah (5,03%), terlihat bahwa kesenjangan kemiskinan antar wilayah di Kalimantan Selatan masih cukup lebar.

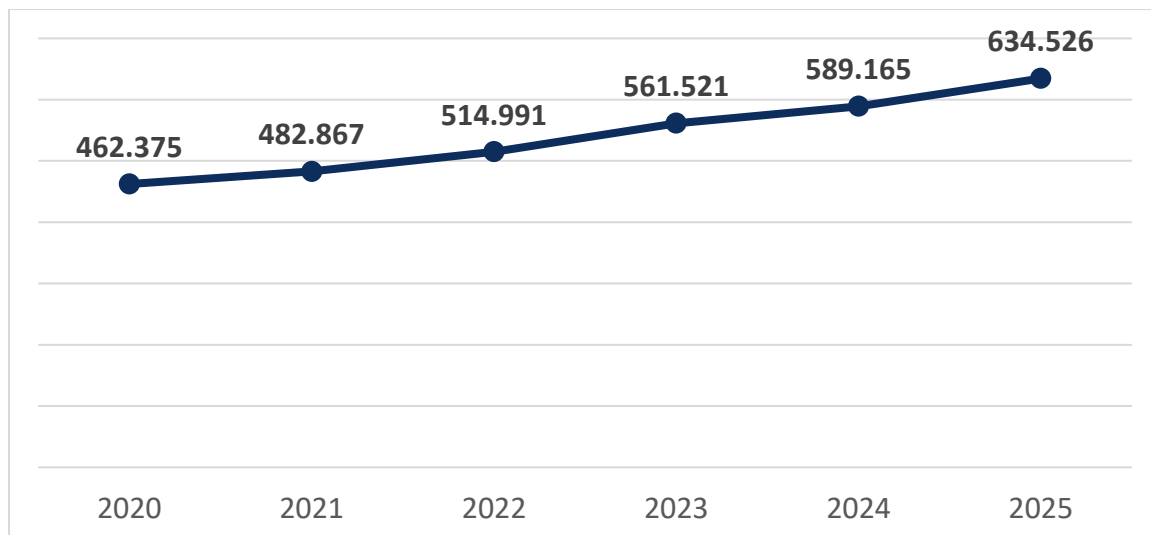
Dengan posisi ini, Kabupaten Banjar dapat dikatakan sebagai benchmark penurunan kemiskinan di Kalimantan Selatan, karena berhasil mempertahankan persentase kemiskinan paling rendah di tengah karakteristik wilayah yang luas dan

dominasi penduduk perdesaan. Namun demikian, capaian ini tetap perlu dijaga melalui penguatan program perlindungan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sinkronisasi data sasaran agar penurunan kemiskinan tidak hanya rendah secara persentase tetapi juga signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin.

3.1.5 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Garis Kemiskinan (GK) adalah indikator yang digunakan untuk menetapkan batas atau standar dalam menentukan tingkat kemiskinan suatu wilayah atau populasi. Nilai GK diperoleh dari penjumlahan antara Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) menggambarkan jumlah pengeluaran minimum yang diperlukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, yakni asupan gizi dan energi yang cukup agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara layak. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mencerminkan besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup selain pangan, seperti sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya.

Seseorang atau rumah tangga dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pendapatan atau pengeluaran per kapita berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Sebaliknya, apabila pendapatan atau pengeluaran per kapita melebihi GK, maka individu atau rumah tangga tersebut digolongkan sebagai penduduk non-miskin.



Gambar 3. 6 Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2025

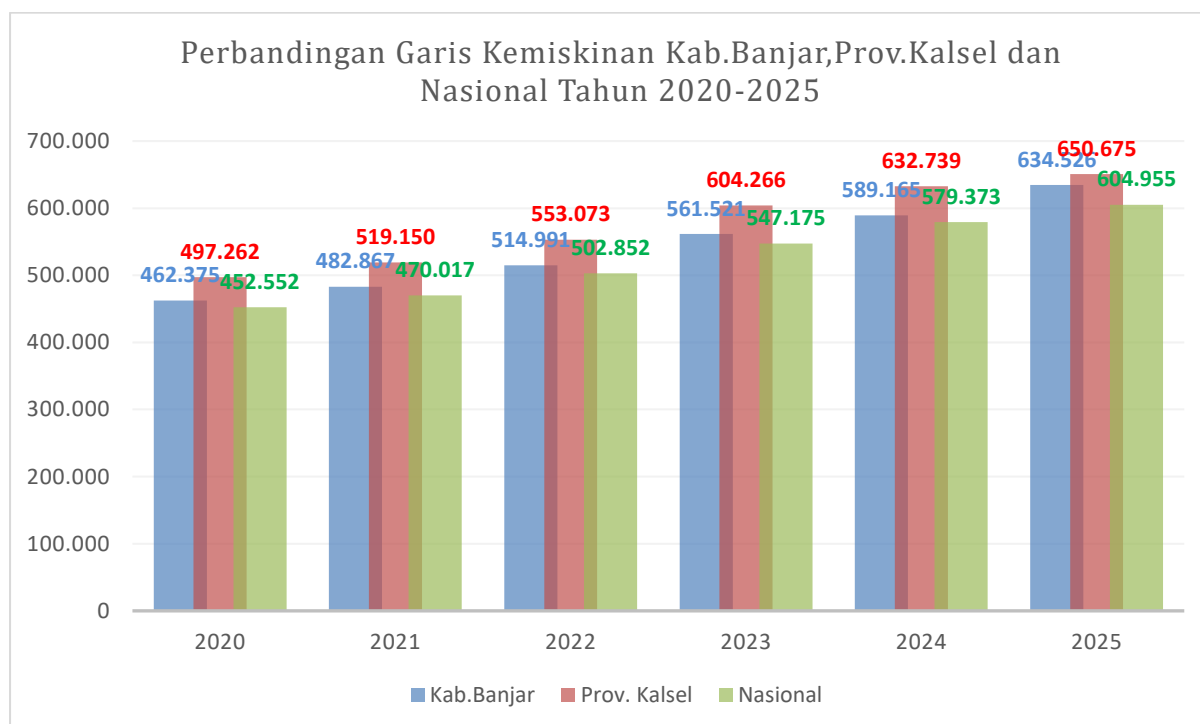
Perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Banjar selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp. 462.375 per kapita per bulan, kemudian meningkat menjadi Rp. 482.867 pada tahun 2021, Rp. 514.991 pada tahun 2022, Rp. 561.521 pada tahun 2023, Rp. 589.165 pada tahun 2024, dan mencapai Rp. 634.526 per kapita per bulan pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa batas minimum pengeluaran yang dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan semakin tinggi.

Secara substansial, peningkatan garis kemiskinan tersebut mencerminkan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, serta penyesuaian terhadap standar kebutuhan hidup layak masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, garis kemiskinan Kabupaten Banjar mengalami kenaikan sebesar Rp172.151 atau sekitar 37,23 persen dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar relatif rendah, tekanan ekonomi yang dihadapi rumah tangga rentan miskin tetap meningkat karena kebutuhan pengeluaran minimum terus bertambah.

Kenaikan garis kemiskinan juga menjadi sinyal bahwa kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan semakin rentan untuk kembali jatuh miskin apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar tidak hanya difokuskan pada penurunan persentase

penduduk miskin, tetapi juga pada penguatan daya beli masyarakat, pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Banjar periode 2020–2025 menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan ke depan tidak hanya terletak pada menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga memastikan bahwa kenaikan biaya kebutuhan hidup dapat diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan masyarakat secara inklusif. Hal ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan pengurangan kemiskinan pada dokumen RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2027.



Gambar 3. 7 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Kab.Banjar, BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, 2025

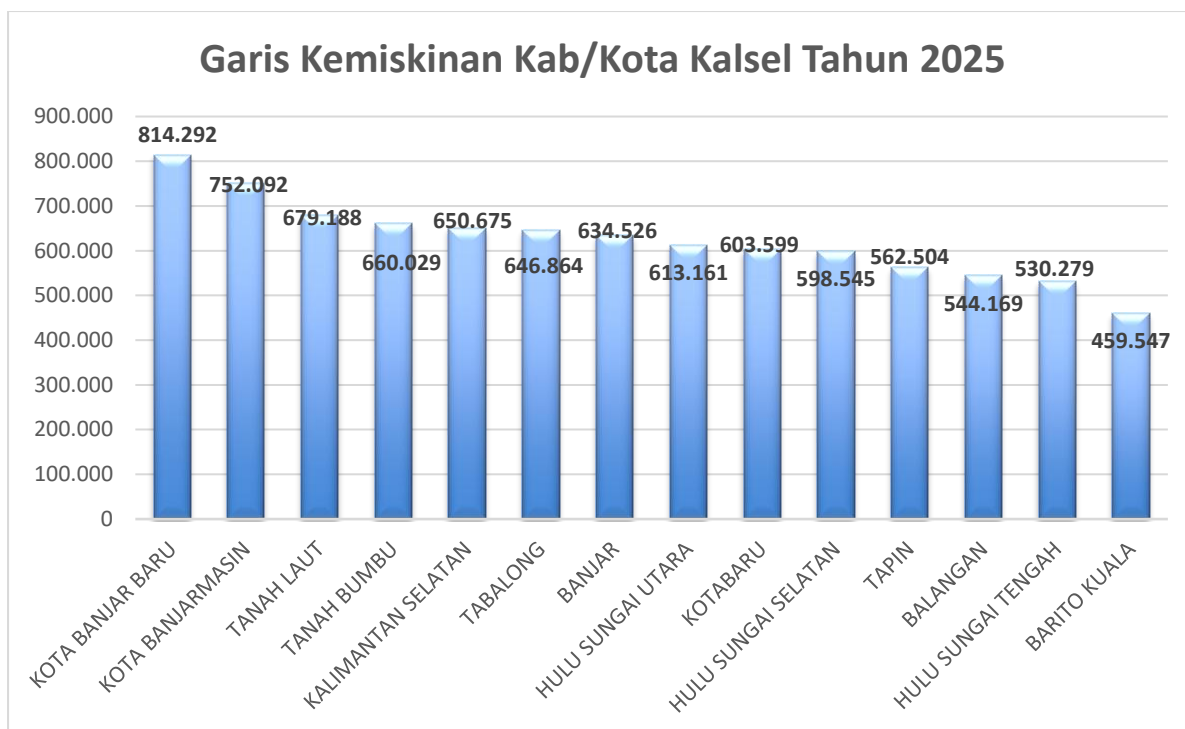
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan nasional selama periode 2020–2025 sama-sama menunjukkan tren meningkat.

Pada tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Banjar tercatat sebesar Rp. 462.375/kapita/bulan, lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 497.262/kapita/bulan, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar Rp. 452.552/kapita/bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar kebutuhan hidup minimum masyarakat Kabupaten Banjar pada awal periode masih berada pada level menengah, yakni di bawah rata-rata provinsi tetapi di atas rata-rata nasional.

Selanjutnya pada tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Banjar meningkat menjadi Rp.634.526/kapita/bulan. Nilai ini masih berada sedikit di bawah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai Rp.650.675/kapita/bulan, namun telah melampaui garis kemiskinan nasional sebesar Rp.604.955/kapita/bulan. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir terjadi kenaikan garis kemiskinan Kabupaten Banjar sebesar Rp.172.151 atau tumbuh sekitar 37,23 persen. Pada periode yang sama, Provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 30,85 persen, sedangkan nasional meningkat sebesar 33,67 persen.

Peningkatan garis kemiskinan Kabupaten Banjar yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional mengindikasikan bahwa biaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas pangan, biaya transportasi, perumahan, energi, serta kebutuhan nonmakanan lainnya. Selain itu, karakteristik Kabupaten Banjar sebagai daerah penyangga kawasan perkotaan Banjarbaru–Banjarmasin turut mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah kebutuhan yang lebih beragam dan bernilai lebih tinggi.

Meskipun posisi garis kemiskinan Kabupaten Banjar masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan, namun nilainya yang telah melampaui nasional menunjukkan bahwa standar minimum pengeluaran untuk dapat hidup layak di Kabupaten Banjar semakin besar. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah semakin rentan terdorong ke bawah garis kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pengendalian inflasi daerah, dan penguatan jaring pengaman sosial.



Gambar 3. 8 Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Kalsel, 2025

Apabila dibandingkan dengan 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar menempati kelompok menengah atas, yaitu berada pada urutan ketujuh tertinggi. Posisi tersebut berada di bawah daerah dengan karakteristik perkotaan dan pusat perdagangan seperti Kota Banjarbaru (Rp.814.292) dan Kota Banjarmasin (Rp.752.092), serta di bawah beberapa kabupaten dengan struktur biaya distribusi dan konsumsi tinggi seperti Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Tabalong. Namun demikian, garis kemiskinan Kabupaten Banjar masih lebih tinggi dibandingkan Hulu Sungai Utara, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Balangan, Hulu Sungai Tengah, hingga Barito Kuala.

Kondisi ini menunjukkan bahwa beban pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Banjar tergolong cukup tinggi. Tingginya posisi Kabupaten Banjar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, Kabupaten Banjar merupakan wilayah penyangga kawasan metropolitan Banjarkuala sehingga pola konsumsi masyarakat tidak sepenuhnya bercorak perdesaan, tetapi mulai bergeser mengikuti kebutuhan masyarakat perkotaan. Kedua, kedekatan dengan pusat aktivitas ekonomi di Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin mendorong meningkatnya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, jasa, serta

kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, adanya heterogenitas wilayah dimana sebagian masyarakat berada pada kawasan semi urban dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi dibanding kabupaten yang dominan agraris.

Apabila dicermati lebih lanjut, selisih garis kemiskinan Kabupaten Banjar dengan rata-rata provinsi hanya sekitar Rp.16.149, yang berarti Kabupaten Banjar sudah sangat mendekati level kebutuhan hidup minimum Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun persentase kemiskinan Kabupaten Banjar relatif rendah, masyarakat miskin di Kabupaten Banjar membutuhkan pengeluaran yang lebih besar untuk dapat keluar dari kondisi miskin dibandingkan daerah-daerah dengan garis kemiskinan lebih rendah. Dengan kata lain, tantangan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar bukan hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menjaga agar pendapatan kelompok rentan mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup minimum yang terus meningkat.

Posisi Kabupaten Banjar yang berada pada kelompok menengah atas ini menjadi sinyal bahwa tekanan inflasi daerah, terutama pada komponen makanan, perumahan, transportasi, dan jasa dasar, harus menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Tanpa penguatan kebijakan stabilisasi harga, peningkatan akses pekerjaan produktif, dan penguatan perlindungan sosial, maka kenaikan garis kemiskinan berpotensi memperbesar kerentanan masyarakat hampir miskin untuk jatuh kembali di bawah garis kemiskinan.

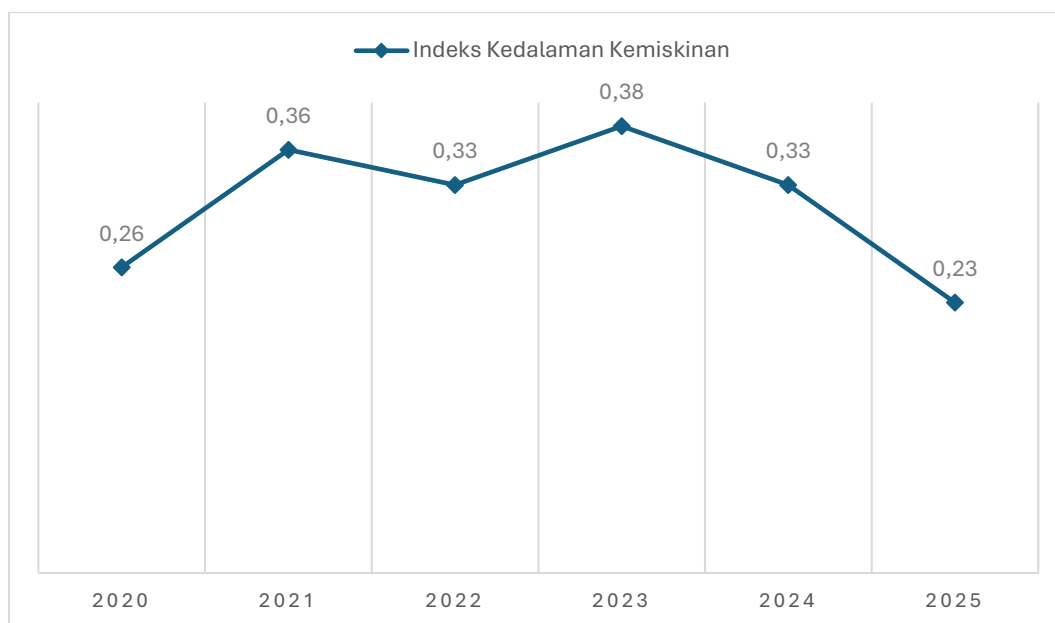
Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengendalian kemiskinan di Kabupaten Banjar pada tahun 2027 akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, persentase penduduk miskin perlu terus ditekan melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas usaha masyarakat, dan perluasan intervensi pemberdayaan ekonomi. Namun di sisi lain, tingginya garis kemiskinan menunjukkan bahwa standar pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar juga terus meningkat, sehingga rumah tangga miskin dan rentan miskin membutuhkan dukungan pendapatan yang lebih besar agar tidak tertinggal oleh laju kenaikan biaya hidup. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi harus diperkuat melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi daerah, peningkatan

akses terhadap layanan dasar yang terjangkau, penguatan ketahanan pangan rumah tangga, serta pengembangan sumber-sumber penghidupan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Banjar diharapkan tidak hanya mampu menurunkan jumlah penduduk miskin secara statistik, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat secara lebih substantif dan berkelanjutan.

3.1.6 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025 (Nilai)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index–P1) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Indeks ini menunjukkan sejauh mana rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah batas garis kemiskinan, sehingga dapat menggambarkan tingkat keparahan atau kedalaman kondisi kemiskinan di suatu wilayah.

Semakin besar nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), maka semakin lebar jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Artinya, nilai P1 yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk miskin memiliki tingkat pengeluaran yang semakin jauh dari batas minimum kebutuhan hidup layak.



Gambar 3. 9 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2025

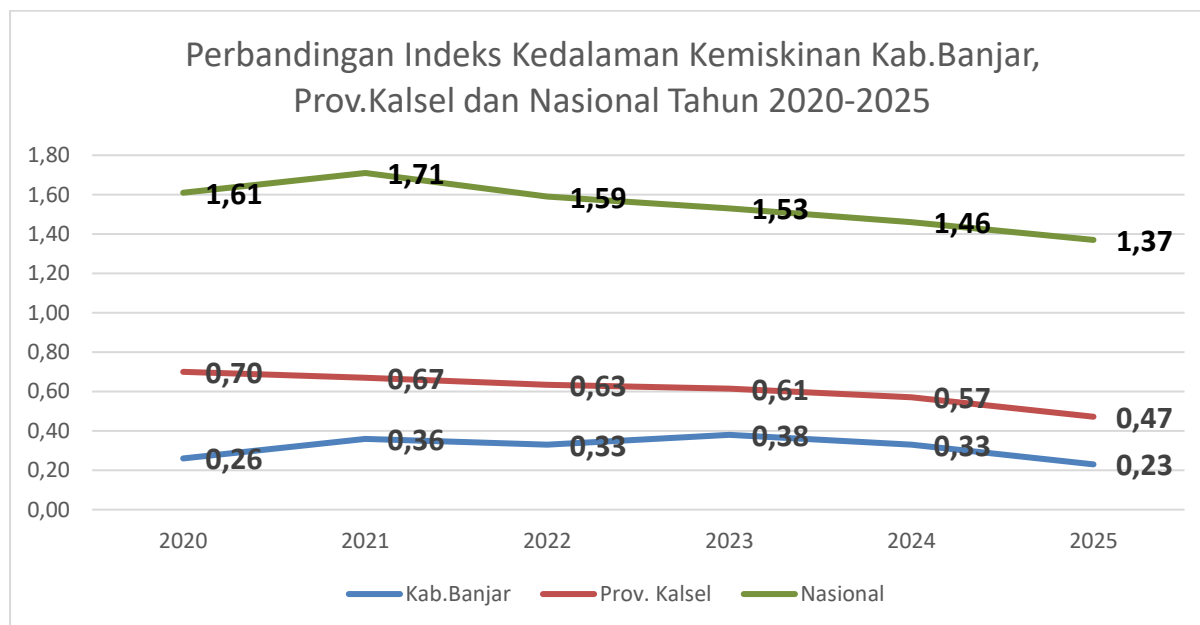
Berdasarkan data Kabupaten Banjar, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan selama periode 2020–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung membaik pada akhir periode. Pada tahun 2020 nilai P1 tercatat sebesar **0,26**, kemudian meningkat menjadi **0,36** pada tahun 2021. Pada tahun 2022 indeks ini sedikit menurun menjadi **0,33**, namun kembali naik ke titik tertinggi sebesar **0,38** pada tahun 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 turun kembali menjadi **0,33**, dan pada tahun 2025 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi **0,23**, yang merupakan nilai terendah selama enam tahun terakhir.

Secara tren, kenaikan indeks pada periode 2021–2023 menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin tidak terlalu tinggi, terdapat kondisi dimana rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih cukup jauh di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar pada periode tersebut menghadapi tekanan ekonomi yang lebih berat akibat kenaikan biaya kebutuhan dasar, perlambatan pemulihan ekonomi pasca pandemi, inflasi bahan pokok, serta belum meratanya peningkatan pendapatan kelompok rentan. Dengan kata lain, sebagian penduduk miskin masih berada pada kategori miskin yang cukup dalam.

Namun demikian, penurunan indeks secara konsisten sejak tahun 2023 hingga mencapai 0,23 pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan kelompok miskin. Nilai tersebut mengandung arti bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit, sehingga beban kekurangan konsumsi dasar yang dialami masyarakat miskin semakin berkurang. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa intervensi pemerintah daerah melalui program perlindungan sosial, bantuan pangan, pengendalian inflasi, peningkatan kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai memberikan dampak terhadap peningkatan daya beli kelompok miskin.

Secara teknokratis, capaian P1 tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya menjadi sinyal positif bahwa kemiskinan di Kabupaten Banjar tidak hanya menurun dari sisi persentase, tetapi juga semakin dangkal. Artinya, rumah tangga miskin secara rata-rata semakin dekat untuk keluar dari garis kemiskinan apabila didukung intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Meski demikian, fluktuasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok miskin Kabupaten Banjar masih sensitif terhadap gejolak harga dan pendapatan,

sehingga penguatan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin tetap menjadi agenda penting.



Gambar 3. 10 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Kab.Banjar, BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, 2025

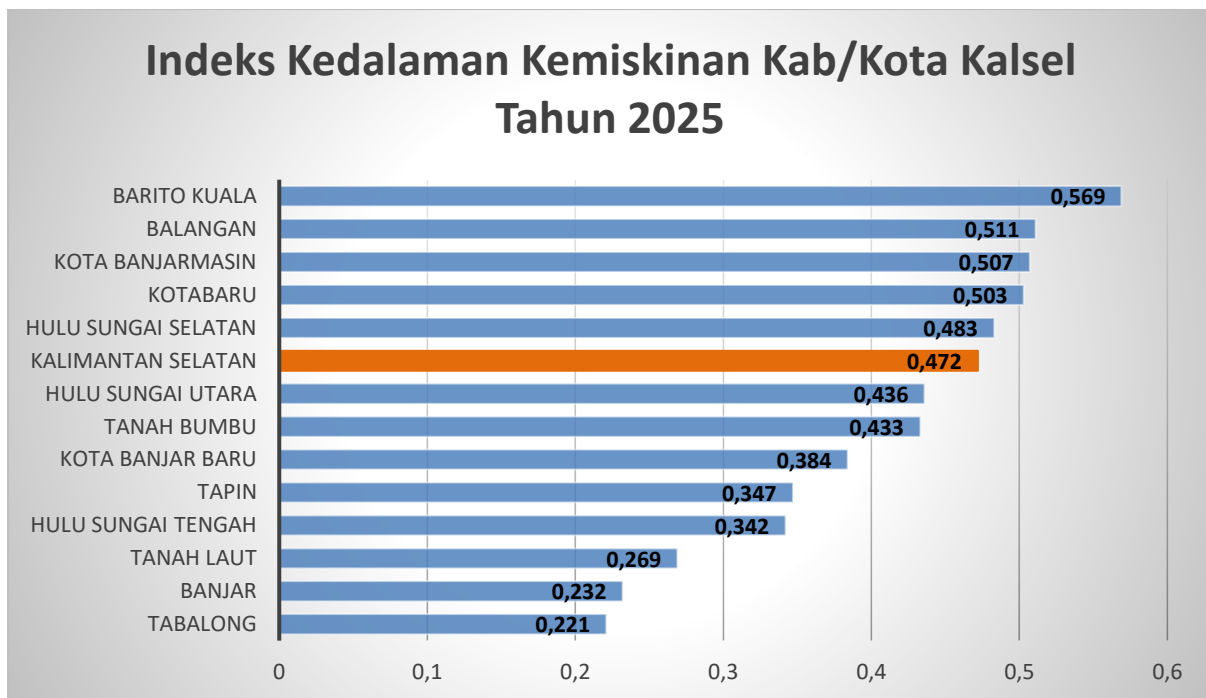
Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banjar tercatat sebesar **0,26**, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **0,70** dan nasional sebesar **1,61**. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Banjar pada awal periode relatif lebih dekat dengan garis kemiskinan dibandingkan penduduk miskin pada level provinsi maupun nasional. Dengan kata lain, tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat miskin di Kabupaten Banjar tergolong lebih sempit.

Selanjutnya pada tahun 2025, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banjar kembali menurun menjadi **0,23**. Pada periode yang sama, Provinsi Kalimantan Selatan turun menjadi **0,472**, sedangkan nasional menurun menjadi **1,37**. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin, dimana rata-rata pengeluaran kelompok miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Meskipun demikian, nilai Kabupaten Banjar tetap merupakan yang paling rendah dibandingkan provinsi maupun nasional, yang mengindikasikan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banjar masih relatif ringan.

Secara kuantitatif, selama kurun waktu lima tahun indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banjar mengalami penurunan sebesar **0,03 poin** atau sekitar **11,54 persen**. Penurunan ini lebih kecil dibandingkan penurunan pada Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar **32,57 persen**, dan nasional sebesar **14,91 persen**. Meskipun laju penurunannya tidak sebesar provinsi, hal tersebut lebih disebabkan karena posisi awal Kabupaten Banjar memang sudah berada pada tingkat yang sangat rendah, sehingga ruang penurunan menjadi relatif terbatas. Dengan demikian, capaian ini tetap menunjukkan bahwa kondisi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Banjar cenderung lebih terkendali.

Rendahnya indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Banjar mengandung makna bahwa sebagian besar penduduk miskin berada tidak terlalu jauh di bawah garis kemiskinan atau berada pada kategori miskin rentan. Artinya, dengan intervensi yang tepat berupa bantuan sosial yang terarah, peningkatan akses pekerjaan produktif, dukungan usaha ekonomi keluarga, dan pengendalian harga kebutuhan pokok, kelompok masyarakat miskin tersebut relatif lebih mudah didorong keluar dari kondisi kemiskinan. Namun demikian, kondisi ini juga menunjukkan adanya kerentanan tinggi, sebab gejolak inflasi, penurunan pendapatan, atau guncangan ekonomi dapat dengan cepat menyebabkan rumah tangga rentan kembali jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional, posisi Kabupaten Banjar yang memiliki indeks kedalaman kemiskinan jauh lebih rendah memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan di daerah ini bukan terutama terletak pada jurang pengeluaran yang sangat lebar, melainkan pada keberadaan rumah tangga-rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Dengan demikian, tantangan utama pembangunan tahun 2027 adalah menjaga agar kelompok miskin dan hampir miskin tidak mengalami penurunan daya beli akibat meningkatnya biaya hidup, sekaligus mendorong percepatan peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan ekonomi dan perluasan akses kesempatan kerja. Strategi ini menjadi penting agar kedalaman kemiskinan yang saat ini relatif rendah dapat terus ditekan, sehingga masyarakat miskin tidak hanya berkurang secara jumlah tetapi juga semakin mendekati tingkat kesejahteraan yang layak.



**Gambar 3. 11 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2025**

Sumber: BPS Provinsi Kalsel, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) antar kabupaten/kota pada tahun 2025 menunjukkan variasi yang cukup nyata, dengan kisaran antara **0,221 hingga 0,569**. Nilai terendah tercatat di Kabupaten Tabalong sebesar **0,221**, sedangkan nilai tertinggi berada di Kabupaten Barito Kuala sebesar **0,569**. Rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka **0,472**.

Kabupaten Banjar pada tahun 2025 memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan sebesar **0,232**, menempatkan Kabupaten Banjar sebagai **daerah dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Selatan** setelah Kabupaten Tabalong. Posisi ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Banjar tergolong sangat rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Dengan kata lain, penduduk miskin di Kabupaten Banjar secara umum berada relatif lebih dekat dengan ambang garis kemiskinan, sehingga tingkat kekurangan konsumsi yang dialami tidak sedalam daerah lain.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,472, nilai Kabupaten Banjar hanya sekitar **49,15 persen dari rata-rata provinsi**.

Hal ini menandakan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Banjar jauh lebih ringan dibandingkan kondisi umum Kalimantan Selatan. Bahkan bila dibandingkan dengan sejumlah daerah lain seperti Kota Banjarmasin (0,507), Kotabaru (0,503), Balangan (0,511), Hulu Sungai Selatan (0,483), dan Barito Kuala (0,569), kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin di Kabupaten Banjar terlihat jauh lebih sempit.

Posisi Kabupaten Banjar yang berada pada kelompok terbaik ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di daerah bukan didominasi oleh rumah tangga yang sangat miskin, melainkan lebih banyak didominasi oleh rumah tangga yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan atau kelompok miskin rentan. Artinya, secara karakteristik, penduduk miskin Kabupaten Banjar masih memiliki peluang yang relatif lebih besar untuk segera terdorong keluar dari kemiskinan apabila memperoleh tambahan pendapatan, bantuan perlindungan sosial, atau akses usaha produktif yang memadai.

Namun demikian, kondisi indeks kedalaman kemiskinan yang rendah tersebut juga perlu dibaca secara hati-hati. Rendahnya nilai P1 bukan berarti persoalan kemiskinan telah selesai, melainkan menunjukkan bahwa terdapat konsentrasi rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan dan sangat sensitif terhadap perubahan harga kebutuhan pokok, penurunan pendapatan, maupun gangguan ekonomi rumah tangga. Dengan kata lain, kelompok masyarakat ini mudah keluar dari kemiskinan, tetapi juga mudah kembali jatuh miskin apabila tidak didukung oleh kestabilan daya beli dan keberlanjutan sumber penghidupan.

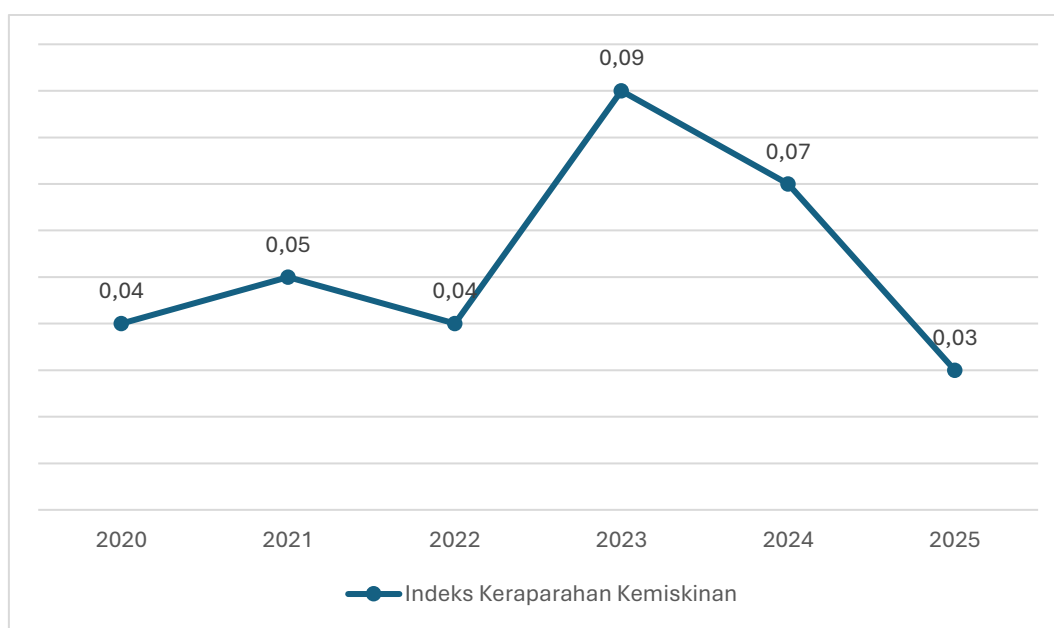
Jika dicermati dari persebaran kabupaten/kota, daerah dengan indeks kedalaman kemiskinan relatif tinggi umumnya merupakan wilayah yang memiliki keterbatasan akses ekonomi, dominasi sektor primer berproduktivitas rendah, serta ketergantungan pada aktivitas pertanian tradisional dan kawasan rawa/perdesaan. Sementara Kabupaten Banjar, meskipun memiliki wilayah perdesaan yang luas, memperoleh keuntungan dari kedekatan dengan kawasan pertumbuhan Banjarbakula sehingga akses pasar, distribusi barang, kesempatan kerja, dan aktivitas jasa relatif lebih terbuka. Faktor ini turut menekan jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan menjadi lebih kecil.

Posisi Kabupaten Banjar sebagai kabupaten dengan indeks kedalaman kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Selatan merupakan modal positif dalam

percepatan pengurangan kemiskinan tahun 2027. Strategi kebijakan yang diperlukan bukan semata penanganan kemiskinan ekstrem, melainkan lebih diarahkan pada upaya menjaga kelompok miskin dan rentan miskin tetap berada di atas garis kemiskinan melalui penguatan pendapatan rumah tangga, perluasan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan dasar, serta intervensi perlindungan sosial yang responsif dan berkelanjutan.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dalam suatu wilayah. Nilai P2 yang semakin tinggi menandakan bahwa perbedaan pengeluaran antar individu miskin semakin besar, sehingga mencerminkan ketimpangan yang lebih dalam di kelompok masyarakat berpendapatan rendah.



Gambar 3. 12 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2025

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar selama periode 2020–2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi namun pada akhir periode memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 nilai indeks

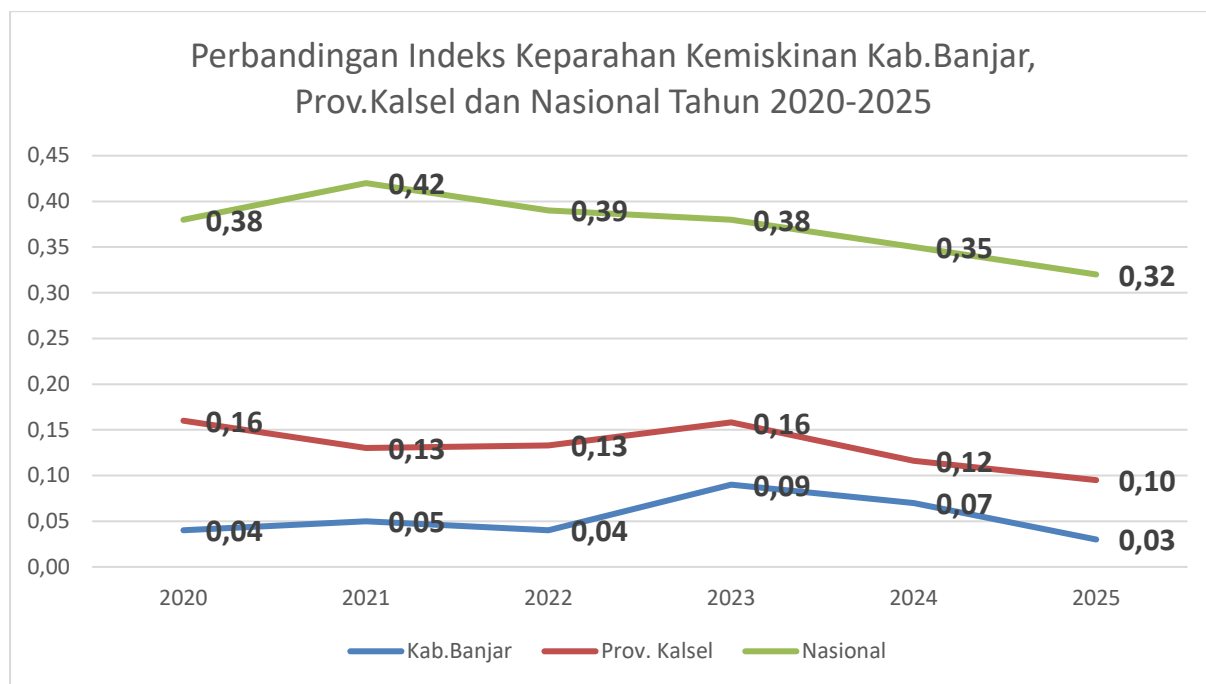
keparahan kemiskinan tercatat sebesar **0,04**, kemudian meningkat menjadi **0,05** pada tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai ini kembali turun menjadi **0,04**, namun pada tahun 2023 melonjak cukup tajam hingga mencapai **0,09** yang merupakan titik tertinggi selama periode pengamatan. Selanjutnya pada tahun 2024 indeks menurun menjadi **0,07**, dan kembali turun signifikan pada tahun 2025 menjadi **0,03**, yang merupakan nilai terendah dalam enam tahun terakhir.

Kenaikan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada periode tersebut terdapat ketimpangan tingkat kesejahteraan yang lebih besar di antara penduduk miskin. Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin tidak meningkat secara drastis, terdapat sebagian rumah tangga yang berada jauh di bawah garis kemiskinan sehingga kondisi kemiskinan menjadi lebih berat dan tidak merata. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan biaya hidup, fluktuasi harga komoditas kebutuhan pokok, kerentanan pendapatan pekerja informal, serta belum meratanya pemulihan ekonomi pada kelompok masyarakat bawah.

Namun demikian, tren penurunan yang terjadi pada tahun 2024 hingga 2025 memberikan sinyal positif bahwa tingkat ketimpangan di dalam kelompok miskin mulai menurun. Penurunan nilai P2 menjadi 0,03 pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran antar rumah tangga miskin semakin merata dan kesenjangan kondisi kemiskinan ekstrem semakin kecil. Dengan kata lain, tidak terdapat lagi perbedaan yang terlalu jauh antara rumah tangga miskin yang paling bawah dengan rumah tangga miskin lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi penanggulangan kemiskinan mulai mampu menjangkau kelompok miskin secara lebih luas dan merata. Secara teknokratis, rendahnya indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2025 menandakan bahwa kualitas kemiskinan di Kabupaten Banjar mengalami perbaikan. Penanganan kemiskinan tidak hanya berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga berhasil mengurangi disparitas tingkat kesejahteraan di dalam kelompok miskin itu sendiri. Kondisi ini penting karena semakin rendah keparahan kemiskinan, semakin kecil pula risiko munculnya kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang membutuhkan biaya intervensi sangat tinggi.

Meski demikian, adanya lonjakan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kelompok miskin Kabupaten Banjar masih rentan terhadap gejolak ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah ke depan perlu tetap diarahkan pada

penguatan perlindungan sosial adaptif, stabilisasi harga kebutuhan dasar, peningkatan akses pendapatan rumah tangga miskin, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan agar tingkat keparahan kemiskinan dapat dipertahankan pada level rendah secara berkelanjutan.



Gambar 3. 13 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025

Sumber: BPS Kab.Banjar, BPS Provinsi Kalsel, BPS RI, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar selama periode 2020–2025 menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.

Pada tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar tercatat sebesar **0,04**, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **0,16** dan nasional sebesar **0,38**. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Banjar tergolong sangat rendah, sehingga mayoritas penduduk miskin berada pada tingkat kekurangan pengeluaran yang relatif tidak terlalu berjauhan.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjar selalu menjadi yang paling rendah dibandingkan provinsi maupun nasional sepanjang periode tersebut.



Gambar 3. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Kalsel, 2025

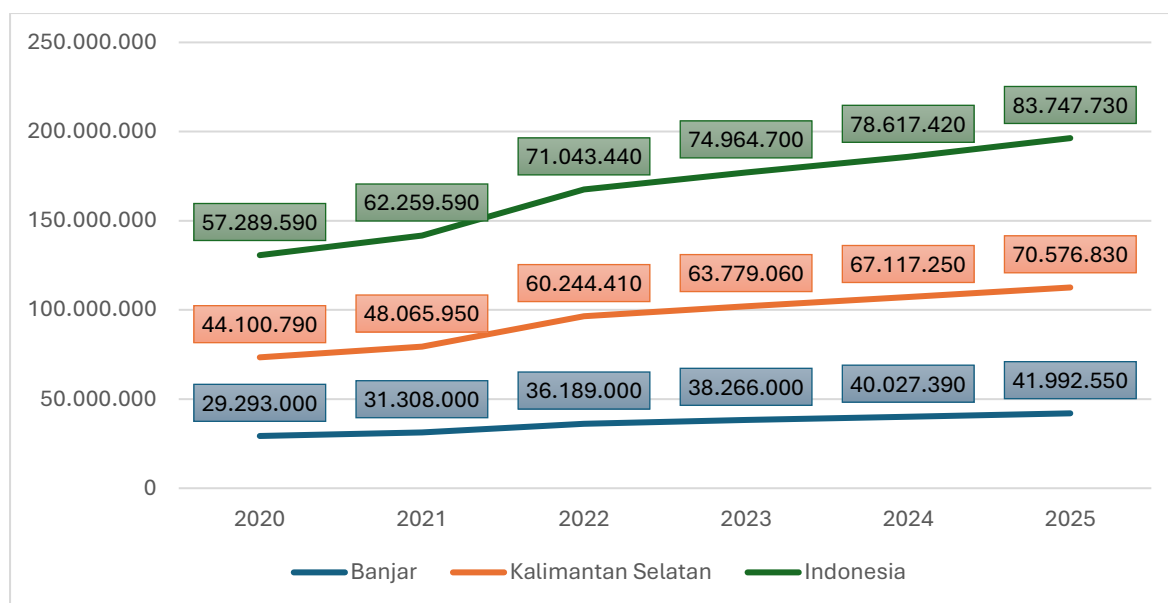
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota pada tahun 2025 berada pada rentang **0,018 hingga 0,124**, dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar **0,095**. Nilai tertinggi tercatat di Kabupaten Barito Kuala sebesar **0,124**, disusul Hulu Sungai Selatan sebesar **0,123** dan Tanah Bumbu sebesar **0,119**. Sementara nilai terendah berada di Kabupaten Tabalong sebesar **0,018**.

Kabupaten Banjar pada tahun 2025 memiliki nilai indeks keparahan kemiskinan sebesar **0,028**, sehingga menempatkan Kabupaten Banjar sebagai **kabupaten dengan indeks keparahan kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Selatan** setelah Kabupaten Tabalong. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Banjar tergolong sangat rendah dibandingkan daerah lain. Dengan kata lain, kondisi rumah tangga miskin di Kabupaten Banjar relatif lebih merata dan tidak terdapat kesenjangan yang terlalu tajam antara kelompok miskin yang paling bawah dengan kelompok miskin lainnya.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,095, nilai Kabupaten Banjar hanya sekitar **29,47 persen dari rata-rata provinsi**, yang berarti tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Banjar jauh lebih ringan dibandingkan kondisi umum kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Bahkan selisih Kabupaten Banjar dengan daerah-daerah yang memiliki nilai P2 tinggi seperti Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, maupun Kotabaru menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Banjar tidak terdapat akumulasi rumah tangga sangat miskin dalam jumlah besar yang mengalami ketertinggalan pengeluaran secara ekstrem.

3.1.7 Grafik PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator makro yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Indikator ini diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk, sehingga mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat secara rata-rata. Dalam penyajiannya, PDRB per kapita dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan. Pertama, atas dasar harga berlaku (ADHB), yang menggambarkan nilai ekonomi secara nominal sesuai harga pada tahun berjalan, sehingga masih dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi. Adapun PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Banjar untuk periode 2020-2025 disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. 15 Grafik PDRB ADHB Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Sumber: BPS RI, 2026; BPS Kalimantan Selatan, 2026; BPS Kabupaten Banjar, 2026

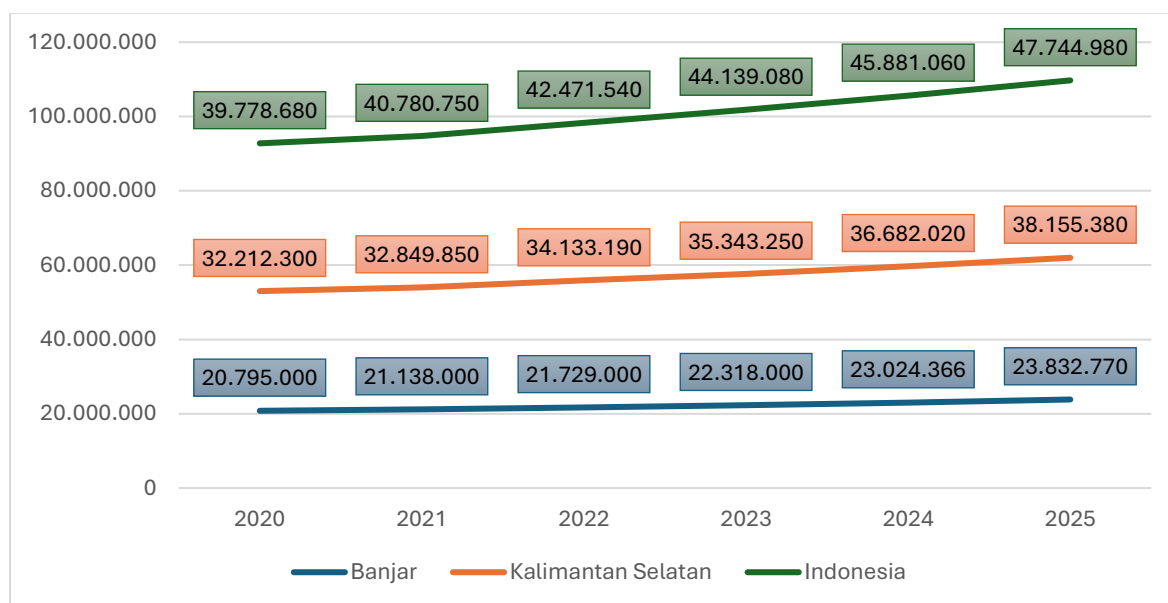
PDRB ADHB per kapita Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2025. Dalam kurun waktu tersebut, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Banjar meningkat sebesar 12,70 juta rupiah, dari 29,29 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 41,99 juta rupiah pada tahun 2025, atau tumbuh sebesar 43,35 persen. Persentase pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 60,04 persen, namun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional yang tumbuh sebesar 46,18 persen.

Pada level provinsi, PDRB ADHB per kapita Kalimantan Selatan meningkat sebesar 26,48 juta rupiah, dari 44,10 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 70,58 juta rupiah pada tahun 2025. Sementara itu, pada level nasional, peningkatan PDRB ADHB per kapita mencapai 26,46 juta rupiah, yaitu dari 57,29 juta rupiah menjadi 83,75 juta rupiah pada periode yang sama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal nilai tambah ekonomi per kapita secara nominal, laju pertumbuhannya masih relatif tertinggal dibandingkan dengan tingkat provinsi dan sedikit di bawah capaian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan ekonomi daerah masih perlu terus didorong agar mampu memperkecil kesenjangan dengan wilayah yang lebih tinggi.

3.1.8 Grafik PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2021–2025

Kedua untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pertumbuhan ekonomi riil masyarakat, yang telah menghilangkan pengaruh inflasi, maka analisis selanjutnya perlu menggunakan indikator PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK). Adapun data PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar untuk periode 2020-2025 disajikan sebagai berikut:



Gambar 3. 16 Grafik PDRB ADHK Per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025

Sumber: BPS RI, 2026; BPS Kalimantan Selatan, 2026; BPS Kabupaten Banjar, 2026

Dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Namun demikian, laju pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan PDRB ADHB per kapita karena indikator ADHK telah menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga lebih mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil.

Selama periode 2020–2025, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Banjar meningkat sebesar 3,04 juta rupiah, dari 20,80 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 23,83 juta rupiah pada tahun 2025, dengan persentase pertumbuhan sebesar 14,61 persen. Secara umum, persentase pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 18,45 persen maupun tingkat nasional sebesar 20,03 persen.

Pada periode yang sama, PDRB ADHK per kapita di tingkat provinsi meningkat sebesar 5,94 juta rupiah, dari 32,21 juta rupiah menjadi 38,16 juta rupiah. Sementara itu, pada tingkat nasional, peningkatan mencapai 7,97 juta rupiah, yaitu dari 39,78 juta rupiah menjadi 47,74 juta rupiah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Banjar masih relatif lebih lambat dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional. Meskipun demikian, tren peningkatan yang terjadi setiap tahun mencerminkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi riil masyarakat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar masih memiliki potensi untuk terus mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan produktivitas dan penguatan sektor-sektor unggulan daerah.

3.1.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang belum terserap dalam pasar kerja. Indikator ini mencerminkan kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi penduduk usia produktif. Dalam konteks pembangunan daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, serta stabilitas sosial.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur lapangan usaha, serta kualitas sumber daya manusia. Penurunan tingkat pengangguran pada umumnya menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, sedangkan peningkatan pengangguran mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia.

Salahsatu inklusifitas pertumbuhan ekonomi menyasar pada kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi (lapangan usaha) sangat diperlukan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan akan semakin memberikan multiplier efek besar bagi perluasan kesempatan kerja di daerah. Implikasinya, perhatian pemerintah sudah selayaknya lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi yang padat tenaga kerja. Semakin

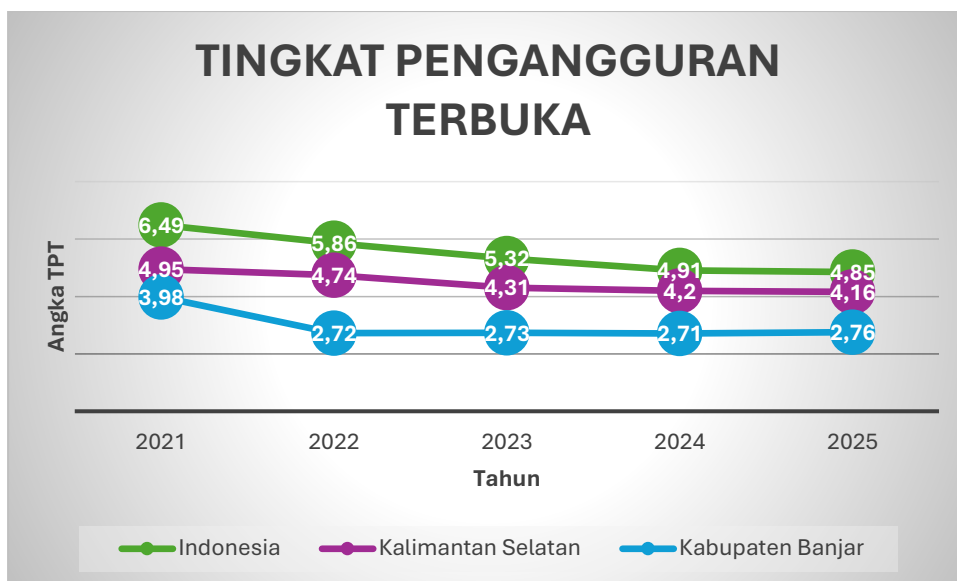
pertumbuhan ekonomi inklusif, maka tingkat pengangguran juga akan berangsur menurun.

Dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Pemerintah Daerah perlu mengarahkan kebijakan pada penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

**Tabel 3. 4 TPT Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar
Tahun 2021-2025**

No.	Tahun	Indonesia	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar
1.	2021	6.49	4.95	3.98
2.	2022	5.86	4.74	2.72
3.	2023	5.32	4.31	2.73
4.	2024	4.91	4.20	2.71
5.	2025	4.85	4.16	2.76

Sumber Data : BPS Kab. Banjar, BPS Prov Kalsel, BPS RI, data diolah



Gambar 3. 17 Grafik TPT Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Sumber Data : BPS Kab. Banjar, BPS Prov Kalsel, BPS RI, data diolah

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif baik dan stabil. Kabupaten Banjar konsisten memiliki tingkat pengangguran yang:

- lebih rendah dibanding angka nasional,
- dan juga lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Banjar relatif lebih baik serta memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi dibanding wilayah lainnya.

Dijelaskan bahwa angka TPT Kabupaten Banjar menunjukkan perkembangan yang lumayan baik dibandingkan tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka yaitu dari 3.98 persen pada tahun 2021 turun menjadi 2.76 persen pada tahun 2025. Adapun angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banjar mengalami sedikit kenaikan di tahun 2025 disebabkan telah terjadinya PHK yang cukup besar di sektor pertambangan karena dampak geopolitik serta adanya kebijakan yang sangat ketat dari Kementerian ESDM terkait Usulan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Batubara dan adanya pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian perdesaan ke sektor informal seperti umkm dan sebagainya.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar terutama di perkotaan sebenarnya hanya menyebabkan aspek-aspek yang kompleks dari masalah kesempatan kerja dan merupakan penampakan dari fenomena gunung es dari kejadian pengangguran. Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai karena angka tingkat pengangguran hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah menganggur (*under employment*), pengangguran tak kentara (*disguished unemployment*), dan pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka.

Pengangguran (pengangguran terbuka), menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia adalah jika dan hanya jika memenuhi kriteria berikut : berusia 15-55 tahun, bekerja kurang dari 36 jam per minggu, dan sedang mencari pekerjaan.

Disguished unemployment adalah tenaga kerja dengan jam kerja di atas 36 jam per minggu akan tetapi memiliki marginal productivity yang sangat rendah (mendekati nol). Kurva tenaga kerja dengan marginal productivity yang mendekati nol dapat diilustrasikan dengan gambar di bawah ini.

Seperti dijelaskan di awal tadi khususnya di wilayah Kabupaten Banjar, fenomena tingkat pengangguran terbuka ini banyak dijumpai di bidang pertanian dan sektor-sektor informal. Pengolahan lahan pertanian yang seharusnya dapat dikerjakan oleh 3-4 orang/ha dikerjakan oleh lebih dari itu. Penambahan tenaga kerja sudah tidak lagi seimbang dengan penambahan hasil yang diperoleh. Di perdesaan kecenderungan meningkatnya *disguished unemployment* berkorelasi erat dengan semakin menurunnya luas kepemilikan lahan dan jumlah anggota keluarga yang semakin besar.

Dalam struktur masyarakat agraris Kabupaten Banjar, distribusi penggunaan tenaga kerja pertanian per tahun sangat diwarnai dinamika musim tanam. Pada masa pengolahan tanah dan penanaman terjadi peningkatan penggunaan tenaga kerja, sedangkan pada masa pemeliharaan tanaman pemakaian tenaga kerja sangatlah rendah, dan pada masa panen terjadi lagi peningkatan penggunaan tenaga kerja. Permasalahan tenaga kerja lainnya adalah etos kerja dari masyarakat Kabupaten Banjar yang buruk dibandingkan masyarakat di Pulau Jawa. Sebagian kelompok masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kabupaten Banjar secara khusus memiliki kecenderungan untuk tidak berupaya memaksimalkan pendapatannya, walaupun memperoleh kesempatan.

Walaupun capaian TPT Kabupaten Banjar secara umum cukup baik, terdapat beberapa tantangan ke depan, yaitu perlu adanya:

1. peningkatan kualitas tenaga kerja,
2. penyediaan lapangan kerja formal,
3. peningkatan kompetensi generasi muda,
4. adaptasi terhadap transformasi digital,
5. dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Selain itu, capaian rendahnya TPT Kabupaten Banjar belum tentu sepenuhnya mencerminkan tingginya kualitas pekerjaan, karena sebagian tenaga kerja masih berada pada sektor informal dan berpenghasilan rendah.

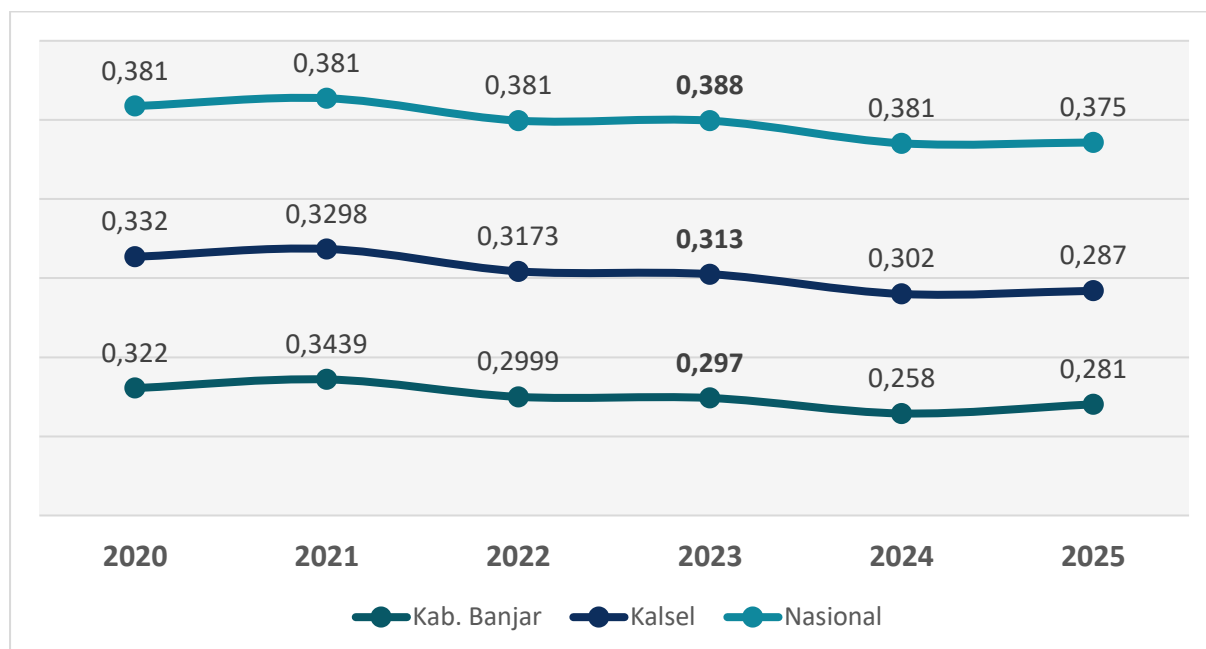
Dari angka-angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjar secara keseluruhan, maka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang sangat baik dan stabil. Kabupaten Banjar secara konsisten memiliki tingkat pengangguran lebih rendah dibanding nasional, dan lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar relatif sehat, daya serap tenaga kerja cukup baik, dan aktivitas ekonomi masyarakat mampu menopang stabilitas pasar kerja daerah. Ke depan, tantangan utama bukan hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan, produktivitas tenaga kerja, dan perluasan lapangan kerja formal yang berkelanjutan.

3.1.10 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan nilai yang semakin mendekati 1 menandakan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Dalam pengukurannya, Indeks Gini menggunakan asumsi bahwa pendapatan masyarakat dapat direpresentasikan melalui data pengeluaran rumah tangga. Secara umum, jika nilai indeks Gini berada pada kisaran 0,5–0,7 berarti terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi, sedangkan nilai antara 0,2–0,35 menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata di masyarakat.

Pengukuran ketimpangan dengan menggunakan Indeks Gini memiliki peran penting dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indeks ini berfungsi untuk mengidentifikasi pola distribusi pendapatan atau kekayaan, menilai tingkat kesenjangan antara kelompok masyarakat, serta menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini juga memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan pendapatan, di mana kisaran nilai antara 0,20 hingga 0,35 menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, sedangkan nilai antara 0,50 hingga 0,70 mengindikasikan adanya ketimpangan yang cukup tinggi di dalam masyarakat.



Gambar 3. 18 Perbandingan Indeks Gini Ratio Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2025 (Maret)

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2025

Indeks Gini di Kabupaten Banjar dari tahun 2020 hingga 2025, terlihat adanya fluktuasi nilai Indeks Gini selama periode tersebut. Namun, tren yang menarik adalah adanya penurunan nilai Indeks Gini dari 0,322 pada tahun 2020 menjadi 0,281 pada tahun 2025. Kabupaten Banjar memiliki tingkat ketimpangan yang sama rendahnya dibandingkan dengan tingkat nasional, artinya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Banjar lebih merata, serta provinsi Kalimantan Selatan juga

menunjukkan tren penurunan ketimpangan, sementara tingkat nasional tetap relatif stabil.

Meskipun ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan, fluktuasi nilai Indeks Gini menandakan bahwa upaya menuju pemerataan ekonomi perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu terus memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya, pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Selain itu, kebijakan yang mendorong peningkatan mobilitas sosial dan pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat harus terus diperkuat agar pemerataan kesejahteraan dapat tercapai secara menyeluruh.

Indeks Gini Kabupaten Banjar sempat mengalami fluktuasi pada periode 2020 dan sedikit kenaikan pasca-pandemi di tahun 2021 (0,3439), wilayah ini berhasil melakukan pemulihan struktur ekonomi masyarakat dengan sangat cepat. Sejak tahun 2022, Kabupaten Banjar menunjukkan tren penurunan yang konsisten dan stabil.

Tahun 2024 menjadi titik balik yang impresif bagi Kabupaten Banjar. Terdapat penurunan tajam yang mengindikasikan keberhasilan program distribusi pendapatan atau efektivitas bantuan sosial di tingkat akar rumput.

Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Banjar memiliki daya tahan ekonomi yang baik terhadap ketimpangan. Gap antara si kaya dan si miskin di wilayah ini jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional. Penurunan drastis di tahun 2024 mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya terpusat pada golongan tertentu, melainkan mulai terdistribusi secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.

3.1.11 Indeks Pembangunan Manusia

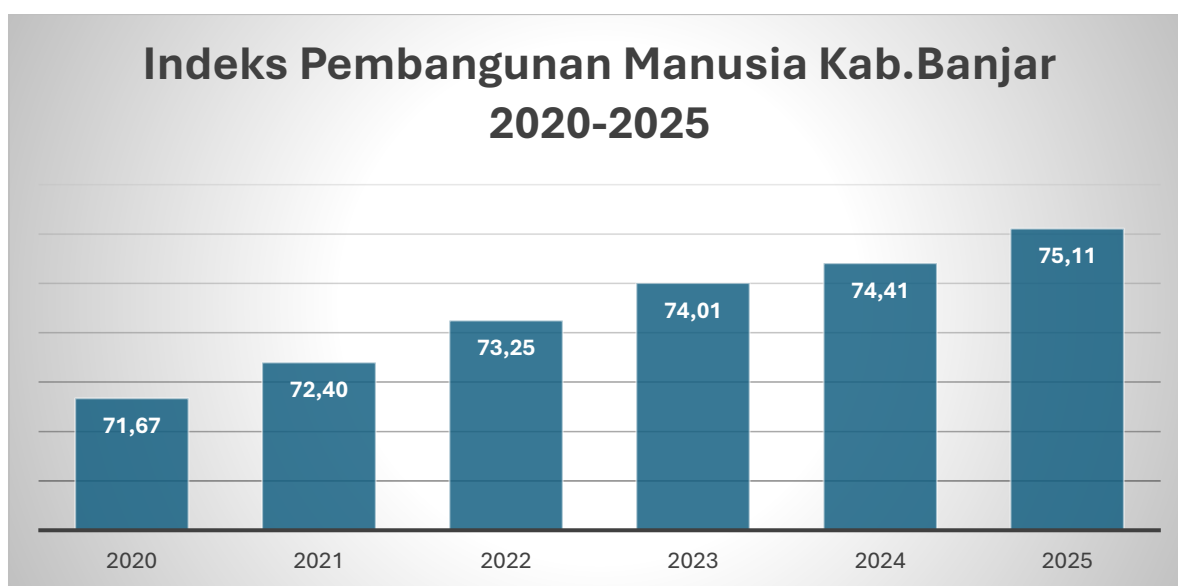
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama : umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM menjadi tolok ukur yang komprehensif dan representative. Tingginya angka IPM menunjukkan bahwa masyarakat di daerah tersebut memiliki harapan hidup yang tinggi, akses terhadap Pendidikan baik serta kondisi ekonomi yang memadai. Sebaliknya IPM yang rendah

menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pembangunan, terutama alam aspek layanan kesehatan, Pendidikan dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Daerah menggunakan IPM tidak hanya menjadi angka statistik semata, melainkan cerminan nyata dari keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Peningkatan IPM adalah indikator bahwa pembangunan benar benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan membawa manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat. Dengan indikator IPM sebagai acuan utama, daerah dapat memastikan bahwa pembangunan yang dicapai bersifat merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pemutakhiran perhitungan IPM dengan menggunakan data hasil long form SP 2020, dapat dilihat perkembangan IPM Kabupaten Banjar Tahun 2020-2025 sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 3. 19 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, 2025 (Data diolah)

Perkembangan IPM di Kabupaten Banjar selama enam tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, meskipun dengan laju pertumbuhan yang mulai melambat di tahun terakhir.

Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Banjar meningkat dari 71,67 pada tahun 2020 menjadi 74,41 pada tahun 2024, atau tumbuh sebesar 2,74 poin dalam lima tahun. Rata-rata pertumbuhan IPM per tahun adalah sekitar 0,685 poin

Tahun 2020 merupakan awal dari periode lima tahun yang dianalisis. Dengan angka IPM sebesar 71,67, Kabupaten Banjar berada pada kategori tinggi menurut klasifikasi BPS. Namun, tahun ini juga merupakan awal dari pandemi COVID-19, yang berdampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk kesehatan dan pendidikan. Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan fondasi pembangunan manusia yang relatif stabil

Pada tahun 2021, IPM mengalami peningkatan sebesar 0,73 poin menjadi 72,40. Kenaikan ini menandakan adanya pemulihan dari dampak pandemi, terutama dengan mulai dibukanya kembali akses layanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah tampaknya berhasil mempertahankan momentum pembangunan, meski dalam situasi yang masih penuh tantangan

IPM pada tahun 2022 meningkat signifikan sebesar 0,85 poin menjadi 73,25, yang merupakan kenaikan tertinggi dalam periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pemulihan sosial ekonomi mulai menunjukkan hasil yang nyata. Peningkatan ini kemungkinan didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi masyarakat, meningkatnya daya beli, serta perbaikan layanan pendidikan dan Kesehatan

Tahun 2023 mencatat peningkatan IPM sebesar 0,76 poin menjadi 74,01. Kenaikan ini masih relatif tinggi dan mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan pembangunan manusia. Keberhasilan ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai intervensi kebijakan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan akses layanan dasar di tingkat lokal.

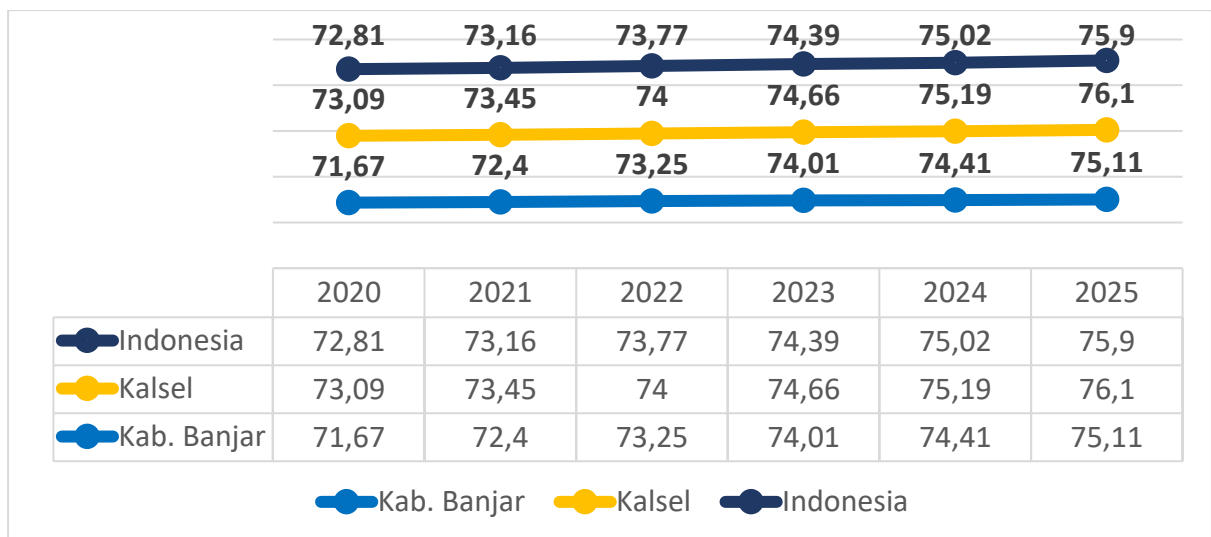
Pada tahun 2024, IPM meningkat menjadi 74,41, namun dengan kenaikan yang lebih kecil, yakni 0,40 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan laju pertumbuhan ini dapat mengindikasikan bahwa tantangan pembangunan mulai bergeser dari kuantitas ke kualitas, seperti peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat.

Tren ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Banjar terus mengalami kemajuan. Namun, perlambatan kenaikan IPM di tahun terakhir menunjukkan pentingnya pendekatan baru yang lebih fokus pada kualitas layanan dan pemerataan hasil pembangunan, terutama di sektor-sektor yang langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan agar dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan inovatif

guna menjaga momentum peningkatan IPM, terutama dalam mengatasi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara merata.

Untuk menjaga tren positif ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi pada pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang merata, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif guna mendorong daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Banjar berada pada jalur yang baik menuju pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif, namun tetap membutuhkan kerja sama dan sinergi lintas sektor agar pertumbuhan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.



Gambar 3. 20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020 -2025

Sumber : BPS Kabupaten Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, Data diolah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar menunjukkan tren kenaikan IPM yang konsisten setiap tahun, dari 2020 hingga 2025. Ini menandakan adanya peningkatan pembangunan manusia dalam hal pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat di semua tingkatan.

Meskipun mengalami peningkatan yang stabil, IPM Kabupaten Banjar selalu berada di bawah IPM provinsi dan nasional, menunjukkan bahwa pembangunan manusia di kabupaten ini masih tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

IPM Kalsel selalu lebih tinggi dari IPM Kabupaten Banjar, namun masih sedikit lebih tinggi daripada IPM nasional sepanjang periode 2020–2025. Ini menunjukkan bahwa secara umum, pembangunan manusia di Kalimantan Selatan cukup baik dan berada di atas rata-rata nasional.

IPM nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan berada di antara IPM Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalsel sepanjang periode 2020–2025.

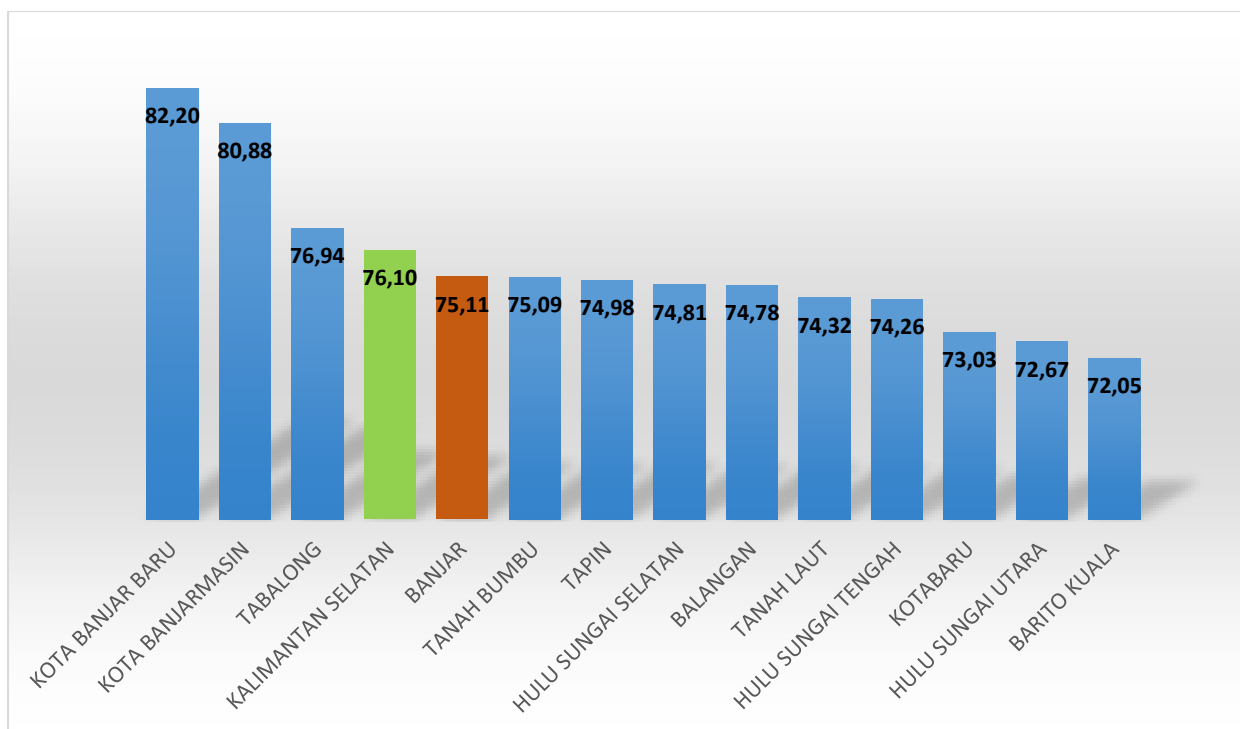
Pemerintah Kabupaten Banjar perlu memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat untuk mendorong percepatan peningkatan IPM serta perlu peningkatan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam program-program pembangunan manusia yang lebih fokus .

Posisi Relatif IPM Kabupaten Banjar terhadap IPM Kalimantan Selatan, pada tahun 2020, selisih sebesar – 1,42 poin dan pada tahun 2024 selisih sebesar -0,78 poin. Hal ini menunjukkan IPM Kabupaten Banjar semakin mendekati rata rata IPM Provinsi, dengan selisih berkurang hampir setengah dalam 5 tahun.

Posisi Relatif IPM Kabupaten Banjar terhadap IPM Nasional, pada tahun 2020, selisih sebesar – 1,14 poin dan pada tahun 2024 selisih sebesar -0,61 poin. Hal ini menunjukkan Kabupaten Banjar mengejar ketertinggalannya terhadap IPM Nasional secara signifikan.

Kabupaten Banjar memiliki laju kenaikan IPM tercepat dibanding Provinsi maupun Nasional.

Rata rata kenaikan tahunan untuk Kabupaten Banjar sebesar + 0,685, rata rata kenaikan tahunan untuk provinsi sebesar +0,525 dan rata rata kenaikan nasional sebesar + 0,552. Kab. Banjar menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam hal mengejar ketertinggalan terhadap provinsi dan nasional.



Gambar 3. 21 Perbandingan IPM Kab / Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2025

Sumber : BPS Provinsi Kalsel 2025, Data diolah

Berdasarkan perbandingan 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar mencatat nilai IPM sebesar **75,11**. Capaian ini menempatkan Kabupaten Banjar pada **peringkat keempat tertinggi** setelah Kota Banjarbaru (**82,20**), Kota Banjarmasin (**80,88**), dan Kabupaten Tabalong (**76,94**). Posisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia Kabupaten Banjar berada pada kelompok atas di Kalimantan Selatan dan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya seperti Tanah Bumbu, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Hulu Sungai Utara, dan Barito Kuala.

Meskipun demikian, nilai IPM Kabupaten Banjar masih berada sedikit di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan dengan selisih sekitar **0,99 poin**. Hal ini menandakan bahwa secara umum kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banjar sudah cukup baik, namun masih memerlukan percepatan peningkatan terutama untuk mengejar daerah-daerah dengan karakteristik perkotaan maju seperti Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin yang memiliki keunggulan signifikan pada akses pendidikan, layanan kesehatan, dan tingkat pengeluaran masyarakat.

Apabila dilihat dari distribusi capaian, terdapat rentang IPM yang cukup lebar antara kabupaten/kota tertinggi dan terendah di Kalimantan Selatan, yaitu sekitar

10,15 poin antara Kota Banjarbaru dan Barito Kuala. Kabupaten Banjar berada pada posisi yang relatif strategis karena masuk dalam klaster daerah dengan IPM tinggi, namun belum mampu menembus kelompok sangat tinggi sebagaimana dua kota utama di provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Banjar telah bergerak ke arah yang positif, tetapi transformasinya belum secepat wilayah perkotaan yang memiliki konsentrasi fasilitas pendidikan, kesehatan, jasa, perdagangan, dan lapangan kerja modern.

Posisi Kabupaten Banjar yang berada di atas sebagian besar kabupaten lain mengindikasikan adanya dukungan faktor struktural yang cukup baik, antara lain kedekatan dengan kawasan metropolitan Banjarbakula, aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pelayanan dasar, pertumbuhan aktivitas ekonomi, serta meningkatnya kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan. Kedekatan dengan Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin memberikan efek spillover pembangunan yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banjar, terutama pada wilayah-wilayah peri-urban.

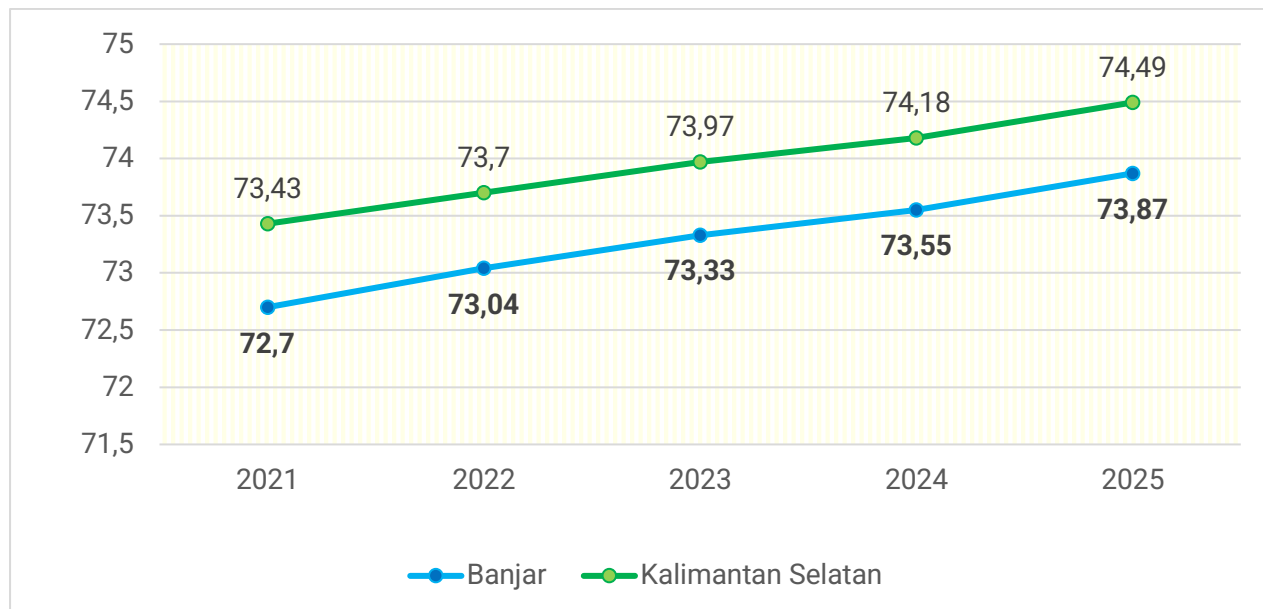
Secara komparatif, Kabupaten Banjar dapat dikatakan berada pada posisi **transisi antara kabupaten berkembang dan wilayah maju**. Kabupaten ini tidak lagi berada pada kelompok IPM rendah-menengah seperti beberapa kabupaten hinterland lainnya, namun juga masih memiliki gap yang cukup jauh dengan kota-kota maju. Kondisi ini menuntut arah kebijakan pembangunan tahun 2027 agar lebih menitikberatkan pada percepatan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi yang lebih fokus pada peningkatan mutu pendidikan, penurunan stunting dan perbaikan derajat kesehatan, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan riil masyarakat.

3.2 Kesehatan untuk Semua

3.2.1 Usian Harapan Hidup (UHH)

Pembangunan kesehatan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui upaya *promotive*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitative*, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu indikator yang mencerminkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup (UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat

ditempuh seseorang sejak lahir pada tahun suatu tahun tertentu. UHH menjadi salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM). Semakin tinggi UHH mengindikasikan semakin baik derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Berikut capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar.



Gambar 3. 22 Grafik Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2026

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Banjar mengalami tren yang meningkat selama periode 2021 hingga 2025. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, UHH Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebesar 1,17 poin. Kenaikan UHH mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar berjalan cukup baik. UHH dapat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, akses pemenuhan gizi, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih dan pengelolaan sampah yang memadai.

Pada tahun 2025, capaian UHH Kabupaten Banjar sebesar 73,87. Artinya, rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 73,87 tahun. Meskipun mengalami peningkatan, capaian UHH Kabupaten Banjar masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2025, UHH Kabupaten Banjar selisih 0,62 poin lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas kesehatan perlu dioptimalkan melalui program-program kesehatan seperti peningkatan kualitas

fasilitas kesehatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

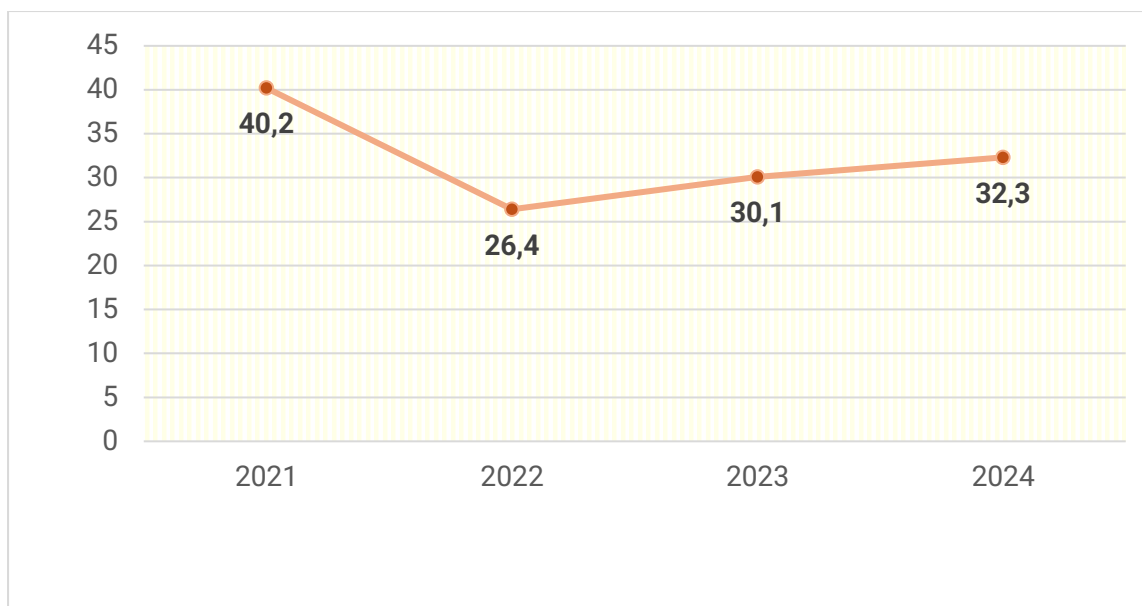
Indikator makro lain yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada sektor kesehatan adalah prevalensi stunting. Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan kekebalan tubuh anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis.

3.2.2 Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah ukuran epidemiologis yang menunjukkan persentase balita yang mengalami stunting terhadap total jumlah balita pada wilayah dan periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat masalah gizi kronis dan kualitas kesehatan masyarakat suatu daerah. Stunting

Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi dan pola asuh yang memadai dalam jangka panjang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan menurut umur lebih rendah dibandingkan standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh World Health Organization.

Secara teknis, seorang anak dikategorikan stunting apabila nilai Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) atau Panjang Badan menurut Umur (PB/U) berada di bawah minus dua standar deviasi (< -2 SD) dari standar baku pertumbuhan WHO.



Gambar 3. 23 Prevalensi Stunting di Kabupaten Banjar Tahun 2021-2024

Sumber: Diolah dari Laporan Studi Status Gizi Indonesia (2022-2025) dan data.kalseslprov.go.id, 2025

Berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk Kabupaten Banjar tahun 2021–2024, terlihat adanya fluktuasi prevalensi stunting yang cukup dinamis. Pola dinamis ini menunjukkan bahwa perubahan prevalensi stunting tidak selalu bersifat linier, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat temporer maupun struktural, termasuk perubahan metode pengukuran, cakupan sampel survei, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pada waktu tertentu. Dari 2021 ke 2022 Prevalensi stunting sempat menurun akan tetapi terjadi kenaikan kembali prevalensi pada tahun 2023–2025 yang juga dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dampak lanjutan pascapandemi, perubahan pola konsumsi rumah tangga, kondisi ketahanan pangan, serta variasi akses terhadap layanan kesehatan dan gizi di tingkat keluarga. Selain itu, sebagai survei berbasis sampling, SSGI memiliki kemungkinan variasi antar tahun yang dipengaruhi oleh distribusi responden dan karakteristik wilayah yang terpilih. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan RKPD, data ini perlu dibaca secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan faktor yang memengaruhi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kondisi stunting di Kabupaten Banjar.

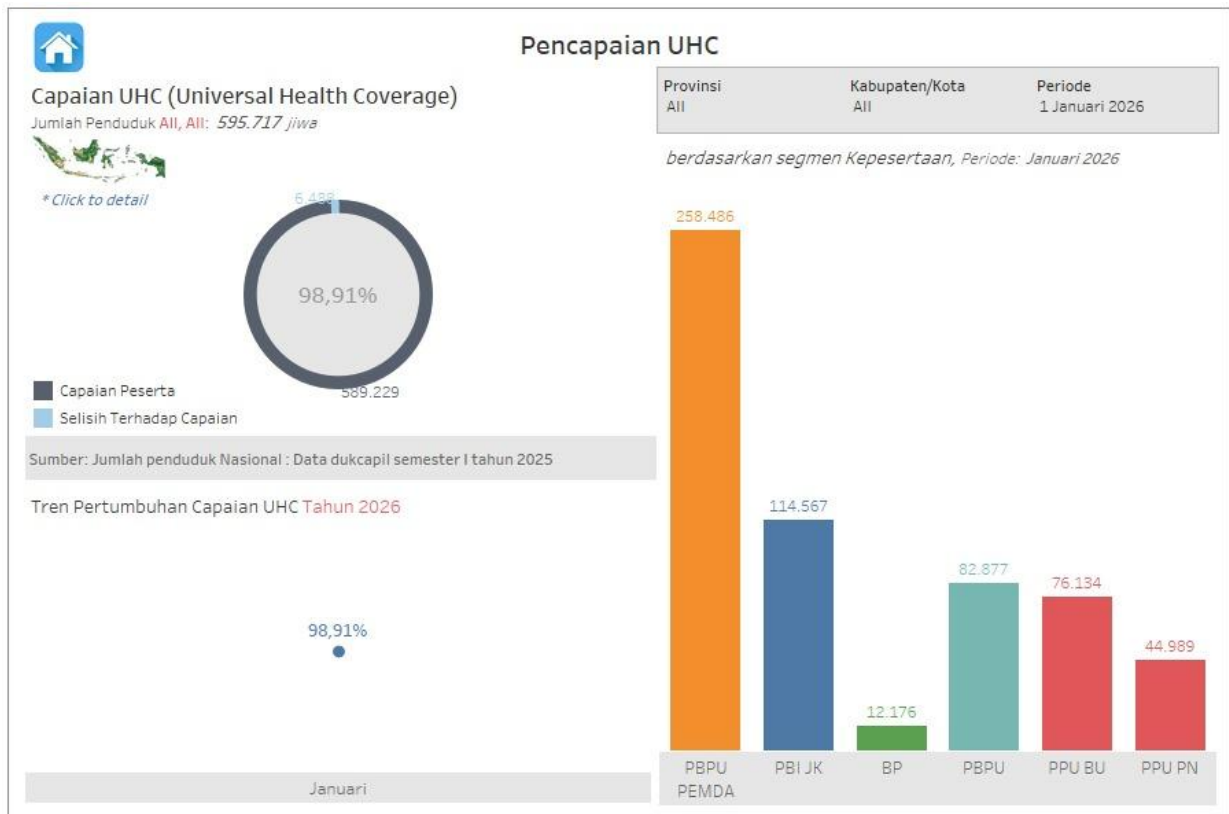
Pada tahun 2025, pengukuran prevalensi stunting melalui Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tidak dilaksanakan, sejalan dengan kebijakan dan regulasi terbaru dari Kementerian Kesehatan yang menetapkan bahwa pelaksanaan survei nasional tersebut dilakukan setiap dua tahun sekali. Dengan demikian, pengukuran berikutnya direncanakan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2026 guna memperoleh gambaran terkini yang lebih representatif dan terstandar secara nasional. Selama periode tanpa pelaksanaan SSGI, pemantauan kondisi stunting di Kabupaten Banjar tetap dilakukan secara rutin melalui pemanfaatan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Namun demikian, kualitas dan akurasi data E-PPGBM sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi sasaran atau cakupan penimbangan (D/S), sehingga apabila cakupan tersebut belum optimal, maka data yang dihasilkan berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, diperlukan kehati-hatian serta pendekatan analisis yang komprehensif dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber data yang ada. Upaya peningkatan cakupan D/S melalui penguatan peran posyandu, kader, serta dukungan lintas sektor menjadi sangat penting agar data E-PPGBM dapat semakin andal sebagai dasar pengambilan kebijakan.

3.2.3 Cakupan UHC atau Universal Health Coverage

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan memerlukan komponen pembiayaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan terdiri dari pembiayaan yang bersumber dari pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat.

Tahun 2023 Kabupaten Banjar telah mencapai UHC atau *Universal Health Coverage*. Predikat UHC ini tidak terlepas dari kontribusi daerah terhadap pencapaian atas bantuan pembayaran iuran PBI APBD Pemerintah Daerah. Tahun 2025 sebanyak 589.229 jiwa telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan rincian Penerima Bantuan iuran (PBI) APBN 114.567 jiwa, Penerima Bantuan iuran (PBI) APBD sebanyak 258.486 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) 121.113 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri 82.877

Jiwa serta Bukan Pekerja (BP) sebanyak 12.176 Jiwa. Adapun Grafik Pencapaian UHC Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

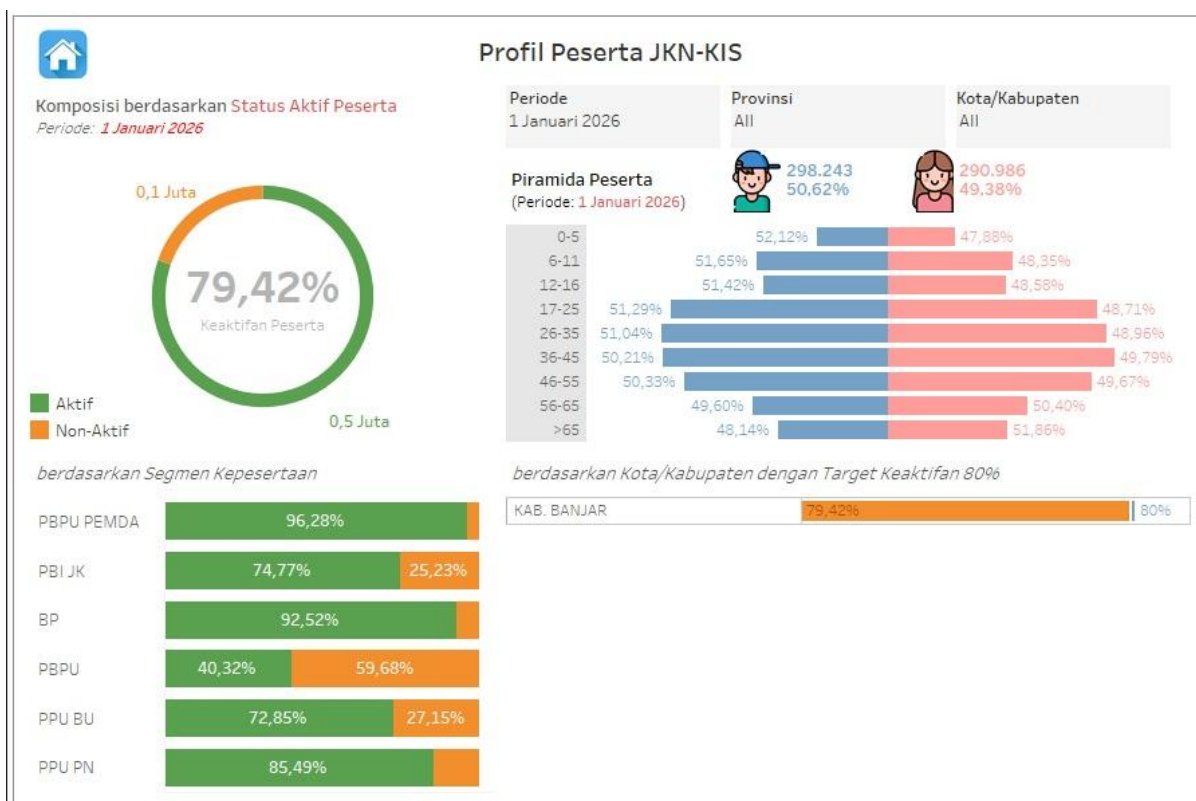


Gambar 3. 24 Capaian Universal Health Coverage (UHC) dan Distribusi Peserta JKN Berdasarkan Segmen Kepesertaan Kabupaten Banjar Tahun 2025

Sumber: Portal Data Aplikasi JKN – dataviz BPJS Kesehatan (1 Januari 2026)

Seiring dengan semakin digaungkannya status penjaminan pembiayaan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC), maka Kabupaten Banjar telah mengambil kebijakan dengan mendaftarkan penduduknya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Peserta tersebut berasal dari integrasi peserta Jamkesda maupun dari kalangan penduduk lainnya seperti guru-guru honor madarasah/pesantren, relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), para imam dan marbot mesjid, keluarga berisiko stunting, keluarga yang mempunyai anggota telah menderita penyakit atau dengan resiko menderita penyakit, warga miskin yang terdata dari Puskessos, dan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) no data DTSEN, sehingga cakupan persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Banjar Pada tahun 2025 adalah 98,91% atau 589.229 jiwa penduduk Kabupaten Banjar telah memiliki JKN.

Meskipun capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar telah terpenuhi secara administratif, evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menghadapi tantangan. Apabila ditinjau berdasarkan segmen kepesertaan, tingkat keaktifan masih terdapat selisih antara Cakupan UHC dengan Keaktifan peserta. Adapun data keaktifan peserta BPJS Kesehatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 25 Profil Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan Peserta JKN Kabupaten Banjar Tahun 2025

Sumber: Portal Data Aplikasi JKN – dataviz BPJS Kesehatan (1 Januari 2026)

Tingkat keaktifan peserta JKN Tahun 2025 berada pada angka 79,42%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat selisih sebesar 20,58% peserta yang berstatus nonaktif. Di sisi lain, capaian Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 98,91%, yang mengindikasikan bahwa secara kepesertaan hampir seluruh penduduk telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan. Namun demikian, tingginya cakupan UHC belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat keaktifan peserta, sehingga terdapat

kesenjangan antara kepesertaan administratif dan utilisasi aktif layanan jaminan kesehatan.

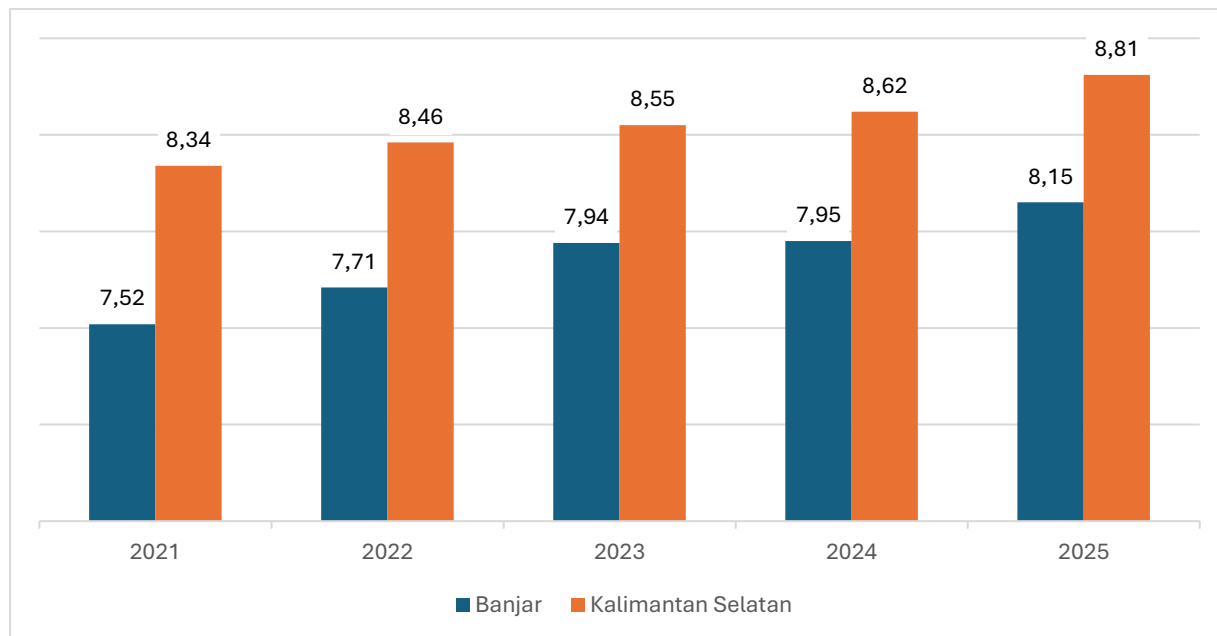
Apabila ditelaah lebih lanjut, komposisi keaktifan berdasarkan segmen kepesertaan menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Segmen PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) memiliki tingkat keaktifan paling rendah, yaitu sekitar 40,32%, dibandingkan dengan segmen lain seperti PBPU Pemda (96,28%) dan BP (92,52%). Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok peserta mandiri menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mempertahankan status keaktifan, terutama terkait kemampuan dan kepatuhan dalam membayar iuran secara rutin. Dari perspektif demografis, distribusi peserta relatif seimbang antara laki-laki (50,62%) dan perempuan (49,38%), serta tersebar merata di berbagai kelompok usia. Namun demikian, tingkat keaktifan yang belum optimal di hampir seluruh kelompok umur menunjukkan bahwa persoalan nonaktif tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga lintas kelompok usia dan jenis kelamin.

Dalam rangka mengatasi kesenjangan antara cakupan UHC dan tingkat keaktifan peserta, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Pemerintah daerah harus memperkuat skema subsidi atau bantuan iuran bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal. Selain itu, optimalisasi peran pemerintah daerah melalui integrasi program jaminan kesehatan dengan kebijakan perlindungan sosial lainnya menjadi krusial. Disisi lain perlu dilakukan intensifikasi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keaktifan kepesertaan. Dan terakhir perlu penguatan sistem monitoring berbasis data untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti peserta nonaktif secara berkala dan pengembangan inovasi yang komperhensif dalam pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Banjar.

3.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas di suatu daerah dapat dilihat dari capaian beberapa indikator makro pada urusan pendidikan seperti Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk umur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan harapan lamanya sekolah yang akan dijalani oleh anak usia 7 tahun dimasa mendatang. RLS dan HLS

digunakan untuk mengetahui kualitas dan kondisi sistem pendidikan pada suatu wilayah. Berikut capaian RLS dan HLS Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan:



Gambar 3. 26 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2026

3.3.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025

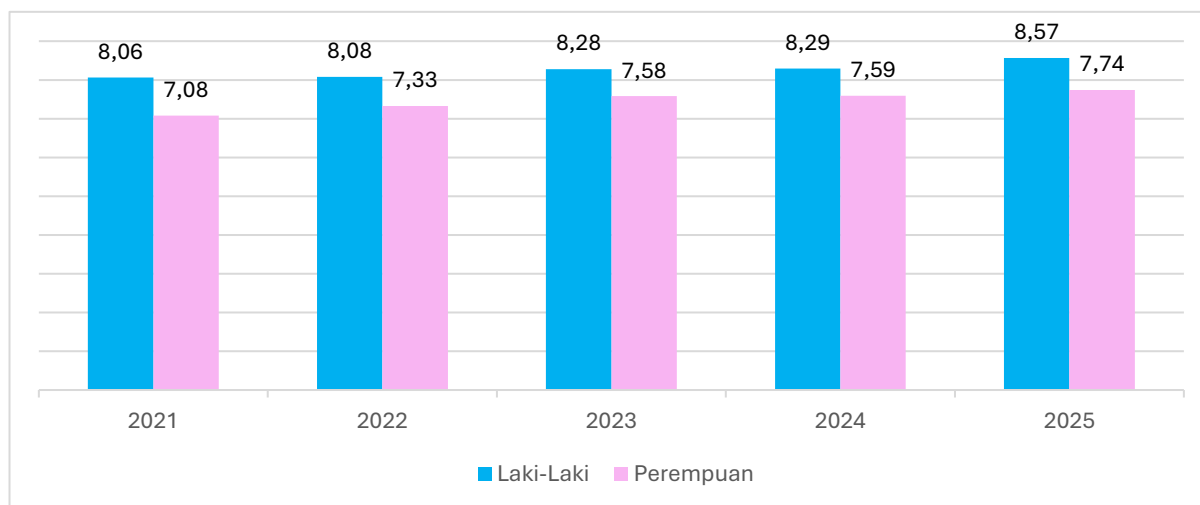
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 7,52 tahun pada awal periode menjadi 8,15 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat, meskipun peningkatannya berlangsung secara bertahap. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, capaian Kabupaten Banjar masih berada di bawah rata-rata provinsi yang meningkat dari 8,34 tahun menjadi 8,81 tahun. Meskipun demikian, selisih antara kabupaten dan provinsi menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, sehingga mengindikasikan adanya upaya perbaikan yang berjalan namun belum sepenuhnya mampu mengejar ketertinggalan secara signifikan.

Secara substantif, RLS merupakan indikator yang menggambarkan akumulasi lama pendidikan formal yang ditempuh oleh penduduk usia tertentu, sehingga peningkatannya mencerminkan membaiknya partisipasi dan retensi pendidikan. Kenaikan RLS di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mampu melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, baik pada tingkat menengah maupun atas. Namun demikian, masih adanya kesenjangan dengan capaian provinsi mengindikasikan bahwa tantangan seperti angka putus sekolah, keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu, serta faktor sosial ekonomi keluarga masih menjadi determinan penting yang memengaruhi capaian tersebut.

Untuk mempercepat peningkatan RLS, pemerintah daerah perlu memperkuat intervensi yang tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada keberlanjutan pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui perluasan program bantuan pendidikan, penguatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, serta peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana pendidikan. Selain itu, integrasi dengan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi krusial agar anak-anak usia sekolah tidak terdorong untuk putus sekolah, sehingga peningkatan RLS dapat berlangsung lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Adapun Pembedingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar berdasarkan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 3. 27 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2026

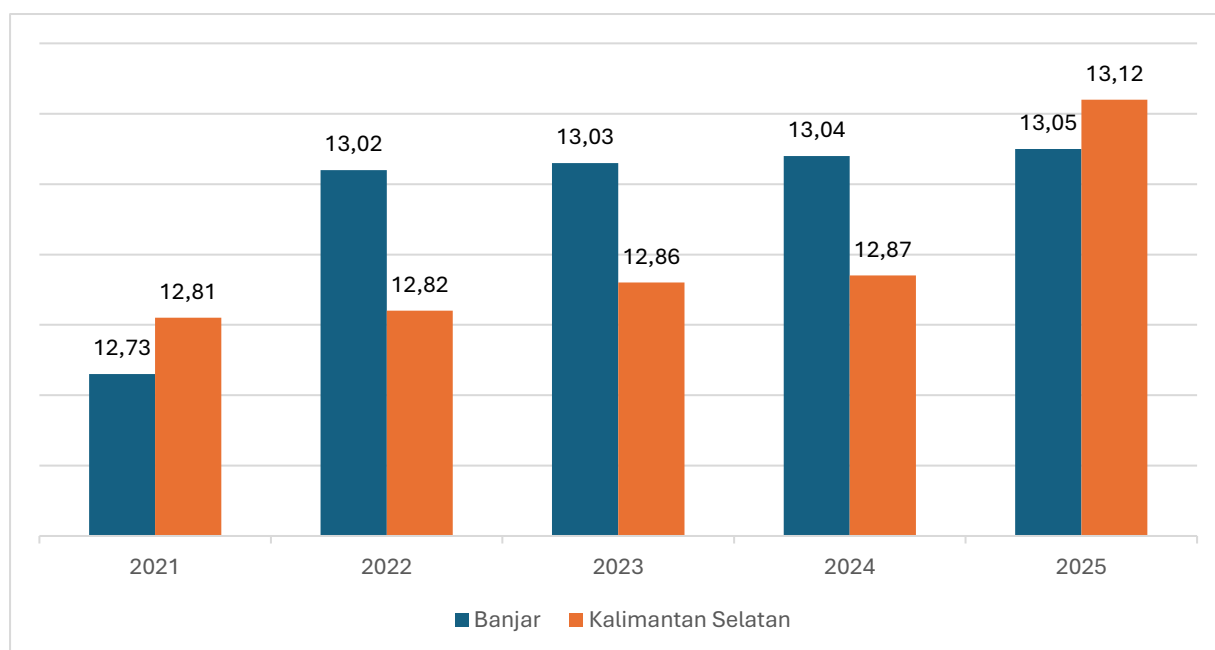
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banjar berdasarkan jenis kelamin selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten baik pada laki-laki maupun perempuan. RLS laki-laki meningkat dari 8,06 tahun menjadi 8,57 tahun, sementara perempuan dari 7,08 tahun menjadi 7,74 tahun. Meskipun kedua kelompok mengalami kemajuan, terdapat kesenjangan yang relatif persisten di mana capaian laki-laki tetap lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun demikian, selisih tersebut tidak menunjukkan pelebaran yang signifikan, sehingga dapat diindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan juga mulai dirasakan oleh perempuan, meskipun belum sepenuhnya setara.

Secara substantif, perbedaan capaian RLS antara laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya faktor struktural yang memengaruhi partisipasi dan keberlanjutan pendidikan, seperti norma sosial, kondisi ekonomi keluarga, serta akses terhadap pendidikan lanjutan. Peningkatan pada kedua kelompok menunjukkan keberhasilan program pendidikan dalam memperluas jangkauan layanan, namun masih diperlukan intervensi yang lebih responsif gender untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan afirmatif bagi perempuan, seperti peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, pencegahan putus sekolah, serta dukungan terhadap keluarga agar memberikan kesempatan yang setara bagi anak perempuan dalam menempuh pendidikan. Dengan demikian, peningkatan RLS tidak hanya mencerminkan kemajuan secara agregat, tetapi juga mencerminkan keadilan dan inklusivitas dalam pembangunan pendidikan.

3.3.3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025

Indikator penting lainnya dalam pendidikan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Jika RLS mencerminkan capaian pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk, maka HLS memberikan gambaran mengenai peluang dan ekspektasi pendidikan yang akan dijalani oleh generasi usia sekolah di masa mendatang. Dengan demikian, analisis HLS menjadi relevan untuk menilai sejauh mana sistem pendidikan di Kabupaten Banjar mampu mendorong keberlanjutan pendidikan secara lebih inklusif dan berkeadilan gender.

Dalam konteks ini, HLS juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah kesenjangan gender yang masih terlihat pada RLS berpotensi berlanjut atau justru mengalami perbaikan di masa depan. Apabila HLS menunjukkan kecenderungan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan akses dan peluang pendidikan yang lebih merata. Sebaliknya, jika masih terdapat disparitas, maka diperlukan penguatan kebijakan yang lebih responsif gender. Oleh karena itu, penyajian grafik HLS berikut menjadi penting sebagai bagian dari analisis komprehensif terhadap pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Banjar.



Gambar 3. 28 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2026

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia tertentu di masa mendatang, dengan asumsi pola partisipasi sekolah yang berlaku saat ini tetap konstan. Dengan demikian, HLS tidak hanya merefleksikan kondisi aktual, tetapi juga proyeksi keberlanjutan akses pendidikan dalam jangka panjang. Perkembangan HLS Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, dari 12,73 tahun menjadi 13,05 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan ekspektasi masyarakat terhadap akses

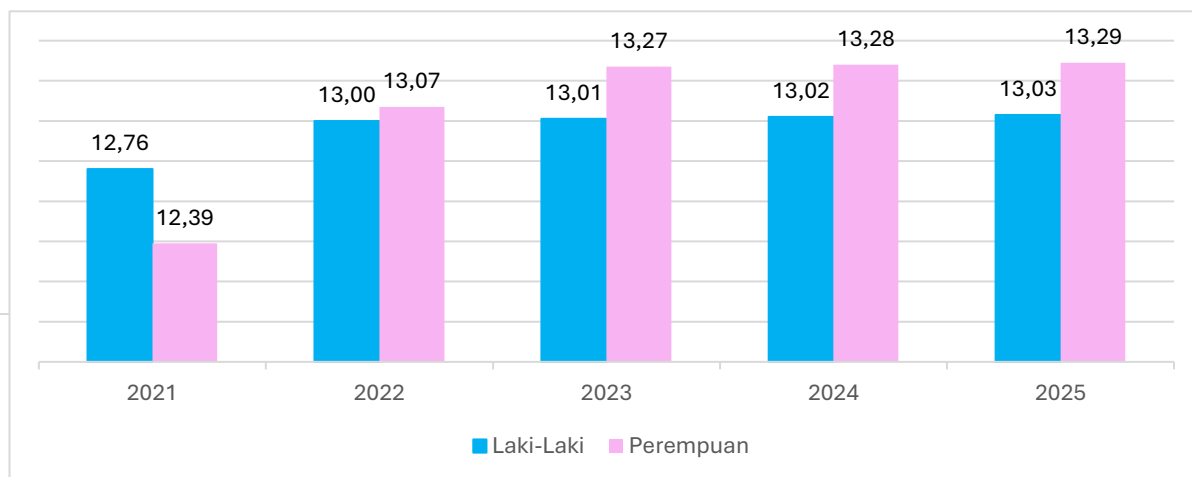
pendidikan, yang mencerminkan semakin terbukanya peluang bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, dinamika HLS Kabupaten Banjar menunjukkan pola yang cukup menarik. Pada awal periode, capaian provinsi sedikit lebih tinggi (12,81 tahun) dibandingkan kabupaten, namun pada tahun-tahun berikutnya Kabupaten Banjar mampu melampaui capaian provinsi dengan nilai yang relatif lebih tinggi dan stabil di atas 13 tahun. Sementara itu, provinsi mengalami peningkatan yang lebih fluktuatif sebelum akhirnya mencapai 13,12 tahun pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam aspek ekspektasi lama pendidikan, Kabupaten Banjar memiliki kinerja yang relatif lebih baik, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan akses pendidikan dan meningkatkan aspirasi pendidikan masyarakat.

Peningkatan HLS tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, seperti ketersediaan sarana prasarana pendidikan, kebijakan wajib belajar, serta dukungan program bantuan pendidikan bagi masyarakat. Namun demikian, untuk memastikan bahwa ekspektasi tersebut dapat terealisasi menjadi capaian nyata, diperlukan penguatan pada aspek kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan HLS diiringi dengan penurunan angka putus sekolah, peningkatan transisi ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Selain itu, sinergi dengan kebijakan sosial dan ekonomi juga penting agar hambatan struktural yang dihadapi rumah tangga dalam mengakses pendidikan dapat diminimalkan, sehingga harapan lama sekolah benar-benar tercermin dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nyata.

3.3.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Adapun Pembandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar berdasarkan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 3. 29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2026

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Banjar menurut jenis kelamin selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup menarik dan mencerminkan pergeseran pola kesetaraan akses pendidikan. Pada awal periode, HLS perempuan masih berada di bawah laki-laki, yakni 12,39 tahun dibandingkan 12,76 tahun. Namun demikian, dalam waktu relatif singkat terjadi peningkatan yang signifikan pada kelompok perempuan hingga melampaui laki-laki sejak tahun 2022 (13,07 berbanding 13,00), dan tren tersebut terus berlanjut secara konsisten hingga tahun 2025. Sementara itu, HLS laki-laki juga mengalami peningkatan, tetapi dengan laju yang lebih lambat dan cenderung stabil di kisaran 13 tahun.

Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan positif dalam ekspektasi pendidikan bagi perempuan, yang tidak hanya mengalami peningkatan, tetapi juga mampu melampaui laki-laki dalam hal lama pendidikan yang diharapkan. Kenaikan HLS perempuan dari 12,39 tahun menjadi 13,29 tahun menunjukkan adanya perbaikan akses, partisipasi, dan keberlanjutan pendidikan yang semakin inklusif. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, keberhasilan program afirmasi pendidikan, serta semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, stabilnya HLS laki-laki mengindikasikan bahwa meskipun akses pendidikan tetap terjaga, peningkatannya tidak seakseleratif kelompok perempuan.

Secara lebih luas, kondisi ini memberikan sinyal bahwa kesenjangan gender dalam aspek ekspektasi pendidikan cenderung mengalami perbaikan, bahkan berbalik arah menjadi lebih menguntungkan bagi perempuan. Namun demikian, capaian ini tetap perlu diimbangi dengan realisasi dalam bentuk peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), agar ekspektasi tersebut benar-benar terwujud dalam capaian pendidikan aktual. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keberlanjutan kebijakan yang mendukung akses pendidikan bagi perempuan, sekaligus memastikan bahwa

laki-laki juga tidak mengalami stagnasi dalam peningkatan partisipasi pendidikan. Pendekatan yang seimbang dan responsif gender menjadi kunci agar pembangunan pendidikan dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.3.5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), Indikator yang tidak kalah penting dalam dunia Pendidikan Adalah Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya hasil pengukuran IPLM dari Perpustakaan Nasional (Perpunas RI) Pada Tahun 2025 IPLM diukur dalam 2 dimensi, yaitu dimensi kepatuhan dan dimensi kinerja. Kedua dimensi tersebut masing-masing memiliki variabel khusus, misalnya dimensi kepatuhan merupakan komponen dari variabel koleksi dan variabel tenaga perpustakaan, sedangkan dimensi kinerja terdiri dari variabel pelayanan dan variabel penyelenggaraan pengelolaan.

Dalam pelaksanaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dilakukan penyesuaian pada indikator, instrumen, dan metode perhitungan. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan pengukuran dengan dinamika literasi masyarakat serta meningkatkan akurasi dan relevansi hasil. Oleh karena itu, perbedaan capaian yang muncul bukan mencerminkan penurunan kinerja, melainkan konsekuensi dari penyempurnaan sistem pengukuran.

Sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, antara lain Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca melalui kegiatan story telling, Penyelenggaraan lomba bertutur, Bimbingan teknis literasi dan informasi bagi pustakawan, guru, dan pegiat literasi, Lokakarya literasi digital, Lomba video konten literasi, Pembinaan Perpustakaan pada perpustakaan umum dan perpustakaan satuan pendidikan serta Pengadaan bahan pustaka baik itu cetak maupun digital.

3.3.6 Unsur IPLM

Capaian IPLM yang diukur oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Tahun 2025 untuk Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Banjar

No	Dimensi	Nilai	Interpretasi	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepatuhan	0.196	Nilai Kepatuhan lebih kecil dari Nilai Kinerja, menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki kekurangan dalam pengembangan koleksi dan tenaga perpustakaan	Perlu dilakukan pengembangan koleksi dan tenaga perpustakaan untuk meningkatkan Nilai Kepatuhan. - Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas tenaga perpustakaan.
1.1	Variabel Koleksi	0.229	Nilai Variabel Koleksi lebih besar dari Nilai Variabel Tenaga Perpustakaan, menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki koleksi yang lebih baik.	-Perlu dilakukan pengembangan koleksi untuk meningkatkan Nilai Variabel Koleksi. -Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas tenaga perpustakaan.
1.2	Variabel Tenaga Perpustakaan	0.164	Nilai Variabel Tenaga Perpustakaan lebih kecil dari Nilai Variabel Koleksi, menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki tenaga perpustakaan yang kurang.	-Perlu dilakukan pengembangan tenaga perpustakaan untuk meningkatkan Nilai Variabel Tenaga Perpustakaan.
2	Kinerja	0.203	Nilai Kinerja lebih besar dari Nilai Kepatuhan,	- Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas

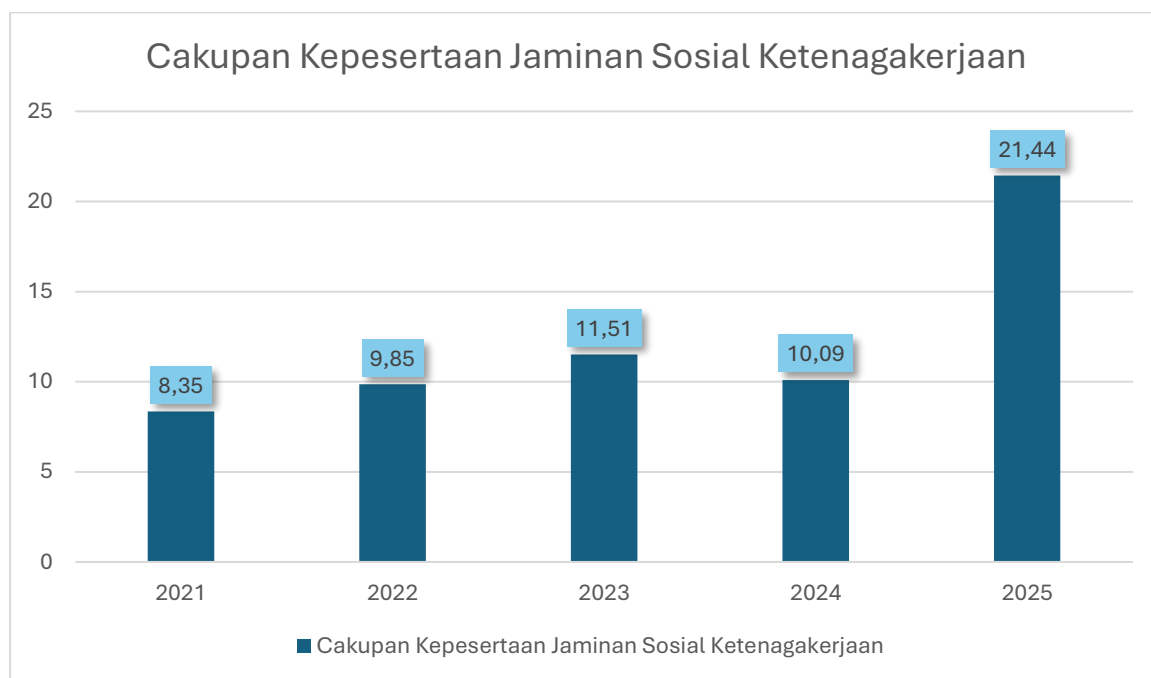
No	Dimensi	Nilai	Interpretasi	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki kinerja yang lebih baik daripada kepatuhan.	kinerja perpustakaan.
2.1	Variabel Pelayanan	0.109	Nilai Variabel Pelayanan lebih kecil dari Nilai Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan, menunjukkan bahwa perpustakaan	- Perlu dilakukan pengembangan kepatuhan untuk meningkatkan Nilai Kepatuhan.
2.2	Variabel Penyelenggaraan Pengelolaan	0.124	Nilai Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan lebih besar dari Nilai Variabel Pelayanan, menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki penyelenggaraan/pengelolaan yang lebih baik daripada pelayanan.	- Perlu dilakukan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan Nilai Variabel Pelayanan.
3	Nilai IPLM	8.95	Nilai IPLM lebih besar dari Nilai Kepatuhan dan Nilai Kinerja, menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki kinerja yang lebih baik dari pada kepatuhan.	- Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan/pengelolaan.

Sumber: Laporan Akhir IPLM, Perpustakaan Nasional Tahun 2025, LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Tahun 2025

3.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang telah terlindungi dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Indikator ini mencerminkan tingkat perlindungan sosial bagi pekerja terhadap berbagai risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga jaminan hari tua. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian.

3.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Gambar 3. 30 Grafik Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025, data diolah

Sumber Data BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025, data diolah

Selama periode 2021–2025, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2021 cakupan kepesertaan tercatat sebesar 8,35 persen, meningkat menjadi 9,85 persen pada tahun 2022 dan 11,51 persen pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024

terjadi penurunan menjadi 10,09 persen, sebelum kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 21,44 persen. Lonjakan pada tahun 2025 ini mengindikasikan adanya percepatan perluasan kepesertaan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial.

Peningkatan cakupan kepesertaan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan, antara lain melalui sosialisasi kepada perangkat desa, pelaku usaha, serta masyarakat. Selain itu, dorongan terhadap partisipasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal juga menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan perlindungan.

Meskipun menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar masih tergolong rendah dibandingkan total jumlah tenaga kerja yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian besar pekerja, khususnya di sektor informal, yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, seperti perluasan kepesertaan berbasis desa, penguatan regulasi dan kepatuhan pemberi kerja. Ke depan, peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya berfokus pada kuantitas peserta, tetapi juga pada keberlanjutan kepesertaan aktif serta peningkatan kualitas perlindungan. Dengan cakupan yang lebih luas dan inklusif, diharapkan sistem perlindungan sosial di Kabupaten Banjar dapat semakin adaptif dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi dan ketenagakerjaan, serta berkontribusi dalam menurunkan tingkat kerentanan dan kemiskinan masyarakat.

3.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

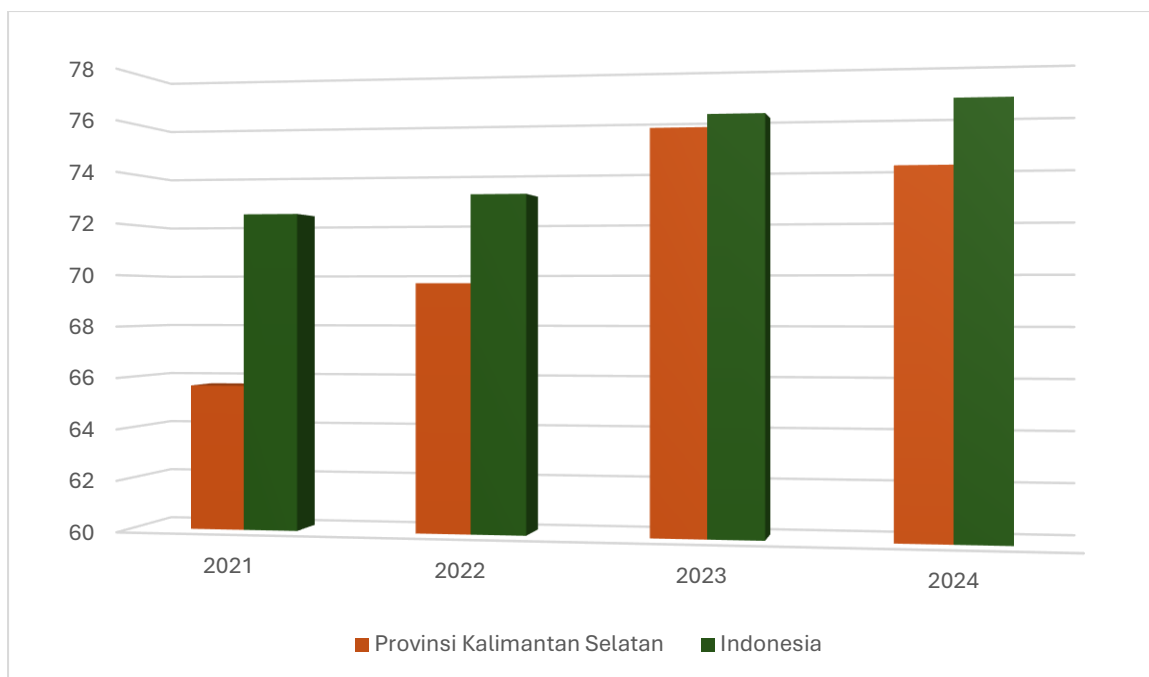
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju mencerminkan keseimbangan antara kehidupan beragama yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat serta perkembangan budaya yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kemajuan zaman. Beragama maslahat berarti praktik keagamaan yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Kehidupan beragama yang demikian menumbuhkan sikap toleransi, kepedulian, serta keharmonisan antar individu dan kelompok dalam

berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, berkebudayaan maju menggambarkan dinamika kebudayaan yang terus berkembang tanpa kehilangan identitas dan akar tradisinya. Kemajuan budaya mencakup inovasi dalam seni, pendidikan, teknologi, serta tata kehidupan sosial yang tetap menghargai warisan leluhur namun mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Sinergi antara nilai-nilai agama yang membawa maslahat dan budaya yang terus berkembang menciptakan masyarakat yang harmonis, berdaya saing, serta memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju di suatu wilayah dapat dilihat melalui indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

3.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Upaya keberlanjutan dibutuhkan untuk membangun, memelihara, dan menguatkan toleransi serta kerja sama antar umat beragama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) hadir sebagai instrumen untuk mengukur tingkat harmoni antar pemeluk agama di suatu wilayah. Indeks ini tidak hanya menggambarkan kondisi aktual kerukunan, tetapi juga memberikan pemetaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk memperkuat kohesi sosial. Berikut merupakan capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Banjar Tahun 2021 hingga 2024.



Gambar 3. 31 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banjar Tahun 2021-2024

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar menggunakan data proksi dari Provinsi Kalimantan Selatan karena pengukuran IKUB hanya dilakukan hingga level provinsi. IKUB di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun begitu, terdapat tren peningkatan indikator tersebut baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024 menunjukkan perkembangan yang relatif positif sebagai indikator kondisi harmonisasi sosial dan toleransi antarumat beragama di daerah. Capaian indeks tersebut mengalami peningkatan secara bertahap hingga tahun 2023, meskipun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan.

Pada tahun 2021, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 65,66, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 72,39. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan harmonisasi sosial, toleransi, dan moderasi beragama masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta pembinaan kehidupan sosial masyarakat yang inklusif dan kondusif.

Pada tahun 2022, indeks mengalami peningkatan menjadi 69,68 atau meningkat sebesar 4,02 poin dibanding tahun sebelumnya namun capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 73,09. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pembinaan kehidupan beragama dan penguatan nilai toleransi di masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2023, capaian indeks meningkat signifikan menjadi 75,53 dan mendekati capaian nasional sebesar 76,02. Kondisi ini menunjukkan semakin baiknya kualitas hubungan sosial antarumat beragama serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pembinaan kerukunan dan moderasi beragama di daerah.

Pada tahun 2024, Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 74,01 atau mengalami penurunan sebesar 1,52 poin dibanding tahun 2023. Sementara itu, indeks nasional mengalami peningkatan menjadi 76,47. Penurunan capaian tersebut menjadi perhatian dalam rangka menjaga konsistensi kualitas kerukunan sosial masyarakat, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial dan keberagaman di daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kondisi yang cukup baik dan cenderung meningkat selama periode 2021–2024. Meskipun capaian daerah masih berada di bawah rata-rata nasional, tren peningkatan yang terjadi menunjukkan adanya kemajuan dalam penguatan kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan kondusif sehingga diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, FKUB serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan kerukunan dan moderasi beragama guna menjaga stabilitas sosial daerah dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama secara berkelanjutan.

Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki dinamika sosial-keagamaan yang cukup kompleks. Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peran tokoh agama dan adat dalam membangun komunikasi lintas agama, program pemerintah daerah yang mendukung dialog dan toleransi antar umat beragama, dan peningkatan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural. Tren peningkatan IKUB di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Banjar perlu dijaga melalui kebijakan inklusif, pendidikan toleransi, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

3.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

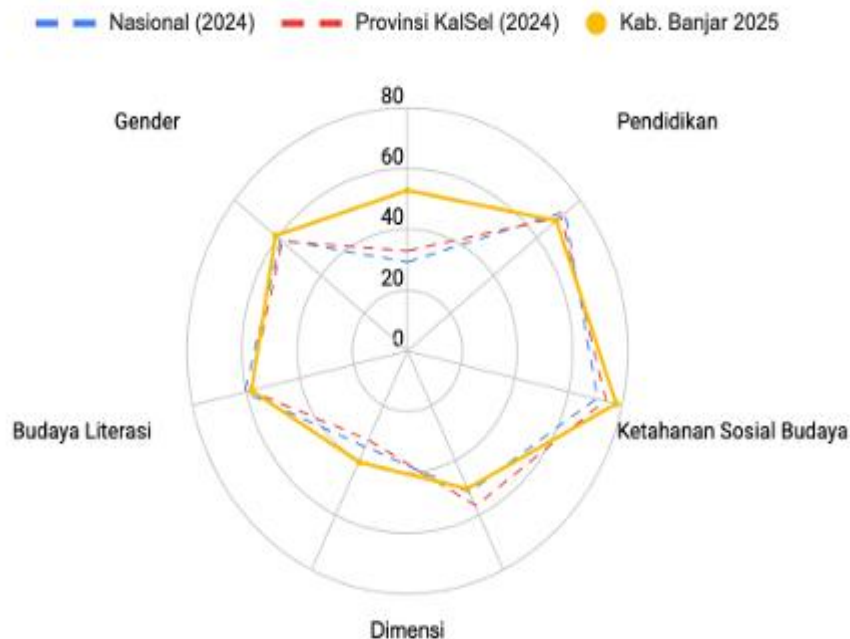
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan suatu wilayah atau negara melalui berbagai dimensi yang mencerminkan peran budaya dalam kehidupan masyarakat. IPK disusun untuk menilai sejauh mana pembangunan kebudayaan telah berlangsung dan memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

Di Indonesia, IPK dikembangkan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan berdasarkan berbagai aspek yang mencakup pelestarian budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, pemanfaatan budaya sebagai sumber kesejahteraan, hingga penguatan nilai-nilai sosial dan literasi budaya.

Indeks Pembangunan Kebudayaan terdiri atas tujuh dimensi, yaitu:

1. Ekonomi Budaya, yang mengukur kontribusi sektor budaya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Pendidikan, yang mengukur peran pendidikan dalam mendukung pembangunan dan pelestarian budaya.
3. Ketahanan Sosial Budaya, yang mengukur kemampuan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai sosial, toleransi, dan kohesi sosial.
4. Warisan Budaya, yang mengukur upaya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya benda maupun tak benda.
5. Ekspresi Budaya, yang mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya.
6. Budaya Literasi, yang mengukur kebiasaan membaca, akses terhadap informasi, dan pemanfaatan sumber pengetahuan.
7. Gender, yang mengukur kesetaraan peran dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya.

Secara sederhana, Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan kebudayaan suatu daerah berdasarkan berbagai dimensi budaya yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, memperkuat identitas bangsa, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Semakin tinggi nilai IPK, semakin baik kondisi pembangunan kebudayaan di wilayah tersebut.



Gambar 3. 32 Grafik Analisis Klaster Performa Dimensi Kebudayaan

Sumber Data: Bapperida tahun 2025 data diolah

Tabel 3. 6 Data Indeks Pembangunan Kebudayaan Kab Banjar Tahun 2025

Kode	Bobot	Dimensi	Kab. Banjar
D1	10.00%	Ekonomi Budaya	53,00
D2	20.00%	Pendidikan	68,79
D3	20.00%	Ketahanan Sosial Budaya	77,97
D4	25.00%	Warisan Budaya	50,31
D5	10.00%	Ekspresi Budaya	40,47
D6	10.00%	Budaya Literasi	58,03
D7	5.00%	Gender	61,21
IPK			60,14

Sumber Data: Bapperida tahun 2025 data diolah

Berdasarkan data Tahun 2025, Kabupaten Banjar memperoleh Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 60,14 poin. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Banjar berada pada kategori sedang, dengan beberapa dimensi telah menunjukkan capaian yang baik, namun masih terdapat dimensi yang memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan.

Berdasarkan data tabel di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Ketahanan Sosial Budaya (77,97)

Dimensi ini merupakan capaian tertinggi di Kabupaten Banjar. Tingginya nilai ketahanan sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat toleransi, gotong royong, rasa aman, dan kohesi sosial yang baik. Kondisi ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di daerah. Ketahanan sosial budaya yang tinggi juga menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

2. Pendidikan (68,79)

Dimensi pendidikan menunjukkan capaian yang relatif baik. Nilai ini menggambarkan bahwa akses dan kualitas pendidikan yang mendukung pelestarian serta pengembangan kebudayaan telah berkembang cukup baik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kontribusi sektor pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang memahami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal.

3. Gender (61,21)

Nilai dimensi gender berada di atas rata-rata IPK Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun partisipasi publik. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pelestarian budaya.

4. Budaya Literasi (58,03)

Capaian budaya literasi berada sedikit di bawah nilai IPK daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat, pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan akses terhadap sumber informasi masih perlu ditingkatkan. Penguatan budaya literasi menjadi penting karena literasi merupakan sarana utama dalam pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.

5. Ekonomi Budaya (53,00)

Nilai ekonomi budaya menunjukkan bahwa pemanfaatan sektor budaya sebagai sumber ekonomi masyarakat belum optimal. Kontribusi pelaku seni, industri kreatif berbasis budaya, serta kegiatan budaya yang menghasilkan nilai ekonomi masih perlu didorong melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi kreatif dan pengembangan produk budaya unggulan daerah.

6. Warisan Budaya (50,31)

Dimensi warisan budaya memperoleh nilai yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pelestarian cagar budaya, warisan budaya tak benda, penggunaan bahasa daerah, serta pemanfaatan produk budaya tradisional masih perlu diperkuat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri mengingat Kabupaten Banjar memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai identitas daerah.

7. Ekspresi Budaya (40,47)

Dimensi ekspresi budaya merupakan capaian terendah di antara seluruh dimensi. Rendahnya nilai ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni, organisasi budaya, penyelenggaraan upacara adat, maupun ruang berekspresi budaya masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan dukungan terhadap komunitas seni dan budaya, penyelenggaraan festival budaya, serta penyediaan ruang kreatif bagi masyarakat untuk mengekspresikan nilai-nilai budayanya.

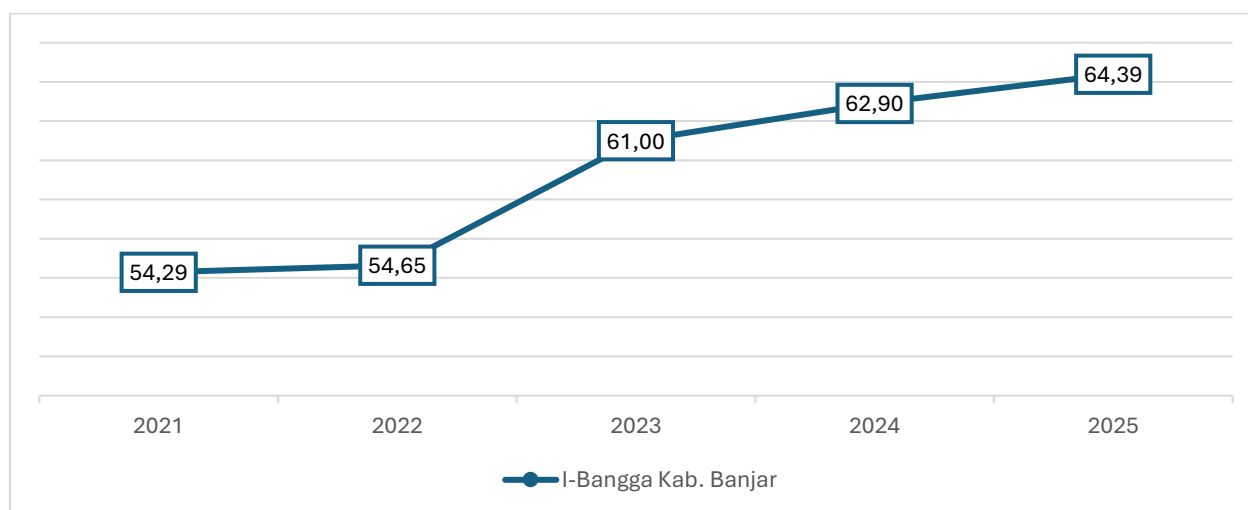
Secara umum, Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar 60,14 poin menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan telah berkembang cukup baik, terutama didukung oleh tingginya Ketahanan Sosial Budaya (77,97) dan Pendidikan (68,79). Kedua dimensi tersebut menjadi modal utama dalam memperkuat pembangunan kebudayaan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa dimensi yang memerlukan perhatian serius, terutama Ekspresi Budaya (40,47), Warisan Budaya (50,31), dan Ekonomi Budaya (53,00). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan pada peningkatan pelestarian warisan budaya, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, penguatan budaya literasi, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat dalam aktivitas seni dan budaya. Dengan upaya tersebut, pembangunan kebudayaan Kabupaten Banjar diharapkan dapat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu memperkuat identitas daerah di masa mendatang.

3.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

3.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa data seperti Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.



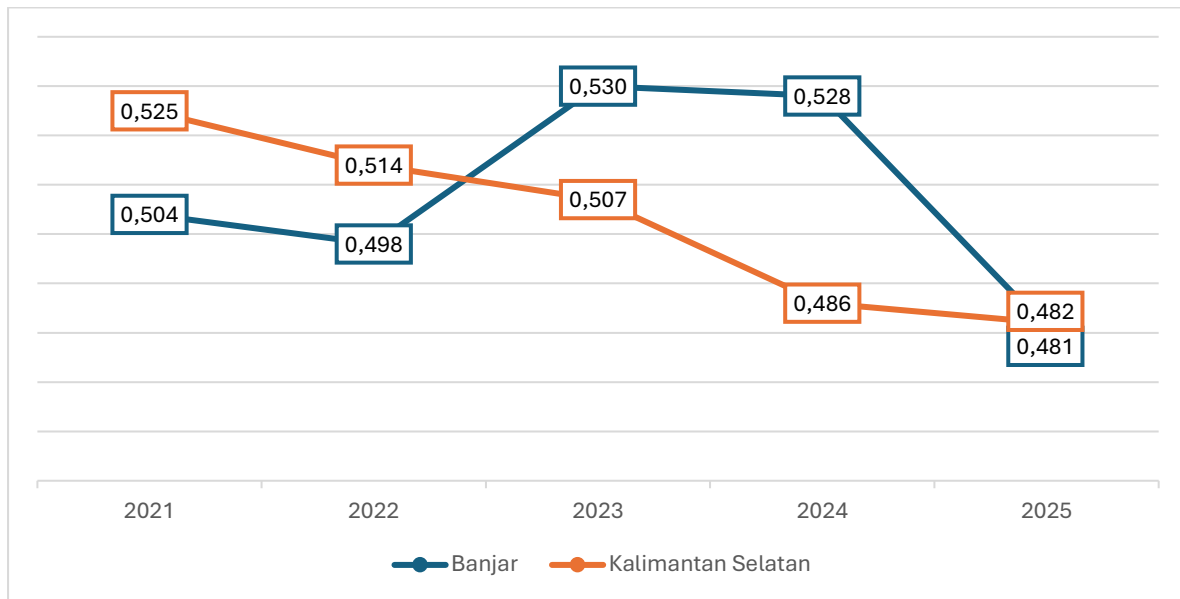
Gambar 3. 33 Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) Kabupaten Banjar

Sumber: Laporan Kinerja DinsosP3AP2KB Kab. Banjar, Publish BKKBN Prov. Kaltel

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang konsisten meningkat, dari kisaran pertengahan 50-an pada awal periode hingga mencapai di atas 64 pada tahun terakhir. Kenaikan yang cukup signifikan terutama terlihat pada fase transisi menuju 2023, yang kemudian diikuti oleh peningkatan yang lebih gradual namun tetap stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pola ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga yang semakin menguat, baik dari sisi ketahanan maupun kesejahteraan keluarga. Secara umum, tren positif ini mengindikasikan bahwa intervensi program pembangunan keluarga di daerah telah berjalan cukup efektif dan mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.

Secara substantif, I-Bangga dibentuk oleh beberapa dimensi utama seperti ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Peningkatan indeks ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek seperti kualitas hubungan dalam keluarga, kemampuan ekonomi rumah tangga, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, untuk menjaga tren peningkatan yang berkelanjutan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat program berbasis keluarga, khususnya dalam peningkatan kualitas pengasuhan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta ketahanan sosial di tingkat komunitas. Pendekatan lintas sektor menjadi penting, termasuk integrasi dengan program perlindungan sosial, peningkatan literasi keluarga, serta penguatan peran kelembagaan masyarakat, sehingga pembangunan keluarga tidak hanya meningkat secara kuantitatif tetapi juga semakin berkualitas dan inklusif.

3.6.2 Indeks Ketimpangan Gender



Gambar 3. 34 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2026

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan manusia. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara dalam bidang kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Dimensi kesehatan reproduksi umumnya tercermin melalui kondisi kesehatan ibu dan kelahiran remaja, sedangkan dimensi pemberdayaan diukur melalui tingkat pendidikan dan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Sementara itu, dimensi partisipasi ekonomi menggambarkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi, sehingga kondisi pembangunan gender dinilai semakin baik dan inklusif.

Berdasarkan grafik tersebut, perkembangan IKG Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada awal periode, Kabupaten Banjar memiliki kondisi ketimpangan gender yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi, namun pada pertengahan periode terlihat adanya peningkatan kesenjangan yang menyebabkan nilai IKG Kabupaten Banjar sempat berada di atas capaian provinsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan responsif

gender masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi capaian antar sektor pembangunan. Meski demikian, pada tahun 2025 terlihat adanya perbaikan yang cukup signifikan, dimana nilai IKG Kabupaten Banjar berada pada angka 0,481 dan sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 0,482. Selisih yang sangat tipis tersebut menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Banjar telah kembali sejalan dengan capaian pembangunan gender di tingkat provinsi.

Secara substantif, dinamika IKG Kabupaten Banjar mencerminkan bahwa tantangan pembangunan gender tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan serta aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu, optimalisasi pembangunan gender perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya perempuan melalui akses pendidikan yang lebih tinggi, perluasan kesempatan kerja yang setara, penguatan kewirausahaan perempuan, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif maupun jabatan strategis pemerintahan. Selain itu, penguatan layanan kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan juga menjadi aspek penting untuk menjaga keberlanjutan capaian pembangunan gender. Dengan pembangunan yang semakin responsif gender, diharapkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banjar dapat terus diperkecil sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

BAB IV

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, daya saing tidak hanya mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor ekonomi unggulan, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, inovasi, teknologi, dan lainnya.

4.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam menentukan kemajuan suatu daerah. SDM yang kompetitif tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kemampuan individu dalam menguasai keterampilan, pendidikan, serta inovasi menentukan efektivitas mereka dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Tingkat produktivitas berkaitan erat dengan kualitas SDM yang ada pada daerah terkait. SDM yang unggul akan lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, menghasilkan *output* yang lebih tinggi, serta meningkatkan efisiensi kerja. Produktivitas yang meningkat secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing wilayah, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

4.1.1 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banjar

Daya saing SDM juga berkorelasi dengan angka ketergantungan, yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif. Daerah dengan tingkat ketergantungan tinggi cenderung menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar karena beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif lebih tinggi. Sebaliknya, jika angka ketergantungan menurun dan diimbangi dengan peningkatan produktivitas, suatu daerah dapat menikmati "bonus demografi," di mana sebagian besar penduduk berada dalam usia kerja dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

Angka ketergantungan adalah indikator demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (kombinasi usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam membiayai kebutuhan kelompok usia tidak produktif. Faktor-faktor yang memengaruhi angka ketergantungan meliputi tingkat kelahiran, angka harapan hidup, serta migrasi penduduk. Negara dengan angka kelahiran tinggi cenderung memiliki angka ketergantungan tinggi karena banyaknya anak-anak yang belum memasuki usia produktif.

Angka ketergantungan hingga tingkat kecamatan masih terbatas pada data tahun 2024. Kondisi tersebut disebabkan karena data struktur penduduk menurut kelompok umur secara rinci sampai level kecamatan hanya tersedia pada saat pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Dengan demikian, analisis angka ketergantungan di Kabupaten Banjar masih menggunakan basis data tahun 2020 sebagai tahun acuan. Berikut merupakan capaian angka ketergantungan di Kabupaten Banjar.

Tabel 4. 1 Angka Ketergantungan di Kabupaten Banjar Tahun 2020

No	Kecamatan	Tahun
		2020
1	Aluh-Aluh	42,77
2	Beruntung Baru	45,93
3	Gambut	46,37
4	Kertak Hanyar	43,27
5	Tatah Makmur	44,87
6	Sungai Tabuk	45,29
7	Martapura	41,28
8	Martapura Timur	45,07
9	Martapura Barat	44,92
10	Astambul	43,86
11	Karang Intan	45,76
12	Aranio	48,72
13	Sungai Pinang	43,17
14	Paramasan	44,03

No	Kecamatan	Tahun
		2020
15	Pengaron	43,87
16	Sambung Makmur	44,12
17	Mataraman	39,21
18	Simpang Empat	42,36
19	Telaga Bauntung	42,90
20	Cintapuri Darussalam	46,36
	Kabupaten Banjar	44,37

Sumber Data : BPS Kab. Banjar tahun 2020

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif angkatan kerja di Kabupaten Banjar akan menanggung 44 hingga 45 penduduk bukan angkatan kerja atau tidak produktif. Angka tersebut merupakan rata-rata penduduk dari seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Angka ketergantungan di Kabupaten Banjar termasuk cukup tinggi karena jumlah penduduk produktif dan non produktif hampir sama. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu melakukan antisipasi apabila kenaikan angka ketergantungan semakin tinggi. Hal itu dikarenakan semakin tinggi angka ketergantungan, maka semakin tinggi pula beban produktivitas yang harus ditanggung oleh masyarakat usia angkatan kerja. Hal itu akan berimplikasi terhadap daya saing dan kesejahteraan sosial daerah secara keseluruhan. Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menyesuaikan kebijakan untuk memastikan kelompok usia produktif mampu mendukung kelompok tidak produktif tanpa mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan. Oleh karena itu, strategi seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem pensiun, serta penciptaan lapangan kerja menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan demografis dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

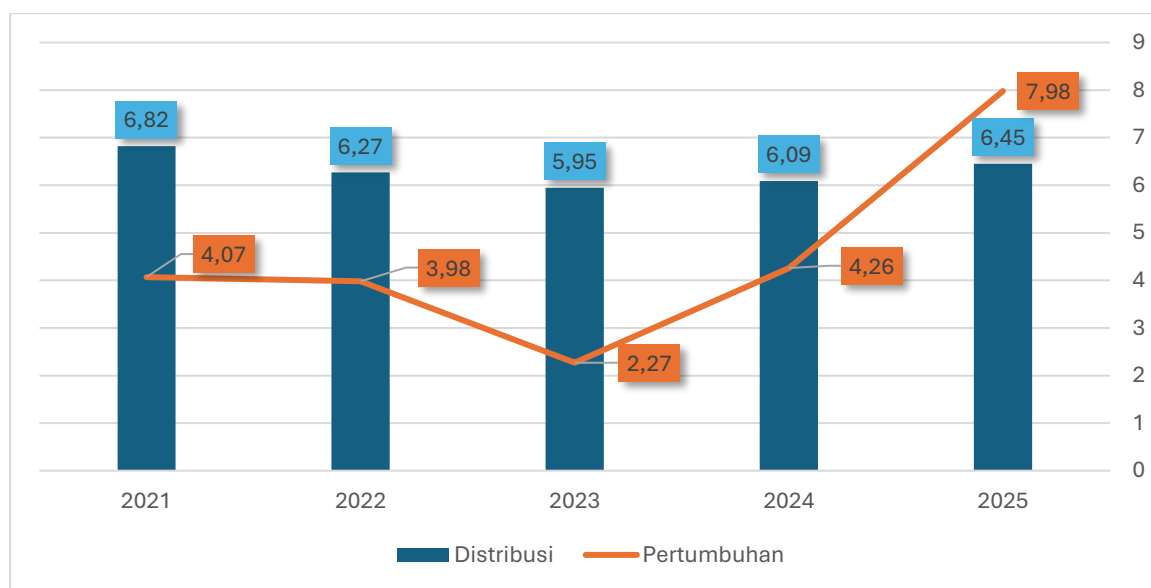
4.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu didorong oleh perkembangan teknologi yang mumpuni dan iklim inovasi daerah yang mendukung. Perkembangan teknologi dan informasi di daerah dapat digambarkan melalui tingkat pembangunan sektor-sektor daerah yang padat akan penerapan teknologi dalam prosesnya, seperti industri. Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga dapat menjadi salah satu tanda ukur

bagi penerapan iptek daerah mengingat ekonomi kreatif didukung oleh teknologi digital yang mumpuni. Dalam sub bagian ini dijabarkan beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ini, seperti rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB akomodasi makan dan minum, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks inovasi daerah.

4.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah indikator ekonomi makro yang menghitung nilai produksi dari lapangan usaha industri pengolahan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan sektor industri merupakan salah satu prasyarat bagi pembangunan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah lebih lanjut. Sektor industri memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan atas bahan mentah menjadi produk konsumsi final. Rasio PDRB Industri Pengolahan dihitung dengan cara menyandingkan angka PDRB lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB total. Berikut merupakan data mengenai Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025:



Gambar 4. 1 Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Banjar menunjukkan kecenderungan relatif stabil dengan fluktuasi ringan. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 6,82 persen, kemudian menurun hingga 156.

mencapai 5,95 persen pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 6,09 persen pada tahun 2024 dan 6,45 persen pada tahun 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat mengalami tekanan, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan pemulihan dan penguatan kontribusi dalam struktur ekonomi daerah.

Sementara itu, dari sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan juga menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 pertumbuhan tercatat sebesar 4,07 persen, sedikit melambat pada tahun 2022 menjadi 3,98 persen, dan turun lebih dalam pada tahun 2023 menjadi 2,27 persen. Namun demikian, kinerja sektor ini kembali membaik pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,26 persen dan meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 7,98 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya akselerasi aktivitas produksi serta membaiknya kondisi usaha di sektor industri pengolahan.

Pada tahun 2025, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp1,65 triliun atau sekitar 6,45 persen dari total PDRB Kabupaten Banjar. Peningkatan kontribusi ini tidak terlepas dari berkembangnya aktivitas industri, khususnya pada skala industri kecil dan mikro. Berbagai dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti kemudahan akses pembiayaan, program pelatihan peningkatan kapasitas SDM, serta fasilitasi pengembangan usaha, turut mendorong peningkatan kinerja sektor ini.

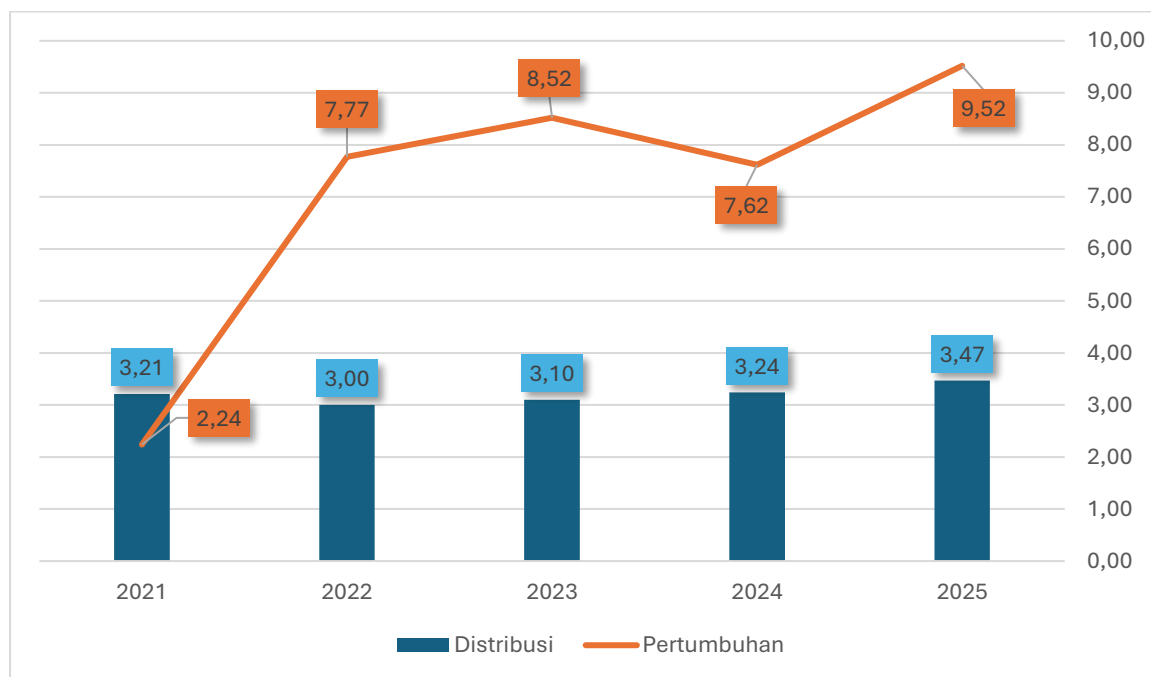
Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih relatif terbatas dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banjar masih didominasi oleh sektor primer atau sektor lain di luar industri pengolahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk memperkuat peran sektor ini, antara lain melalui peningkatan investasi industri, penguatan hilirisasi produk unggulan daerah, pengembangan kawasan industri, serta perluasan akses pasar.

Ke depan, penguatan sektor industri pengolahan diharapkan tidak hanya meningkatkan kontribusi terhadap PDRB, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) berupa peningkatan kesempatan kerja, penguatan rantai nilai ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum merupakan salah satu komponen dalam data PDRB secara keseluruhan. Dalam perhitungannya, rasio PDRB

akomodasi makan dan minum dihitung dengan membandingkan nilai produksi dalam lapangan usaha akomodasi makan dan minum dengan jumlah total dari keseluruhan PDRB. Indikator ini dapat menggambarkan produktivitas ekonomi daerah dalam sektor-sektor yang terkait seperti pariwisata. Berikut merupakan data PDRB lapangan usaha makan dan minum Kabupaten Banjar selama tahun 2021-2025:



Gambar 4. 2 Grafik Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Akomodasi Makan Minum Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, kontribusi sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Banjar cenderung stabil dengan fluktuasi yang relatif kecil. Pada tahun 2021 kontribusinya sebesar 3,21%, kemudian menurun menjadi 3,00% pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat secara bertahap menjadi 3,10% pada tahun 2023, 3,24% pada tahun 2024, dan mencapai 3,47% pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan bahwa setelah mengalami penyesuaian, sektor ini mulai menunjukkan penguatan kontribusi dalam struktur ekonomi daerah.

Dari sisi pertumbuhan, sektor akomodasi dan makan minum menunjukkan kinerja yang cukup impresif. Setelah sempat mengalami tekanan pada masa pandemi, sektor ini tumbuh sebesar 2,24% pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan menjadi 7,77% pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya sebesar 8,52% pada tahun 2023. Meskipun mengalami sedikit perlambatan menjadi 7,62% pada tahun 2024,

pertumbuhan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 9,52%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

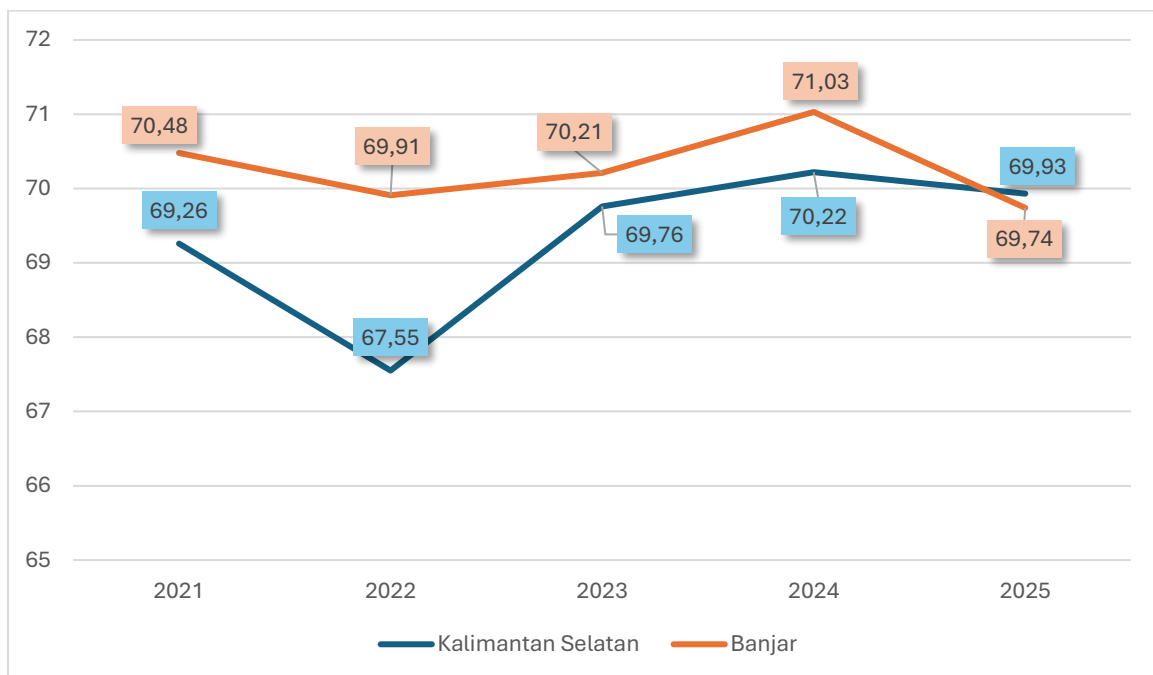
Pada tahun 2025, sektor akomodasi dan makan minum memberikan kontribusi sebesar Rp888 miliar atau sekitar 3,47 persen terhadap total PDRB Kabupaten Banjar dengan pertumbuhan mencapai 9,52 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kinerja sektor ini didorong oleh berkembangnya aktivitas usaha akomodasi dan kuliner, seperti bertambahnya jumlah kafe, rumah makan, restoran, dan hotel, serta implementasi program pemerintah melalui penyediaan dapur SPPG dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang turut meningkatkan aktivitas produksi dan distribusi makanan. Selain itu, pertumbuhan sektor ini juga diduga dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan berskala besar pada momen 5 Rajab. Kegiatan tersebut menarik kedatangan jamaah dari berbagai daerah dengan durasi tinggal yang relatif lama, sehingga mendorong peningkatan permintaan terhadap jasa akomodasi, konsumsi, serta usaha jasa pendukung lainnya yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Banjar.

Secara umum, tren pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun demikian, kontribusinya terhadap total PDRB masih relatif terbatas, sehingga diperlukan upaya penguatan yang lebih sistematis.

Ke depan, pengembangan sektor ini perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar usaha, pengembangan destinasi wisata unggulan, serta integrasi dengan produk ekonomi kreatif lokal. Selain itu, dukungan terhadap pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui akses permodalan, digitalisasi pemasaran, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Dengan strategi yang tepat, sektor akomodasi dan makan minum dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Banjar.

4.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia kerja yang ikut aktif di dalam perekonomian. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan indikator yang membandingkan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut capaian TPAK Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan:



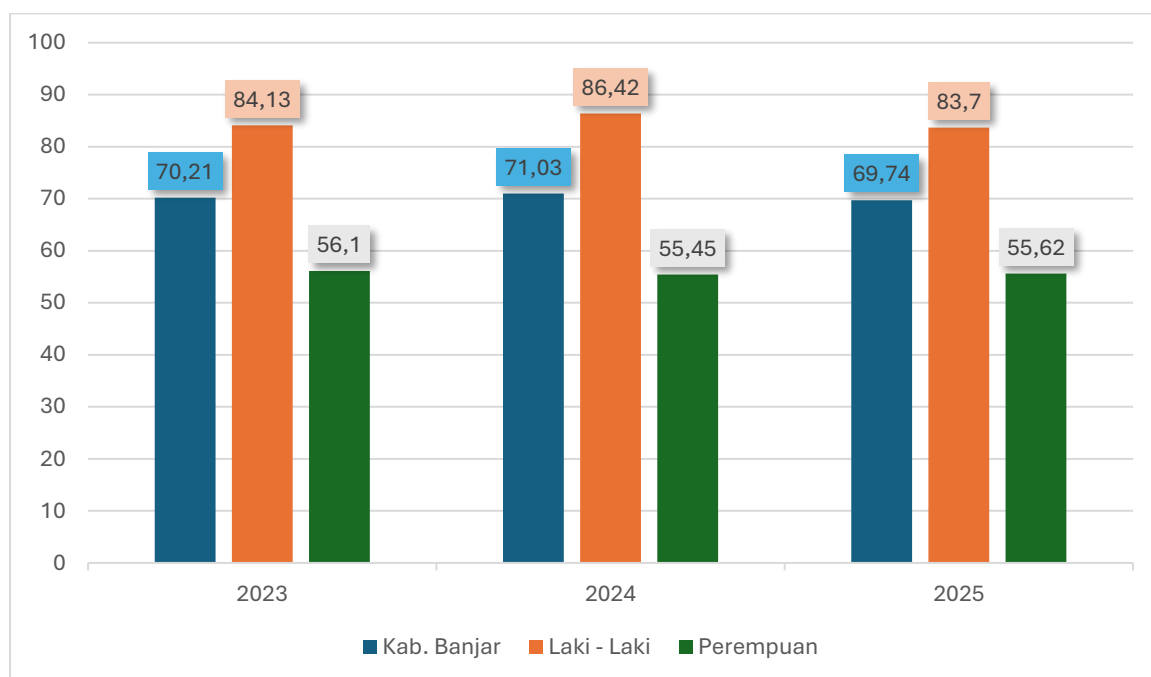
Gambar 4. 3 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banjar menunjukkan capaian yang relatif lebih tinggi secara konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, TPAK Kabupaten Banjar tercatat sebesar 70,48%, lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan sebesar 69,26%. Kondisi tersebut terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana TPAK Kabupaten Banjar mencapai 71,03%, sedangkan Kalimantan Selatan sebesar 70,22%. Namun pada tahun 2025, TPAK Kabupaten Banjar mengalami penurunan menjadi 69,74% dan sedikit berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69,93%.

Secara umum, perkembangan TPAK Kabupaten Banjar selama periode tersebut menunjukkan kondisi yang cukup stabil dengan kecenderungan fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Banjar telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Pada tahun 2025, nilai TPAK sebesar 69,74 persen menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk usia kerja, sekitar 69–70 orang termasuk dalam angkatan kerja.

Untuk melihat lebih lanjut karakteristik partisipasi angkatan kerja, TPAK juga dapat ditinjau berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif.



Gambar 4. 4 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan di Kabupaten Banjar. Pada tahun 2025, TPAK laki-laki tercatat sebesar 83,70%, sedangkan TPAK perempuan sebesar 55,62%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam pasar kerja masih jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Selama periode 2023–2025, TPAK laki-laki cenderung mengalami penurunan, dari 84,13% pada tahun 2023 menjadi 83,70% pada tahun 2025, setelah sempat meningkat menjadi 86,42% pada tahun 2024. Sementara itu, TPAK perempuan relatif stabil, yaitu sebesar 56,10% pada tahun 2023, turun menjadi 55,45% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 55,62% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan TPAK secara keseluruhan pada tahun 2025 lebih dipengaruhi oleh menurunnya partisipasi angkatan kerja laki-laki.

Kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peran domestik perempuan dalam rumah tangga, keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja, tingkat pendidikan, serta belum optimalnya lapangan kerja yang mendukung kesetaraan gender. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan perlu terus didorong melalui penyediaan kesempatan kerja yang lebih inklusif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan terhadap usaha ekonomi produktif perempuan.

Ke depan, peningkatan TPAK tidak hanya diarahkan pada peningkatan jumlah angkatan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dengan partisipasi angkatan kerja yang semakin tinggi, berkualitas, dan inklusif, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar.

4.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebijakan nasional. Inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Banjar dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan

Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, inovasi daerah mencakup tiga bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam implementasinya, inovasi daerah diselenggarakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan umum tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Sejalan dengan tema RKPD, inovasi daerah juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap risiko bencana, serta mendorong pengembangan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi tidak hanya berfungsi meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana serta mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 388 ayat (9), Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Penilaian ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kreativitas pemerintah daerah dalam mengembangkan praktik-praktik inovatif pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian inovasi daerah tersebut dilaksanakan secara periodik sebagai bagian dari pelaporan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri, yang diwujudkan melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah dalam kerangka pelaksanaan Innovative Government Award. Indeks Inovasi Daerah merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kualitas inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaannya, penilaian Indeks Inovasi Daerah mencakup dua aspek utama, yaitu aspek satuan pemerintah daerah dan aspek satuan inovasi daerah. Kedua aspek ini digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas kelembagaan serta kualitas inovasi yang dihasilkan.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

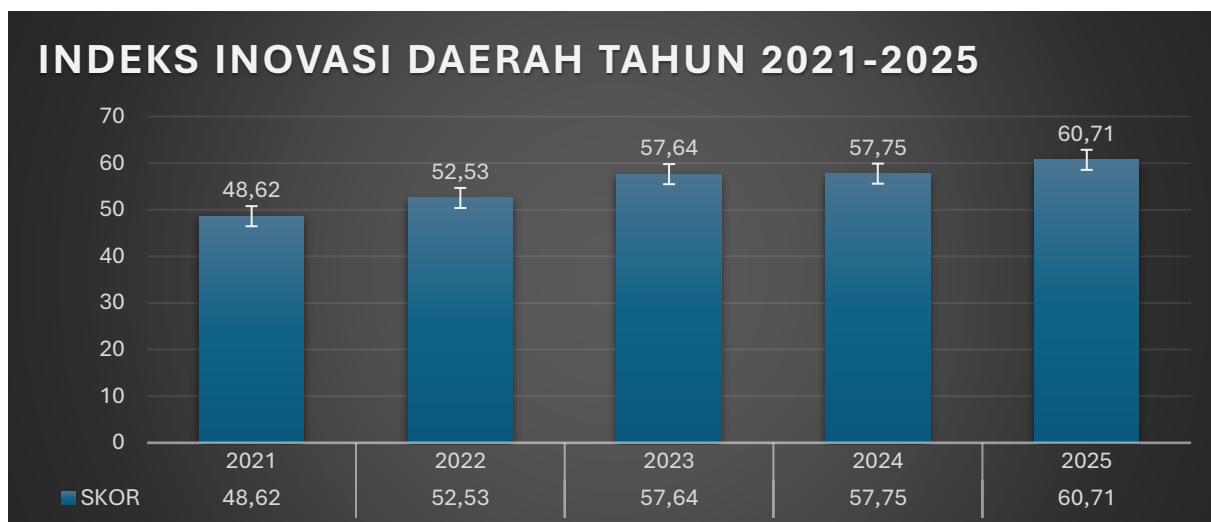


Gambar 4. 5 Rekapitulasi Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Sumber : Bapperida Kab. Banjar

Berdasarkan gambar diatas terlihat adanya variasi capaian yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Pada klaster kabupaten, Kabupaten Balangan (96,80) dan Tabalong (92,09) menempati posisi tertinggi dengan kategori “sangat inovatif”, diikuti oleh beberapa daerah lain seperti Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tapin yang juga menunjukkan capaian tinggi.

Kabupaten Banjar memperoleh skor 60,71 dan berada pada peringkat ke-6, yang masih termasuk dalam kategori “inovatif”. Pada klaster kota, Kota Banjarmasin (62,95) dan Kota Banjarbaru (56,19) juga berada pada kategori yang sama, namun belum ada yang mencapai kategori “sangat inovatif”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum capaian inovasi di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh kategori inovatif, dengan hanya sebagian kecil daerah yang telah mencapai tingkat sangat inovatif. Selanjutnya, perkembangan skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021–2025 disajikan pada tabel berikut :



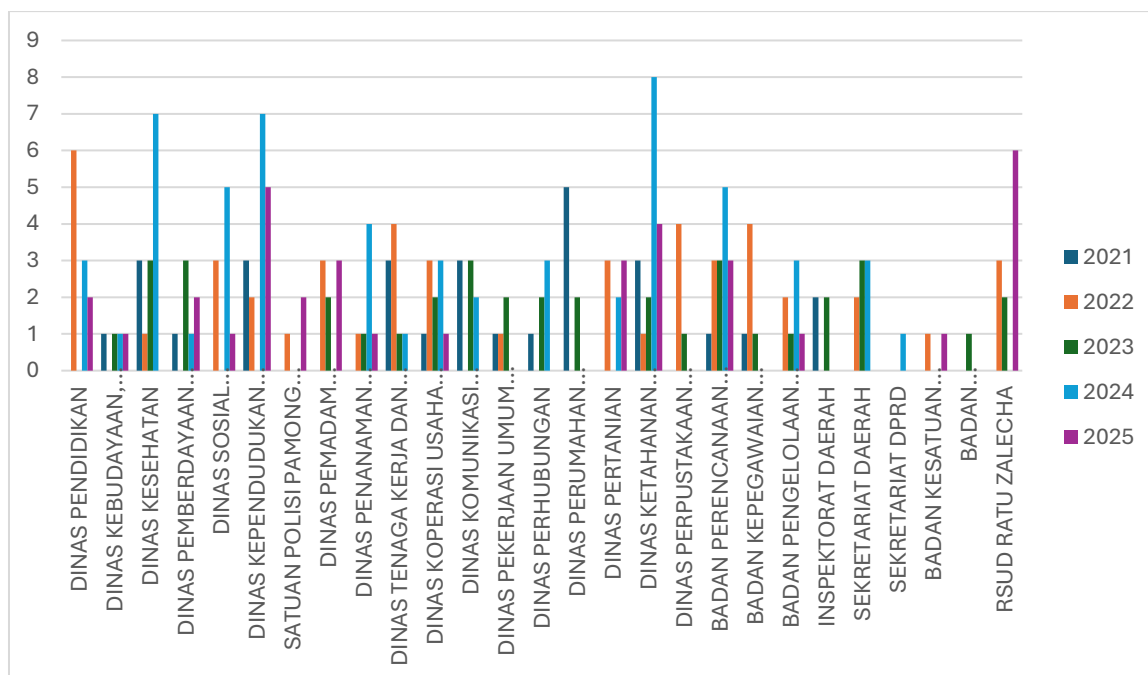
Gambar 4. 6 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2025

Sumber Data : Bapperida Kabupaten Banjar

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat walaupun masih berada pada kategori inovatif, dari 48,62 pada tahun 2021 menjadi 60,71 pada tahun 2025. Peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2021 hingga 2023, yang mencerminkan adanya penguatan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong inovasi, baik melalui peningkatan jumlah inovasi maupun perbaikan sistem pelaporan. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi perlambatan peningkatan yang relatif stagnan, sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kuantitas inovasi telah berkembang, kualitas dan dampaknya masih perlu terus ditingkatkan.

Secara umum, tren tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar telah berada pada jalur yang positif dalam pengembangan inovasi daerah, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas inovasi, keberlanjutan, dan dampak inovasi terhadap masyarakat. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terarah, antara lain melalui peningkatan kualitas inovasi yang berorientasi hasil, dan penguatan ekosistem inovasi daerah, serta optimalisasi pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah. Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian inovasi daerah tidak hanya meningkat secara nilai indeks, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.29 Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2025



Gambar 4. 7 Grafik Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah Kab.Banjar Tahun 2021 - 2025

Sumber Data : Bapperida Kabupaten Banjar

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa jumlah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah di kabupaten banjar dalam rentang waktu 5 (lima) tahun masih berfluktuasi dan belum merata setiap tahunnya. Beberapa perangkat daerah, seperti sektor kesehatan, pertanian, dan perencanaan, terlihat lebih konsisten dan bahkan mengalami peningkatan pada periode tertentu, khususnya tahun 2023–2024. Namun demikian, masih terdapat perangkat daerah dengan jumlah inovasi yang relatif rendah, tidak stabil, atau cenderung stagnan, yang menunjukkan bahwa budaya inovasi belum berkembang secara merata di seluruh organisasi perangkat daerah.

Secara umum, terdapat tren peningkatan inovasi pada periode 2022–2024, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dorongan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan kompetisi inovasi daerah. Namun peningkatan tersebut belum berkelanjutan hingga tahun 2025 dan masih didominasi oleh perangkat daerah tertentu.

Dalam konteks penilaian Inovative Government Award (IGA), kondisi seperti ini menempatkan Kabupaten Banjar pada kategori berkembang dan masih perlu

didorong menuju kategori “sangat inovatif”. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah melalui pemerataan pembinaan inovasi, penetapan target inovasi pada setiap perangkat daerah, serta penguatan kualitas inovasi yang berfokus pada dampak, keberlanjutan, dan replikasi. Selain itu, integrasi indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur pada setiap perangkat daerah perlu diperkuat agar peningkatan inovasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kematangan sistem inovasi daerah yang berkelanjutan.

Agar semakin jelas arah pembangunan yang strategis juga telah disusun dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) tahun 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman strategis dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah. Dokumen ini bertujuan memberikan arah kebijakan, tahapan pengembangan, serta program prioritas yang selaras dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD. Fokus utama dari penyusunan ini adalah menjadikan riset dan inovasi sebagai pengungkit utama dalam meningkatkan daya saing daerah, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mengawal dan meningkatkan kualitas inovasi daerah serta mendorong peningkatan Indeks Inovasi Daerah antara lain:

Laboratorium Inovasi

Laboratorium Inovasi merupakan pendampingan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI kepada instansi pemerintah untuk menghasilkan inovasi melalui pendekatan *co-creation*, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu *drump-up* sebagai tahap awal untuk membangun semangat dan budaya inovasi, *diagnose* untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan ide solusi inovatif, *design* untuk menyusun rencana aksi serta strategi pelaksanaan, *deliver* untuk implementasi inovasi yang disertai monitoring dan evaluasi, serta *display* untuk publikasi dan penyebarluasan inovasi guna memperoleh masukan dan pengembangan lebih lanjut.

Pembentukan Tim Independen dan Tim Inovasi Daerah Kab. Banjar

Pembentukan Tim dengan melibatkan akademisi, tenaga ahli, serta perangkat daerah teknis seperti DKISP, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, dan Dinas Pendidikan.

Kompetisi INTAN BANJAR (Inovasi Tangguh dan Andalan) Kab.Banjar

Kompetisi inovasi daerah dilaksanakan setiap tahun sebagai upaya menjaring inovasi dari perangkat daerah dan masyarakat, sekaligus memberikan motivasi dan apresiasi melalui penghargaan kepada inovator berprestasi di Kabupaten Banjar. Pelaksanaan kompetisi ini juga diselaraskan dengan upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah melalui penjangkaran inovasi yang berkualitas dan berdampak. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

Diseminasi Inovasi

Inovasi daerah tidak hanya diukur dari jumlah, tetapi juga dari kualitasnya. Untuk meningkatkan kualitas inovasi, Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan berbagai upaya, antara lain melalui workshop/ bimbingan teknis penguatan inovasi, serta kegiatan BSI (Bapperida Sapa Inovator) dan SI-ANIDA (Suara Inspirasi Anak Inovasi Daerah) sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kapasitas inovator daerah.

Klinik Inovasi

Merupakan layanan pendampingan inovasi yang disediakan melalui kunjungan langsung ke Bappedalitbang maupun secara daring (WhatsApp dan telepon). Layanan ini bertujuan membina dan mendampingi inovator dalam melengkapi data dukung inovasi, mulai dari penetapan, sosialisasi, publikasi, dokumentasi, hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, Klinik Inovasi berfungsi sebagai wadah penghimpunan data inovasi daerah, baik inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya, serta mengawal pengembangan inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kabupaten Banjar.

Penandatanganan Perjanjian Inovasi

Sebuah strategi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memperkuat komitmen perangkat daerah dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi, sekaligus memotivasi para inovator. Langkah ini bertujuan menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar program jangka pendek, guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Regulasi Inovasi

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah sebagai landasan hukum dalam penerapan inovasi di daerah . Regulasi ini menekankan prinsip *one innovation one agency* untuk mendorong peran aktif setiap perangkat daerah, sekaligus memperkuat ekosistem inovasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sebagai tindak lanjut, telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/529/KUM/2025 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2025 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) inovasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Inovasi Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	GEOLASTING (Geospasial untuk Kolaborasi Atasi Stunting)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	SI-ANIDA (Suara Anak Inspirasi Inovasi Daerah)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Non Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	BSI (Bappedalitbang Sapa Inovator)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa Politik	Fasilitasi pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Melalui Peraturan Bupati	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Non Digital
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar	PENJAWAB JITU ONLINE (Pelayanan Tanya Jawab Bidang Perizinan Tertentu Online)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Digital
6	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar	GEOTAX BANJAR (Transformasi Penetapan NPOP BPHTB Berbasis Geotagging Peta Zona Nilai Tanah di Kabupaten Banjar)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
7	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	LAPAT MANIS (Layanan Cepat Tanggap Masyarakat Berkebutuhan Khusus)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital
8	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	PELUKIS DESA (Pelayanan KIA Di Sekolah Untuk Tingkat Dasar Dan Desa)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital
9	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	DESAKU PELANDUK MANIS (Pelayanan Adminduk ada di Desa)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SIGAP DOKKAR (Menerbitkan langsung dokumen kependudukan warga terdampak musibah kebakaran)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital
11	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2. Program pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SAPPA BANJAR (Sosialisasi, Edukasi, dan Peningkatan Pemahaman Adminduk Warga Banjar)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital
12	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD Ratu Zalecha	SIMUTU RAZA (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Ratu Zalecha)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
13	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD Ratu Zalecha	SI IMUT-SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
14	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD Ratu Zalecha	KOMEN SEHAT (Konsultasi Online Masyarakat Melalui Telemedisin, Sistem Efektif Hubungan Antar Tenaga Medis)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Digital
15	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD Ratu Zalecha	RAJA SORAZA (Rawat Jalan Sore Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital
16	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Ratu Zalecha	SIPANGGAR (Sistem Informasi Perencanaan Dan Penganggaran BLUD) Rumah Sakit	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
17	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD Ratu Zalecha	LAKASI RAZA (Layanan Penanganan Kusta Terintegrasi RSUD Ratu Zalecha)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
18	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	TUNTAS BANJAR (Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Terintegrasi di Kabupaten Banjar	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
19	Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	SI CERAH (Siap Cepat Ramah)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
20	Aplikasi si CERAH	Satuan Polisi Pamong Praja	PROMED (Program Mediasi)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
21	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	APLIKASI SIAP (Sistem Informasi Aduan Dan Pelayanan)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Digital
22	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROTEKSI BANJAR (Program Terpadu Kolaborasi Sistem Informasi Pemadam Banjar)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Non Digital
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PENGEMBANGAN APLIKASI SI DAMKAR (Sistem Informasi Manajemen Data Pemadam Kebakaran Kabupaten Banjar)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Digital
24	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APAR BAMARA (Aksi Pencegahan Aktif Responsif Berdayakan Masyarakat Antisipasi Kebakaran)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pertanian	BATURAI INTAN (Banjar Tumbuhkan Santri Tani Milenial Inovatif Tangguh Dan Andal	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
26	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	BAHUMA CANGKAL (Batanam Banih Hemat Dan Ramah Lingkungan Memakai Cangkang Telur Dan Mulsa Kayapu)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
27	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian	TERONG BANGTANI (Terus Dorong Kembangkan Petani)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
28	Program peningkatan keterampilan petani	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	SI PRASWITA (Sistem Informasi Prasarana Dan Sarana Pariwisata)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Digital
29	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan	KEDAI KOPI (Kanal Edukasi Dan Informasi Koperasi)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Digital
30	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	INTAN SIKAPAYU (Inovasi Tangguh Sinergi Kampung Ikan Papuyu)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
31	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	UPT Balai Benih Dan Induk Ikan Karang Intan	IKAN TAUMAN (Intensifikasi Lahan Tadah Hujan Dan Musiman)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
32	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	UPT Balai Benih Dan Induk Ikan Karang Intan	BABARI KOLAM (Berlimpah Benih Ikan Dengan Kolaborasi Multi Pihak)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
33	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	UPT Balai Benih Dan Induk Ikan Karang Intan	SI LELGA PAHAM (Antisipasi Illegal Fishing Dengan Budidaya Papuyu Haruan Alam)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
34	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	ASDETA (Aset Desa Kita)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
35	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Peraturan Bupati Banjar Tentang Tata Kerja Sama Desa Dalam Mengoptimalkan Pengembangan Ekonomi Perdesaan Melalui Kerja Sama Desa	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Non Digital
36	Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPAL PPKS SI PROSEDUR DIGITAL (Standarisasi Prosedur Dan Digitalisasi Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gambut	SIP RAM (Sistem Informasi Dokumen Perencanaan Dan Program Kegiatan)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Karang Intan	SIPELARI-RIB (Rumah Informasi Bersama)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Digital
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Simpang Empat	PROGRAM SADAR ADMINISTRASI (Satu Data Rekap)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Sambung Makmur	SILAKIMETAL (Efisiensi Pelaporan Kinerja ASN Melalui Media Digital)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Inovasi Digital
41	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Mataraman	PERSADA MANIS (Pojok Ekonomi Kreatif Bersama Desa Maju, Mandiri, Agamis)	Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi Non Digital
42	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	UPTD Puskemas Telaga Bauntung	BAKUL KADER (Belajar Dan Kuliah Bersama Kader)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
43	Program Usia Produktif	UPTD Puskemas Telaga Bauntung	KURMA KUNING RASA PERMEN (Kunjungan Rumah Untuk Skrining PTM)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
44	Program Kelompok Anak Balita Stunting	UPTD Puskemas Telaga Bauntung	KEPITING (Kelompok Peduli Stunting)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital

No	Program dan Kegiatan	Nama Perangkat Daerah	Nama Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis Inovasi
45	Program Usia Produktif	UPTD Puskesmas Telaga Bauntung	GINTAS (Gerakan Iva Test Keliling Desa)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
46	Program Hipertensi	UPTD Puskesmas Telaga Bauntung	KALIBER HT (Kartu Kendali Berobat Hipertensi)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
47	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	UPTD Puskesmas Astambul	KU PENGEN CERIA MA (Kuis Pengetahuan Cegah Pernikahan Dini Pada Remaja)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
48	Program Pencegahan Stunting	UPTD Puskesmas Martapura Barat	GIAT SI APING (Gigi Sehat Aksi Pencegahan Stunting)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital
49	Program Pencegahan Stunting	UPTD Puskesmas Sungai Tabuk 2	KUCING BAGASING (Konsumsi Obat Cacing Untuk Pencegahan Stunting)	Inovasi Daerah lainnya	Inovasi Non Digital

Sumber Bapperida Kab. Banjar 2025

4.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah model pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan ekonomi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis lingkungan global yang terjadi akibat pembangunan konvensional yang mengedepankan profit tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem. Ekonomi hijau berfokus pada efisiensi sumber daya dan rendah karbon di daratan, sementara ekonomi biru menekankan pengelolaan berkelanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Pendekatan penerapan ekonomi hijau dan biru dilakukan melalui perhitungan PDRB Non-Tambang. PDRB Non-Tambang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan mengecualikan sektor pertambangan dan penggalian, sehingga mencerminkan kontribusi sektor ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Perhitungan ini bertujuan untuk menilai kinerja ekonomi daerah tanpa pengaruh sektor ekstraktif yang cenderung fluktuatif akibat perubahan harga komoditas global. Dengan demikian, PDRB Non-Tambang memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai daya saing dan ketahanan ekonomi suatu daerah dalam jangka panjang, terutama dalam sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

4.3.1 Distribusi Persentase PDRB Non Tambang Lapangan Usaha (Persen)

Data PDRB non tambang merupakan data yang diperoleh dari akumulasi data lapangan usaha di luar sektor pertambangan. Angka PDRB non tambang ini untuk menggambarkan kinerja sektor usaha lain selain pertambangan, untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai penerapan ekonomi hijau dan biru. Berikut adalah data distribusi PDRB non tambang di Kabupaten Banjar.

Tabel 4. 3 Distribusi Persentase PDRB Non Tambang Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,77	15,07	14,85	15,02	15,43
C. Industri Pengolahan	6,82	6,27	5,95	6,09	6,45
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,14	0,14	0,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
F. Konstruksi	10,34	9,59	9,74	9,89	9,81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,32	13,68	14,60	14,78	15,55
H. Transportasi dan Pergudangan	4,57	4,29	4,63	4,72	4,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,21	3	3,10	3,24	3,47
J. Informasi dan Komunikasi	4,13	3,8	3,84	3,96	4,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25	1,97	1,96	1,98	2,02

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
L. Real Estate	3,59	3,24	3,24	3,28	3,33
M,N. Jasa Perusahaan	0,36	0,34	0,36	0,38	0,39
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,04	6,12	6,07	6,13	5,95
P. Jasa Pendidikan	5,79	5,16	5,14	5,16	5,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	2,46	2,51	2,52	2,55
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,68	1,57	1,59	1,66	1,72
Produk Domestik Regional Bruto	83,9	76,93	77,95	79,18	81,19

*Catatan : * Angka Sementara*

*** Angka Sangat Sementara*

Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2026

PDRB non tambang di Kabupaten Banjar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 15,56 persen dari tahun 2021 hingga 2023. Sektor kedua penopang perekonomian Kabupaten Banjar terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 14,20 persen dari tahun 2021 hingga 2023. Sektor ketiga terdapat di sektor konstruksi. Sektor ini memiliki rata-rata distribusi sebesar 9,89 persen pada periode yang sama.

Faktor determinan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan PDRB non tambang di Kabupaten Banjar adalah pembangunan sektor pertanian yang berfokus pada penerapan teknologi modern dan diversifikasi produk. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas infrastruktur yang terfokus pada peningkatan kualitas jalan dan perhubungan serta ketenagalistrikan. Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah yang terfokus pada formulasi kebijakan dan dukungan secara berkesinambungan. Investasi pada sektor UMKM yang terfokus pada pembangunan UMKM dan pemberian kemudahan terhadap bantuan permodalan.

4.4 Transformasi Digital

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya mengubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

4.4.1 Pembangunan TIK

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi pilar utama dalam transformasi berbagai sektor kehidupan. Dengan kemajuan yang pesat dalam perangkat keras, perangkat lunak, serta infrastruktur jaringan, TIK tidak hanya mengubah cara berkomunikasi tetapi juga mengubah cara bekerja, belajar, dan berinteraksi. Infrastruktur digital yang semakin canggih memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi, meningkatkan produktivitas, dan memfasilitasi inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Pembangunan TIK juga mendorong integrasi sistem yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung berbagai industri, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, serta sektor publik dan swasta.

Kondisi akses telekomunikasi di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa dari total 277 desa yang ada, masih terdapat 15 desa yang berada dalam kategori blankspot atau belum terjangkau layanan sinyal komunikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian besar wilayah telah menikmati konektivitas digital, masih terdapat kesenjangan akses di beberapa desa, terutama yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan infrastruktur pendukung. Keberadaan desa blankspot ini menjadi tantangan dalam mendorong pemerataan informasi, pelayanan publik berbasis digital, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penguatan kolaborasi dengan penyedia layanan guna memastikan seluruh desa dapat terhubung dan memperoleh manfaat dari transformasi digital secara merata.

4.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Perekonomian yang optimal membutuhkan keterhubungan yang erat antara pasar domestik dan pasar global. Dalam konteks globalisasi, muncul berbagai peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi lokal dan domestik untuk memperluas akses pasar. Bagian ini akan menganalisis hubungan antara perekonomian lokal dan perekonomian global dengan menggunakan data terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

4.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keterhubungan ekonomi daerah dengan wilayah lain, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Integrasi ini tercermin melalui aktivitas perdagangan, arus investasi, serta keterlibatan dalam rantai pasok regional dan global. Tingkat integrasi ekonomi yang tinggi dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar, serta peningkatan daya saing produk dan jasa daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan integrasi ekonomi menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar lokal serta meningkatkan peluang ekspor dan investasi. Namun demikian, integrasi ekonomi juga memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk infrastruktur, kualitas produk, serta kapasitas pelaku usaha.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan integrasi ekonomi antara lain melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas, penyederhanaan perizinan investasi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha lokal agar mampu memenuhi standar pasar nasional dan internasional. Selain itu, pengembangan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting dalam mendorong keterhubungan ekonomi yang lebih luas.

Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan indikator yang menggambarkan besarnya investasi dalam bentuk barang modal yang digunakan untuk proses produksi, seperti bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan. PMTB menjadi salah satu komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dari sisi pengeluaran dan memiliki peran penting dalam menentukan kapasitas produksi serta pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.

Tingkat PMTB yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, rendahnya PMTB dapat mengindikasikan terbatasnya investasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

‘Dalam upaya meningkatkan PMTB, Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, kepastian hukum, serta kemudahan dalam proses perizinan. Selain itu, penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema kemitraan juga menjadi strategi penting dalam mendorong peningkatan investasi. Perencanaan investasi juga harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan PMTB, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, kepastian hukum, serta kemudahan dalam proses perizinan. Selain itu, penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema kemitraan juga menjadi strategi penting dalam mendorong peningkatan investasi. Perencanaan investasi juga harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Dalam ilmu ekonomi regional, PMTB menunjukkan:

1. tingkat aktivitas investasi,
2. kemampuan ekspansi ekonomi,
3. dan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Semakin tinggi PMTB, maka semakin besar kemampuan daerah dalam:

1. menciptakan kapasitas produksi,
2. meningkatkan produktivitas,
3. dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Indonesia (miliar rupiah)	Kalimantan Selatan (miliar rupiah)	Kabupaten Banjar (miliar rupiah)
1.	2021	5.227.853,94	30.346,15	3.602,38
2.	2022	5.697.279,18	31.935,78	3.719,61
3.	2023	6.090.676,73	33.588,68	3.884,77
4.	2024	6.452.530,73	35.259,02	4.058,11
5.	2025	6.852.617,82	37.168,95	4.253,11

Sumber Data BPS RI tahun 2026

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) nasional selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari sebesar Rp5.227.853,94 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp6.852.617,82 miliar pada tahun 2025. Secara kumulatif, nilai PMTB nasional meningkat sekitar 31,08 persen dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa aktivitas investasi fisik dan akumulasi barang modal di Indonesia terus mengalami penguatan, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan mesin dan peralatan, konstruksi bangunan, maupun investasi aset produktif lainnya. PMTB sendiri merupakan salah satu komponen utama dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran, sehingga peningkatan PMTB mencerminkan membaiknya kapasitas produksi dan optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Pada tahun 2021, peningkatan PMTB masih berada dalam fase pemulihan pascapandemi COVID-19. Aktivitas investasi mulai bergerak kembali seiring relaksasi pembatasan mobilitas, percepatan program vaksinasi, dan mulai pulihnya aktivitas industri serta perdagangan. Namun demikian, pada periode tersebut dunia usaha masih cenderung berhati-hati karena adanya ketidakpastian global, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi harga komoditas internasional. Oleh karena itu, meskipun PMTB tumbuh, laju peningkatannya belum terlalu agresif.

Memasuki tahun 2022 dan 2023, peningkatan PMTB nasional menjadi lebih kuat. Kondisi ini dipengaruhi oleh membaiknya permintaan domestik, meningkatnya konsumsi rumah tangga, serta percepatan berbagai proyek strategis nasional. Selain itu, tingginya harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit,

dan nikel pada periode tersebut turut meningkatkan kemampuan investasi sektor swasta, khususnya pada sektor pertambangan, industri pengolahan, dan logistik. Pemerintah juga tetap mempertahankan belanja infrastruktur sebagai stimulus ekonomi sehingga mendorong tumbuhnya investasi konstruksi dan pengadaan barang modal.

Pada tahun 2024 hingga 2025, PMTB nasional masih menunjukkan tren meningkat dengan pertumbuhan nominal yang relatif lebih tinggi dibanding periode awal pemulihan. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim investasi nasional semakin stabil dan ekspansi usaha mulai dilakukan dalam skala yang lebih besar. Peningkatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur konektivitas, hilirisasi industri, transformasi digital, serta pengembangan kawasan industri dan energi. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat kemudahan berusaha, dan mendorong investasi melalui berbagai insentif fiskal turut memberikan dampak positif terhadap pembentukan modal di tingkat nasional.

Meskipun demikian, peningkatan PMTB nasional juga perlu dicermati secara kritis. Kenaikan investasi belum tentu sepenuhnya mencerminkan pemerataan kualitas pembangunan antarwilayah. Sebagian besar investasi nasional masih cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik, terutama di Pulau Jawa dan kawasan industri besar. Di sisi lain, ketergantungan terhadap investasi berbasis komoditas juga dapat menimbulkan kerentanan apabila terjadi penurunan harga komoditas global. Oleh sebab itu, keberlanjutan pertumbuhan PMTB nasional ke depan perlu diarahkan pada investasi yang lebih produktif, inklusif, berbasis hilirisasi, serta mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja yang lebih luas di seluruh daerah.

Selama periode Tahun 2021–2025, PMTB Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari Rp 30.346,15 Miliar pada 2021, menjadi Rp 37.168,95 pada 2025, artinya terjadi peningkatan sekitar Rp 6.822,8 miliar atau tumbuh sekitar 22,5 % selama lima tahun.

Adapun PMTB Kabupaten Banjar juga mengalami peningkatan yang cukup stabil dari Rp 3.602,38 miliar pada 2021, menjadi Rp 4.253,11 miliar pada tahun 2025, terjadi peningkatan sekitar Rp 650,73 miliar atau tumbuh sekitar 18,1 % selama lima tahun.

Peningkatan PMTB Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa investasi daerah terus bergerak positif, aktivitas pembangunan meningkat, dan sektor ekonomi lokal berkembang secara bertahap. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, PMTB Kabupaten Banjar menunjukkan kontribusi yang cukup penting terhadap investasi regional. Kabupaten Banjar memiliki tren pertumbuhan yang relatif stabil setiap tahun tanpa mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah cukup resilien, aktivitas investasi tetap berjalan, dan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan. Walaupun, skala PMTB Kabupaten Banjar lebih kecil dibanding tingkat provinsi, pola pertumbuhannya menunjukkan arah yang positif dan konsisten. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan bahwa peningkatan investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

4.6.1 Panjang Jalan Berdasarkan Wewenang Pengelolaan Kabupaten Banjar

Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Banjar menunjukkan peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas perekonomian masyarakat. Hingga saat ini, yang berfungsi sebagai tulang punggung mobilitas antar kecamatan serta akses utama menuju pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan jaringan jalan kabupaten ini sangat penting dalam memperlancar distribusi barang dan jasa, khususnya untuk sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Di sisi lain, menjadi penghubung vital pada skala lokal, yang secara langsung melayani kebutuhan mobilitas masyarakat di tingkat desa. Infrastruktur ini berperan besar dalam membuka akses ke lahan pertanian, permukiman, serta fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jalan desa juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang masih berkembang.

Tabel 4. 5 Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Banjar(km), 2022-2025

Kewenangan Pemerintahan	2022	2023	2024	2025
Negara	154,48	154,48	154,48	154,48
Provinsi	127,60	127,60	127,60	127,60
Kabupaten	806,46	806,46	781,65	781,65
Jumlah	1.088,54	1.088,54	1.063,73	1.063,73

Sumber: BPS Kab. Banjar 2026

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Banjar menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan kualitas infrastruktur transportasi daerah. Kondisi permukaan jalan yang baik berperan dalam mendukung konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta peningkatan akses terhadap pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Tabel 4. 6 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Banjar (km), 2022-2025

Kewenangan Pemerintahan	2022	2023	2024	2025
Aspal	699,31	744,67	726,75	766,38
Kerikil	369,41	277,81	278,76	236,30
Tanah	-	38,82	38,32	22,60
Lainnya	19,83	27,25	19,40	38,45
Jumlah	1.088,54	1.088,54	1.063,73	1.063,73

Sumber: BPS Kab. Banjar 2026

Berdasarkan data tahun 2022–2025, panjang jalan berpermukaan aspal di Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan, dari 699,31 km pada tahun 2022 menjadi 766,38 km pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan untuk mendukung aksesibilitas wilayah. Di sisi lain, panjang jalan berpermukaan kerikil mengalami penurunan cukup signifikan dari 369,41 km menjadi 236,30 km, yang mengindikasikan adanya peningkatan status jalan ke permukaan yang lebih baik. Jalan tanah juga mengalami penurunan hingga tersisa 22,60 km pada tahun 2025, menunjukkan semakin berkurangnya ruas jalan dengan kualitas rendah. Secara umum, komposisi permukaan jalan di Kabupaten

Banjar semakin didominasi oleh jalan beraspal, yang mencerminkan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.

4.6.2 Kondisi Jalan Kabupaten Banjar

Kondisi jalan di Kabupaten Banjar memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas penduduk, distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta keterhubungan antarwilayah. Infrastruktur jalan yang baik mampu meningkatkan aksesibilitas kawasan produksi, pusat pelayanan, dan pasar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.

Tabel 4. 7 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Banjar (km), 2022-2025

Kondisi Jalan	2022	2023	2024	2025
Baik	504,49	615,49	646,37	646,37
Sedang	248,51	103,77	86,04	86,04
Rusak	55,23	39,00	17,90	17,90
Rusak Berat	227,05	330,27	313,42	313,42
Jumlah	1.035,28	1.088,53	1.063,73	1.063,73

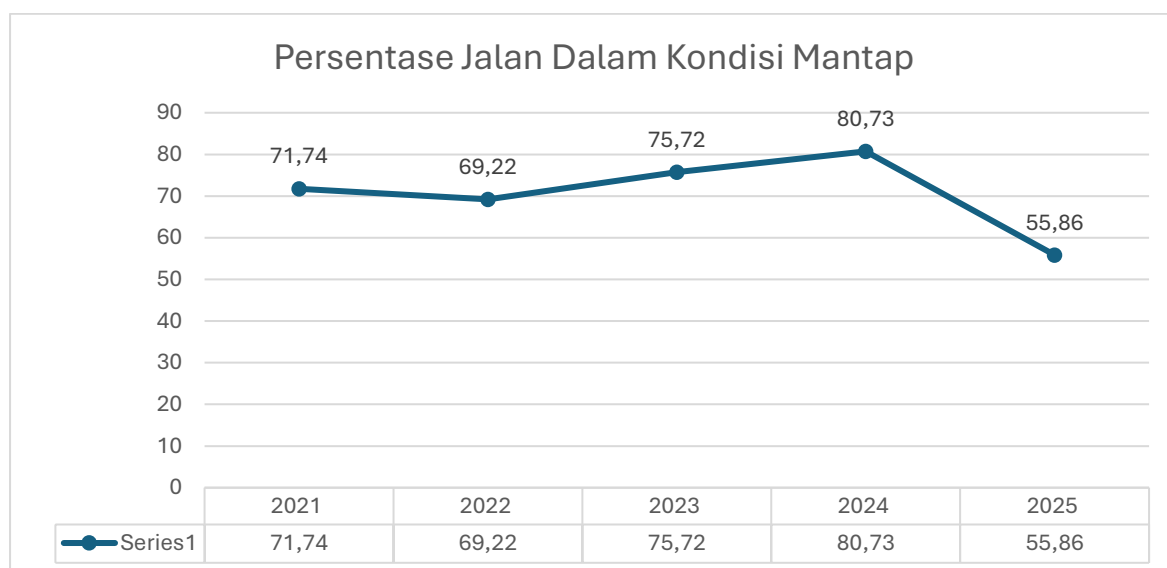
Sumber: BPS Kab. Banjar 2026

Kondisi jalan di Kabupaten Banjar selama periode 2022–2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, yang ditandai dengan bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik dari 504,49 km pada tahun 2022 menjadi 646,37 km pada tahun 2024 dan tetap stabil pada tahun 2025. Di sisi lain, panjang jalan dalam kondisi rusak mengalami penurunan signifikan dari 55,23 km menjadi 17,90 km, sedangkan jalan dengan kondisi sedang juga menurun dari 248,51 km menjadi 86,04 km. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang cukup efektif. Namun demikian, panjang jalan dengan kondisi rusak berat masih relatif tinggi, yakni sebesar 313,42 km pada tahun 2024–2025, sehingga masih diperlukan percepatan penanganan untuk mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta aktivitas perekonomian masyarakat secara lebih optimal.

4.6.3 Persentase Konektivitas, Persentase Kondisi Jalan mantap, dan Indeks Konektivitas di Kabupaten Banjar

Jaringan transportasi merupakan infrastruktur dasar yang penting untuk menunjang perkembangan wilayah. Jaringan transportasi yang baik akan memudahkan mobilitas dan konektivitas masyarakat serta distribusi barang. Pembangunan jalan di Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya persentase konektivitas wilayah. Jalan terbangun di Kabupaten Banjar dilengkapi dengan jalan nasional dan jalan provinsi yang melintas. Selain itu jalan kabupaten terus mengalami penambahan panjang jalan yang digunakan, baik untuk menghubungkan antarwilayah di Kabupaten Banjar maupun dengan kabupaten kota lain yang bersebelahan. Kondisi jalan terbangun di Kabupaten Banjar tergambar bervariasi jika dilihat dari kondisi strukturnya.

Jalan dalam kondisi mantap



Gambar 4. 8 Grafik Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap

Sumber Data Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Banjar

Persentase jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat dari 69,22% pada tahun 2022 menjadi 80,73% pada tahun 2024, sebelum mengalami penurunan menjadi 55,86% pada tahun 2025. Penurunan signifikan pada tahun 2025 tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan degradasi kondisi infrastruktur jalan, melainkan dipengaruhi oleh adanya perubahan metode perhitungan dan kriteria penilaian terhadap kondisi jalan yang dikategorikan mantap. Penyesuaian ini menyebabkan standar penilaian menjadi

lebih ketat dan komprehensif, sehingga sebagian ruas jalan yang sebelumnya tergolong mantap mengalami reklasifikasi. Dengan demikian, capaian tersebut tetap perlu dipahami sebagai bagian dari upaya peningkatan akurasi data dan kualitas evaluasi dalam pengelolaan infrastruktur jalan

4.6.4 Indeks Konektivitas

Indeks konektivitas merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterhubungan antarwilayah melalui dukungan infrastruktur transportasi, khususnya jaringan jalan. Di Kabupaten Banjar, indeks konektivitas mencerminkan kemampuan infrastruktur jalan dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta keterhubungan antar pusat kegiatan wilayah. Semakin baik kondisi dan jangkauan jaringan jalan, maka semakin tinggi pula tingkat aksesibilitas dan efisiensi pergerakan yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.



Gambar 4. 9 Grafik Indeks Konektivitas

Sumber Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab, Banjar

Indeks konektivitas di Kabupaten Banjar menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari 59,97 pada awal periode menjadi 84,44, dan relatif stabil di angka 84,16 pada tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya keterhubungan antarwilayah yang didukung oleh pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, khususnya jaringan jalan. Konektivitas yang semakin kuat tersebut berdampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta akses terhadap

pusat-pusat pelayanan dan ekonomi. Meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan, secara umum capaian ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas wilayah sudah berada pada kategori baik dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah.

4.6.5 Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan di Kabupaten Banjar

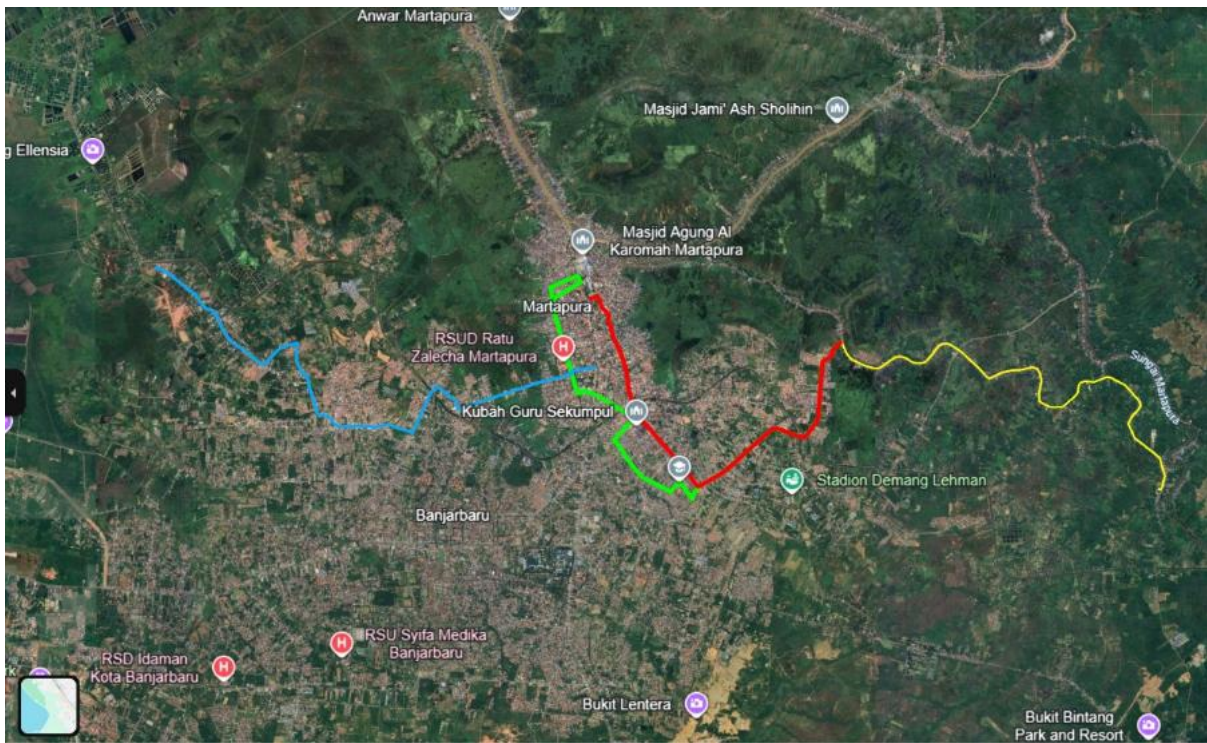
Kondisi geografis Kabupaten Banjar yang dilalui oleh sejumlah sungai besar dan kawasan perairan menjadikan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat. Jaringan transportasi perairan di Kabupaten Banjar meliputi Sungai Martapura, Sungai Riam Kanan, dan Sungai Riam Kiwa yang menjadi bagian dari sistem transportasi wilayah Kalimantan Selatan.

Sungai Martapura merupakan salah satu jalur transportasi air utama yang menghubungkan wilayah Martapura dengan Kota Banjarmasin. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi masyarakat, sungai ini juga mendukung aktivitas perdagangan dan distribusi barang pada kawasan bantaran sungai. Keberadaan dermaga dan pelabuhan sungai di beberapa wilayah turut mendukung aktivitas transportasi dan konektivitas antarwilayah.

Angkutan Darat

Layanan Feeder Trans Intan Banjar adalah sistem angkutan pengumpan gratis yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perhubungan. Layanan ini hadir sebagai solusi mobilitas publik yang efisien untuk menghubungkan kawasan pemukiman dengan pusat kota dan moda transportasi utama lainnya.

Dengan kekuatan armada sebanyak 36 unit, layanan ini mencakup empat trayek strategis yang melintasi area penting seperti Martapura, Cindai Alus, kawasan Sekumpul hingga Karang Intan. Selain bertujuan mempermudah aksesibilitas masyarakat, program ini juga menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menekan angka emisi karbon dan mengendalikan inflasi melalui penyediaan transportasi umum yang terjangkau dan terintegrasi.



Gambar 4. 10 Trayek Angkutan Pengumpan (Feeder)

Sumber: DISHUB KAB. BANJAR, 2026

Selain angkutan pengumpan Bus Trans Banjarbakula (feeder BTS), pelayanan transportasi umum di Kabupaten Banjar juga didukung oleh angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melayani mobilitas masyarakat pada berbagai trayek antarwilayah. Keberadaan angkutan umum tersebut masih memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas kawasan permukiman, pusat perdagangan, pusat pelayanan, serta akses masyarakat menuju ibu kota kecamatan maupun pusat kegiatan di Kota Martapura.

Tabel 4. 8 Jumlah Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Menurut Trayek di Kabupaten Banjar Tahun 2025

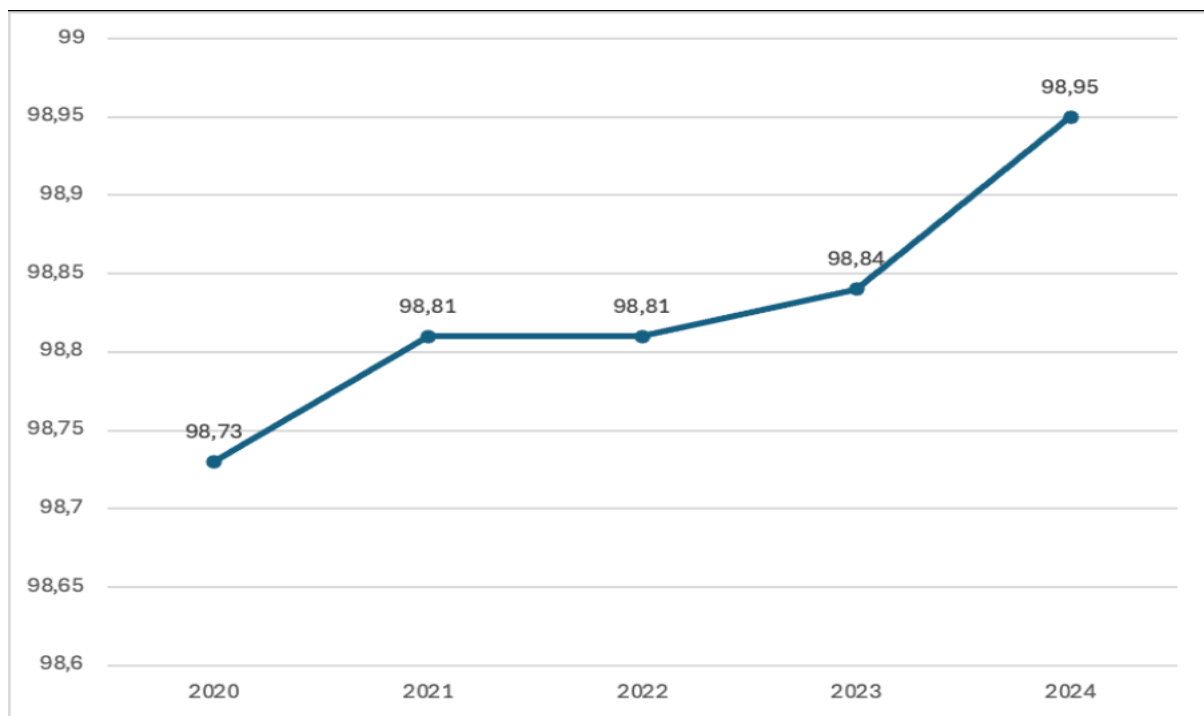
Kode	Trayek	Layanan	Jumlah Angkutan yang Teregistrasi Izin Trayek
J	Terminal Gambut Barakat – Gambut – Kertak Hanyar (Pulang Pergi)	Angkutan Perkotaan	136
A1	Terminal Martapura – Sungai Sipai – Cindai Alus (Pulang Pergi)	Angkutan Perkotaan	10
A2	Terminal Martapura – Tanjung Rema – Sekumpul – Bincau (Pulang Pergi)	Angkutan Perkotaan	10
AA	Terminal Gambut Barakat – Beruntung Baru – Tatah Makmur	Angkutan Perdesaan	2

Kode	Trayek	Layanan	Jumlah Angkutan yang Teregistrasi Izin Trayek
	– Aluh–aluh (Pulang Pergi)		
BB	Terminal Martapura – Karang Intan (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	5
C	Terminal Martapura – Aranio (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	18
D	Terminal Martapura – Mataraman – Simpang Empat – Cintapuri Darussalam (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	40
E	Terminal Martapura – Martapura Barat – Sungai Tabuk – Terminal Gambut Barakat (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	1
F	Terminal Martapura – Martapura Timur (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	2
G	Terminal Martapura – Pengaron – Sambung Makmur – Sungai Pinang (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	17
H	Terminal Martapura – Mataraman – Simpang Empat – Pengaron – Telaga Bauntung – Sungai Pinang (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	7
I	Terminal Martapura – Mataraman – Simpang Empat – Pengaron – Sungkai (Pulang Pergi)	Angkutan Perdesaan	1
Jumlah			249

Sumber: BPS, 2026

Keberadaan jaringan angkutan umum tersebut mendukung mobilitas masyarakat untuk kegiatan pendidikan, perdagangan, pekerjaan, dan pelayanan sosial lainnya. Namun demikian, perkembangan penggunaan kendaraan pribadi dan perubahan pola mobilitas masyarakat turut memengaruhi tingkat penggunaan angkutan umum di beberapa trayek. Oleh karena itu, keberadaan angkutan perkotaan dan perdesaan tetap menjadi bagian penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan transportasi masyarakat di Kabupaten Banjar.

4.6.6 Indeks Konektivitas Prasarana di Kabupaten Banjar



Gambar 4. 11 Grafik Indeks Konektivitas Prasarana Di Kab. Banjar Tahun 2020-2024

Sumber Data : Bappeda Kabupaten Banjar

Indeks konektivitas prasarana di Kabupaten Banjar menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat interaksi, hubungan, dan kemudahan akses antarwilayah semakin bertambah, karena adanya jaringan termasuk prasarana yang lebih banyak dan efektif untuk perpindahan barang, jasa, dan manusia. Hal tersebut berdampak pada peningkatan mobilitas, potensi ekonomi, pengembangan pariwisata, dan pertumbuhan sosial di Kabupaten Banjar.

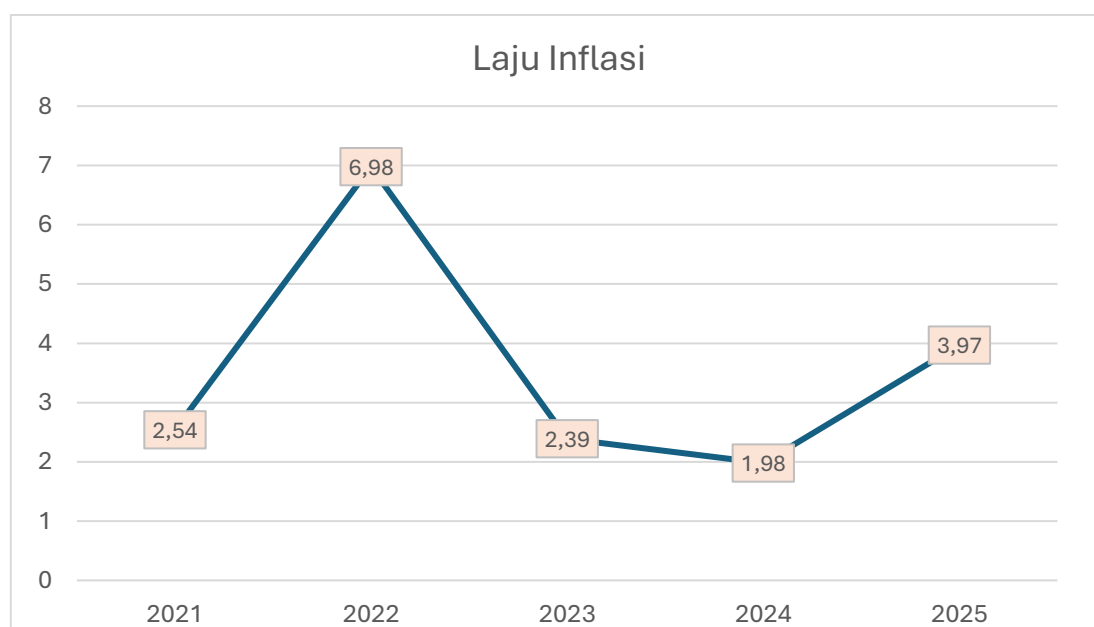
4.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro adalah kondisi di mana suatu perekonomian berada dalam keseimbangan yang berkelanjutan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat pengangguran yang rendah, serta inflasi yang terkendali. Inflasi, sebagai salah satu indikator ekonomi makro, memiliki hubungan erat dengan stabilitas ekonomi karena fluktuasi tingkat inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, investasi, serta kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Berikut adalah data inflasi Kota Banjarmasin sebagai acuan inflasi Kabupaten Banjar.

Inflasi merupakan salah satu kondisi perekonomian yang perlu menjadi perhatian utama dalam pengelolaan perekonomian suatu wilayah. Inflasi adalah kondisi naiknya harga-harga kebutuhan pokok dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tinggi rendahnya inflasi suatu wilayah dapat memengaruhi kondisi perekonomian suatu wilayah. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga tingkat inflasi agar selalu terjaga, untuk menjaga rata-rata kenaikan harga barang kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Kondisi inflasi di Kabupaten Banjar dapat dilihat melalui daerah terdekat dari Kabupaten Banjar, yaitu Kota Banjarmasin.

4.7.1 Grafik Laju Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin tahun 2021-2025

Berikut merupakan kondisi inflasi tahunan Kota Banjarmasin selama periode 2021 hingga 2025:



Gambar 4. 12 Grafik Laju Inflasi Tahunan Kota Banjarmasin 2020-2025

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2026

Selama periode 2021 hingga 2025, laju inflasi bergerak sangat fluktuatif (naik-turun tajam), dengan puncaknya pada tahun 2022, menurun di tahun 2023 dan 2024 namun kembali merangkak naik di tahun 2025.

Pada tahun 2021, inflasi masih terhitung rendah dan stabil di angka 2,54%. Namun, memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan yang sangat drastis sebesar 4,44 poin persentase hingga menyentuh angka 6,98%. Ini adalah titik tertinggi (puncak inflasi) dalam lima tahun terakhir, yang biasanya dipicu oleh faktor eksternal seperti kenaikan

harga bahan bakar, gangguan rantai pasok, atau pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang meningkatkan permintaan secara mendadak.

Laju inflasi berhasil ditekan secara signifikan pada tahun 2023 menjadi 2,39%. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana inflasi mencapai titik terendahnya di angka 1,98%. Penurunan ini kemungkinan karena adanya intervensi pemerintah dalam menjaga harga pangan sehingga berhasil meredam gejolak harga. Pada tahun 2025 inflasi kembali merangkak naik ke angka 3,97% (hampir mendekati 4%). Kenaikan sebesar hampir 2% dari tahun sebelumnya ini bisa diakibatkan adanya pelemahan nilai tukar atau kenaikan harga barang-barang pokok yang diatur pemerintah.

Secara keseluruhan Rata-rata Inflasi dalam periode ini berada di angka 3,57% per tahun. Angka rata-rata ini sebenarnya masih relatif aman bagi pertumbuhan ekonomi, namun fluktuasi yang tajam antara tahun 2022 (tertinggi 6,98 %) dan 2024 (terendah 1,98 %) menunjukkan bahwa kondisi perekonomian selama periode ini sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi makro.

Hubungan antara Kabupaten Banjar (Martapura) dengan Kota Banjarmasin dalam hal laju inflasi adalah keduanya terletak dalam satu kawasan metropolitan yang sama di Kalimantan Selatan (kawasan Banjarbakula). Secara statistik dan ekonomi makro, Kota Banjarmasin dijadikan salah satu acuan utama (IHK / Indeks Harga Konsumen) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan pergerakan harga di wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Banjar.

Inflasi kedua wilayah ini didorong oleh komoditas yang sama:

- Sektor Pangan: Kenaikan harga cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, dan ikan air tawar lokal (seperti ikan gabus/haruan dan patin) langsung memengaruhi pasar-pasar besar di Kabupaten Banjar (seperti Pasar Bauntung atau Pasar Martapura) sesaat setelah terjadi kenaikan harga di Banjarmasin.
- Faktor Cuaca: Tingginya curah hujan yang sempat menggenangi lahan pertanian di wilayah Kabupaten Banjar otomatis mengganggu suplai sayuran ke Banjarmasin, yang pada akhirnya memicu inflasi makanan di kedua daerah secara bersamaan.
- Momen Musiman: Dorongan inflasi selalu kompak naik di kedua wilayah saat memasuki momen Hari Besar Keagamaan (Ramadhan, Idul Fitri) serta momen Natal dan Tahun Baru akibat melonjaknya permintaan transportasi dan bahan pangan.

Karena inflasi Kabupaten Banjar sangat dipengaruhi oleh dinamika harga di Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Banjar secara rutin mengalibrasi kebijakannya melalui Rapat Koordinasi TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah). Strategi yang dilakukan Kabupaten Banjar untuk mengimbangi pengaruh inflasi dari kota terdekatnya meliputi:

- **Pasar Murah Bersubsidi:** Mengadakan operasi pasar di titik-titik rawan untuk menahan agar harga bapak (bahan pokok) di tingkat kabupaten tidak bergejolak lebih tinggi daripada harga di kota.
- **Menjaga Pasokan Pertanian Mandiri:** Sebagai daerah penyangga pangan (produsen padi dan hortikultura), Kabupaten Banjar justru bertindak sebagai penyuplai untuk meredam inflasi Banjarmasin. Ketika produksi padi dan jagung di Kabupaten Banjar surplus (seperti lonjakan data produksi Anda di tahun 2024–2025), hal ini secara langsung membantu menstabilkan harga pangan di Kota Banjarmasin.

BAB V

ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pendukung manajemen pelayanan publik yang memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Berhasil tidaknya pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja tata kelola pemerintahan. Kinerja tersebut dinilai dari sejauh mana penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak.

5.1 Regulasi dan tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

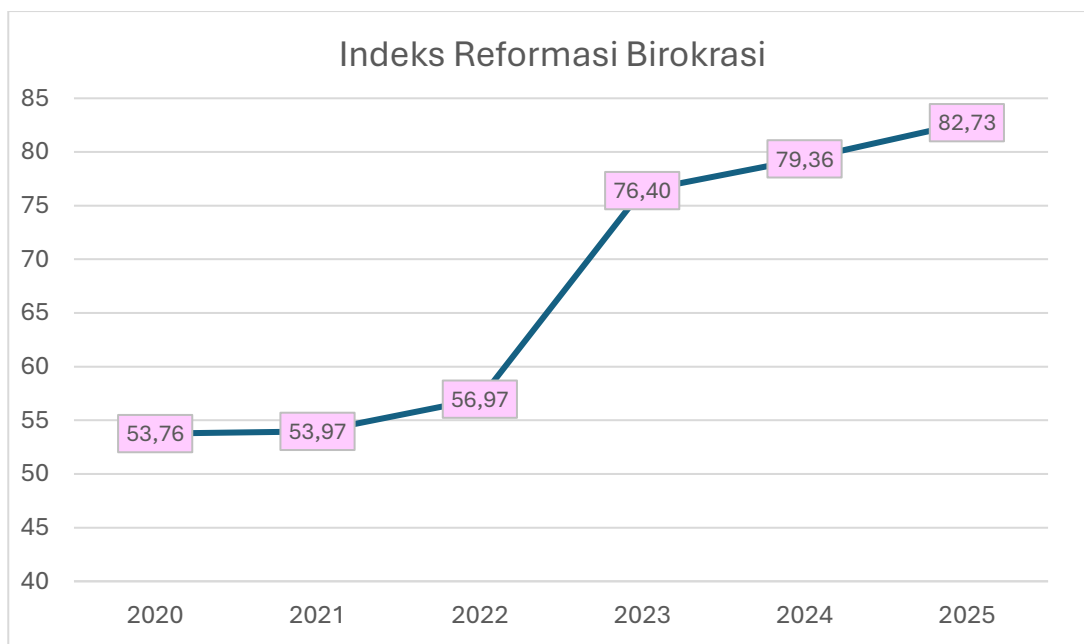
Aspek pelayanan umum berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan berfungsi sebagai pendukung manajemen pelayanan publik yang memiliki peran dalam mengontrol dan memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan baik. Berhasil tidaknya pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja tata kelola pemerintahan. Kinerja tersebut dinilai dari sejauh mana penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas dan berdampak.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah). Penilaian ini dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Secara sederhana, IRB menunjukkan seberapa efektif, efisien, bersih, dan akuntabelnya suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya serta melayani masyarakat.

5.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banjar

Secara umum kinerja tata Kelola pemerintahan Kabupaten Banjar dapat dinilai dari Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), sebagai berikut.



Gambar 5. 1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banjar

Sumber Data: Kemenpan RB data diolah

Secara keseluruhan, Indeks Reformasi Birokrasi ini menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 5 tahun (2021 ke 2025), nilai IRB berhasil melonjak dari 53,76 menjadi 82,73 (mengalami kenaikan total sebesar 28,97 poin).

Pada periode awal ini, kenaikan nilai IRB cenderung menaik. Dari tahun 2021 ke 2022 menunjukkan kenaikan 3,00 poin menjadi 56,97 (kategori C / Cukup) menunjukkan fondasi reformasi baru mulai berjalan. Terjadi lonjakan performa yang sangat signifikan dari tahun 2022 ke 2023, di mana nilai IRB melompat sebesar 19,43 poin (dari 56,97 menjadi 76,40). Lonjakan tajam seperti ini biasanya terjadi karena adanya perubahan masif, seperti keberhasilan implementasi sistem digitalisasi birokrasi (e-government), penyederhanaan struktur organisasi yang sukses, atau adanya penyesuaian/perubahan komponen instrumen penilaian dari kementerian terkait.

Setelah lompatan besar di tahun 2023, tren positif ini berhasil dipertahankan dan terus ditingkatkan secara stabil pada dua tahun berikutnya. Tahun 2024 naik 2,96 poin menjadi 79,36 (kategori B / Baik). Tahun 2025 naik 3,37 poin hingga mencapai angka tertinggi di 82,73 atau sudah masuk ke dalam kategori "A" (Sangat Baik). Ini menandakan tata kelola instansi/wilayah tersebut sudah semakin akuntabel, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang prima.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang meningkat menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dari pemerintah daerah menjadi lebih efektif, efisien, bersih dari KKN dan memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan serta berkualitas. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan nyata pada sistem, SDM aparatur dan hasil. Peningkatan Indeks Reformasi birokrasi memiliki makna :

- Mampu dalam memberikan layanan yang cepat, tidak diskriminatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- Adanya perbaikan dalam sistem pencegahan korupsi, yang berarti birokrasi lebih transparan dan bersih dari praktik KKN
- Proses tata kelola pemerintahan yang tumpang tindih berhasil dipangkas sehingga menghasilkan birokrasi yang lebih ramping, lincah dan berfokus kepada hasil/kinerja
- Peningkatan indeks ini sejalan dengan kemajuan nyata dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri
- Reformasi dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, tidak hanya sebagai proyek sesaat
- Memberikan penghargaan bagi kinerja baik dan sanksi bagi pelanggar (Reward dan Punishment)

SAKIP dan SPBE adalah dua instrumen evaluasi utama yang digunakan untuk menilai dan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas. SAKIP dinilai setiap tahun oleh Kementerian PANRB.

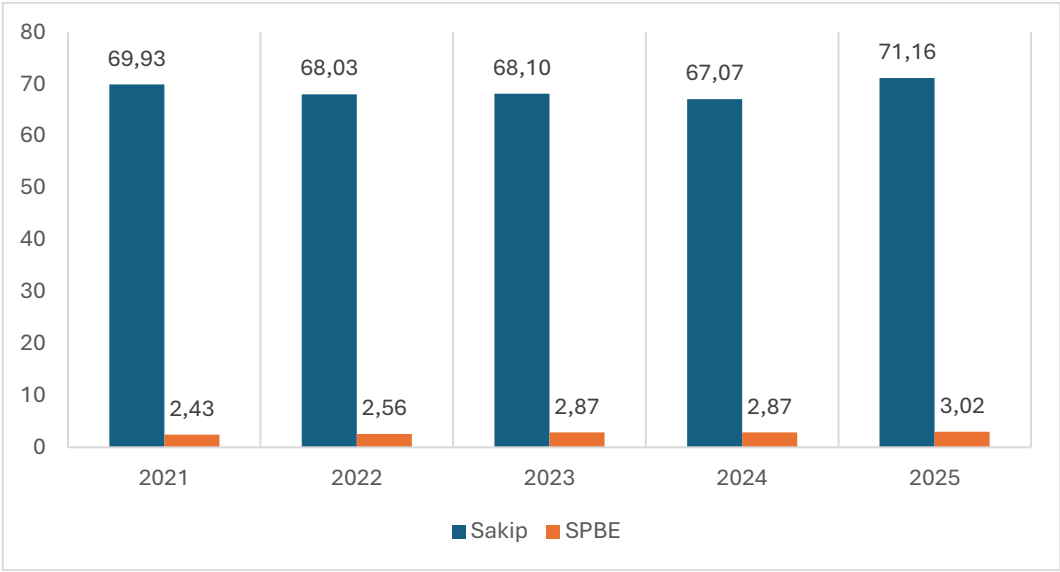
SPBE atau yang sering dikenal sebagai *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Aparatur Sipil Negara, masyarakat, dan pelaku usaha). Keduanya saling melengkapi SAKIP fokus pada akuntabilitas kinerja dan efisiensi anggaran, sedangkan SPBE fokus pada modernisasi pelayanan melalui digitalisasi (e-government).

Adapun keterkaitan yang dimaksud antara peningkatan nilai sakip dengan indeks SPBE sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Capaian Kinerja SAKIP Daerah, Indeks SPBE Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	SAKIP Daerah	69,33 (B)	68,03 (B)	68,10 (B)	67,07 (B)	71,16 (BB)
2	Indeks SPBE	2,43	2,558	2,87	2,87	3,02

Sumber Data Kemenpan RB RI Tahun 2026



Gambar 5. 2 Capaian Kinerja SAKIP dan SPBE Kab. Banjar

Sumber Data Kemenpan RB RI Tahun 2026

5.1.2 Capaian Kinerja SAKIP, Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabuptaen Banjar Tahun 2025

Nilai SAKIP menunjukkan tren yang fluktuatif (naik-turun), namun berhasil mencatatkan performa terbaiknya di tahun terakhir. Pada tahun 2021, SAKIP dimulai dengan angka yang cukup baik, yaitu 69,93 (umumnya berkategori B). Namun, pada tahun 2022 nilai ini mengalami penurunan ke 68,03 dan cenderung stagnan hingga tahun 2024 di angka 67,07. Penurunan atau stagnasi ini biasanya mengindikasikan adanya kendala dalam penyelarasan perencanaan anggaran dengan realisasi kinerja, atau evaluasi internal yang belum berjalan optimal. Setelah tiga tahun mendatar, SAKIP mengalami lompatan besar di tahun 2025 menjadi 71,16. Kenaikan ini sangat penting karena angka di atas 70 umumnya membuat predikat SAKIP naik kelas dari B menjadi BB (Sangat Baik). Hal ini menandakan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja sudah jauh lebih akuntabel dan tepat sasaran.

Berbeda dengan SAKIP, indeks SPBE (kematangan digitalisasi/e-government) menunjukkan tren yang konsisten naik dan sangat positif. Dimulai dari 2,43 pada tahun 2021 dan naik menjadi 2,56 pada tahun 2022 (Kategori Cukup). Angka ini menunjukkan fondasi awal digitalisasi pelayanan publik baru mulai dibangun. Nilai SPBE meningkat dan bertahan stabil di angka 2,87. Angka ini biasanya sudah masuk dalam kategori "Baik" (ambang batas umumnya adalah 2,6). Ini mencerminkan integrasi aplikasi dan tata kelola sistem informasi yang semakin teratur. Tren positif berlanjut hingga tahun 2025 dengan menembus angka 3,02 (Kategori Sangat Baik/Puncak). Keberhasilan melewati angka 3,0 ini menandakan bahwa sistem berbasis elektronik tidak hanya sekadar ada, melainkan sudah berdampak luas pada efisiensi birokrasi dan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Ketika sebuah pemerintah daerah atau instansi meraih nilai SAKIP dengan predikat BB (Sangat Baik) dan Indeks SPBE sebesar 3,02 (Kategori Baik), hal ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara akuntabilitas kinerja dan implementasi digitalisasi birokrasi di instansi tersebut.

Nilai SAKIP Predikat "BB" (Rentang Nilai 70 - 80) mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki tingkat akuntabilitas kinerja yang Sangat Baik. Artinya, perencanaan kinerjanya selaras dengan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran sangat tinggi, dan program-program kerja terbukti memberikan dampak (*outcome*) nyata bagi masyarakat.

Indeks SPBE "3,02" berada pada rentang predikat Baik. Ini menandakan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Kabupaten Banjar sudah terstruktur, memiliki kebijakan internal yang jelas, aplikasinya sudah mulai terintegrasi (tidak berjalan sendiri-sendiri), dan layanan digitalnya berjalan dengan stabil.

Capaian SAKIP BB dan SPBE 3,02 adalah kombinasi ideal yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah birokrasi yang berkinerja tinggi sekaligus modern. SPBE yang bernilai 3,02 telah menyediakan infrastruktur digital yang sehat, sehingga pengelolaan akuntabilitas kinerja SAKIP mampu dieksekusi dengan sangat baik hingga meraih predikat BB.

5.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

5.2.1 Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjar

Aspek ini menjelaskan terkait Penegakan Perda, Aksi HAM, demokrasi lokal. Hal ini untuk menilai kondusivitas daerah mulai dari tingkat keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Semakin kondusif daerah maka semakin mudah dalam pencapaian pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja aspek ini dapat dinilai dari angka kriminalitas, sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Angka Kriminalitas di Kabupaten Banjar

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Angka kriminalitas	555 kasus	591 kasus	809 kasus	876 kasus	731 kasus

Sumber: Kesbangpol Kab. Banjar 2025

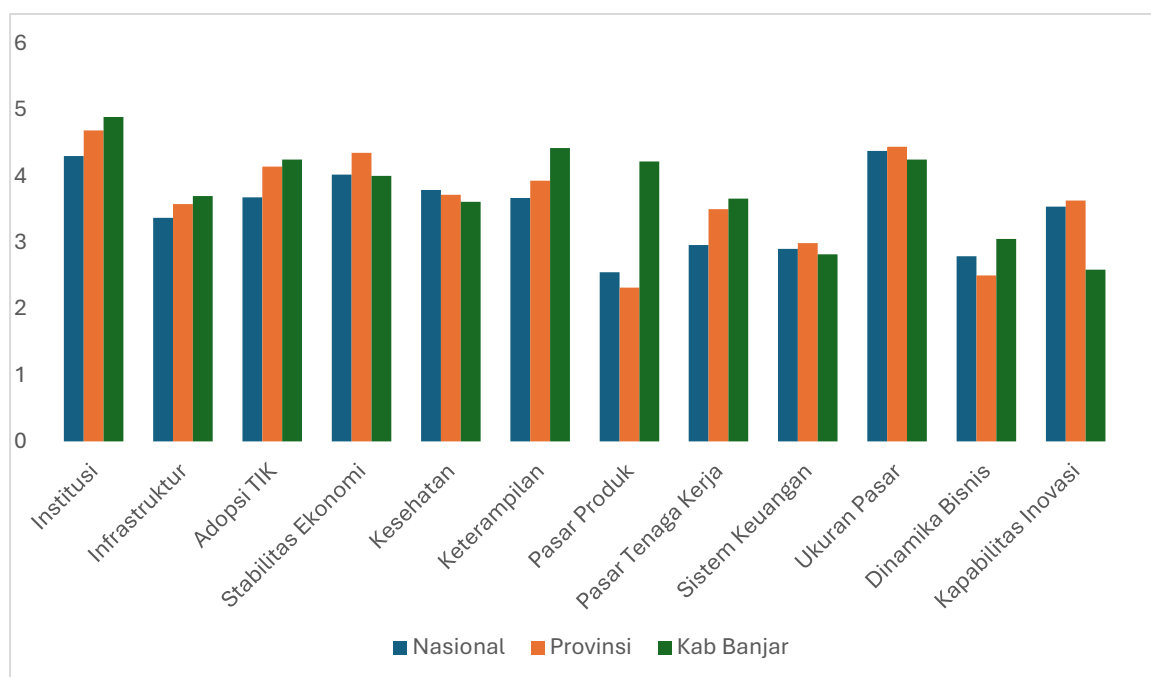
Kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Banjar menunjukan trend peningkatan signifikan hingga tahun 2024. Peningkatan tajam terjadi dari tahun 2021 sampai dengan 2024 kemudian menurun pada tahun 2025. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 37 persen dengan kenaikan jumlah kasus sebanyak 218, sedangkan peningkatan kasus kriminalitas terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu hanya sebesar 6,5 persen dengan kenaikan jumlah kasus sebanyak 36 dari tahun 2021. Namun, penurunan terjadi pada tahun 2025 dimana kasus kriminalitas turun cukup besar, yaitu 17% atau jumlah kasus kriminalitas turun sebanyak 145 kasus dari tahun 2024. Hal ini memberikan indikasi awal perbaikan kondisi keamanan dan menunjukkan bahwa adanya perbaikan dan intervensi yang efektif dalam menjaga kondusifitas daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertahankan strategi yang efektif dan harus melakukan pencegahan dan penanganan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya secara intens dan berkualitas.

5.3 Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

5.3.1 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023-2025

Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan saing dicerminkan melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan Pembangunan daerah. Daya saing

dikaitkan dengan masalah produktivitas dan kemampuan daerah. Dalam konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Faktor penentu daya saing kemudian diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing yang mencerminkan kondisi kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kapasitas inovasi daerah. Dalam konteks daerah atau dalam hal ini Kabupaten Banjar dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Daerah pada tahun 2025 sebagai berikut:

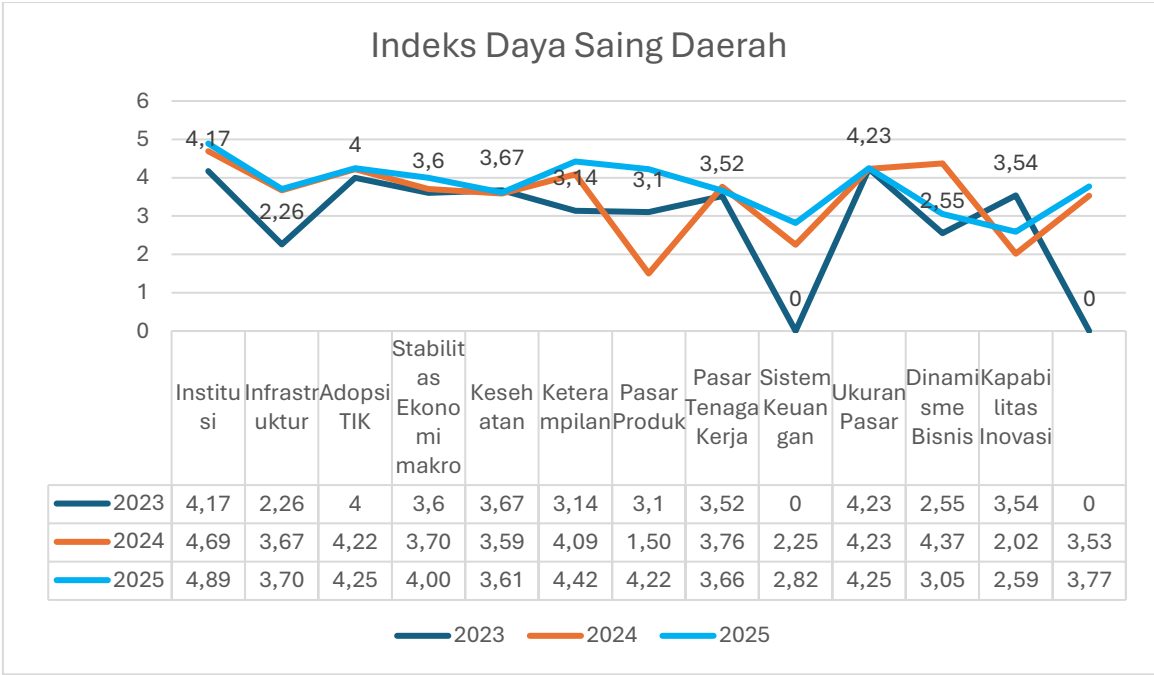


Gambar 5. 3 Skor Indeks Daya Saing Daerah

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2025

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, Kabupaten Banjar memperoleh skor IDSD sebesar 3,77, yang berada di atas rata-rata Nasional sebesar 3,50 dan lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,65. Nilai IDSD Kabupaten Banjar jika dibandingkan dengan IDSD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan perbedaan skor hanya sebesar 0,12. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Banjar memiliki tingkat daya saing yang relatif baik dan kompetitif, serta mampu bersaing pada level regional maupun nasional.

Perbandingan capaian skor IDSD Kabupaten Banjar mulai tahun 2023 sampai dengan 2024 secara lebih detail dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 5. 4 Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023-2025

Sumber: Diolah dari Indeks Daya Saing Daerah 2023 sampai dengan 2025

Daya saing Kabupaten Banjar 2023 dan 2024 yang diukur dengan IDSD tidak dapat dilihat, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 nilai pada pilar institusi dan pilar sistem keuangan tidak ditemukan. Namun, secara umum capaian nilai pada setiap pilar pada tahun 2025 untuk Kabupaten Banjar mengalami peningkatan. (Dibandingkan) dengan tahun 2023 dan 2024.

Ditinjau berdasarkan pilar pembentuknya, terdapat beberapa aspek yang menjadi keunggulan utama. Pilar Institusi memperoleh skor tertinggi sebesar 4,89 yang berada di atas Nasional (4,30) dan Provinsi Kalimantan Selatan (4,69), kondisi ini mengindikasikan kualitas tata kelola pemerintahan yang relatif lebih baik. Pilar Adopsi TIK dengan skor 4,25, juga melampaui Nasional (3,68) dan Provinsi Kalimantan Selatan (4,14), hal ini mencerminkan tingkat pemanfaatan teknologi yang cukup tinggi. Selain itu, pilar Keterampilan dengan skor 4,42 menunjukkan keunggulan dibandingkan skor Nasional (3,67) dan Provinsi Kalimantan Selatan (3,93) yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia yang lebih kompetitif. Sementara itu, terdapat beberapa pilar dengan capaian yang relatif setara atau sedikit lebih baik dibandingkan Nasional dan Provinsi, seperti pilar Infrastruktur (3,70) yang sedikit di bawah Nasional (3,37) dan Provinsi Kalimantan Selatan (3,58), Pilar Ukuran Pasar

(4,25) berada dibawah Provinsi Kalimantan Selatan (4,44) dan Nasional (4,38), pilar Stabilitas Ekonomi Makro (4,00) masih berada di bawah capaian Provinsi, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan penguatan struktur ekonomi daerah agar lebih resilien terhadap dinamika ekonomi.

Adapun beberapa pilar yang menjadi area perhatian utama adalah pilar Kesehatan (3,61), Sistem Keuangan (2,82), dan Kapabilitas Inovasi (2,59), yang seluruhnya berada di bawah capaian nasional maupun provinsi. Rendahnya capaian pada pilar kesehatan mengindikasikan masih perlunya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Sementara itu, pada pilar sistem keuangan, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya akses terhadap layanan keuangan serta rendahnya tingkat inklusi keuangan di masyarakat. Pada pilar kapabilitas inovasi, rendahnya skor menunjukkan bahwa pengembangan riset, teknologi, serta hilirisasi produk unggulan daerah masih belum berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian IDSD Kabupaten Banjar Tahun 2025 menunjukkan fondasi daya saing yang cukup kuat. Namun demikian, untuk mendorong peningkatan daya saing yang berkelanjutan, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, khususnya pada aspek inovasi, sistem keuangan, dan kesehatan sebagai faktor pengungkit utama pembangunan daerah.

5.3.2 Indeks Kesalehan Sosial

Pada tahun 2025 Kabupaten Banjar melakukan analisis komparatif antara capaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) untuk mengukur kinerjanya pada tahun 2025 serta membandingkan kinerja pada tahun 2024, dan rata-rata IKS Nasional terungkap sebuah temuan progresif yang signifikan. Secara agregat, Kabupaten Banjar telah berhasil mencatatkan lonjakan kinerja yang impresif, bertransformasi dari posisi di bawah rata-rata nasional pada tahun 2024 menjadi pemimpin yang melampaui tolok ukur nasional pada tahun 2025. Data menunjukkan bahwa skor total IKS Kabupaten Banjar 2025 mencapai angka 81.70, meningkat secara substansial sebesar 7.03 poin dari capaian tahun 2024 yang berada di angka 74.67. Kenaikan masif ini tidak hanya memperbaiki catatan historis daerah, tetapi juga berhasil menempatkan Kabupaten Banjar unggul dengan margin yang meyakinkan sebesar 5.13 poin di atas rata-rata IKS Nasional yang berada di angka 76.57. Tren positif ini mengindikasikan efektivitas intervensi kebijakan dan penguatan modal sosial yang telah berjalan selama satu tahun terakhir. Hal ini tergambar pada gambar diagram dibawah ini :



Gambar 5. 5 Perbandingan IKS Kabupaten Banjar 2024, 2025 dan IKS Nasional

Sumber : Bapperida Kabupaten Banjar

Hasil analisis deskriptif statistik terhadap 646 responden memberikan gambaran komprehensif mengenai peta kesalehan sosial di Kabupaten Banjar pada tahun 2025. Secara agregat, **Indeks Kesalehan Sosial** (sebagai variabel komposit) mencatatkan nilai rata-rata (*Mean*) yang sangat tinggi, yakni sebesar **81,6991**. Dengan rentang nilai minimum 52,90 dan maksimum 100, capaian rata-rata yang berada di atas angka 80 ini mengindikasikan bahwa secara umum, masyarakat Kabupaten Banjar memiliki modal sosial yang kuat dan perilaku kesalehan yang telah terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan dimensi pembentuknya, terlihat adanya hierarki nilai yang mencerminkan prioritas perilaku Masyarakat yaitu :

1. Dimensi Dominan (Kekuatan Utama): Pilar terkuat dalam struktur kesalehan sosial ini adalah dimensi Relasi Negara dan Pemerintah, yang meraih skor rata-rata tertinggi sebesar 87,4211. Tingginya angka ini menyiratkan bahwa kepatuhan terhadap hukum, loyalitas pada negara, dan dukungan terhadap

pemerintah merupakan aspek yang paling kokoh dalam masyarakat. Posisi kedua ditempati oleh dimensi Etika dan Budi Pekerti dengan skor 85,3050. Hal ini menegaskan bahwa norma sopan santun dan moralitas individual masih menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi.

2. Dimensi Moderat: Dimensi Relasi Antar Manusia berada pada posisi tengah dengan skor 81,8633. Selain itu, dimensi ini memiliki nilai simpangan baku (*Std. Deviation*) terendah di antara seluruh dimensi parsial, yaitu 9,81216. Rendahnya variasi ini menunjukkan adanya konsensus atau keseragaman yang tinggi di kalangan responden dalam hal menjaga hubungan baik dengan sesama; artinya, hampir semua masyarakat sepakat dan mempraktikkan kerukunan sosial pada level yang relatif setara.
3. Dimensi dengan Catatan Khusus (Area Perbaikan): Dua dimensi tercatat memiliki skor di bawah angka 80, yang mengindikasikan area yang masih memerlukan intervensi. Dimensi Pelestarian Lingkungan mencatat skor 78,8973, menandakan kesadaran ekologis belum setinggi kesadaran hukum atau etika. Namun, sorotan utama tertuju pada dimensi Kepedulian Sosial yang menempati peringkat terendah dengan skor 75,0113. Yang menarik secara statistik, dimensi Kepedulian Sosial ini juga memiliki nilai simpangan baku tertinggi (12,70014). Tingginya standar deviasi ini mengindikasikan bahwa perilaku tolong-menolong atau filantropi di masyarakat sangat bervariasi (timpang); ada kelompok yang sangat dermawan/peduli, namun ada pula segmen masyarakat yang masih sangat rendah kepeduliannya. Tidak seperti dimensi "Relasi Antar Manusia" yang seragam, dimensi "Kepedulian Sosial" menunjukkan adanya polarisasi perilaku responden.

Dari ketiga dimensi di atas dapat dilihat pada nilai perbandingan nilai IKS anatar tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 3 Perbandingan IKS Kabupaten Banjar 2024-2025

No.	Dimensi	IKS Kabupaten Banjar		
		2024	2025	Gap
1	Kepedulian Sosial	70.808	75.011	4.203
2	Relasi Antar Manusia	84.812	81.863	-2.949

No.	Dimensi	IKS Kabupaten Banjar		
		2024	2025	Gap
3	Etika dan Budi Pekerti	88.87	85.305	-3.565
4	Pelestarian Lingkungan	71.249	78.897	7.648
5	Patuh pada Peraturan Pemerintah	88.414	87.421	-0.993
INDEKS KESALEHAN SOSIAL		80.83	81.699	0.869

Sumber Data Bapperida Kab. Banjar tahun 2025

Sementara untuk pemetaan capaian Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di tingkat kecamatan mengungkapkan adanya variabilitas performa yang cukup dinamis di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Meskipun skor rata-rata tingkat kabupaten berada pada posisi tinggi (81,69), analisis mikro per kecamatan menunjukkan adanya disparitas antara wilayah pusat (agglomerasi) dengan wilayah penyangga atau pesisir.

Wilayah dengan Performa Tinggi (Above Average) Secara nominal, Kecamatan Cintapuri Darussalam mencatatkan skor tertinggi dengan nilai rata-rata 85,50, diikuti oleh Telaga Bauntung (85,00) dan Paramasan (83,91).

Temuan yang lebih substansial terlihat pada Kecamatan Martapura Timur (83,21), Astambul (83,18), dan Martapura (Kota) (83,13) memiliki skor di atas rata-rata kabupaten, Hal ini diindikasikan bahwa wilayah-wilayah yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan pemerintahan di Kabupaten Banjar merupakan kontributor utama yang mendongkrak nilai indeks keseluruhan menjadi tinggi. Konsistensi nilai di wilayah-wilayah ini mencerminkan kuatnya modal sosial dan religiusitas di pusat kabupaten.

Sebaliknya ada beberapa kecamatan dengan performa sedang hingga rendah mencatatkan skor yang berada signifikan di bawah rata-rata kabupaten. Skor terendah teridentifikasi di Kecamatan Aluh-Aluh dengan nilai 72,93, disusul oleh Pengaron (73,18) dan Tatah Makmur (73,57). Wilayah-wilayah lain seperti Sungai Pinang (74,40), Beruntung Baru (77,30), Gambut (78,33), dan Mataraman (78,43) juga masih berada di bawah ambang batas psikologis 80. Artinya kecamatan-kecamatan dengan nilai IKS tinggi cenderung berkumpul di area hinterland atau pusat aglomerasi santri sementara kecamatan dengan nilai lebih rendah tersebar di wilayah pesisir atau wilayah penyangga perkotaan yang lebih heterogen/urban-pinggiran.

5.3.3 Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni Indonesia merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keharmonisan sosial masyarakat, khususnya dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh nilai-nilai toleransi, kebersamaan, serta saling menghormati antar kelompok masyarakat. Indeks ini mencerminkan kondisi sosial yang kondusif, stabil, dan harmonis sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indeks Harmoni Indonesia sebagai indikator utama dalam mengukur terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif di Kabupaten Banjar pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai **6,55 poin indeks**. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar **6,67 poin indeks**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **101,83 persen** dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui dan mencerminkan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang semakin harmonis, toleran, serta kondusif dalam keberagaman.

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, toleransi, dan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan turut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan indeks tersebut, antara lain fasilitasi dialog antarumat beragama, penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, pembinaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi, serta penguatan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Capaian ini menjadi indikator bahwa upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat di Kabupaten Banjar telah berjalan dengan baik. Ke depan, berbagai program penguatan harmoni sosial perlu terus ditingkatkan guna mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kerukunan, toleransi, dan persatuan masyarakat sebagai modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kenaikan nilai indeks tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan, peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pelaksanaan program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Selain itu, sinergi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal juga turut mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis.

Meskipun menunjukkan tren positif, peningkatan Indeks Harmoni Indonesia tetap memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pembinaan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan dialog antar kelompok masyarakat, serta upaya preventif dalam mengantisipasi potensi konflik sosial. Dengan demikian, peningkatan Indeks Harmoni Indonesia di Kabupaten Banjar diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif terhadap terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera, serta mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh

5.3.4 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di suatu daerah, yang mencakup aspek kebebasan sipil, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas Lembaga demokrasi. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial.

No	Nama Indikator	Nilai (2025)
A. Aspek Kebebasan		82,54
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	72,00
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	100,00
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	99,07
4	Terjaminnya kebebasan berekspresi, berkumpul, berkeyakinan dalam setiap kebijakan	65,00
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat	98,45
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	61,50
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	80,91
B. Aspek Kesetaraan		87,02
8	Kesetaraan Gender	68,52
9	Partisipasi Masyarakat Dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan	100,00
10	Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi	100,00
11	Akses Warga Miskin Pada Perlindungan Dan Jaminan Sosial	80,00
12	Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	78,00
13	Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik	90,00
14	Kesetaraan Dalam Pelayanan Dasar	90,00
C. Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		71,68
15	Kinerja Lembaga Legislatif	45,95
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	92,77
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	50,00
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	50,00
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	50,93
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	85,00
21	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	100,00
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	80,00
IDI Kabupaten Banjar		80,82

Gambar 5. 6 Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Banjar Tahun 2025

Sumber : KESBANGPOL 2026

Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Banjar Tahun 2025, diperoleh nilai IDI sebesar **80,82**. Nilai tersebut berada pada kategori "**Baik**" (nilai >80), yang menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Kabupaten Banjar secara umum telah berkembang dengan baik. Capaian ini mencerminkan adanya kondisi yang relatif kondusif dalam pemenuhan hak-hak demokrasi masyarakat, pelaksanaan pemerintahan yang terbuka, serta partisipasi publik dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Aspek Kebebasan memperoleh nilai **82,54** dan termasuk kategori **baik**. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan sipil masyarakat di Kabupaten Banjar relatif terjamin.

Beberapa indikator yang menunjukkan capaian sangat baik antara lain:

- Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat (**100,00**).
- Terjaminnya kebebasan berkeyakinan (**99,07**).
- Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat (**98,45**).

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Pemenuhan hak-hak pekerja (**61,50**).
- Terjaminnya kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan (**65,00**).
- Kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparatur negara (**72,00**).

Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan perlindungan hak-hak pekerja serta penguatan kebijakan yang menjamin kebebasan sipil secara lebih optimal.

Aspek Kesetaraan memperoleh nilai **87,02**, menjadi aspek dengan capaian tertinggi dan termasuk kategori **sangat baik**. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap berbagai layanan dan kesempatan pembangunan semakin merata.

Indikator yang memperoleh nilai maksimal meliputi:

- Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan (**100,00**).
- Anti monopoli sumber daya ekonomi (**100,00**).

Selain itu, indikator lainnya juga menunjukkan capaian yang tinggi, yaitu:

- Akses masyarakat terhadap informasi publik (**90,00**).
- Kesetaraan dalam pelayanan dasar (**90,00**).
- Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial (**80,00**).
- Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah (**78,00**).

Meski demikian, indikator **Kesetaraan Gender** masih memperoleh nilai **68,52**, yang menunjukkan perlunya peningkatan peran dan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pengambilan keputusan publik, ekonomi, dan politik.

Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi memperoleh nilai **71,68**, menjadi aspek dengan nilai terendah dibandingkan dua aspek lainnya. Meskipun masih berada dalam kategori sedang hingga baik, aspek ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan demokrasi masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Banjar.

Indikator yang menunjukkan capaian sangat baik antara lain:

- Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik (**100,00**).
- Kinerja lembaga yudikatif (**92,77**).
- Transparansi anggaran melalui penyediaan informasi APBN/APBD (**85,00**).
- Pendidikan politik pada kader partai politik (**80,00**).

Namun terdapat beberapa indikator yang masih rendah, yaitu:

- Kinerja lembaga legislatif (**45,95**).
- Netralitas penyelenggara pemilu (**50,00**).
- Putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah (**50,00**).
- Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup masyarakat (**50,93**).

Rendahnya nilai pada indikator-indikator tersebut menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas fungsi pengawasan dan legislasi DPRD, penguatan integritas penyelenggara pemilu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap putusan hukum, serta penguatan kebijakan perlindungan lingkungan hidup.

Secara keseluruhan, nilai **IDI Kabupaten Banjar Tahun 2025 sebesar 80,82** menunjukkan bahwa kondisi demokrasi berada dalam kategori **baik**. Kekuatan utama demokrasi Kabupaten Banjar terletak pada aspek **Kesetaraan (87,02)** dan **Kebebasan (82,54)** yang menunjukkan tingginya akses masyarakat terhadap hak-hak sipil, partisipasi publik, dan kesetaraan layanan.

Di sisi lain, aspek **Kapasitas Lembaga Demokrasi (71,68)** masih memerlukan perhatian lebih melalui penguatan fungsi lembaga legislatif, peningkatan netralitas penyelenggara pemilu, peningkatan akuntabilitas pemerintahan, serta penguatan perlindungan lingkungan hidup. Perbaikan pada aspek ini akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi Kabupaten Banjar secara berkelanjutan.

Dengan mempertahankan capaian yang telah baik dan melakukan perbaikan pada indikator-indikator yang masih rendah, Kabupaten Banjar memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.

5.3.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai dimensi, seperti kecepatan, kemudahan, transparansi, akuntabilitas, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pelayanan yang efektif dan efisien juga dapat mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya peningkatan Indeks Pelayanan Publik dilakukan melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, antara lain dengan penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan sistem pelayanan berbasis elektronik, serta peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan evaluasi kinerja pelayanan juga perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan masyarakat.

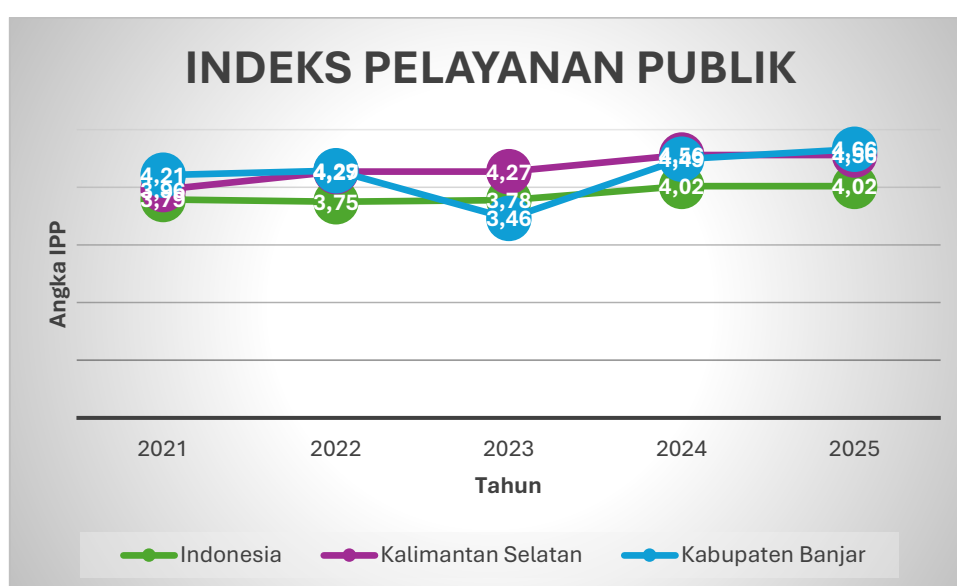
Tabel 5. 4 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tahun	Indonesia	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar
1.	2021	3.79	3.96	4.21
2.	2022	3.75	4.27	4.29
3.	2023	3.78	4.27	3.46
4.	2024	4.02	4.56	4.49
5.	2025*	4.02*	4.56* (angka sementara)	4.66

Sumber Data Kemenpan RB tahun 2026 data diolah

Secara umum, capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang dinamis dengan pola mengalami peningkatan pada 2021–2022, penurunan cukup signifikan pada 2023, kemudian pulih secara drastis pada 2024, dan meningkat kembali pada 2025 hingga mencapai kategori “Pelayanan Prima”.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki kemampuan melakukan perbaikan pelayanan publik secara cepat melalui penguatan tata kelola pelayanan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sistem pelayanan.



Gambar 5. 7 Grafik Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025

Sumber data Kemenpan RB Tahun 2026

5.3.6 Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta tingkat kerentanan terhadap praktik korupsi. Indikator ini sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pembangunan daerah berjalan secara bersih, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkat integritas yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, rendahnya integritas dapat menghambat

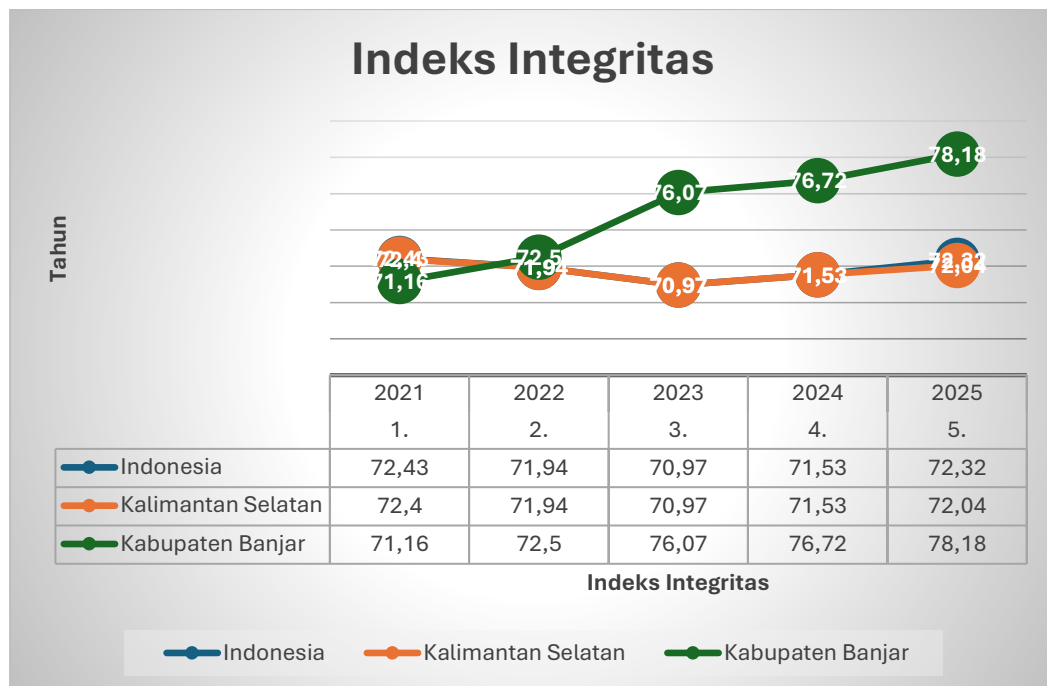
pelaksanaan pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Integritas, Pemerintah Daerah perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menerapkan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyimpangan. Selain itu, pembangunan budaya integritas di kalangan aparatur pemerintah perlu terus didorong melalui pendidikan, pelatihan, serta penegakan disiplin.

Tabel 5. 5 Indeks Integritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tahun	Indonesia	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar
1.	2021	72,43	72,4	71,16
2.	2022	71,94	71,94	72,5
3.	2023	70,97	70,97	76,07
4.	2024*	71,53	71,53	76,72
5.	2025*	72,32	72,04	78,18

Sumber Data KPK RI Tahun 2026 diolah



Gambar 5. 8 Grafik Indeks Integritas Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber data KPK RI tahun 2026 data diolah

Indeks Integritas Kabupaten Banjar selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang jauh lebih positif dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan maupun rata-rata nasional. Berdasarkan data yang disajikan, nilai Kabupaten Banjar meningkat secara konsisten dari 71,16 pada tahun 2021 menjadi 78,18 pada tahun 2025. Sementara itu, nilai nasional cenderung stagnan pada kisaran 70–72 dan Kalimantan Selatan bergerak relatif datar di kisaran 70–72.

Secara kronologis, pada tahun 2021 Kabupaten Banjar masih berada pada kategori “rentan” dengan nilai 71,16, sedikit di bawah nasional (72,43) dan Kalimantan Selatan (72,40). Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode, persepsi integritas tata kelola pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan yang relatif sama dengan kondisi nasional, terutama terkait penguatan budaya antikorupsi, transparansi layanan, dan pengawasan internal.

Namun mulai tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan di Kabupaten Banjar menjadi 72,50, sementara nasional dan provinsi justru mengalami penurunan menjadi 71,94. Tren tersebut semakin kuat pada tahun 2023 ketika Kabupaten Banjar melonjak ke angka 76,07, sedangkan nasional dan Kalimantan Selatan turun hingga 70,97. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar memiliki kemampuan adaptasi tata kelola yang lebih baik dibanding rata-rata daerah lain, terutama dalam

menjaga persepsi integritas di tengah tekanan nasional terhadap isu korupsi dan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2024 dan 2025, peningkatan Kabupaten Banjar terus berlanjut hingga mencapai 76,72 dan 78,18. Nilai 78,18 pada tahun 2025 sangat penting karena telah masuk kategori “terjaga”, sedangkan nasional (72,32) dan Kalimantan Selatan (72,04) masih berada pada kategori “rentan”. Secara substantif, hal ini menunjukkan bahwa sistem integritas di Kabupaten Banjar dinilai semakin kuat oleh responden internal, eksternal, maupun ahli dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK.

Jika dihitung dari 2021 hingga 2025:

- Kabupaten Banjar meningkat sekitar 7,02 poin,
- Nasional justru turun sekitar 0,11 poin,
- Kalimantan Selatan turun sekitar 0,36 poin.

Perbedaan tren tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan integritas di Kabupaten Banjar berlangsung lebih progresif dan konsisten dibanding lingkungan regional maupun nasional. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- penguatan pengawasan internal pemerintah daerah;
- peningkatan transparansi pelayanan publik;
- implementasi reformasi birokrasi;
- digitalisasi pelayanan;
- penguatan pengendalian gratifikasi dan pengadaan barang/jasa;
- serta meningkatnya budaya akuntabilitas perangkat daerah.

Selain itu, kenaikan nilai yang cukup tajam sejak 2023 juga dapat mengindikasikan adanya perbaikan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah daerah. Dalam SPI KPK, aspek eksternal seperti transparansi pelayanan, pungutan liar, diskriminasi layanan, dan profesionalisme aparatur memiliki pengaruh cukup besar terhadap skor integritas. Oleh karena itu, peningkatan nilai Kabupaten Banjar tidak hanya mencerminkan perbaikan administratif internal, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap perlu dicermati secara kritis. Indeks integritas pada dasarnya berbasis persepsi dan pengalaman responden sehingga masih sangat dipengaruhi konsistensi implementasi tata kelola di lapangan. Kenaikan indeks belum tentu sepenuhnya menggambarkan hilangnya risiko korupsi, terutama

pada area-area rawan seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, mutasi jabatan, serta pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu, keberlanjutan peningkatan indeks integritas Kabupaten Banjar perlu dijaga melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan keterbukaan informasi publik, penguatan SPIP dan manajemen risiko, serta konsistensi penerapan budaya kerja berintegritas di seluruh perangkat daerah.

BAB VI

PENUTUP

Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menyediakan data, informasi, serta gambaran kondisi daerah sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Melalui analisis terhadap aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, serta aspek pelayanan umum, diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kondisi, potensi, permasalahan, tantangan, dan peluang pembangunan daerah.

Analisis aspek geografi dan demografi memberikan gambaran mengenai karakteristik wilayah, persebaran penduduk, struktur penduduk, serta dinamika kependudukan yang memengaruhi kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Sementara itu, analisis aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan capaian pembangunan manusia dan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kemiskinan, serta kondisi sosial lainnya.

Pada aspek daya saing daerah, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, investasi, inovasi, dan daya tarik wilayah. Adapun pada aspek pelayanan umum, analisis diarahkan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang objektif dan kredibel bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan, menetapkan prioritas pembangunan daerah, serta melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Selain itu, dokumen ini juga diharapkan dapat mendukung penerapan prinsip perencanaan pembangunan yang berbasis data (*evidence-based planning*), terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Selanjutnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola data, sinergi antar perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang berdaya saing, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun sebagai salah satu instrumen pendukung perencanaan pembangunan daerah. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.